



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA
(RKPK) LHOKSEUMAWE TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018**



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2019, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
- c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan berbasis e-rencana;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat lembaga Keistimewaan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RKPK adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019.

Pasal 3

RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tahun 2017-2022; dan
- b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Pasal 4

RKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota, DPRK dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 1 (satu) tahun, dan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun 2019.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BABIII : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Sistematika penyusunan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2019;
- b. SKPK dalam penyusunan Rencana Kerja SKPK; dan
- c. sebagai Dokumen Pedoman Penyusunan Perencanaan Daerah dalam penyusunan KU-APBK dan PPAS-APBK.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RKPK yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPK Kota.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RKPK.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPK menggunakan rancangan Rencana Kerja SKPK.

Pasal 11

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun 2019:

- a. Pemerintah Kota menggunakan RKPK sebagai bahan Pembahasan KU-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun 2019:
RAPBK dengan DPRK;
- b. SKPK menggunakan RKPK Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan RAPBK dengan DPRK Kota Lhokseumawe.

Pasal 12

Indikasi program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam matrik Program Pembangunan Daerah dari RKPK ini yang telah disepakati dalam forum Musrenbang bersama DPRK, Stakeholder dan SKPK dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan aturan perundang-undangan dari pemerintah atasan.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2018

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2019

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-5
1.5 Maksud dan Tujuan	I-8
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	 II-1
2.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-8
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-8
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-13
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-15
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-16
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-16
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-18
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-20
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-21
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-22
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-80

BAB	III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe	III-2
3.1.1	Kondisi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2013.....	III-5
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Lhokseumawe Tahun 2013 dan Tahun 2014.....	III-8
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
3.2.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2013.....	III-10
3.2.2	Target Pendapatan Kota Lhokseumawe.....	III-11
3.2.3	Upaya-upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mencapai Target.....	III-12
BAB	IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.1.1	Tujuan	IV-4
4.1.2	Sasaran.....	IV-5
4.2	Prioritas dan Pembangunan	IV-11
BAB	V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA LHOKSEUMAWE	V-1
BAB	VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2012.....	II – 3
Tabel 2.2	Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II – 3
Tabel 2.3	Arah Angin, Kecepatan rata-rata dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II – 4
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan Kepadatan penduduk di Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II – 7
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dengan Migas dan Tanpa Migas	II – 9
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dengan Migas dan Tanpa Migas	II – 10
Tabel 2.7	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2010 dan 2011 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	II-11
Tabel 2.8	Perbandingan Kenaikan Pendapatan Perkapita Terhadap Inflasi Tahun 2008-2011	II-13
Tabel 2.9	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011	II-14
Tabel 2.10	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-15
Tabel 2.11	Capaian Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2011	II-16
Tabel 2.12	Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011	II-17
Tabel 2.13	Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2008 s/d Tahun 2011	II-17
Tabel 2.14	Ruas Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2012	II-19

Tabel 2.15	Jumlah Penginapan di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011.....	II-19
Tabel 2.16	Jumlah Tamu di Kota Lhokseumawe Tahun 2010 dan Tahun 2011.....	II-20
Tabel 2.17	Presentase Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2011	II-21
Tabel 2.18	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Lhokseumawe	II-23
Tabel 3.1	Struktur Perekonomian dengan Minyak dan Gas Tahun 2007 – 2011	III- 3
Tabel 3.2	Struktur Perekonomian Tanpa Minyak dan Gas Tahun 2007 – 2011	III- 4
Tabel 3.3	Komposisi Penduduk Kota Lhokseumawe Berdasarkan Pekerjaan per Desember 2012	III- 5
Tabel 3.4	Target Capaian Makro Ekonomi Kota Lhokseumawe.....	III- 8
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013	III- 9
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2013	IV-13
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2014	V- 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Luas Wilayah Kota Lhokseumawe.....	II-1
Gambar 2.2	Banyaknya Gampong Menurut Letak Topografis Kota Lhokseumawe	II-2
Gambar 2.3	Luas dan Penggunaan Lahan (Ha)	II-5
Gambar 2.4	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2011	II-8
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Kota Banda Aceh dan Nasional Tahun 2008-2011	II-12
Gambar 2.6	Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2011.....	II-14
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008-2011	III-6
Gambar 3.2	Laju Inflasi Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2011	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan daerah Kota Lhokseumawe atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Kota Lhokseumawe adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe jalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun pedoman penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RKPK Kota Lhokseumawe mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dokumen RKPK Kota Lhokseumawe merupakan acuan bagi Walikota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Lhokseumawe.

Penyusunan dokumen RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) alur yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut dilakukan dengan pendekatan yang berbeda akan tetapi saling berinteraksi antara satu dan lainnya untuk menghasilkan RKPK yang terpadu. Adapun proses penyusunan RKPK dilakukan dengan menggunakan pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja), Pendekatan Demokratis Partisipatif, Pendekatan Politis serta pendekatan yang bersifat Bottom-Up dan Top-Down.

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunan RKPK Kota antara lain pertama persiapan penyusunan RKPK, penyusunan rancangan awal RKPK, tahap penyusunan rancangan RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan akhir RKPK dan tahap penetapan RKPK dengan Peraturan Walikota dan dijadikan pedoman penyempurnaan Renja SKPK.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh no 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagu Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah penjabaran dari tahun kedua dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun sebagai upaya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPK berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2019.

Penyusunan RKPK bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta kota. Oleh karena itu substansi RKPK harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, dokumen perencanaan tingkat provinsi dan dokumen perencanaan tingkat kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota.

Hubungan antara RKPK, Renstra SKPK dan Renja SKPK yaitu RKPK memuat program dan kegiatan SKPK, dan penjabaran Renstra SKPK. Dokumen RKPK merupakan acuan bagi SKPK dalam menyempurnakan Renja SKPK untuk tahun yang bersangkutan. Proses penyusunan RKPK dilakukan bersamaan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK).

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan kedalam KUA dan PPAS Tahun 2019 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2019 serta renja SKPK.

b. Tujuan

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

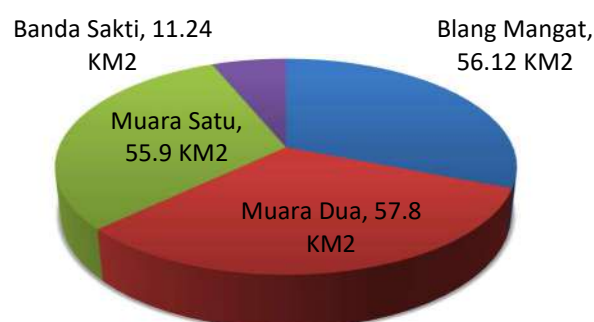
2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Lhokseumawe dengan ketinggian 0-10 meter diatas permukaan laut. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut. Sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit degan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa/gampong. Kota Lhokseumawe terletak diantara 04°54' – 05°18' Lintang utara dan 96° 20' – 97° 21' Bujur Timur. Adapun batas-batas daerah yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur), sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Dewantara) dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu).

Gambar 2.1

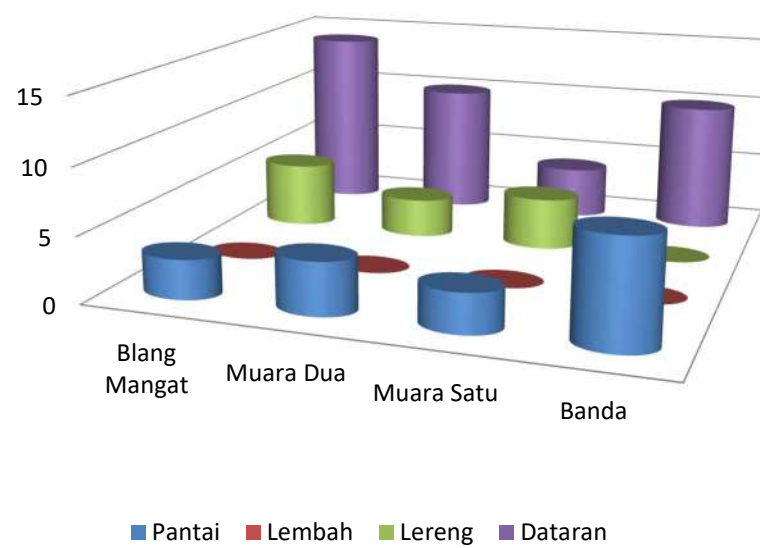
Luas Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber : *Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2017*

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu terdiri dari 18 gampong daerah berpantai, 12 gampong daerah berlereng dan 38 gampong berdataran. Banyaknya gampong menurut letak geografis Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
Banyaknya Gampong Menurut Letak Topografis
Kota Lhokseumawe



Sumber : BPS dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2017

Data BPS (2017) menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki persentase lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Mei dan Juni 2016 yaitu sebesar 78 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 16 dan 10 hari, adapun jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 41 persen yang terjadi pada Bulan Desember 2016 dengan jumlah hari hujan yaitu 24 hari sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan November dan Desember 2016 sebesar 85 persen dan terendah terjadi pada Bulan Juni 2012 yaitu sekitar 74 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Banyaknya Curah hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe Tahun 2012

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	151	18	80
Februari	81	12	71
Maret	-	-	88
April	44	9	74
Mei	80	14	55
Juni	126	16	73
Juli	118	17	62
Agustus	38	11	65
September	38	8	73
Oktober	35	20	56
November	171	23	40
Desember	197	21	40

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2017

Tabel 2.2
Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

Bulan	Rata-rata	Tekanan Udara (mb)
Januari	85	1011.2
Februari	80	1011.5
Maret	83	1011.0
April	81	1009.2
Mei	81	1011.2
Juni	81	1009.5
Juli	83	1009.1
Agustus	80	1008.5
September	80	1009.5
Oktober	79	1009.2
November	86	1009.6
Desember	87	1009.6

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2017

Menurut sumber Stasiun Meteorologi Klas III Lhokseumawe tercatat kecepatan angin maksimum terjadi pada Bulan September 2016 pada kecepatan 18 Knots didominasi arah dari Timur Laut dan kecepatan angin Minimum terjadi pada Bulan Oktober 2016 pada kecepatan 9 Knots dengan arah angin dari Barat Daya.

Tabel 2.3

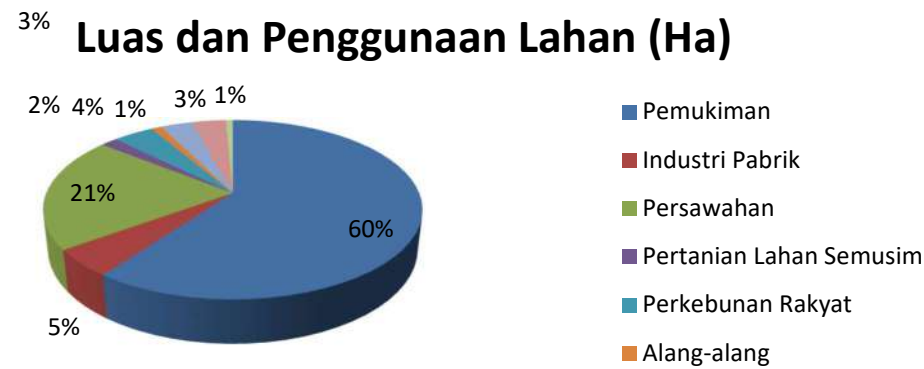
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2016

Bulan	Arah Angin	Kecepatan Rata-rata	Kecepatan Maksimum	Arah Maksimum
Januari	SW	4	100	19
Februari	E	5	080	19
Maret	SW	4	070	16
April	SW	4	030	14
Mei	SW	4	280	16
Juni	SE	4	280	24
Juli	SE	4	010	11
Agustus	SE	3	190	11
September	N	4	310	15
Oktober	NW	5	300	15
November	SW	3	190	14
Desember	SW	4	120	19

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA) 2017

Kota Lhokseumawe dengan luas 18.106 Ha dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan masyarakat. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebutuhan pemukiman, yaitu 10.877 Ha (60,08 persen), kemudian secara berturut-turut untuk persawahan 3.747 Ha atau 20,69 persen, budidaya perairan darat dan perkebunan rakyat masing-masing 626 Ha (3,46 persen) dan 587 Ha (3,24 persen) serta seluas 626 Ha (3,46 persen) yang masih berupa hutan belukar dan semak yang belum dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3



Sumber : Lhokseumawe Dalam angka, 2017

a. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional disebutkan pada lampiran II, bahwa Kota Lhokseumawe merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe yang sedang dalam proses qanun diantaranya terbagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangannya yaitu : pengembangan itu terbagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan diantaranya :

1. Zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - a) Zona di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - b) Zona di Kecamatan Muara Dua dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perdagangan, jasa, Central Bussiness District (CBD);
 - c) Zona di Kecamatan Banda Sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pemerintahan, perdagangan dan Jasa;
 - d) Zona di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan, perikanan laut, dan sektor perikanan darat.

2. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan. Wilayah ini merupakan wilayah datar dan berbukit yang mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan, jasa dan permukiman.
3. Zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak (*By Pass*) memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

b. Wilayah Rawan Bencana

1. Tsunami

Kota Lhokseumawe berada pada pertemuan *Plate Eurosia* dan Australia berjarak ± 130 Km dari garis pantai barat sehingga kota ini rawan terhadap terjadinya *Tsunami* jika terjadi gempa bumi pada skala yang tinggi yang dapat memacu timbulnya gelombang *Tsunami*.

2. Ombak/Abrasi Pantai

Kota Lhokseumawe terutama Kecamatan Banda Sakti sangat rentan terhadap kemungkinan ancaman abrasi pantai dan gelombang pasang laut serta luapan sungai-sungai. Kecamatan Banda Sakti sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe merupakan kawasan yang dikelilingi oleh laut dan sungai, sehingga rawan bencana gelombang laut.

3. Gempa Bumi

Kota Lhokseumawe secara umum sangat dipengaruhi oleh kedudukan *tektonik* aktif di patahan yang diakomodasikan oleh gerak *convergent* miring lempeng Hindia Australia dan Lempeng Sunda, dan patahan geser *dextral* memanjang di sepanjang Bukit Barisan, sehingga rawan terjadi gempa bumi.

4. Banjir

Kota Lhokseumawe, terutama Kecamatan Banda Sakti sangat rentan terhadap bencana alam banjir, hal ini disebabkan oleh letak *topografi* Kota Lhokseumawe yang rendah, ditambah lagi buruknya kondisi *drainase*. Walaupun pembangunan Teluk Pusong (*Reservoir*) sedang/telah dilaksanakan, tapi belum mampu menanggulangi banjir pada saat musim hujan tiba. Sebagian besar jalan-jalan utama belum dapat dihindari dari banjir yang sering melanda Kota Lhokseumawe, begitupun dengan Kecamatan Blang Mangat sangat rentan terhadap banjir yang disebabkan karena kondisi saluran (*drainase*) yang kurang memadai.

c. Demografi

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 berjumlah 195.186 jiwa, terdiri atas 97.299 jiwa laki-laki dan 97.887 jiwa perempuan. Kecamatan Banda Sakti adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan proporsi hampir 45 persen dari total penduduk Lhokseumawe atau 81.187 jiwa. Kecamatan Blang Mangat mempunyai jumlah penduduk paling kecil diantara kecamatan lainnya di Lhokseumawe yakni 26.870 jiwa atau sekitar 13,7 persen. Secara jelas dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
di Kota Lhokseumawe Tahun 2012

No	Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan
1	Blang Mangat	26.870	56,12	479
2	Muara Dua	53.766	57,80	930
3	Muara Satu	33.363	55,90	597
4	Banda Sakti	81.187	11,24	7223
	Jumlah	195.186	181,06	1078

Sumber : Buku Lhokseumawe Dalam Angka - BPS 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan dan Sruktur PDRB (Lapangan Usaha)

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pencapaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe menurut Lapangan usaha mengalami peningkatan disetiap tahun khususnya sektor tanpa Migas mulai dari sektor pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Enceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor, Tranportasi dan Pergudangan, Penyediaan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Pada table dibawah dapat kita lihat nilai PDRB Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2012-2016 baik itu nilai PDRB dengan Migas ataupun tanpa Migas dimana nilai PDRB dengan Migas mengalami penurunan karena pengaruh dari berakhirnya operasional Gas Arun tahun 2014 lalu pada Tahun 2012 mencapai 8,980 triliun dan mengalami penurunan hingga 6.462triliun pada tahun 2016. Namun nilai PDRB tanpa migas

menunjukkan grafik peningkatan sebesar 4,727 triliun dan terus membaik sampai dengan tahun 2016 sebesar 5.341 triliun.

Tabel 2.5
PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2012-2016

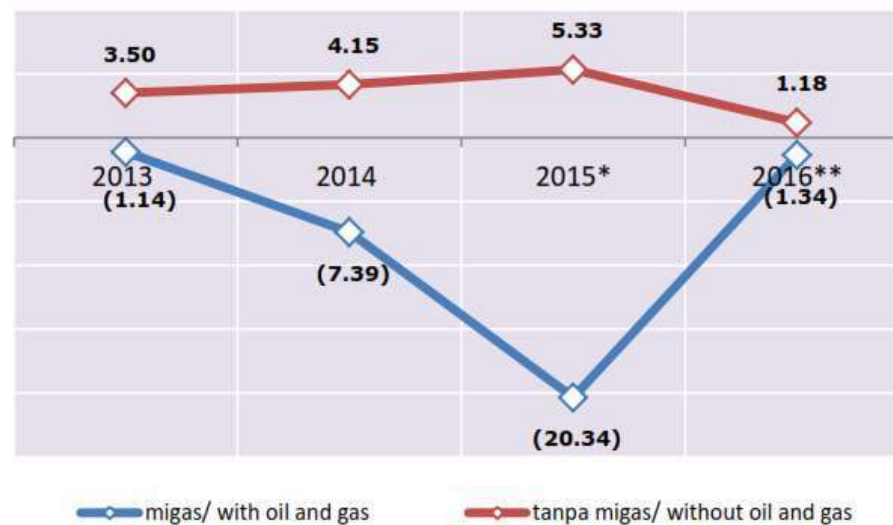
Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	487,026.8	502,308.1	506,299.0	516,413.7	529,845.9
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	102,903.6	103,443.2	103,060.3	104,335.9	106,541.2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,015.1	3,910.6	3,862.7	3,803.5	3,763.5
	3 Perikanan	380,108.1	394,952.3	399,375.7	408,274.3	419,541.2
B	Pertambangan dan Penggalian	26,624.9	27,930.9	28,967.1	29,320.9	29,922.2
C	Industri Pengolahan	4,360,337.4	4,096,402.8	3,240,474.8	1,301,452.3	1,154,726.1
	1 Industri Migas	4,252,768.2	3,985,208.7	3,126,057.5	1,182,468.5	1,031,187.2
	2 Industri Non Migas	107,569.2	111,194.0	114,417.2	118,983.8	123,538.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,801.0	8,127.6	8,639.2	9,223.7	11,926.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	387.3	399.0	475.1	577.3	634.3
F	Konstruksi	799,080.9	817,661.0	906,263.3	1,042,918.8	994,918.8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,386,989.8	1,438,586.7	1,473,637.3	1,508,861.4	1,515,851.6
H	Transportasi dan Pergudangan	800,874.0	819,782.3	827,306.6	840,006.4	833,390.6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52,483.8	54,845.1	58,896.9	63,638.1	70,828.6
J	Informasi dan Komunikasi	214,100.9	224,636.4	236,182.7	242,641.0	249,796.2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	109,660.5	119,204.3	125,536.1	132,688.1	144,563.9
L	Real Estate	202,881.2	214,310.2	227,468.8	242,647.0	262,646.5
M,N	Jasa Perusahaan	47,587.4	49,937.1	53,138.1	57,146.9	60,521.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	206,337.3	212,894.5	221,857.4	233,876.9	248,964.7
P	Jasa Pendidikan	62,191.0	65,040.2	68,329.0	72,951.9	77,781.1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157,056.5	164,206.1	173,410.9	187,051.7	201,196.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	58,956.3	61,952.1	65,446.2	68,819.6	74,877.3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8,980,377.1	8,878,224.4	8,222,328.4	6,550,236.0	6,462,392.0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		4,727,608.9	4,893,015.7	5,096,270.8	5,367,767.4	5,431,204.8

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe

Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu dengan migas dan tanpa migas. Pergerakan ekonomi dengan migas dan tanpa migas cukup berbeda. Selama lima tahun terakhir (2012-2016), pertumbuhan ekonomi dengan migas Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini terjadi karena kategori migas

yang banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terusmenurun. Pada tahun 2016, Lhokseumawe mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 1,34 persen, sedangkan tanpa migas terlihat bahwa tahun 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,18 persen. Dapat di lihat pada grafik dibawah laju pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2016 (Persen).

Grafik 2.1
LajuPertumbuhanEkonomiLhokseumawe
Tahun 2013-2016



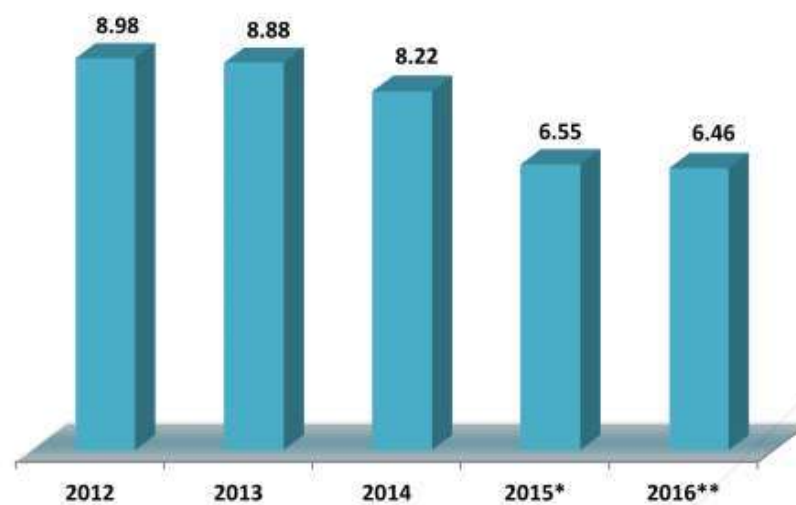
Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe

Jika dilihat lebih rinci di Tahun 2016, terdapat tiga kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kategori Industri Pengolahan (11,27 persen), kategori Konstruksi (4,60 persen), dan kategori Transportasi dan Pergudangan (0,79 persen). Selain kategori tersebut, kategori lain menunjukkan pertumbuhan yang positif. Enam kategori dengan pertumbuhan di atas 8 persen adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 29,30 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,30 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,87 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,95 persen, Jasa lainnya sebesar 8,80 persen, dan real estate sebesar 8,24 persen.

B. Pertumbuhan dan Struktur PDRB (Pengeluaran)

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan migas menurut pengeluaran selama tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, nilai PDRB sebesar 9,32 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2013 sedikit meningkat menjadi 9,58 triliun, lalu turun pada tahun 2014 menjadi 9,32 triliun rupiah. Pada tahun 2015 nilai PDRB ADHB turun drastis menjadi 7,63 triliun, lalu meningkat sedikit pada tahun 2016 menjadi 7,73 triliun. Nilai PDRB dengan mengabaikan faktor harga menunjukkan nilai PDRB secara riil, yang secara umum disebut sebagai PDRB ADHK. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) dengan migas mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2012-2016. Pada tahun 2012, nilai PDRB sebesar 8,98 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 8,88 triliun rupiah. Di tahun 2014 nilai PDRB ADHK juga mengalami penurunan menjadi 8,22 triliun rupiah. Di dua tahun terakhir nilai PDRB ADHK turun drastis menjadi 6,55 triliun pada tahun 2015 dan 6,46 triliun pada tahun 2016.

Grafik 2.2
Produk Domestik Regional Bruto dengan Migas Menurut Pengeluaran
Tahun 2011 - 2016



Sumber : BPS

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

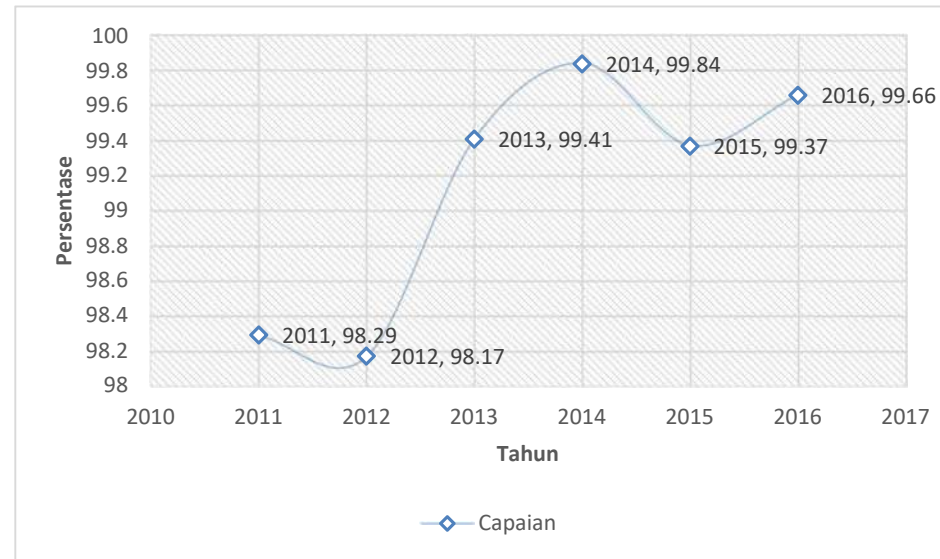
A. Pendidikan Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Menurut Badan Pusat Statistik 2017,Angka Melek Huruf(AMH) di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2012–2016 terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Sejalan dengan usaha mengurangi angka buta huruf yang dilakukan Pemerintah, jika disandingkan dengan daerah kabupaten/kota Lain. PerkembanganAMH penduduk dewasa (usia 15tahun keatas) selama 5 terakhir Kota Lhokseumawe ditunjukkan pada grafik bawah ini.

Grafik. 2.3
Angka Melek huruf Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2016



Sumber BPS. (diolah)

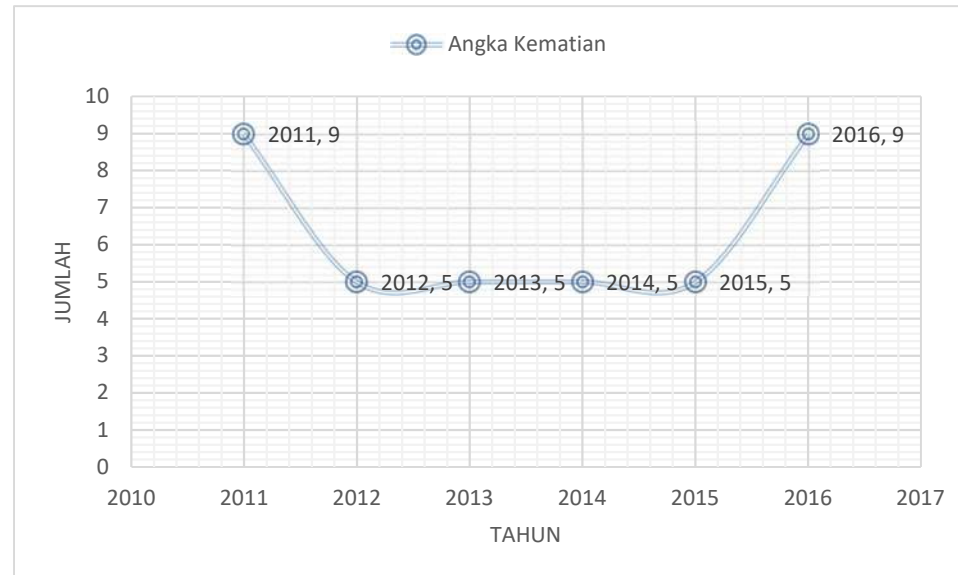
B. Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 8 rumah sakit yang berada di kota Lhokseumawe dan tersebar di Banda Sakti sebanyak 6 buah serta Muara Satu dan Muara Dua masing-masing sebanyak satu buah. Sedangkan untuk puskesmas, Kota Lhokseumawe telah memiliki 6 buah puskesmas.

Meski pun jumlah kasus kematian ibu Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2013-2015, jika dilihat data tidak terlihat adanya penurunan yang signifikan. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan yang signifikan dan tidak berbeda jauh dari tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2.4

Jumlah Angka Kematian Ibu Kota Lhokseumawe 2011 - 2016



Sumber :Dinkes Aceh (Diolah)

AKI merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu AKI juga menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, social budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indicator keberhasilan pembangunan sector kesehatan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka melayani masyarakat umum. Pelayanan tersebut terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih detail

akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjabarannya mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib diantaranya terbagi dalam urusan sebagai berikut :

2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Berikut adalah nilai APM Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016.

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1,1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1,2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1,3	APM SD/MI	98,76	95,83	96,91	96,65	93,66
2	SMP/MTs					
2,1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2,2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2,3	APM SMP/MTs	82,1	85,49	87,8	88,05	79,05
3	SMA/MA/SMK					
3,1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3,2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3,3	APM SMA/MA/SMK	88,41	71,64	78,09	74,91	70,5

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah

yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Berikut adalah nilai APK Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016.

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1.3	APK SD/MI	122.73	105.14	103.41	102.09	105.63
2	SMP/MTs					
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2.3	APK SMP/MTs	104,39	104.57	103.6	100.61	101
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
3.3	APK SMA/MA/SMK	108,13	106.18	97,56	91.87	91.8

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

3. Fasilitas Pendidikan

Dalam khazanah peristilahan pendidikan sering disebut-sebut istilah sarana dan prasarana pendidikan. Kerap kali istilah itu digabung begitu saja menjadi sarana-prasarana pendidikan. Dalam bahasa Inggris sarana dan prasarana itu disebut dengan facility (*facilities*). Jadi, sarana dan prasarana pendidikan akan disebut educational facilities. Sebutan itu jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Fasilitas pendidikan merupakan salah indikator dalam meningkatkan mutu pendidikan Kota Lhokseumawe. Kondisi bangunan gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas dan ruang guru dikelompokkan dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Berikut adalah Kondisi Fasilitas Pendidikan, tahun 2014 – 2016:

Tabel 2.8
Kondisi Fasilitas Pendidikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

Jenjang Pendidikan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
SD/ MI	517	115	0	562	112	0	587	107	0
SMP/ MTs	373	60	-	345	58	-	365	55	-
SMA/MA/SMK	363	32	-	401	27	-	426	15	-

Kondisi Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada tahun 2014 kondisi sekolah pada jenjang pendidikan SD/ MI terdapat 517 ruang kelas ber kondisi baik, 115 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan, sedangkan pada tahun 2015 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang ber kondisi baik sebanyak 562 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan

sebanyak 112 ruang kelas. Selanjutnya pada tahun 2016 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 587 ruang kelas, 107 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan.

Sedangkan jumlah ruang kelas baik pada tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap tahun. Pada tahun 2016, untuk tingkat SMP/ MTs 365 ruang kelas dengan kondisi baik dan rusak ringan 55 ruang. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 426 ruang kelas dengan kondisi baik, dan 15 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan.

Sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Nasional terhadap penyediaan dana alokasi bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD setiap tahunnya tentu yang harus diperhatikan adalah mempertahankan kondisi baik kearah yang lebih banyak dengan mengalokasikan anggaran perbaikan untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak berat dan rusak ringan menjadi baik kembali, demikian juga melengkapi fasilitas lainnya berupa Laboratorium, ruang perpustakaan, musalla, fasilitas olah raga dan fasilitas lain yang dibutuhkan sesuai standar pendidikan, disamping itu peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan perlu ditingkat dengan meningkatkan mutu guru, distribusi guru yang merata sesuai kebutuhan.

4. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah

Rasio guru/ murid per kelas rata-rata tertinggi untuk jenjang SD/MI di Kota Lhokseumawe terjadi pada tahun 2012 sebesar 1.9 persen dan yang terendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.9 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/ MTs rasio tertinggi sebesar 3.2 persen pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2014 yaitu 2.7 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.9
Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-rata
Kota Lhokseumawe Tahun 2012s.d 2016

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
2	SMP/ MTs	3.2	2.9	2.7	2.9	2.9

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan puskesmas pembantu/ pustu). Seluruh kecamatan sudah memiliki puskesmas. Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, jejaring pelayanan kesehatan dasar seperti pustu, poskesdes, polindes dan posyandu juga terus meningkat walaupun belum merata di seluruh desa. Berikut adalah Jumlah Saran Pelayanan Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016 adalah:

Tabel 2.10
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	8	8	8	8	7
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	9	9	8
7	Puskesmas	6	6	6	6	6
8	Poliklinik	-	10	8	8	8
9	Pustu	21	22	22	22	22

2. Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam peraturan

Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada tahun 2012 seorang dokter harus melayani 7.958 penduduk, tahun 2013 adalah seorang dokter harus melayani 8990 penduduk, tahun 2014 adalah seorang dokter harus melayani 10.704 penduduk, tahun 2015 adalah seorang dokter harus melayani 4359 penduduk, dan di tahun 2016 adalah seorang dokter harus melayani 3.253 penduduk, sedangkan menurut KEPNAKES/SK/I/2004 tentang indikator Indonesia sehat 2010 seorang dokter harus melayani 2500 setiap penduduk dilihat dari PERMENKES tersebut Kota Lhokseumawe masih kekurangan dokter.

Tabel 2.11
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dokter Umum	22	20	17	43	60
2	Jumlah Penduduk	175.082	179.807	181.976	187.455	195.186
	Rasio	7.958	8.99	10.70	4.35	3.25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2017.

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas difasilitas pelayanan

kesehatan dimasyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah menggunakan indikator rasio.

Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Perubahan terjadi pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan terjadi karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	678	700	524	476	611
2	Jumlah Penduduk	175.082	179.807	181.976	187.455	195.186
Rasio		3,87	3,89	2,87	2,53	3,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Meter dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016 (Km)

Tahun	Jalan Kota		Jalan Propinsi	
	Kondisi Baik	Total	Kondisi Baik	Total
2013	Na	340,573	1009,52	1847,91
2014	98,248	340,573	444,24	1701,82
2015	102,652	340,573	624	1781,72
2016	108,157	412,468	741,78	1781,72

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, kondisi jalan negara yang berada pada wilayah Kota Lhokseumawe dengan total panjang 23,20 Km secara umum dalam kondisi baik, begitu pula dengan ruas jalan propinsi dengan panjang 4,60 Km secara umum juga dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan kota dengan panjang 412,468 Km yang terbagi pada 4 (empat) kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang tercipta karena kondisi *drain hole* yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalan tersebut. Berikut tabel Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.14
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

Jenis, Kondisi, Kelas	Status								
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten/ Kota		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Jenis Permukaan									
Aspal	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	229.544	231.606	286.389
Paklah (kerikil)	-	-	-	-	-	-	75.494	74.253	71.988
Tanah	-	-	-	-	-	-	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	339.141	340.573	412.468
Kondisi Jalan									
Baik	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	95.240	95.411	108.157
Sedang	-	-	-	-	-	-	119.585	117.967	131.595
Rusak	-	-	-	-	-	-	99.511	101.403	107.554
Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	24.805	25.792	65.122
Jumlah	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	339.141	340.573	412.428
Kelas Jalan									

Jenis, Kondisi, Kelas	Status								
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten/ Kota		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kelas I	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	229.544	231.606	286.389
Kelas II	-	-	-	-	-	-	75.494	74.253	71.988
Kelas III	-	-	-	-	-	-	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	339.141	340.573	412.468

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Dimana pengelompokan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dari tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah panjang jalan di wilayah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Berikut tabel panjang jalan dilalui roda empat:

Tabel 2.15
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

NO	URAIAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Panjang Jalan (KM)	299.882	301.082	373.439
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187,455	191,407	195,186
	Rasio	1.599	1.572	1.913

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017

3. Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan < 10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 km/jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Tabel 2.16
Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (>40 KM/Jam)	n/a	n/a	63,5	64.46	58,14

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

4. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Konsep pedestrian atau trotoar jalan dan saluran drainase yang dalam sebuah jalan meliputi jalan Panglath, Jl. T. Hamzah Bendahara, sebagian Jl. Merdeka, Jl. Samudera dan Samudera Baru, sebagian Jl. Darussalam, Jl. Pase, Jl. Malahayati, Jl. T. Nyak Adam Kamil, Jl. Chik Di Tiro yang mencapai 3.940 meter yang semuanya berada pada Kecamatan Banda Sakti.

Tabel 2.17
Panjang Jalan Kota Yang Memiliki Trotoar
Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m)	n/a	n/a	n/a	n/a	8,89
Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	n/a	n/a	n/a	n/a	6,98
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	n/a	n/a	n/a	n/a	12,21

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Bertambahnya populasi penduduk akan berdampak pada peningkatan debit limbah cair yang dihasilkan. Adanya resiko pencemaran lingkungan dari limbah tersebut harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah dengan pelaksanaan program-program yang mendukung

pengelolaan limbah secara tepat. Penanganan masalah limbah saat ini telah diupayakan pada pembangunan fisik dan sistematis.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman telah membangun 12 titik Ipal Komunal hingga tahun 2016 pada daerah-daerah yang dianggap masih kekurangan tempat penampungan limbah cair. Sementara itu, Pemerintah Kota juga menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit dan 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja.

Berdasarkan hasil survey kesehatan lingkungan Kota Lhokseumawe diketahui bahwa, terdapat dua sistem pembuangan limbah cair masyarakat yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk *septic tank*. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (*septic tank*). Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di wilayah Kota Lhokseumawe dapat kita ketahui bahwa terdapat 31.415 jamban 26.377 unit SPAL yang secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri.

2. Persentase Penduduk berakses Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi guna

melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

3. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

NO	URAIAN	2016		
		JUMLAH	LUAS	DAYA TAMPUNG
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	68	5,000	2,000
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	204	10,200	2,040
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	2	2,500	1,000
4	Lain – Lain	-	-	-
	Jumlah Tempat Pemakaman	274	17.700	5.040
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)			195,186
	Rasio TPU Per Satuan Penduduk (1/6)			25.82

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017.

4. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km², Blang Mangat 479 jiwa/Km², Muara Satu 930 jiwa/Km², Muara Dua 597 jiwa/Km², dengan sarana jumlah ibadah pada kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13

unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

NO	URAIAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Mesjid	50	50	50
2	Mushalla	93	93	93
3	Meunasah	68	68	68
4	Gereja	3	3	3
5	Vihara	1	1	1
a	Jumlah Rumah Ibadah	215	215	215
b	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187,455	191,407	195,186
b/a	Rasio	1.146	1.123	1.101

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017

5. Rasio Rumah Layak Huni

Data Rumah layak huni pada Kota Lhokseumawe belum tersedia secara akurat, namun rumah layak huni tersebut sangat dibutuhkan pembangunannya di Kota Lhokseumawe mengingat banyaknya kaum dhuafa yang belum memiliki rumah. Pada Provinsi Aceh umumnya dan Kota Lhokseumawe khususnya, usulan program kegiatan melalui dana TDBH Migas Dan Otonomi khusus Aceh mewajibkan Kabupaten/ Kota untuk menyisihkan sebesar 10 persen dari total dana Otonomi khusus untuk pembangunan rumah layak huni.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sementara itu, Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk dihuni baik secara teknis maupun non teknis. Berikut rasio Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe tahun 2012 s.d 2016:

Tabel 2.20
Rasio Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Layak Huni	Na	Na	Na	Na	42,459
2	Jumlah Penduduk	179,807	183,232	187,455	191,407	195,186
	Rasio	-	-	-	-	0.22

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2017

6. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, komplek perumahan PT. Arun, perumahan komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save the Children*, komplek Mutiara, dan komplek Asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya komplek PT. Arun saja yang memiliki fasilitas yang memiliki pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis out door, *volyball*, basket, badminton, *joging track* dan golf.

7. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

Tabel 2.21
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	Pusong	28.60	Banda Sakti	Tinggi
2	Kampung Jawa, dan Hagu (Jagu)	21.07	Banda Sakti	Tinggi
3	Keude Aceh	6.52	Banda Sakti	Sedang
4	Mon Geudong	6.04	Banda Sakti	Sedang
5	Blangtuphat	19.07	Muara Satu	Sedang
	Jumlah	81.30		

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2016.

2.1.3.1.5 Kebencanaan

Arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 bidang kebencanaan adalah Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan strategi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
 - a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
 - d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
 - e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
 - a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
 - b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
 - c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
 - f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
 - g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, melalui:
 - a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
 - f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang

- difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
 - h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
 - i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

2.1.3.1.6 Ketahanan Pangan

A. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Untuk mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kerawanan pangan merupakan masalah multidimensional, yang dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktifitas dengan baik, baik dalam jangka waktu pendek/sementara maupun jangka panjang. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Program pemantapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras(padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan.

Tabel 2.22
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Tahun	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan Utama (%)
2012	1.094.644	179.807	608,79%
2013	1.007.025	183.232	549,59%
2014	468.031	187.455	249,68%
2015	843.438	191.407	440,65%
2016	1.008.300	195.186	516,58%

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2016.

2.1.3.1.7 Pertanian

A. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat yang terdiri dari HGB, HGU, HM, HPL terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanian ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan atas tanah dan bangunan.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak

mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.23
Luas Lahan Bersertifikat (KM²)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas lahan bersertifikat	0.25	0.90	0.65	1.31	1.47
2	Luas Wilayah	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
	Persentase	0.14	0.50	0.36	0.72	0.81

Sumber : Badan Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2017.

2.1.3.1.8 Perhubungan

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus transportasi Kota Lhokseumawe didominasi oleh armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah penumpang yang naik atau turun di terminal Kota Lhokseumawe tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.24
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2012	36,435	144,573	162,941
2013	37,614	148,733	163,541
2014	34,174	147,683	152,538
2015	33,188	146,936	150,395
2016	33,200	146,946	152,221

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

B. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada sebuah jalur transportasi. Sedangkan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Pada

Kota Lhokseumawe rasio ijin trayek terus mengalami peningkatan, hal ini terindikasi bahwa pengusaha transportasi terus bertambah di Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.25
Rasio Ijin Trayek
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Ijin Trayek	832	846	853	895	1.745
2	Jumlah penduduk	179,807	183,232	187,455	191,407	195.186
	Rasio Ijin Trayek	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe terlihat bahwa jumlah angkutan yang di uji kir sangat stabil. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut;

Tabel 2.26
Uji Kir Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kendaraan	1175	2002	2242	2490	2639
2	Kendaraan Yg Diuji	2804	2783	2577	2795	2107
	Rasio	2.39	1.39	1.15	1.12	0.80

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Lhokseumawe hanya memiliki Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe. Hingga saat ini masyarakat Kota Lhokseumawe menggunakan pelabuhan laut dan udara milik Kabupaten Aceh Utara yang lokasinya berada di sekitar wilayah Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.27
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
2	Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
3	Terminal Bis/Barang	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

E. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum cukup baik dimana hampir setengah dari kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum memiliki KIR atau tidak melakukan uji kir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkutan Umum yang memiliki KIR	2804	2783	2577	2795	2107
2	Jumlah Angkutan Umum	1175	2002	2242	2490	2639
Persentase		239	139	115	112	80

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

F. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh Tim dari Dinas Perhubungan. Pengujian kit tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum meliputi pengecekan administrasi dan kelayakan kendaraan, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian

tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di Kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Tabel 2.29
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
2	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	20 menit	20 menit	20 menit

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

G. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/ wisatawan ketika berkunjung disuatu Kota/Kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.30
Pemasangan Rambu-rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	44	47	119	83	78
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	250	200	250	300	212
Persentase		17.6	23.5	47.6	27.7	36.8

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017.

2.1.3.1.9 Komunikasi, Informatika dan Persandian

A. Rasio Warnet Terhadap Penduduk

Teknologi informasi saat ini mulai berkembang dengan pesat sehingga mempermudah setiap orang untuk memperoleh informasi atau

memperluas relasi tanpa harus terbatas oleh waktu dan tempat. Salah satu cara untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi saat ini adalah jasa dibidang internet.

Tabel 2.31
Rasio Warnet Terhadap Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Warnet	-	-	70	76	74
2	Jumlah Penduduk	179.807	183.232	187.455	191.407	195.186
Rasio				37,34	39,7	37,91

Sumber: Lhokseumawe dalam angka, 2017.

Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio warnet terhadap penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2014 rasionya 37,34 sedangkan tahun 2015 rasionya sebesar 39,7 dan tahun 2016 sebesar 37,91 dengan perhitungan rasio perseribu jumlah penduduk.

B. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

C. Pameran/Expo

Pameran/ Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk tahun 2012 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam Pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan.

2.1.3.1.10 Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pada tahun 2012 jumlah investor untuk PMDN tidak ada sedangkan pada tahun 2013 s/d 2016 jumlah investor penanam modal dalam negeri di Lhokseumawe semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun. Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 4 tahun mencapai 501 investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor.

Tabel 2.32
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Investor	NA	16	26	154	305

Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.

B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 tahun di Kota Lhokseumawe. Angka tertinggi mencapai 3.386.437.000.000 pada tahun 2016. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.33
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2013 s.d 2016

Tahun	URAIAN	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2013	Jumlah Investasi	167.799.000.000	-	
2014	Jumlah Investasi	862.948.000.000	-	
2015	Jumlah Investasi	2.237.000.000.000	-	
2016	Jumlah Investasi	3.386.437.213.079	-	

Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMDN/PMA setiap tahunnya semakin meningkat dengan jumlah PMDN/PMA yang juga meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.32
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA/PMDN	60	75	98	125	140
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	10	15	18	19	27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		6,00	5,44	5	6,57	5,18

Sumber: DPMTSPNAKER, 2017.

2.1.3.1.11 Pendidikan Dayah

Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat dan juga tuntutan serta penjelmaan dari tingkah laku, serta sikap masyarakat sebagai salah satu sub sistem dari kelompok masyarakat guna menjaga kemandirian, kebiasaan yang berfungsi untuk menjadikan agama islam sebagai pegangan kehidupannya.

Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan Agama Islam. Kondisi ini sudah mencapai rata-rata jumlah dayah seluruh Aceh. Jika merujuk pada Rancangan Akhir Qanun RPJMA 2017-2022 jumlah dayah seluruh Aceh pada tahun 2014 adalah 1.065 dayah, sehingga untuk jumlah dayah di Kota Lhokseumawe sudah cukup baik. Berikut tabel dayah, kepemilikan, dan jumlah guru dayah:

Tabel 2.33
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

Tipe	Kepemilikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Yayasan	5	5	5	10	14
	Pribadi	0	0	0	0	0
B	Yayasan	27	30	30	13	9
	Pribadi	0	0	0	0	0
C	Yayasan	0	0	0	22	24
	Pribadi	0	0	0	0	0
D	Yayasan	0	0	0	0	0
	Pribadi	0	0	0	0	0
Jumlah Dayah		32	35	35	45	47
Jumlah Guru Dayah		298	341	341	432	450

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2017.

2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian, Perikanan, Kelautan

A. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe ialah sector yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama pembangunan ekonomi (*engine of development*) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil merupakan syarat keharusan agarsuatu sektor layak dijadikan sebagai andalan pembangunan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen minyak bumi dan gas pada tahun 2014 dan 2015 masih didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel di bawah ini. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.34
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	102,903.6	103,445.2	103,060.5	104,335.9	106,541.2
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,015.1	3,910.6	3,862.7	3,803.5	3,763.5
3	Perikanan	380,108.1	394,952.3	399,375.7	408,274.3	419,541.2
	Jumlah	487,026.8	502,308.1	506,298.9	516,413.7	529,845.9
	Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)	5.2	5.2	5.4	6.8	6.9
	Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)	9.7	9.4	8.8	8.2	8.2

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2017.

B. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Kelompok petani yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB dengan migas dan PDRB non migas pada tahun 2016 adalah Kecamatan Blang Mangat, yaitu sebesar 33,98% dan Kecamatan Muara Dua sebesar 30,10%. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Blang Mangat di dominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.35
Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2016

Sektor	PDRB Migas		PDRB Non Migas	
	2016		2016	
	Kel	%	Kel	%
Kecamatan Banda Sakti	12	11,65%	12	11,65%
Kecamatan Muara Satu	25	24,27%	25	24,27%
Kecamatan Muara Dua	31	30,10%	31	30,10%
Kecamatan Blang Mangat	35	33,98%	35	33,98%
Jumlah	103	100%	103	100%
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas		0,001		0,002

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe 2017.

C. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi

sejak 2011 hingga 2015. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada tahun 2012 dan 2013, sementara itu, pada tahun 2014 komoditi padi menurun secara signifikan hingga mencapai sepertiga dari kondisi sebelumnya. Kemudian pada tahun 2015, produksi padi kembali menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut ini;

Tabel 2.36
Produktivitas Komoditas Pangan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No.	KOMODITI	PRODUKSI (Kg)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	15.222.500	15.333.000	5.245.000	10.578.000	15.333.000
2	Jagung	168.000	198.000	4.000	-	198.000
3	Ubi Kayu	1.250.000	317.000	1.677.000	2.550.000	317.000
4	Ubi Jalar	118.000	-	193.000	24.000	-
5	Kedelai	88.000	22.000	3.000	-	20.000

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2012-2016.

2.3.3.1 Perdagangan

A. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2012 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15,76 % dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 29,29 %. Angka ini terus mengalami peningkatan yang berarti khususnya pada sektor migas, sementara itu kontribusi pada tanpa migas mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.37
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2012s.d 2016

Tahun	Sektor Perdagangan (Juta Rp)	PDRB Migas		PDRB Non Migas	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%
2012	1,469,479.20	9,321,240.70	15.76	5,018,961.10	29.28
2013	1,548,649.60	9,578,669.30	16.17	5,323,321.70	29.09
2014	1,662,981.10	9,321,037.70	17.84	5,786,148.60	28.74
2015	1,726,605.50	7,634,983.30	22.61	6,270,202.30	27.54
2016	1,791,550.10	7,729,193.60	23.18	6,473,429.90	27.68

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

2.3.3.2 Perindustrian

A. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto*(PDRB) daerah Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.38
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Industri Pengolahan	4,360,337.4	4,096,402.7	3,240,474.7	1,301,452.3	1,154,726.1
	- Migas	4,252,768.2	3,985,208.7	3,126,057.5	1,182,468.5	1,031,187.2
	- Non Migas	107,569.2	111,194.0	114,417.2	118,983.8	123,538.9
PDRB dengan Migas		9,321,240.70	9,578,669.30	9,321,037.70	7,634,983.30	7,729,193.60
Kontribusi (%)		46.78	42.77	34.77	17.05	14.94
PDRB tanpa Migas		5,018,961.10	5,323,321.70	5,786,148.60	6,270,202.30	6,473,429.90
Kontribusi (%)		86.88	76.95	56.00	20.76	17.84

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan (Budidaya)

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti, tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan:

Tabel 2.39
Produksi Perikanan (Budidaya)
Kota Lhokseumawe Tahun 2014 s.d 2016

No.	Jenis Ikan	Produksi (dalam ton)		
		2014	2015	2016
1	Mujair	523	359	129
2	Bandeng	988	2.142	1.244
3	Kerapu	80	457	137
4	Udang Windu	73	208	148
5	Udang Lainnya	89	453	46
Total		1.753	3.619	1.704

Sumber: DKPPP, 2017.

B. Konsumsi Ikan

Ikan sangat layak dikonsumsi karena mempunyai kandungan gizi yang memadai, khususnya kandungan protein, DHA, dan kalsium, vitamin A, dan zat besi. Kadar protein ikan segar atau olahan cukup tinggi, seperti cakalang 24,2 persen, tuna 23,7 persen, bandeng 21,7 persen, ikan mas 16 persen, pindang 27 persen, ikan asap 30 persen, ikan asin 42-50 persen, dan udang segar 21 persen. Meskipun ikan asin lebih murah, namun ikan asin mempunyai kandungan protein yang paling tinggi di antara beberapa jenis ikan lainnya. Kandungan lemak ikan rendah, umumnya di bawah 5 persen, dan ini masih lebih rendah dibandingkan kadar lemak daging ayam yang mencapai 25 persen.

Komponen gizi yang paling bagus dari ikan dan diduga berperan dalam meningkatkan kecerdasan adalah Docosa-hexaenoic-acid (DHA), yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda berupa rantai panjang Omega-3. DHA banyak ditemukan di dalam ikan salmon, tuna, makarelmenjadikan ikan sebagai bagian ketahanan pangan yang baik, secara kualitas gizi individual maupun secara agregat di tingkat nasional, perlu modernisasi sektor perikanan yang memungkinkan pengemasan dan pengalengan berbagai produk ikan dan juga rantai distribusi yang menghubungkan daerah produksi ikan dengan daerah pengonsumsi ikan. Dengan adanya suplai yang memadai, pasar dapat menyerapnya menjadi berbagai makanan olahan yang dekat dengan selera pasar, seperti bakso ikan, sosis ikan. Konsumsi ikan masyarakat Kota Lhokseumawe per hari/ KK/hari sebanyak 1 Kg.

C. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 25 kelompok, sedangkan pada tahun 2011 cakupan bina kelompok nelayan adalah sebanyak 30 kelompok. Ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan bina kelompok nelayan Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.40
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	25	25	30

Sumber: DKPPP, 2017.

D. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kota Lhokseumawe dengan migas mengalami penurunan sedangkan tanpa migas mengalami kenaikan, walaupun kontribusi sub sektor perikanan kecil terhadap PDRB tetapi terus meningkat. Untuk itu perlu dibutuhkan suatu upaya dalam meningkatkan peran yang lebih besar terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe. Secara geografis wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah yang di kelilingi oleh pantai sangat berpotensi untuk pengembangan perekonomian perikanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perikanan	380,108.10	394,952.30	399,375.70	408,274.30	419,541.20
PDRB dengan Migas		9,321,240.70	9,578,669.30	9,321,037.70	7,634,983.30	7,729,193.60
Kontribusi (%)		4.08	4.12	4.28	5.35	5.43
PDRB tanpa Migas		5,018,961.10	5,323,321.70	5,786,148.60	6,270,202.30	6,473,429.90
Kontribusi (%)		7.57	7.42	6.90	6.51	6.48

Sumber: DKPPP, 2017.

2.1.3.2.2. Lingkungan Hidup

A. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, kemudian penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Lingkungan Hidup telah menyediakan sarana dan prasarana guna menangani sampah yang ada di Kota Lhokseumawe. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki meliputi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sementara (TPS), Bak sampah, menurut jenis sampah (sampah organik, non organik dan sampah basah), Alat pengangkut sampah seperti dumptruck, motor gerobak, dan Alat angkut petugas pelaksana. Berikut tabel jumlah sampah yang terangkut dan jumlah timbulan sampah dalam wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2012 s.d 2016:

Tabel 2.42
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (Ton)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sampah yang Terangkut	200	220	245	305	350
2	Jumlah Timbulan Sampah	449	454	468	478	490
Persentase		44,5	48,5	52,4	63,80	71,40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2017

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

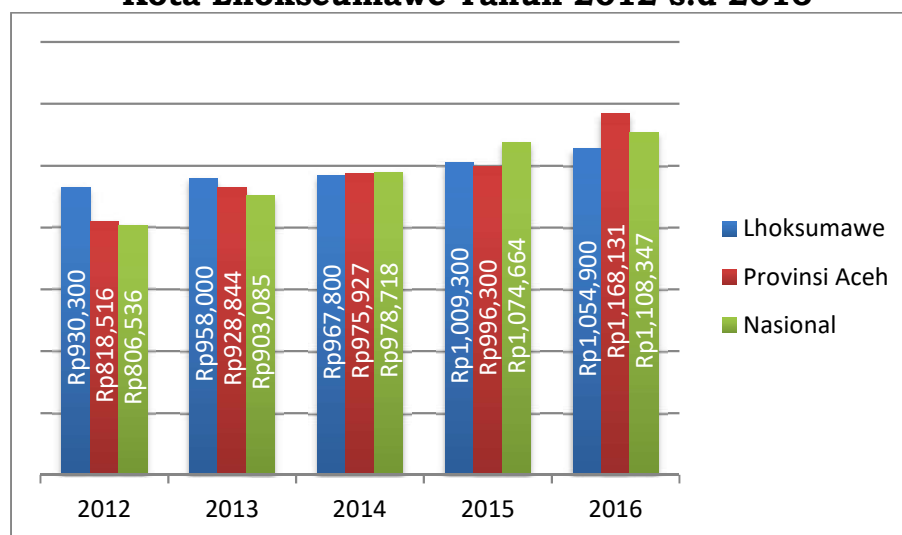
PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir

oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksisendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan, tahun 2012 Rp. 930.300, dan tahun 2016 Rp.1.054.900-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat, namun nilai ini masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh(Tahun 2016:Rp 1.108.347,-) Pengeluaran perkapita per bulan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.4
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016



Sumber : Statistik Daerah Kota Lhokseumawe, BPS 2017.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih

Jumlah rumah tangga Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 yang mendapat akses air bersih melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 1.719 rumah tangga atau sebesar 3.89 %. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih karena PDAM

baru membuat jaringan pipa air untuk wilayah kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT)
Yang Menggunakan Air Bersih
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	-	-	-	-	1,719
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	4.35	4.23	4.22	3.97	3.89

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

B. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe selama periode 20012-2016 terjadi peningkatan yang sangat berarti yaitu sebesar 12,32 persen, pada tahun 2013 persentase rumah tangga yang berlistrik sebesar 99,14 persen, sedangkan pada tahun tahun 2009 yaitu 86,82persen, dengan demikian jumlah rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Aceh sebanyak 9.830 unit atau sebesar 0,86 persen. Secara rinci persentase rumah tangga berlistrik di Kota Lhokseumawe disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe)	34,978	36,081	37,632	39,267	40,828
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	88.42	88.81	92.40	90.67	92.44

Sumber : Publikasi PLN (analog & upb) 2017.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

A. Angka Kriminalitas yang tertangani

Tindak kejahatan yang terjadi di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami peningkatan, tindak kejahatan yang terjadi dikelompokkan dalam dua katagori besar yaitu kelompok tindakan kriminal biasayang merupakan kasus pencurian, penipuan, perompokan, pembunuhan, tindak

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, sedangkan yang dikelompokkan dalam kelompok Kriminal Narkoba yang berupa kasus Ganja dan Sabu-sabu dan zat adiktif lainnya.

Tabel 2.45
Angka Kriminalitas
Kota Lhoksumawe Tahun 2014 s.d 2016

Uraian Jenis Kriminalitas	Tahun		
	2014	2015	2016
Pembunuhan	2	6	3
Penganiayaan Berat (Anirat)	37	38	75
Penganiayaan Ringan (Anira)	126	144	119
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	33	31	29
Perkosaan	1	3	4
Pencabulan	32	-	36
Penculikan	4	-	3
Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	4	24	24
Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	45	41	22
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	220	336	276
Pembakaran Dengan Sengaja	20	-	6
Narkotika Dan Psikotropika	73	-	108
Penipuan/Perbuatan Curang	66	118	122
Penggelapan	51	87	70
Korupsi	-	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-
Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	132	219	227
Pengrusakan/Penghancuran Barang	32	23	23
Jumlah/Total	878	1070	1147
Jumlah Penduduk	187,455	191,407	195,186
Angka Kriminalitas (Per 10.000)	46.84	55.90	58.76

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2017.

B. Angka Partisipasi Angkatan Kerja.

Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Melihat angka partisipasi angkatan kerja ditentukan melalui perbandingan antara yang bekerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu daerah. Dari tahun 2012 s/d 2015 Angka partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari grafik berikut:

Tabel 2.46
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun	190.750	197.915	199.120	200.276	201.156
2	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas	58.804	65.454	67.388	67.857	77.021
Rasio		3.24	3.02	2.95	2.95	2.61

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka, 2017.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Lhokseumawe berkurang drastis pada tahun 2013. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut data tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.47
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2012 s.d 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TPT	10,88	7,46	11,20	13,06	10,51
2	TPAK	55,34	56,77	59,10	59,38	60,22

Sumber : Statistik daerah, BPS Lhokseumawe 2017.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK 2017

2.2.1. Capaian Indikator Makro

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah ada beberapa indikator ekonomi yang perlu diukur diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Laju Inflasi dan Pendapatan Perkapita.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu tantangan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disisi lain peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan juga merupakan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan yang serius.

Untuk itu target perekonomian Kota Lhokseumawe Tahun 2017 secara makro adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 ditargetkan tumbuh sekitar 6,6 persen
2. Inflasi ditargetkan Tahun 2017 pada kisaran 3,00 persen sampai dengan 5,00 persen.
3. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen.
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai 5,5 persen.

2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

2.2.2.1 Realisasi Pendanaan

Realisasi Tahun 2017, pendapatan daerah telah mencapai Rp. 818.982.294.053,96,- atau mencapai 88,18 persen dari proyeksi sebesar Rp. 928.679.687.143,16,- Di sisi belanja, realisasi pada tahun 2016 mencapai Rp. 824.229.509.751,- atau 86,60 persen dari proyeksi sebesar Rp. 952.460.290.264,-. Kondisi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2016 tersebut menyebabkan terjadinya defisit terhadap anggaran sebesar Rp (5.247.215.697,1),-. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel 2.90.

Tabel 2.48
Realisasi Pendanaan 2017

No	Uraian	Proyeksi 2016	Realisasi 2016 (Semester II)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Pendapatan	928.679.687.143,16	818.982.294.053,96	88,18
2.	Belanja	952.460.290.264,00	824.229.509.751,00	86,60
3.	Surplus/Defisit	(23.780.603.120,9)	(5.247.215.697,1)	-

2.2.2.2 Realisasi Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe, dapat diketahui realisasi pendapatan Kota

Lhokseumawe hingga semester I seperti tertera pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 2.49
Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Semester 2 Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI SEMESTER 2
1	PENDAPATAN	928.679.687.143,16	818.982.294.053,96
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.251.583.646	65.746.847.318,85
3	Pendapatan Pajak daerah	28.623.150.951	27.839.764.484
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.252.300.000	4.034.034.022
5	Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dinisahkan	5.040.000.000	5.093.717.479,31
6	Lain-lain PAD yang Sah	26.336.132.695	28.779.331.333,54
7	Jumlah Pendapatan Asli	64.251.583.646	22.792.266.286,69
8	PENDAPATAN TRANSFER	657.119.886.340	593.112.652.800
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	657.119.886.340	593.112.652.800
10	Dana Bagi Hasil Pajak	56.418.726.754	45.470.527.507
11	Dana Alokasi Umum	459.628.037.000	459.628.037.000
12	Dana Alokasi Khusus	141.073.112.586	88.014.088.293
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	657.119.912.340	593.112.652.800
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	63.167.967.000,-	63.167.967.000,-
15	Dana Otonomi Khusus	87.941.476.679	87.941.476.679
16	Dana Penyesuaian	63.167.967.000,-	63.167.967.000,-
17	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Pusat Lainnya	63.167.967.000,-	63.167.967.000,-
18	TRANSFER PEMERINTAHAN PROVINSI	120.517.450.157,16	13.957.487.724,11
19	Bantuan Keuangan dari Provinsi	87.941.476.679,-	0,-
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.575.973.478,16	13.957.487.724,11
21	Pendapatan bagi Hasil Lainnya		
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	120.517.450.157,16	13.957.487.724,11
23	Total Pendapatan Transfer		
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23.622.800.000	0,-
25	Pendapatan Hibah	23.622.800.000	0,-
26	Pendapatan Dana Darurat		-
27	Pendapatan Lainnya		-
28	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang sah	23.622.800.000	0,-
29	JUMLAH PENDAPATAN	928.679.687.143,16	818.982.294.053,96

Sumber: Qanun PAPBK dan LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe hingga semester 2 sudah

mencapai 88,18% (Rp.818.982.294.053,96 dari target Rp. 928.679.687.143,16).

2.2.2.3 REALISASI BELANJA

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe, dapat diketahui realisasi belanja Kota Lhokseumawe hingga semester 2 seperti tertera pada tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel 2.50
Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe Semester 2 Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI SEMESTER 2
1	BELANJA	952.460.290.264	824.229.509.751
1.1	BELANJA OPERASI	594.422.146.526,39	502.677.346.462
1.1.1	Belanja Pegawai	377.792.208.260,23	289.169.161.900
1.1.2	Belanja Barang	193.675.491.288,16	126.098.527.287
1.1.3	Belanja Bunga		-
1.1.4	Belanja Subsidi		-
1.1.5	Belanja Hibah	9.077.000.000,00	58.922.293.466
1.1.6	Belanja Sosial	13.877.446.978,00	28.487.363.809
	Jumlah Belanja Operasional	594.422.146.526,39	502.677.346.462,00
2	BELANJA MODAL	239.588.041.734,00	217.514.736.547,00
2.1	Belanja Tanah	8.296.630.995,00	7.656.061.155
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	24.380.217.149,00	17.508.243.654
2.3	Belanja Gedung dan	46.955.964.270,00	44.361.673.500
2.4	Belanja Jalan,Irigasi,dan Jaringan	159.753.219.820,00	147.850.503.738
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	202.009.500,00	138.254.500
2.6	Belanja Aset Lainnya		-
	Jumlah Belanja Modal	239.588.041.734,00	217.514.736.547,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	97.146.000,00
3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	97.146.000
	Jumlah Belanja Tak	500.000.000,00	97.146.000,00
	JUMLAH BELANJA	952.460.290.264,39	824.229.509.751,00
4	TRANSFER	117.950.102.004,00	103.940.280.742,00
4.1	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	3.396.630.000,00	896.425.494,00
4.1.1	Bagi Hasil Pajak	2.886.250.000,00	759.487.729
4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	510.380.000,00	136.937.765
4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan		
	Jumlah Tranfer Bagi hasil ke Desa	3.396.630.000,00	896.425.494,00
4.2	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	114.553.472.004,00	103.043.855.248,00
4.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
4.2.2	Bantuan Keuangan Keuangan Ke Desa	114.083.472.004,00	102.575.943.325

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI SEMESTER 2
4.2.3	Bantuan Keuangan Lainnya	470.000.000,00	467.911.923
	Jumlah Tranfer Bagi Hasil Ke Desa	114.553.472.004,00	103.043.855.248,00
	Jumlah Transfer	117.950.102.004,00	103.940.280.742,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	905.824.453.232,16	905.824.453.232,16
5	SURPLUS / DEFISIT	(23.780.603.121,23)	(5.247.215.698,00)

Sumber: Qanun PAPBK dan LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Dari data pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah realisasi belanja Kota Lhokseumawe tahun 2017 hingga semester 2 berjumlahRp. 824.229.509.751,-. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hingga semester 2 Tahun 2017 yaitu Rp. 818.982.294.053,96, posisi keuangan untuk sementara masih surplus sebesar Rp. 104,450,177,392.16

2.2.2.4 REALISASI PEMBIAYAAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Lhokseumawe, dapat diketahui realisasi pembiayaan Kota Lhokseumawe hingga semester 2 seperti tertera pada tabel 4.3. di bawah ini :

Tabel 2.51
Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe
Semester 2 Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI SEMESTER 2
1	PEMBIAYAAN		23.780.603.121,23
1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.780.603.121	-
1.1.1	Penggunaan SILPA	24.780.603.121	0,00
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0
1.1.4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Pusat		0
1.1.5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintaha Daerah Lainnya		0
1.1.5	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0
1.1.7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0
1.1.8	Pinjaman Dalam Negeri -		0

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI SEMESTER 2
1.1.9	Pinjaman Dalam Negeri -		0
1.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0
1.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0
1.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0
1.1.13	Penerimaan Kembali Piutang		0
1.1.14	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		0
	Jumlah Penerimaan	24.780.603.121	-
1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000,00
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0
1.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000,00
1.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Pusat	-	0
1.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Daerah Lainnya	-	0
1.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga	-	0
1.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	0
1.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	0
1.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	0
1.2.9	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	0
1.2.10	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	0
1.2.11	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	0
	Jumlah Pengeluaran	1.000.000.000	1.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	23.780.603.121,23	(1.000.000.000)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	(6.247.215.698,00)

Sumber: Qanun PAPBK dan LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2017

Dari data pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah realisasi pembiayaan Kota Lhokseumawe tahun 2017 hingga semester 2hanya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- .

2.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

2.3.1 Metode Evaluasi

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Format evaluasi yang digunakan sesuai petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun jenis belanja yang dievaluasi hanya Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2016. Penentuan predikat, ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah diatur seperti yang terlihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
KRITERIA PENILAIAN KINERJA

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

2.3.2 Hasil Evaluasi

2.3.2.1 Capaian Anggaran

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPK sampai dengan triwulan IV mencapai 82,6% (kategori tinggi), dan realisasi anggaran mencapai 123,2% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran SKPK pada tahun 2017 sampai dengan triwulan IV secara umum tergolong sudah baik.

Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing urusan pembangunan.

Tabel 2.53
Tingkat Capaian Realisasi RKPK Tahun 2016
Menurut Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Predikat Capaian Kinerja	% Realisasi Kinerja s/d	
			K	Rp
1.01	Pendidikan	ST	92,1%	87,7%
1.02	Kesehatan	T	85,0%	70,8%
1.03	Pekerjaan Umum	ST	96%	285%
1.04	Perumahan	T	88,7%	84,4%
1.05	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	T	85,6%	68,0%
1.06	Sosial	R	58,2%	42,3%
2.01	Ketenagakerjaan	T	88,1%	64,1%
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	T	77,7%	44,9%
2.03	Pangan	S	70,0%	80,4%
2.05	Lingkungan Hidup	SR	44,3%	99,9%
2.06	Administrasi Kependudukan dan	T	76,8%	67,0%
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ST	92,9%	77,8%
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SR	39,6%	23,3%
2.09	Perhubungan	T	85,8%	69,1%
2.10	Komunikasi dan Informatika	T	85,1%	76,8%
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	T	80,2%	64,2%
2.12	Penanaman Modal	ST	100,0%	77,3%
2.13	Pemuda & Olahraga	ST	95,2%	98,1%
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Predikat Capaian Kinerja	% Realisasi Kinerja s/d	
			K	Rp
2.14	Statistik	ST	100,0%	99,8%
2.16	Kebudayaan	T	80,0%	79,1%
2.17	Perpustakaan	R	62,5%	16,6%
3.01	Kelautan dan Perikanan	SR	50,6%	82,1%
3.02	Pariwisata	ST	100,0%	99,6%
3.03	Pertanian	ST	91,7%	82,9%
3.06	Perdagangan	ST	100,0%	86,2%
3.07	Perindustrian	S	66,7%	60,9%
4.01	Administrasi Pemerintah	ST	94,4%	82,6%
4.02	Pengawasan	ST	99,5%	53,5%
4.03	Perencanaan Pembangunan	T	82,5%	65,3%
4.04	Keuangan	ST	98,2%	78,8%
4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	ST	96,0%	77,3%
4.06	Keistimewaan dan Kekhususan	T	83,8%	67,3%
Predikat Kinerja		T	82,6%	123,2%

2.3.2.2 Capaian Kinerja

Berdasarkan data tersebut di atas, tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017, baik RKPK maupun Kinerja RPJMD belum dapat disajikan disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Masih terdapat perbedaan satuan indikator/satuan indikator antara masing-masing dokumen, baik Renja SKPA/RKPA, Renstra SKPA/RPJMA, dan APBK.
- Sebagian program/kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam dokumen Renstra ataupun Renja SKPK 2017 .

Hal tersebut mengakibatkan kinerja pelaksanaan RKPK 2017 tidak dapat diukur, dimana setiap program/kegiatan memiliki kaitan antar dokumen perencanaan (RPJMK ,Renstra, RKPK 2017, maupun Renja SKPK 2017). Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dimaksud.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Global, Nasional dan Aceh

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada Tahun 2016 kembali terjadi dari angka 2,7 persen pada Tahun 2015 turun menjadi 2,3 persen (Global Economic Prospect, Januari 2017). Perlambatan ekonomi global ini disebabkan oleh melemahnya perdagangan global, investasi yang rendah dan adanya ketidakpastian kebijakan dari negara-negara maju. Di lain sisi kelompok negara cepat tumbuh (emerging markets) dan negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada negara maju pada tahun 2016 yang masing-masing tumbuh sebesar 3,5 persen dan 1,6 persen. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh The International Monetary Fund (IMF) melalui laporan World Economic Update Edisi Januari 2017 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia lebih tinggi yaitu 3,1 persen pada tahun 2016, turun 0,1 persen dari angka pertumbuhan tahun 2016, yaitu 3,2 persen.

Ada dua peristiwa politik penting yang terjadi pada Tahun 2016. Kedua peristiwa ini dapat memberikan implikasi pada ketidakpastian ekonomi global. Peristiwa politik pertama adalah Brexit, yaitu keputusan rakyat Inggris untuk keluar dari Masyarakat Ekonomi Eropa dan yang kedua yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kedua peristiwa ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi dua negara maju tersebut akan bersifat populis dan protektif. Kebijakan tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap perdagangan global yang masih stagnan dan melemah. Ketidakpastian kebijakan juga

mendorong para investor untuk menghindari aset beresiko dan cenderung berinvestasi pada aset di negara yang dianggap aman seperti Amerika Serikat, Jerman dan Jepang. Hal ini menyebabkan penarikan dana atau modal dari negara-negara berkembang dan negara cepat tumbuh yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya defisit neraca berjalan (current account deficit) dan potensi ketidakstabilan ekonomi.

Pada Tahun 2016 perkembangan harga komoditas global menunjukkan kecenderungan positif dan membaik. Harga komoditas energi total yang dicatat oleh Bank Dunia mengalami kenaikan sebesar 11 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga batubara, minyak mentah dan gas alam masing-masing sebesar 38 persen, 10 persen dan 8 persen (Commodity Market Outlook, Januari 2017). Kenaikan harga batubara disebabkan oleh mulai tingginya permintaan dan berkurangnya suplai karena kebijakan Tiongkok untuk mengurangi kapasitas produksi. Minyak mentah mengalami kenaikan harga setelah negara-negara penghasil minyak OPEC dan Non-OPEC bersepakat untuk menurunkan produksi minyak 1,8 juta barrel per hari pada semester pertama tahun 2017. Gas Bumi mengalami kenaikan dikarenakan permintaan yang meningkat akibat musim dingin yang lebih ekstrim dan juga penurunan pasokan akibat rusaknya beberapa kilang pencairan gas alam terutama di Australia. Perkembangan harga komposit komoditas non-energi juga mengalami peningkatan tipis sebesar 1 persen dengan variasi kenaikan dan penurunan yang beragam dari komponen komoditas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2016 mencapai 5,02 persen, lebih besar dari 4,88 persen di tahun sebelumnya. Struktur perekonomian Indonesia tahun 2016 berdasarkan lapangan usaha utamanya ditopang oleh tiga sektor yaitu: sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor. Kontribusi masing-masing sektor sebesar 20,51 persen, 13,45 persen dan 13,19 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia tahun 2015 didominasi oleh

komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan Ekspor Barang dan Jasa. Masing-masing komponen berkontribusi sebesar 56,50 persen; 32,57 persen dan 19,08 persen.

Perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 2016 mengalami surplus. Nilai tambah ekspor atas harga berlaku mencapai US\$ 144,43 miliar yang terdiri dari ekspor migas sebesar US\$ 13,08 miliar dan ekspor non-migas sebesar US\$ 131,35 miliar. Sedangkan nilai impor Indonesia adalah US\$ 135,65 miliar. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor dan impor tahun sebelumnya, kedua nilai tersebut mengalami penurunan masing sebesar 3,95 persen dan 4,94 persen. Dari sektor, ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor non-migas produk industri pengolahan sebesar 76 persen, diikuti oleh produk pertambangan, migas dan pertanian masing-masing sebesar 12,56 persen, 9,06 persen dan 2,38 persen.

Impor Indonesia pada tahun 2016 mengalami penurunan akibat berkurangnya impor produk migas dan non-migas sebesar 23,92 persen dan 0,98 persen. Penurunan impor migas diakibatkan menurunnya impor minyak mentah, produk hasil minyak dan gas. Sedangkan penurunan impor produk non-migas disebabkan oleh penurunan impor produk mesin dan peralatan listrik, perangkat optik, bahan kimia organik, ampas/sisa industri makanan, serta plastik dan barang dalam plastik.

Struktur perekonomian Aceh selama Tahun 2016 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 62,38 persen dengan laju pertumbuhan relatif datar sebesar 3,32 persen. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Aceh masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yakni konsumsi. Disisi lain peningkatan kelompok hotel dan restoran serta pemberian gaji 13 dan 14 oleh pemerintah mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga. Kontribusi terbesar kedua pada struktur perekonomian ini disumbangkan oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 37,38 dimana komponen ini pada

tahun 2016 tumbuh sebesar 6,92 persen sehingga memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap perekonomian Aceh. Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT) tumbuh cukup signifikan sebesar 8,13 persen dibandingkan pada tahun 2015 yang pertumbuhannya minus 4,35 persen. Komponen PKLNPRT merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016.

Pertumbuhan yang tinggi ini didukung oleh peningkatan event-event yang berskala nasional dan daerah yang dilaksanakan di Aceh seperti Hari Nusantara dan PEDTA KTNA 2016. Sementara komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pertumbuhannya mengalami kontraksi yang cukup signifikan menjadi minus 6,07 pada tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 4,17 persen dan kontribusi masing-masing sebesar 24,89 persen dan 27,28 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dari sisi pengeluaran secara kumulatif selama tahun 2016 tumbuh menjadi 3,31 persen dibandingkan pada tahun 2015 yang mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan dua komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB (Pengeluaran). Yang pertama adalah Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 3,32 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 3,01 persen. Yang kedua adalah Komponen PMTB yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan menjadi 6,92 persen dibandingkan tahun 2015 hanya sebesar 3,61 persen.

3.1.2. Kondisi Daerah dan Kondisi Ekonomi Kota Lhokseumawe

Masalah pembangunan Kota Lhokseumawe dilihat dari komposisi anggaran pemerintah kota Lhokseumawe tahun 2017 lebih memperhatikan pada kelompok tersier, yaitu; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan

asuransi, sektor persewaan/real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Diakui bahwa kelompok tersier tersebut menyumbangkan produktifitas terbesar dalam PDRB Kota Lhokseumawe, sehingga Kota Lhokseumawe tumbuh menjadi kota perdagangan dan penyedia jasa-jasa.

Anggaran yang disediakan untuk menghidupkan kelompok tersier terbilang sangat signifikan. Belanja yang bersifat konsumtif yaitu belanja hibah dan bantuan sosial memungkinkan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan menimbulkan efek berganda yang luar biasa. Pembangunan jalan dan jembatan mengakibatkan menjamurnya pertumbuhan toko-toko, ruko, pergudangan, gedung, dan lain-lain.

Kelompok primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami masa surut. Produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didominasi oleh sub sektor perikanan dilihat pada PDRB non Migas Kota Lhokseumawe menduduki peringkat ke empat setelah perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Perhatian pemerintah kota pada sektor tersier akan mengakibatkan beralihnya mata pencaharian penduduk Kota Lhokseumawe dari sektor primer ke sektor tersier tersebut.

Infrastruktur di sub sektor perikanan juga masih banyak yang terbengkalai seperti pelabuhan sandar kapal nelayan yang belum siap, penyediaan coolstorage sebagai tempat penyimpanan ikan juga belum tersedia, minimnya penyediaan TPI dan PPI yang memadai dan lain-lainnya.

Ketertinggalan kelompok primer ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu; tidak adanya perencanaan dibidang keminapolitanan, kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk membangun infrastruktur perikanan, penguasaan terhadap ilmu perikanan yang belum memadai, serta faktor lainnya yang tidak mendukung sub sektor perikanan tersebut.

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan minyak dan gas pada tahun 2014 dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kelompok primer yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan sektor pertambangan dan penggalan.
2. Kelompok sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi.
3. Kelompok tersier terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor persewaan/real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya.

Adapun kelompok penyumbang yang paling besar didominasi oleh kelompok sekunder, terutama sektor industri pengolahan yang berpartisipasi sebesar 40,08% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena dalam kelompok tersebut terdapat industri pengolahan gas alam cair, meskipun dalam kurun waktu 2010-2014 sektor ini cenderung menurun yang sebagai akibat semakin berkurangnya produksi gas alam cair. Selain itu sektor konstruksi juga turut memberi peran yang cukup besar dalam kelompok sekunder ini dengan kontribusi sebesar 10,58% dari total PDRB Kota Lhokseumawe.

Kelompok tersier yang terdiri dari sebelas sektor merupakan penyumbang kedua terbesar komponen PDRB Kota Lhokseumawe. Sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor reparasi mobil dan sepeda motor menyumbangkan 17,92 % dari total PDRB Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2010-2014.

Sementara itu pada kelompok primer sepanjang 2010-2014, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 6,34% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. (Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2014).

Struktur perekonomian dengan minyak dan gas Tahun 2010-2011 secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Struktur Perekonomian dengan Minyak dan Gas
Tahun 2010-2014 (persen)

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Primer</u>	5,24	5,69	5,94	6,11	6,69
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,97	5,40	5,64	5,80	6,34
2. Pertambangan dan Penggalan	0,27	0,29	0,30	0,31	0,35
<u>Sekunder</u>	61,22	58,20	56,79	55,34	50,75
1. Industri Pengolahan	53,08	49,21	47,40	45,69	40,08
2. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4. Konstruksi	8,07	8,91	9,31	9,57	10,58
<u>Tersier</u>	33,53	36,12	37,27	38,53	42,55
1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,05	15,23	15,76	16,15	17,92
2. Transportasi dan Pergudangan	8,15	8,81	8,99	9,33	10,20
3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,54	0,58	0,61	0,64	0,72
4. Informasi dan Komunikasi	2,19	2,31	2,38	2,44	2,62
5. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,10	1,23	1,35	1,50	1,66
6. Persewaan/Real Estate	2,06	2,21	2,28	2,35	2,61
7. Jasa Perusahaan	0,48	0,52	0,53	0,55	0,63
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,12	2,23	2,32	2,37	2,60

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014
Jaminan Sosial Wajib					
9. Jasa Pendidikan	0,64	0,67	0,67	0,71	0,81
10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,68	1,71	1,79	2,00
11. Jasa Lainnya	0,60	0,65	0,67	0,70	0,78
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2014

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan tidak memasukkan unsur minyak dan gas pada perhitungan PDRB tahun 2014 didominasi oleh kelompok tersier sebesar 71,02%. Terdapat dua sektor yang memberi kontribusi terbesar dalam kelompok ini. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sebesar 29,91% dan 17,03% disumbangkan oleh sektor transportasi dan pergudangan seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Struktur Perekonomian Tanpa Minyak dan Gas
Tahun 2010-2014 (persen)

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Primer</u>	11,17	11,20	11,29	11,25	11,17
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,59	10,63	10,72	10,68	10,58
2. Pertambangan dan Penggalan	0,58	0,57	0,57	0,57	0,58
<u>Sekunder</u>	17,35	17,70	17,85	17,77	17,81
3. Industri Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,15	0,15	0,13
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
6. Konstruksi	17,20	17,54	17,70	17,63	17,66
<u>Tersier</u>	71,48	71,10	70,86	70,97	71,02

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	29,95	29,98	29,96	29,75	29,91
8. Transportasi dan Pergudangan	17,37	17,34	17,09	17,19	17,03
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,15	1,14	1,16	1,18	1,20
10. Informasi dan Komunikasi	4,67	4,55	4,52	4,49	4,37
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,34	2,42	2,57	2,76	2,77
12. Persewaan/Real Estate	4,39	4,35	4,33	4,33	4,36
13. Jasa Perusahaan	1,02	1,02	1,01	1,01	1,05
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,39	4,41	4,37	4,34
15. Jasa Pendidikan	1,36	1,32	1,27	1,31	1,35
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,41	3,31	3,25	3,30	3,34
17. Jasa Lainnya	1,28	1,28	1,27	1,29	1,30
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2010-2014

Kelompok primer berada pada posisi ketiga terbesar peranannya dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2014 kelompok ini memberikan kontribusi sebesar 11,17%. Namun kontribusinya yang diberikan cenderung menurun setiap tahunnya. Sektor yang dominan pada kelompok primer adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 10,58%. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalan hanya menyumbang lebih dari setengah persen sejak periode 2010-2014.

Posisi kedua adalah kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi.

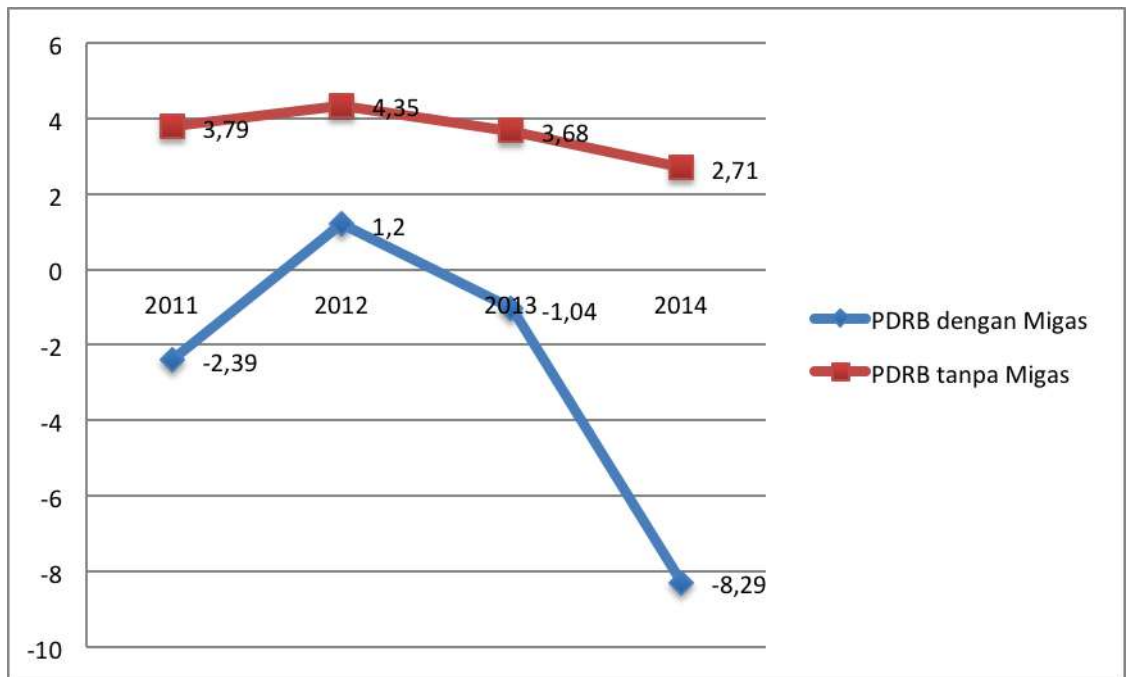
Kelompok sekunder ini lebih didominasi oleh sektor konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 17,66% pada tahun 2014 dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memberi kontribusi yang masih sangat sedikit yaitu hanya 0,02% dan merupakan sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap nilai PDRB Kota Lhokseumawe.

Jika melihat struktur perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas maka kelompok tersier merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Lhokseumawe. Kelompok tersier didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dan memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

3.1.3. Perkiraan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2018

Gambaran kondisi ekonomi makro daerah dapat dilakukan dengan berbagai variabel ekonomi yang ada seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan SDM daerah. Berdasarkan data dari BPS Kota Lhokseumawe, laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2014 sebesar 2,71% yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Pertumbuhan PDRB tersebut tanpa memasukkan unsur minyak dan gas. Sedangkan dengan memasukkan unsur minyak dan gas, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe sebesar -8,29%. Tanpa minyak dan gas, secara sektoral di tahun 2014 seluruh sektor ekonomi tumbuh positif, seperti yang digambarkan pada gambar 3.1 di bawah ini:

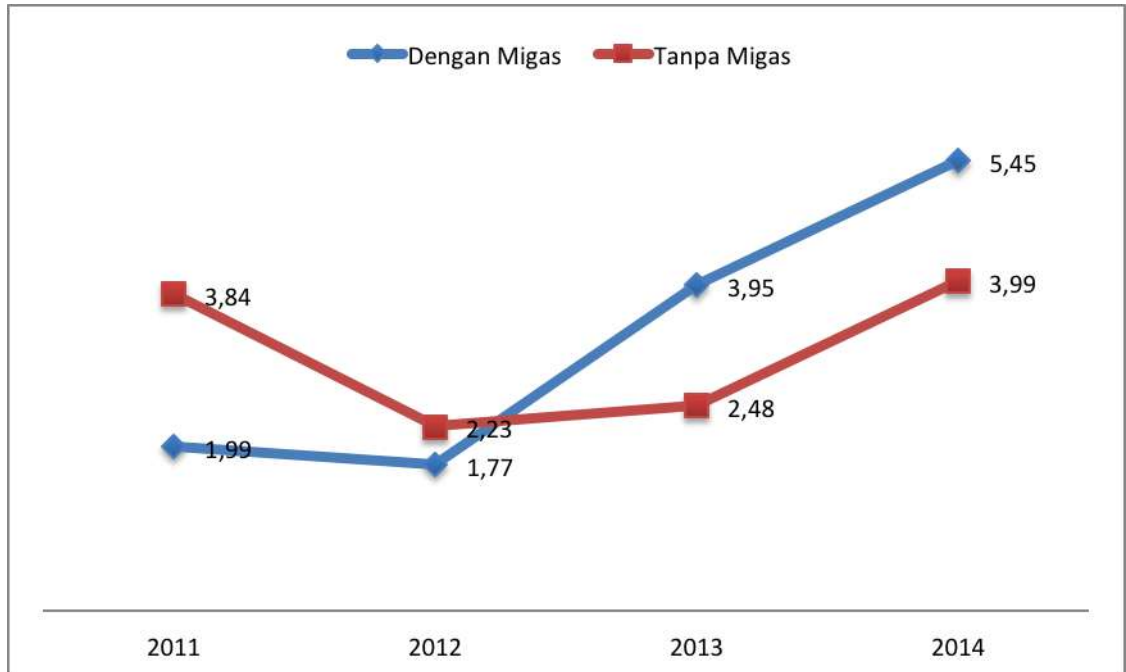
Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe
dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2011-2014



Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014

Tingkat perubahan harga atau laju inflasi dari sisi produsen atas agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar dapat diukur melalui perubahan pada indeks implisit. Indeks implisit merupakan salah satu faktor penting dalam menggambarkan stabilitas perekonomian suatu daerah. Indeks ini meliputi semua jenis harga seperti harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran, dan harga lainnya yang sesuai.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Implisit Lhokseumawe Tahun 2011 – 2014 (persen)



Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2010-2014

Pada Tahun 2018, sebagai daerah yang berbasis pada sub sektor perikanan maka peningkatan sumbangan pada sub sektor ini masih menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe, sektor perikanan harus terus ditingkatkan kepada upaya peningkatan kapasitas produksi dengan memfokuskan pada pengembangan komoditi unggulannya dan berorientasi kepada nilai tambah bagi nelayan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor akan menjadi pendorong ekonomi setelah sektor pertanian, dikarenakan semakin banyak pendatang yang berkunjung ke Kota Lhokseumawe walaupun objek wisata di Kota Lhokseumawe belum memadai. Rumah makan dan restoran semakin diminati peminat baik dari dalam maupun luar Kota Lhokseumawe yang berkunjung di waktu malam. Ini merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe.

Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi pendorong pertumbuhan PDRB. Kebijakan fiskal pada berbagai bidang yang berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat dapat memacu konsumsi sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2017 kebijakan keuangan daerah Kota Lhokseumawe secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi pemerintahan daerah dengan mengacu pada pendekatan Money Follow Program dengan mengedepankan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan wilayah;
2. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka memperbesar belanja langsung yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi layanan publik meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Serta mengefektifkan belanja tidak langsung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah maupun belanja bantuan sosial;
4. Kebijakan penggunaan DAU sesuai dengan amanah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada tahun 2015, alokasi anggaran untuk pemerintah desa sebesar 10 % dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah secara garis besar adalah dipergunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
6. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka penyertaan modal setelah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah teralokasikan.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah, selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sesuai Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, 2. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah
2. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
- c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
- e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB;

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari :

1. Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah

ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah; dan

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- Mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- Meningkatkan kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:

1. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
2. Bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
3. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan

aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah. Berdasarkan kebutuhan pendanaan dan proyeksi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2018, maka realisasi, anggaran dan proyeksi pendapatandaerah tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dalam tabel.

**Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 s.d 2019**

NO	URAIAN	REALISASI			APBK TAHUN 2018	PROYEKSI TAHUN 2019
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	835,809,796,431.35	908,888,389,623.51	818,982,294,053.96	786,821,025,020.00	791,817,866,000.60
I	Pendapatan Asli Daerah	56,560,454,282.49	56,348,631,473.02	65,746,847,318.85	66,522,617,843.00	68,518,296,378.29
1	Pajak Daerah	21,368,637,313.70	24,519,447,668.83	27,839,764,484.00	28,632,500,000.00	29,491,475,000.00
2	Retribusi Daerah	3,593,498,911.00	3,816,764,587.00	4,034,034,022.00	4,753,500,000.00	4,896,105,000.00
3	Hasil Pengel. Kekayaan daerah yang dipisahkan	4,011,810,914.00	4,253,406,003.14	5,093,717,479.31	5,740,000,000.00	13,122,200,000.00
4	Zakat, Infaq dan Sadaqah	8,646,484,339.00	8,790,038,934.00	14,595,940,075.00	-	-
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18,940,022,804.79	14,968,974,280.05	14,183,391,258.54	27,396,617,843.00	21,008,516,378.29
II	Dana Perimbangan	610,875,498,509.00	688,355,157,426.00	643,836,482,332.00	620,259,659,000.00	620,259,659,000.00
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	62,431,349,509.00	42,965,175,599.00	48,888,556,149.00	57,839,252,000.00	57,839,252,000.00
2	Dana Alokasi Umum	469,107,319,000.00	467,846,597,000.00	459,628,037,000.00	459,628,037,000.00	459,628,037,000.00
3	Dana Alokasi Khusus	79,336,830,000.00	177,543,384,827.00	135,319,889,183.00	102,792,370,000.00	102,792,370,000.00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	168,373,843,639.86	164,184,600,724.49	109,398,964,403.11	100,038,748,177.00	103,039,910,622.31
1	Pendapatan Hibah				22,176,800,000.00	22,842,104,000.00
2	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya	19,599,417,900.86	25,208,475,969.49	13,957,487,724.11	22,614,315,177.00	23,292,744,632.31
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	148,774,425,739.00	48,793,965,000.00	95,441,476,679.00	55,247,633,000.00	56,905,061,990.00
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi /Pemda Lainnya	-	73,736,159,755.00	-	-	-
5	Lain-lain Pendapatan	-	16,446,000,000.00		-	
	JUMLAH	835,809,796,431.35	908,888,389,623.51	818,982,294,053.96	786,821,025,020.00	791,817,866,000.60

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe tahun 2019 diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya alokasi anggaran belanja tahun 2019 harus tetap mengedepankan azas efesiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berbasis *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019, maka kebijakan belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. Mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dan fungsi kesehatan 10%;

- d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 s.d 2019**

NO	URAIAN	REALISASI			APBK TAHUN 2018	PROYEKSI TAHUN 2019
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017		
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	879,070,194,380.00	890,338,348,966.21	823,333,084,257.00	793,021,025,020.00	820,523,489,357.38
I	Belanja Tidak Langsung	488,270,068,511.00	476,249,189,555.00	479,719,820,423.00	433,314,568,438.63	459,063,419,072.39
1	Belanja Pegawai	321,048,644,754.00	342,892,103,380.00	289,169,161,900.00	307,693,319,534.63	324,038,661,813.09
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	29,669,950,780.00	25,923,600,000.00	58,922,293,466.00	5,100,400,000.00	5,400,943,800.00
5	Belanja Bantuan Sosial	94,154,021,955.00	17,273,954,000.00	28,487,363,809.00	8,722,865,778.00	4,751,202,972.67
6	Belanja Bagi Hasil				2,833,621,226.00	3,438,758,000.00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan	43,046,237,022.00	89,805,703,175.00	103,043,855,248.00	107,464,361,900.00	120,333,852,486.63
8	Belanja Tidak Terduga	351,214,000.00	353,829,000.00	97,146,000.00	1,500,000,000.00	1,100,000,000.00
II	Belanja Langsung	390,800,125,869.00	414,089,159,411.21	343,613,263,834.00	359,706,456,581.37	361,460,070,284.99
1	Belanja Pegawai	54,575,680,643.00	53,390,938,000.00	50,284,335,540.00	47,511,329,561.00	49,048,819,070.42
2	Belanja Barang Jasa	113,203,381,574.00	124,713,210,923.21	75,814,191,747.00	190,182,293,257.85	188,091,122,203.91
3	Belanja Modal	223,021,063,652.00	235,985,010,488.00	217,514,736,547.00	122,012,833,762.52	124,320,129,010.66
JUMLAH		879,070,194,380.00	890,338,348,966.21	823,333,084,257.00	793,021,025,020.00	820,523,489,357.38

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisanya lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan atas realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, besar pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi PembiayaanKota Lhokseumawe
Tahun 2015 s.d 2019

NO	URAIAN	REALISASI			APBK
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	
	PEMBIAYAAN	49,490,960,413	6,230,562,463.93	(1,000,000,000)	
I	Penerimaan Pembiayaan	53,490,960,413	6,230,562,463.93	-	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	53,340,960,412.58	6,230,562,463.93	-	
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman/dana bergulir	150,000,000	-	-	
6	Penerimaan piutang daerah				
II	Pengeluaran Pembiayaan	4,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2	Penyertaan Modal	4,000,000,000	-	1,000,000,000	
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	JUMLAH	49,490,960,412.58	6,230,562,463.93	(1,000,000,000)	

3.1.3. Perkiraan Tahun 2018

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 1,9 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen.

Pada tahun 2018 harga komoditas non migas diperkirakan menurun sebesar 1,4 persen sementara harga komoditas migas sedikit meningkat 0,1 persen. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:

- Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan baru AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global. Risiko ini cenderung berkurang seiring dengan hasil pemilihan umum di Prancis dan Belanda, misalnya, yang memenangkan pemimpin yang lebih pro terhadap kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.
- Risiko proses penyeimbangan (rebalancing) ekonomi RRT. Risiko yang masih dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat utang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah RRT berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko terjadinya "hard landing". Kebijakan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi RRT. Risiko lain yang masih akan dihadapi

oleh ekonomi RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT.

- Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan dampak yang lebih besar akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris keluar dari Uni Eropa.
- Normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Setelah kenaikan FFR pada bulan Maret dan Juni tahun 2017, Bank Sentral AS diperkirakan masih akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya pada akhir tahun. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Normalisasi neraca keuangan the Fed juga diperkirakan akan mulai dilakukan sejak awal tahun 2018. Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa. Potensi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.
- Kenaikan harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era commodity boom. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.
- Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena aging population di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.
- Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global.
- Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal dalam negeri. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif

rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek crowding out seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.

- Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada dibawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya NPL.
- Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Stabilitas ekonomi Indonesia sangat penting untuk tetap dijaga, karena ekonomi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga keyakinan konsumen pada tingkat yang baik. Kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi akan dititikberatkan pada upaya untuk: (i) menjaga stabilitas harga, yaitu melalui inflasi yang terjaga sesuai target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, (ii) menjaga neraca pembayaran yang tetap solid, serta (iii) menjaga stabilitas sistem keuangan yang antara lain melalui kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.

Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan administered price dan adanya peningkatan harga komoditas minyak dunia. Akan tetapi dampak peningkatan inflasi tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5-4,5 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.300-13.500 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan.

Stabil dan rendahnya inflasi akan didorong oleh stabilitas komponen inflasi volatile food, administered price, dan inflasi inti. Secara umum, arah kebijakan pengendalian inflasi difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola

tanam, (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan, (iii) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan, (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga, (v) penguatan kerjasama antar daerah, (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok, serta (vii) penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari defisit neraca berjalan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, tetapi defisit ini masih dapat terjaga dalam batas yang aman. Penerimaan ekspor barang tahun 2018 diperkirakan mencapai USD165,6-172,2 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang diperkirakan sebesar USD149,3-155,8 miliar seiring dengan implementasi kebijakan diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (existing market) melalui peningkatan keunggulan kompetitif. Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan sebesar USD150,8-157,0 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas diperkirakan sebesar USD127,1-133,1 miliar, seiring dengan peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi yang membutuhkan bahan baku dan barang modal. Sementara itu, defisit neraca perdagangan jasa diperkirakan akan menurun menjadi USD4,9-5,1 miliar karena adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang cukup signifikan. Dengan demikian, neraca transaksi berjalan pada tahun 2018 diperkirakan defisit sebesar USD20,3-22,1 miliar atau 1,9-2,0 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih dapat ditutupi oleh neraca modal dan finansial yang diperkirakan masih akan mengalami surplus di tahun 2018. Surplus neraca modal dan finansial didukung oleh prospek perekonomian domestik yang semakin baik akibat implementasi kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran USD15,4-16,0 miliar karena didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan tumbuh. Namun demikian, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko

terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat.

Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan mencapai USD 9,8-11,0 miliar dengan cadangan devisa di atas kecukupan standar internasional, yaitu sebesar USD 136,3 – 140,0 miliar atau setara dengan 8,8-8,9 bulan impor.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp 5.140,9 - Rp 5.269 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 8,3 – 8,8 persen, atau sebesar Rp 427,7 – Rp 466,1 triliun. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN (capital expenditure) diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp 400,8 – Rp 665,1 triliun. Sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp 4.138,2 - Rp 4.312,5 triliun, dimana dalam bentuk PMA dan PMDN akan menyumbang sebesar Rp 727,0 - 775,0 triliun.

Sasaran pembangunan Indonesia pada tahun 2018 yang akan mencapai range 5,4 - 6,1 persen atau pada titik 5,6 persen atau 5,35 persen untuk sasaran pulau Sumatera dengan inflasi berkisar pada angka 4,0 persen persen, nilai tukar (USD/IDR) berkisar antara Rp 13.600 – Rp 13.900. Tingkat kemiskinan dan pengangguran untuk sasaran Pulau Sumatera adalah turun masing-masing hingga 10,25 persen dan 4,8 persen. Target tersebut berharap akan dicapai pada 6 sektor utama yaitu Industri Pengolahan terutama non migas, pertanian, informasi dan komunikasi, konstruksi dan jasa keuangan.

Begitu juga dengan Perekonomian Aceh mempunyai tantangan defisit perdagangan baik untuk luar negeri maupun antar daerah. Resiko harga komoditas ekspor yang melemah dan rendahnya permintaan global akan mempengaruhi nilai ekspor Aceh. Disamping itu, penurunan kontribusi dan keluaran sektor pertambangan dan penggalan serta sektor industri pengolahan memberikan tekanan bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Dari sisi kualitas pembangunan ekonomi, tantangan Aceh masih dapat dilihat pada angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Pemerataan pembangunan pun masih menjadi tantangan mengingat terjadi kecenderungan peningkatan pada indikator ketimpangan seperti Indeks Williamson dan Rasio Gini. Selanjutnya, frekuensi bencana terutama banjir dan kekeringan meningkat seiring dengan perubahan iklim global menambah resiko bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain tantangan yang dihadapi Aceh pada tahun 2018 ada beberapa peluang atau prospek yang dapat digunakan untuk mempercepat raihan pembangunan Aceh. Perkiraan bahwa harga komoditas dan permintaan global serta perdagangan internasional akan mulai membaik serta beberapa kebijakan nasional yang pro pertumbuhan dapat memberikan peluang bagi Aceh. Selain itu Kebijakan ekonomi penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim investasi, pembangunan infrastruktur strategis seperti waduk, jalan, pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik serta transfer dana desa, dimulainya pembangunan konstruksi pabrik semen di Laweng Pidie, pembangunan Laboratorium LIPI di Sabang, rencana pembangunan SKPT di Sabang, membaiknya harga Batubara di pasar Global turut menjadi kontributor peningkatan pembangunan di Aceh.

Untuk Kota Lhokseumawe, mulai beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe serta membaiknya neraca APBD Kota Lhokseumawe diharapkan dapat kembali mengungkit pertumbuhan ekonomi. Perkembangan Indikator Makro Tahun 2015-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun		Bertambah /berkurang	Proyeksi	Target
			2015	2016		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (ADHK)						
	Migas	Rp (Milyar)	6,550,236.0	6,462,392.0	-87844.0	6611027.0	6763080.6
	Tanpa Migas	Rp (Milyar)	5,367,767.4	5,431,204.0	63436.6	5539828.1	5650624.6
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (ADHK)						
	Migas	%	-20.4	-1.34	19.06	3.92	4.2
	Tanpa Migas	%	5.33	1.18	-4.15	4.6	5.5
3	Tingkat Inflasi	%	2.44	5.6	3.16	2,8	2,6
4	Struktur PDRB Pendekatan Produksi/Sektoral						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7.88	8.2	0.32	0.33	0.33
	Pertambangan dan Penggalian	%	0.45	0.46	0.01	0.01	0.01
	Industri Pengolahan	%	19.87	17.87	-2.00	-2.04	-2.08
	Pengadaan Listrik, Gas	%	0.14	0.18	0.04	0.04	0.04
	Pengadaan Air	%	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	Konstruksi	%	15.92	15.4	-0.52	-0.53	-0.54
	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	23.04	23.46	0.42	0.43	0.44
	Transportasi dan Pergudangan	%	12.82	12.9	0.08	0.08	0.08
	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	%	0.97	1.1	0.13	0.13	0.14
	Informasi dan Komunikasi	%	3.7	4.06	0.36	0.37	0.37
	Jasa Keuangan	%	0.87	0.94	0.07	0.07	0.07
	Real Estate	%	3.7	3.87	0.17	0.17	0.18
	Jasa Perusahaan	%	0.87	0.94	0.07	0.07	0.07

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun		Bertambah /berkurang	Proyeksi	Target
			2015	2016		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	%	3.57	3.85	0.28	0.29	0.29
	Jasa Pendidikan	%	1.11	1.2	0.09	0.09	0.09
	Jasa Kesehatan	%	2.86	3.11	0.25	0.26	0.26
	Jasa Lainnya	%	1.05	1.16	0.11	0.11	0.11
5	Struktur PDRB Pengeluaran						
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	%	46.57	48.88	2.31	2.36	2.40
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	%	0.93	0.99	0.06	0.06	0.06
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	%	14.76	14.97	0.21	0.21	0.22
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	46.93	45.92	-1.01	-1.03	-1.05
	Perubahan Inventori	%	-0.04	0.04	0.08	0.08	0.08
	Ekspor Neto	%	-9.15	-10.81	-1.66	11.03	12.25
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	23.141	23.383	0.242	22.987	22.478
7	Tingkat Pengangguran	%	11.2	13.1	1.8	8.6	6.7
		Orang	8526	10190	1664	7045	6324

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh 2019 dan 2020

Prospek perekonomian Indonesia pada 2018 dan 2019 diperkirakan membaik dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Prospek perekonomian yang membaik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, serta keseimbangan eksternal yang terjaga. Momentum positif dari global dan domestik pada 2017 menjadi basis bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai Inflasi yang diperkirakan tetap rendah dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2018-2019 sebesar $3,5 \pm 1\%$, dipengaruhi terjaganya ekspektasi inflasi dan terkendalinya permintaan domestik. Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan mencatat surplus pada 2018- 2019, didorong peningkatan arus masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan (TB) yang tetap terjaga di bawah 2,5% PDB. Dalam jangka menengah, prospek perekonomian domestik terus tumbuh ke lintasan yang lebih tinggi, didukung dampak positif implementasi reformasi struktural yang optimal dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terpelihara.

Di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi, beberapa tantangan masih mengemuka yang berpotensi mengganggu kesinambungan prospek perekonomian. Tantangan jangka pendek dari global terkait dengan upaya memitigasi risiko yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di

beberapa negara maju, potensi gejolak geopolitik yang masih berlanjut, dan kebijakan proteksionisme perdagangan yang meningkat. Tantangan untuk memitigasi risiko global semakin kuat karena ekonomi global dalam jangka menengah diwarnai penurunan produktivitas akibat investasi yang masih terbatas dan populasi yang menua, terutama di berbagai negara maju. Tantangan lain terkait dengan upaya meminimalkan risiko domestik seperti proses konsolidasi ekonomi yang terus berlanjut, ruang stimulus fiskal yang masih terbatas, dan penurunan aliran modal asing yang dipicu oleh berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter negara maju. Selain itu, tantangan juga muncul berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko inflasi yang meningkat terkait kenaikan harga minyak dan harga komoditas pangan. Dalam jangka menengah, masih terdapat beberapa tantangan struktural dari domestik yang dapat menghambat berlanjutnya pemulihan ekonomi. Tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan daya saing perekonomian, penguatan kapasitas dan kapabilitas industri, penciptaan ekonomi yang inklusif, penyediaan sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, dan perkembangan teknologi digital.

Respons kebijakan ditempuh untuk mengawal perekonomian sehingga dapat tumbuh dengan struktur yang lebih baik dan ditopang stabilitas yang kokoh. Dalam kaitan ini, arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan. Respons kebijakan dilakukan melalui sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SPPUR), serta kebijakan struktural. Peran reformasi struktural menjadi penting untuk dilakukan secara konsisten guna menjawab tantangan jangka menengah dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian. Prospek perbaikan ekonomi global dan beberapa perkembangan positif domestik berpotensi terus mendorong perbaikan ekonomi Indonesia pada 2018-2019. Pertumbuhan ekonomi pada 2018-2019 diperkirakan meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6%.

Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut terutama ditopang oleh peran permintaan domestik yang meningkat sebagai sumber pertumbuhan. Permintaan domestik terutama berasal dari investasi yang menguat, baik investasi bangunan maupun investasi nonbangunan. Perbaikan investasi didukung oleh sektor swasta melalui perbaikan keyakinan pelaku usaha, dan sektor Pemerintah melalui

kelanjutan belanja yang berkualitas. Peran stimulus fiskal juga diperkirakan cukup besar, tidak hanya dari investasi tetapi juga dari konsumsi, didukung prospek pajak yang membaik.

Konsumsi swasta sebagai kontributor utama ekonomi Indonesia diperkirakan mulai meningkat, didukung daya beli yang terjaga, termasuk dari program perlindungan sosial yang lebih luas. Sementara itu, ekspor diperkirakan sedikit melambat namun masih tumbuh positif seiring dengan prakiraan harga komoditas yang tetap tinggi dan permintaan global yang masih kuat. Kinerja investasi diperkirakan berada dalam tren yang meningkat pada 2018 dan 2019 didukung oleh stimulus pemerintah melalui belanja modal disertai berlanjutnya ekspansi sektor swasta. Pertumbuhan investasi pada 2018 dan 2019 diperkirakan meningkat pada kisaran 6,5-6,9%, ditopang oleh investasi bangunan dan nonbangunan. Investasi bangunan diperkirakan naik sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis yang sudah ditargetkan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang Asian Games. Sementara itu, investasi nonbangunan hingga 2019 diperkirakan juga terus meningkat, terutama berupa mesin dan peralatan, seiring ekspansi sektor swasta khususnya untuk industri pengolahan, pengangkutan, jasa-jasa, dan industri terkait lainnya.

Prospek peningkatan investasi juga dipengaruhi konsistensi Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi sehingga dapat meningkatkan keyakinan dan minat pelaku usaha dalam berinvestasi. Pemerintah berkomitmen untuk menata regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan penanaman modal. Penataan regulasi termasuk dengan melakukan integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha.

Sejauh ini, upaya untuk memperbaiki iklim usaha telah menunjukkan perkembangan positif dan diperkirakan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan berbagai upaya tersebut tercermin dari membaiknya peringkat *ease of doing business* Indonesia dari posisi 91 menjadi 72 pada tahun 2018. Konsumsi swasta diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian 2017. Pertumbuhan konsumsi swasta pada 2018 dan 2019 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9-5,3%. Prospek konsumsi swasta tersebut tidak terlepas dari prakiraan konsumsi rumah tangga yang membaik, dan ditopang daya beli yang tetap terjaga seiring potensi peningkatan pendapatan dari ekspor serta inflasi yang terjaga pada level rendah. Prospek konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh stimulus fiskal dari Pemerintah melalui berbagai instrumen belanja fiskal.

Stimulus pemerintah pada 2018 diperkirakan membantu kinerja konsumsi rumah tangga. Stimulus pemerintah yang memengaruhi konsumsi rumah tangga antara lain terkait belanja pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada dan pemilu pada 2018-2019, subsidi, dan bantuan sosial.

Secara keseluruhan, komponen konsumsi pemerintah terkait subsidi dan bantuan sosial meningkat. Pemerintah dalam APBN 2018 menargetkan belanja subsidi untuk listrik serta energi tidak banyak berbeda dibandingkan dengan subsidi pada 2017. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung tetap terjaganya konsumsi. Selain itu, program bantuan tunai bersyarat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperluas dari 6 juta keluarga pada 2017 menjadi 10 juta keluarga pada 2018.

Di tengah optimisme prospek perekonomian ke depan, hasil identifikasi menunjukkan beberapa tantangan masih mengemuka dan perlu mendapat perhatian. Identifikasi berbagai tantangan tersebut menjadi penting dalam mendukung perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan diarahkan tidak hanya untuk memitigasi risiko yang muncul, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat mengawal berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan.

Tantangan perekonomian bersumber dari global dan domestik, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dari global, tantangan jangka pendek yang mengemuka berkaitan dengan upaya untuk memitigasi risiko-risiko terkait perubahan stance kebijakan moneter negara maju ke arah pengetatan, gejolak geopolitik yang masih berlanjut, serta proteksionisme perdagangan yang menunjukkan tendensi meningkat. Risiko pertama dan kedua perlu dicermati karena dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan meningkatkan risiko pembalikan modal dari negara berkembang. Sementara itu, risiko ketiga yakni peningkatan proteksionisme dapat mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional, yang akan berdampak negatif ke ekonomi Indonesia.

Tantangan dari global dalam jangka menengah berkaitan dengan upaya memitigasi dampak negatif dari risiko penurunan produktivitas global yang dapat kembali melemahkan ekonomi dunia. Perkembangan terkini menunjukkan pemulihan ekonomi global masih rentan dan berisiko bersifat temporer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh di berbagai negara. Pada faktor struktural, terjadi penuaan populasi di berbagai negara maju. Selain itu,

tantangan struktural global juga diwarnai dengan tingkat produktivitas dunia yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelum krisis keuangan global. Penurunan produktivitas disebabkan oleh investasi yang masih rendah dan kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi kapital dan inovasi teknologi.

Tantangan dari domestik juga meliputi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, tantangan domestik terkait dengan upaya untuk mempercepat berakhirnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan, memitigasi risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar, meminimalkan risiko berkurangnya capital inflows jika arah pengetatan kebijakan moneter negara maju lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi pasar, dan menjaga stabilitas makro di tengah risiko peningkatan inflasi. Risiko berlanjutnya periode konsolidasi korporasi dan perbankan dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena menghambat potensi ekspansi usaha. Risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar juga mengemuka akibat penerimaan pajak yang belum optimal dan dapat membatasi peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, risiko berkurangnya capital inflows akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju perlu diantisipasi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Terakhir, inflasi dalam jangka pendek berisiko meningkat akibat kenaikan harga minyak dan komoditas pangan yang melebihi prakiraan.

Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Dalam jangka menengah, tantangan domestik terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga dapat tumbuh secara berkesinambungan. Upaya memperkuat struktur perekonomian menjadi penting karena berpengaruh pada kemampuan perekonomian untuk tumbuh tinggi tanpa diikuti dengan meningkatnya kerentanan ekonomi yang dapat berujung pada instabilitas. Kerentanan yang paling mengemuka antara lain terkait hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan defisit Transaksi Berjalan (TB). Pengalaman empiris menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan diikuti oleh peningkatan defisit TB.

Upaya mendorong perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh tinggi, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif setidaknya mencakup lima tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing perekonomian yang perlu terus ditingkatkan. Daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat modal dasar pembangunan, yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi, dan institusi. Tantangan kedua berhubungan dengan upaya untuk membangun

kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas. Tantangan tersebut juga termasuk membangun sektor industri yang potensial dan berteknologi tinggi untuk memperkuat struktur ekspor-impor yang dapat meningkatkan daya tahan sektor eksternal terhadap guncangan. Tantangan ketiga terkait upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang belum diikuti dengan turunnya tingkat kesenjangan. Tantangan keempat berhubungan dengan upaya memperkuat struktur dan sumber pembiayaan yang masih terbatas, termasuk dari sektor keuangan dan fiskal. Tantangan terakhir terkait upaya untuk mengoptimalkan berbagai peluang yang ada dan sekaligus memitigasi risiko yang dapat muncul dari perkembangan teknologi digital yang pesat.

Tahun ini, pemerintah mengangkat tema RKP 'Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan'. Sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 berdasarkan perkembangan indikator terkini dan memperhatikan target yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJM Nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 di targetkan sekitar 4,0 – 4,6 persen dan 2019 ditargetkan berkisar 4,2 - 4,5 persen.
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2018 di targetkan turun menjadi sekitar 11,98 persen dan pada tahun 2019 dibawah 11,38 persen.
3. Tingkat pengangguran pada tahun 2018 sekitar 10,51 persen dan pada tahun 2019 sekitar 9,46 persen.
4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2018 dan 2019 dapat terkendali sekitar 2,8–3,3.

Sasaran pembangunan tersebut diatas merupakan target kinerja pembangunan yang perlu diraih. Melihat pencapaian indikator kinerja acuan tahun 2017 yang mulai membaik, maka tantangan pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019 sedikit lebih optimis untuk dicapai. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan harus dilakukan melalui bauran kebijakan (*policy mix*) antara Nasional dan Pemerintah Aceh maupun bauran kebijakan sektoral dan moneter.

Kebijakan belanja perlu diarahkan untuk memberikan stimulus pembangunan guna mencapai target kinerja. Pemilihan program dan kegiatan yang paling elastis terhadap pencapaian sasaran dan memperhatikan visi-misi Walikota Lhokseumawe yang akan dituangkan dalam RPJM 2018 – 2022 mutlak harus dilakukan. Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah Pembangunan Pemerintahan yang Berintegritas serta Penguatan Kinerja Keuangan yang Akuntabel.

Kondisi permintaan global, rendahnya harga komoditas ekspor serta defisit perdagangan yang besar dan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran mensyaratkan reorientasi pembangunan Kota Lhokseumawe pada 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya;
2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
5. Penataan Reformasi Birokrasi;
6. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kota Lhokseumawe memiliki potensi besar di berbagai bidang, baik itu di sektor perikanan, wisata, dan industri sehingga, apabila dikelola dengan baik, maka akan lebih cepat lagi berkembang. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang mulai beroperasi tentunya akan berdampak ke Kota Lhokseumawe yang akan menjadi daerah yang akan dilirik oleh para investor.

Namun perlu diperhatikan bahwa pihak luar baru mau berinvestasi ke Lhokseumawe dan Aceh umumnya, jika kondisi keamanan benar-benar kondusif dan proses berbagai izin yang dibutuhkan masyarakat/pelaku usaha harus mudah dan bebas pungli.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan atas penjabaran dari tahun Kedua RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022. RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 memiliki tema yaitu: **“MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS SERTA PENGUATAN KINERJA KEUANGAN YANG AKUNTABEL”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 8 prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih Kota Lhokseumawe masabakti 2017-2022 sebagai berikut:

a. Visi:

“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki”.

Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam;
- Sehat, mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
- Cerdas, mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
- Sejahtera, mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

b. Misi

Dalam mencapai visi, maka ditetapkan tujuh misi Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Pertama, Membangun Masyarakat yang Islami, yaitu Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal;

Kedua, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Menurunnya Angka Pengangguran, Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat, Mewujudkan kesejahteraan nelayan;

Ketiga, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Perempuan, Meningkatkan minat baca masyarakat, Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara, Meningkatkan sumber daya masyarakat gampong;

Keempat, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan (Clean And Good Governance) yaitu Meningkatkan pelayanan Publik Masyarakat, Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan, Mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi serta berbasis *e-government*;

Kelima, Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai, yaitu Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar, Meningkatkan sistem transportasi masyarakat yang aman, Meningkatkan kewaspadaan bencana;

Keenam, Mengelola Lingkungan Hidup Sehat, Asri dan Lestari, yaitu Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata ruang;

Ketujuh, Menjaga Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan, yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1		
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan		
Visi : MEWUJUDKAN KOTA LHKSEUMAWE BERSYARIAT,SEHAT,CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Masyarakat yang Islami	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam	• Menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat
2. Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	• Menurunkan Angka Kemiskinan • Meningkatnya Pertumbuhan UMKM • Meningkatnya Iklim Investasi • Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang. Meningkatkan Kualitas Kesehatan	• Meningkatnya Pendidikan dasar yang berkualitas • Meningkatnya Status Tipe Dayah • Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas • Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular • Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian karena Penyakit PD3I
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	• Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan • Meningkatnya pengembangan dan pemamfaatan TIK terhadap informasi publik

Misi	Tujuan	Sasaran
5. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan, serta Sarana dan Prasarana yang memadai	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal	• Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat • Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan • Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal
6. Terwujudnya Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	• Terselenggaranya penataan ruang daerah
7. Terwujudnya Kota Lhokseumawe yang tentram, tertib, damai dan bersatu.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	• Meningkatnya Pemahaman terhadap Syariat Islam

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Nawacita

Sembilan agenda prioritas nasional (NawaCita) sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2 merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019.

Tabel 4.2
NAWACITA

1.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2.	Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan NawaCita dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sector pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sector kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahanrakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawacita (Agenda Pembangunan Nasional – RPJMN 2015-2019).
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrika, kemaritiman, pariwisata, industry dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawacita.
3. Dimensi Pambangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program

pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

- 1. Pengarusutamaan Dan Pembangunan Lintas Bidang;
- 2. Sosial Budaya Dan KehidupanBeragama;
- 3. Pembangunan Ekonomi;
- 4. IlmuPengetahuan Dan Teknologi;
- 5. Pembangunan Politik;
- 6. Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan;
- 7. Hukum Dan Aparatur;
- 8. Pembangunan Wilayah Dan Tata Ruang;
- 9. Penyediaan Sarana Dan Prasarana;
- 10. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh

Dalam rangka mendukung pencapaian NAWACITA maka pada tahun 2019 prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Aceh dititik beratkan pada 8 Prioritas Pembangunan. Berikut tabel prioritas pembangunan Aceh:

Tabel 4.3	
Prioritas Pembangunan Aceh	
1.	Penurunan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran
2.	Peningkatan Aksesibilitas Serta Kualitas Kesehatan
3.	Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis Dan Penguatan Konektifitas
4.	Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Energi
5.	Penguatan Dinul Islam, Peningkatan Kualitas Pendidikan
6.	Peningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Industri Kreatif, Dan Pariwisata
7.	Optimalisasi Sumberdaya Alam Berkelanjutan Dan Penurunan Resiko Bencana
8.	Penataan Reformasi Birokrasi Dan Penguatan Perdamaian

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe

Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe dijabarkan kedalam 7 prioritas pembangunan dengan mengacu pada Prioritas Nasional dan Prioritas Pemerintah Aceh. Berikut matrik sinergitas prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe.

Gambar 4.1
Sinergitas Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019

NASIONAL "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS"	PROVINSI ACEH "PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN KONEKTIFITAS UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS"	KOTA LHOKSEUMAWE "PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS SERTA PENGUATAN KINERJA KEUANGAN YANG AKUNTABEL".
• Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar • Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konekfistas dan Kemaritiman • Peningkatan Nilai tambah ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif • Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air • Stabilitas Kemananan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	• Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran • Peningkatan Aksesibilitas serta Kualitas Kesehatan • Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis dan Penguatan Koneksifitas • Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi • Penguatan Dinul islam, Peningkatan Kualitas Pendidikan • Peningkatan Investasi dan Nilai tambah hasil Pertanian, Industri Kreatif, dan Pariwisata • Optimaslisasi Sumberdaya Alam berkelanjutan dan Penurunan Resiko Bencana • Penataan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Perdamaian.	• Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya • Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata • Peningkatan Kualitas Pendidikan • Peningkatan Pelayanan Kesehatan • Penataan Reformasi Birokrasi • Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup • Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penjelasan lebih lebih lanjut Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

Kinerja

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	Penguatan Dinul Islam, Sosial dan Budaya				
	Sasaran : Terwujudnya masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter Islami				
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	9 Keg	Dinas Sosial
		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8 Keg	
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Terlaksananya Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	1 Keg	
		Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Terlaksananya Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	3 Keg	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana; Psk; Narkoba Dan Penyakit Sosial)	Terlaksananya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana; Psk; Narkoba Dan Penyakit Sosial)	1 Keg	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	6 Keg	
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Terciptanya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	7 Keg	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	17 Keg	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	2 Keg	
		Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	10 Keg	
		Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terlaksannya Pengembangan Keserasian Pemuda	1 Keg	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		'Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningktanya Peran serta Pemuda	2 Keg	
		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terciptanya Upaya Tumbuh Kembang Kewirausahaan Pemuda	1 Keg	
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya Pencegahan Narkoba	2 Keg	
		Program Pengembangan Dan Kebijakan Manajemen Olahraga	Terlaksananya Kebijakan Manajemen Olahraga	2 Keg	
		Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	6 Keg	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Terciptanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	5 Keg	
		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Pelayanan Kehidupan Beragama Islam	5 Keg	Dinas Syariat Islam dan Dayah
		Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'At Islam Dan Peran Ulama	Meningkanya Pelaksanaan Syari'At Islam Dan Peran Ulama	6 Keg	
		Program Peningkatan Sumber Daya Ulama Dan Kualitas Pendidikan Agama	Meningkatnya Sumber Daya Ulama Dan Kualitas Pendidikan Agama	5 Keg	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Agama	Meningkatnya Pengawasan Aliran Sesat	1 Keg	
		Program Peningkatan Sumber Daya Ulama Dan Kualitas Pendidikan Agama	Meningkatnya Sumber Daya Ulama Dan Kualitas Pendidikan Agama	5 Keg	Sekretariat MPU

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Agama	Meningkatnya Pengawasan Aliran Sesat	1 Keg	
		Program Pembina, Pengembangan, Dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Meningkatnya Kapasitas Ulama	2 Keg	
		Program Pembinaan Keagamaan Dan Adat	Terciptanya Peusujuk Adat Tamu Daerah	3 Keg	Sekretariat Baitul Mal
		Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Baitul Mal	Terselenggaranya Kegiatan Dan Pembinaan Baitul Mal		
		Program Pengembangan Nilai Budaya			Sekretariat MAA
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terciptanya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata		
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terciptanya Peningkatan Pemahaman Tentang Adat		
		Program Penguatan Lembaga Adat	Tersedianya Lembaga Adat		
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
2	Pembangunan Ekonomi, Industri Dan Pariwisata				
	Sasaran : Terwujudnya Pemerataan ekonomi Masyarakat, Pertumbuhan Industri, dan daya saing sektor Pariwisata.				
		Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja	4 Keg	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	3 Keg	
		Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	14 Keg	
		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	3 Keg	
		Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Promosi Dan Kerjasama Investasi	2 Keg	
		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Meningkatnya Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	1 Keg	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya jumlah Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1 Keg	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Jumlah pangan		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan			
		Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SumberDaya Laut			
		Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat			
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	1 Keg	
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1 Keg	
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			
		Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5 Keg	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan			
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan	1 Keg	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3 Keg	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1 Keg	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6 Keg	
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			
		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1 Keg	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2 Keg	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1 Keg	
		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya Program Perencanaan Sosisal Dan Budaya	1 Keg	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3 Keg	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
		Program Pengembangan Dagang Dan Industri Kecil Menengah	Terlaksananya Program Perencanaan Sosisal Dan Budaya	6 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri	Meningkatnya Kapasitas Iptek Sistem Industri	1 Keg	
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Teknologi Industri	10 Keg	Disporapar
		Program Pengembangan Dan Pembinaan Industri Kerajinan	Terlaksananya Pengembangan Dan Pembinaan Industri Kerajinan	2 Keg	
		Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terlaksananya Pengembangan Keserasian Pemuda	1 Keg	
		'Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningktanya Peran serta Pemuda	1 Keg	
		Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terciptanya Upaya Tumbuh Kembang Kewirausahaan Pemuda	2 Keg	
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya Pencegahan Narkoba	1 Keg	
		Program Pengembangan Dan Kebijakan Manajemen Olahraga	Terlaksananya Kebijakan Manajemen Olahraga	2 Keg	
		Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga	2 Keg	
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Terciptanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	6 Keg	PPKD
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terciptanya Pengembangan Pariwisata	5 Keg	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terciptanya Lokasi Wisata	10 Keg	
		Program Pengembangan Kemitraan	Terbangunnya Pengembang Keitraan Wisata	3 Keg	
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan				
	Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah.				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Keg	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	7 Keg	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas Sdm Aparatur Perencanaan	2 Keg	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Keg	
		Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Tersedianya Laporan Kinerja Dan Keuangan	3 Keg	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Pembangunan Kota Lhokseumawe	1 Keg	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pembangunan	Tersedianya Data Informasi Pembangunan Pendidikan	1 Keg	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini	7 Keg	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tersedianya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	14 Keg	
		Program Pendidikan Menengah			
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksannnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	5 Keg	
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidik Kota Lhokseumawe	5 Keg	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Perencanaan Dan Pengawasan /Monitoring Dan Evaluasi	3 Keg	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		6 Keg	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		1 Keg	
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		2 Keg	
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan			
		Program Pendidikan, Pembinaan Dan Pengembangan Dayah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Pembinaan Dan Pengembangan Dayah	4 Keg	Dinas Syariat Islam dan Dayah
		Program Perencanaan Dan Pengawasan /Monitoring Dan Evaluasi	Program Perencanaan Dan Pengawasan /Monitoring Dan Evaluasi	3 Keg	Sekretariat MPD
		Program Perencanaan, Pengawasan Dan Peningkatan Mutu Mpd	Program Perencanaan Dan Pengawasan /Monitoring Dan Evaluasi	8 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Jumlah Pelaksanaan 2 Kegiatan Perencanaan, Pengawasan Dan Peningkatan Mutu Mpd	1 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	2 Keg	
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan				
	Sasaran : Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal kepada seluruh lapisan Masyarakat.				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		
		Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Tersedianya Laporan Kinerja Dan Keuangan		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Pembangunan Kota Lhokseumawe		
		Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan Obat Masyarakat	5 Keg	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	9 Keg	
		Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Terpenuhinya Pengawasan Pada Produk Makanan	5 Keg	
		Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Promosi Kesehatan Dan Pember Dayaan Masyarakat	13 Keg	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat	5 Keg	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat	4 Keg	
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Menular	9 Keg	
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular	4 Keg	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2 Keg	
		Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Terpenuhinya Sarana Dan Prasaran Pelayanan Masyarakat Dalam Memenuhi Kesehatan	35 Keg	
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terjalinya Kemitraan Di Bidang Kesehatan	4 Keg	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Tersedianya Data Informasi Pembangunan	1 Keg	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Peduli Lansia	2 Keg	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Terlaksananya Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Kearah Yang Lebih Baik	4 Keg	
		Program Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan	Terlaksananya Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan	9 Keg	
		Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Program Keluarga Berencana	5 Keg	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi	3 Keg	
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Jumlah Pengguna Alat Kontrasepsi	1 Keg	
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terciptanya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	5 Keg	
5	Penataan Reformasi Birokrasi				
	Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bermartabat,baik, bersih dan amanah serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme				
		Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya Pelayanan Satu Pintu kepada Masyarakat	13 Keg	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	22 Keg	Disdukcapil
		Program Pengawasan Dan Penegakkan Peraturan Kependudukan	Terlaksananya Pengawasan Dan Penegakkan Peraturan Kependudukan	1 Keg	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa	11 Keg	DPMG
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya Ekonomi Lembaga Masyarakat Desa	3 Keg	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa	6 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		1 Keg	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Terencananya Pembangunan Ekonomi Kota Lhokseumawe	11 Keg	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Tersedianya Data Informasi Pembangunan	11 Keg	Diskominfo
		Program Pengelolaan Data Dan Informasi	Tersedianya Data/ Informasi Pembangunan	7 Keg	
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Sistem Kearsipan Baku	1 Keg	Dinas Keperpustakaan dan Arsip
		Program Peningkatan Sdm Kearsipan	Meningkatnya Sdm Arsip	1 Keg	
		Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Budaya Baca	7 Keg	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	7 Keg	Sekretariat Daerah
		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Terlaksananya Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4 Keg	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaporan	7 Keg	
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kdh Dan Wkdh	Kelancaran Dalam Pelayanan Kedinasan Kdh/Wkdh	6 Keg	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi	3 Keg	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1 Keg	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penataan Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota	21 Keg	
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru	18 Keg	
		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syari'at Islam)	Terwujudnya Pelayanan Kehidupan Beragama	2 Keg	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekonomi Dan Pembangunan	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan	10 Keg	
		Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh Dan Kesra	Meningkatkan Penerapan Keistimewaan Aceh Dan Kesra	8 Keg	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	2 Keg	
		Program Peningkatan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Umum	Meningkatnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Umum	2 Keg	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
		Program Peringatan Hari-Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar	11 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11 Keg	
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel	5 Keg	Kec. Banda Sakti,
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel	5 Keg	Kec. Maura Dua,
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel	5 Keg	Kec. Blang Mangat,
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel	5 Keg	Kec. Muara Satu
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Terlaksananya Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	27 Keg	Inspektorat

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Asn	3 Keg	
		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya Kebijakan Dan Prosedur Pengawasan	3 Keg	
		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Tersedianya Data/ Informasi / Statistik Daerah	3 Keg	Bappeda
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pembangunan	Tersedianya Informasi Pembangunan Kota Lhokseumawe	1 Keg	
		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data Informasi Pembangunan	3 Keg	
		Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya Data/ Informasi Pembangunan	3 Keg	
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya Pembangunan Daerah	3 Keg	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah Dan Besar	Terlaksananya Program Sanitasi Kota Lhokseumawe	3 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	1 Keg	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah	22 Keg	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2 Keg	
		Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	5 Keg	
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Keg	
		Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan	3 Keg	
		Program Khusus	Terlaksananya Program Khusus Perencanaan	4 Keg	
		Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Meningkatkan Efektifitas Pengeluaran Daerah	2 Keg	BPKD
		Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah			
		Program Peningkatan Penerimaan Dan Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi (Wp/Wr)	Meningkatkan Penerimaan Dan Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi (Wp/Wr)	10 Keg	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	19 Keg	
		Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	2 Keg	
		Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	11 Keg	
		Program Lanjutan			
		Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1 Keg	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Belanja Hibah	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		PPKD

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
		Belanja Tidak Terduga			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Badan Kepegawaian dan Pengembangan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur			
6	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				
	Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana Kota Lhokseumawe sesuai pemanfaatan tata ruang				
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan		4 Keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		1 Keg	
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		1 Keg	
		Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		1 Keg	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		3 Keg	
		Program Pengendalian Banjir		1 Keg	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh		2 Keg	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		1 Keg	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan		1 Keg	
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum		3 Keg	
		Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana Bersumber Dari Doka Tahun 2018		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3 Keg	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10 Keg	
		Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1 Keg	
		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sda Dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sda Dan Lingkungan Hidup	2 Keg	
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	3 Keg	
		Program Peningkatan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Umum	Program Peningkatan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Umum	2 Keg	
		Program Peningkatan Keindahan Dan Keresasian Kota	Program Peningkatan Keindahan Dan Keresasian Kota	1 Keg	
		Program Normalisasi Jaringan Air Limbah	Program Normalisasi Jaringan Air Limbah	1 Keg	
		Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	7 Keg	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Laj	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Laj	2 Keg	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
		Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan			
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			

No	Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan		Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya Informasi Dan Tenaga Terlatih Dalam Penanganan Bencana		BPBD
7	Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Sasaran : Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai amanat MoU Helsinki				
		Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	3 Keg	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Adanya Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan	8 Keg	
		Program Pemeliharaan Kantranbtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Adanya Kantranbtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	1 Keg	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Adanya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3 Keg	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Adanya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	3 Keg	
		Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Adanya Dukungan Kelancaran Pemilu	10 Keg	
		Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Sistem Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	7 Keg	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terwujudnya Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	5 Keg	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Keg	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Tentang Ketertiban Dan Keamanan	1 Keg	
		Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Keg	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022 serta mengacu pada evaluasi program/kegiatan Tahun 2017 maka pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe (SKPK) telah menyusun rencana kerja dan pendanaan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019. Rencana kerja dan pendanaan tersebut di kelompokkan kedalam urusan pemerintahan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 - a. Pendidikan
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Kesehatan
 - Dinas Kesehatan
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - c. Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
 - e. Sosial
 - Dinas Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pangan
 - Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup
 - Dinas Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
 - Dinas Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
 - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
 - Sekretariat Daerah
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman Modal
 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- m. Kepemudaan dan Olah Raga
 - Dinas Pemuda, Olah Raga
- n. Statistik
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Sekretariat Majelis Adat Aceh
- q. Perpustakaan

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

r. Kearsipan

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- Dinas kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan

b. Pariwisata

- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

c. Pertanian

- Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan

d. Kehutanan

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

f. Perdagangan

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

g. Perindustrian

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

d. Transmigrasi

4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

- Dewan Perwakilan Rakyat Kota
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
- Kecamatan Banda Sakti
- Kecamatan Blang Mangat
- Kecamatan Muara Satu
- Kecamatan Muara Dua
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Pengawasan

- Inspektorat
- c. Perencanaan
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Keuangan
 - Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - PPKD
- e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- f. Keistimewaan dan Kekhususan
 - Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
 - Sekretariat MPU
 - Sekretariat Baitul Mal
 - Sekretariat Majelis Adat Aceh
 - Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

Rencana kerja yang dituangkan dalam table berikut ini adalah hasil keiatan yang dihasilkan dari forum Musrenbang Kota Lhokseumawe dimana masing-masing prioritas pembangunan per SKPK dapat dilihat pada tabel 5.1.

TABEL 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2019

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL BELANJA								
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	TOTAL BELANJA LANGSUNG								
1 01 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
	BELANJA				274,864,934,864				313,187,102,046
	Belanja Tidak Langsung				166,508,197,910				183,159,017,701
	Belanja Langsung				108,356,736,954				130,028,084,345
1 01	Urusan Pendidikan				31,093,536,954				37,312,244,345
1 01 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			13,097,347,116				15,716,816,539
1 01 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,664,000			12 Bulan	3,196,800
1 01 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	432,105,955			12 Bulan	518,527,146
1 01 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Periode Tenaga Jasa Administrasi KeuanganSKPD (174 Org x 12 Bln)		2,088 OB	418,959,174			2,088 OB	502,751,009
1 01 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	93,913,503			12 Bulan	112,696,204
1 01 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	75,139,194			12 Bulan	90,167,033
1 01 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000
1 01 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	170,000,000			12 Bulan	204,000,000
1 01 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah OB Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran		1842 Orang	11,854,565,290			1842 Orang	14,225,478,348
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			709,760,000				851,712,000
1 01 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah pengadaan peralatan & perlengkapan kantor		5 unit	30,000,000			5 unit	36,000,000
1 01 01 02 08	Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah Tempat Parkir yg terbangun		1 Halaman	150,000,000			1 Halaman	180,000,000
1 01 01 02 15	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin mobil dinas /jabatan (1 unit x 12 bln)		1 Unit	42,400,000			1 Unit	50,880,000
1 01 01 02 16	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (1 unit x 12 bln)		1 Unit	35,000,000			1 Unit	42,000,000
1 01 01 02 21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (mobiler, komputer dll)	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor		77 Unit	28,860,000			77 Unit	34,632,000
1 01 01 02 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor		100%	211,750,000			100%	254,100,000
1 01 01 02 45	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Terpeliharanya Fasilitas Gedung Kantor		100%	211,750,000			100%	254,100,000
1 01 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perencanaan			191,800,000				230,160,000
1 01 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk PNS dan Non PNS di lingkungan Disdikpora LSM		227 Org	156,800,000			227 Org	188,160,000
1 01 01 03 06	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang disewa		1 Gedung	35,000,000			1 Gedung	42,000,000
1 01 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				70,000,000				84,000,000
1 01 01 05 25	Penetapan Angka Kredit	Tercapainya Angka Kredit		500 Org	70,000,000			500 Org	84,000,000
1 01 01 10	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Laporan kinerja dan keuangan			13,120,000				15,744,000
1 01 01 10 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja yang di Cetak		10 Buku	6,560,000			10 Buku	7,872,000
1 01 01 10 04	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Buku Lakip yang di Cetak		10 Buku	6,560,000			10 Buku	7,872,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 01 08	Program peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Tersedianya data informasi pembangunan Pendidikan			250,000,000				300,000,000
1 01 01 08 03	Penyusunan Perencanaan OTSUS/TDBH Migas Urusan Pendidikan	Terealisasinya Penyusunan Perencanaan OTSUS/TDBH Migas Urusan Pendidikan		12 Dokumen	250,000,000			12 Dokumen	300,000,000
1 01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya data/informasi pembangunan			1,206,600,000				1,447,920,000
1 01 01 15 18	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa		10 Sekolah	600,750,000			10 Sekolah	720,900,000
1 01 01 15 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Rehab Ruang Kelas Sekolah		2 Ruang	211,750,000			2 Ruang	254,100,000
1 01 01 15 68	Peringatan Hari Aksara Internasional	Jumlah Peserta Kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional		1 Keg	67,040,000			1 Keg	80,448,000
1 01 01 15 78	Bantuan Operasioanal Pendidikan PAUD (DAK NON FISIK)	Periode BOP PAUD		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1 01 01 15 82	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD	Periode BOP PAUD		12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	30,000,000
1 01 01 15	Lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	Jumlah Peserta Lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas		1 Keg	52,060,000			1 Keg	62,472,000
1 01 01 15	Pelaksanaan Kegiatan Bunda PAUD			1Keg	50,000,000			1Keg	60,000,000
1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1,780			14,581,689,838				17,498,027,806
1 01 01 16 09	Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah sekolah yang dilakukan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir		15 Sekolah	1,461,075,000			15 Sekolah	1,753,290,000
1 01 01 16 14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Jumlah Sarana air bersih dan Sanitary		5 Sekolah	350,000,000			5 Sekolah	420,000,000
1 01 01 16 15	Pengadaan Buku buku dan alat tulis siswa	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Buku dan Alat Tulis Sekolah		20 Sekolah	150,000,000			20 Sekolah	180,000,000
1 01 01 16 19	Pengadaan Mobiler Sekolah	Jumlah Sekolah yg Mendapatkan Mobiler sekolah		3 Sekolah	300,000,000			3 Sekolah	360,000,000
1 01 01 16 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	Jumlah Sekolah yg terpelihara		2 Sekolah	200,000,000			2 Sekolah	240,000,000
1 01 01 16 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Bangunan Sekolah Yg di rehab		1 Sekolah	75,000,000			1 Sekolah	90,000,000
1 01 01 16 42	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKB)	Jumlah Ruang Sekolah yang di Bangun		3 Ruang	623,500,000			3 Ruang	748,200,000
1 01 01 16 70	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa			4 Kegiatan	204,790,000			4 Kegiatan	245,748,000
1 01 01 16 79	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang di Renovasi		1 Ruang	574,571,995			1 Ruang	689,486,394
1 01 01 16 85	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK)	Jumlah ruang perpustakaan yang di Renovasi		1 Ruang	113,414,399			1 Ruang	136,097,279
1 01 01 16 93	Penyelenggaraan UN dan UAS	Jumlah Panitia Penyelenggaraan UN dan UAS		22 Org	118,268,750			22 Org	141,922,500
1 01 02 16 94	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	Jumlah ruang kelas sekolah yang di Renovasi		1 ruang	2,176,459,182			1 ruang	2,611,751,018
1 01 01 16 96	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)	Tersedianya Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)		1 Ruang	1,600,000,000			1 Ruang	1,920,000,000
1 01 01 16 97	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Jumlah Hari Penerima Peserta Didik Baru		3 Hari	4,500,000			3 Hari	5,400,000
1 01 01 16 ##	Pembangunan Pagar dan Sarana Pendukung	Jumlah Pagar sekolah yg dibangun		5 sekolah	887,950,000			5 sekolah	1,065,540,000
1 01 01 16 ##	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Sekolah	Jumlah Pagar Sekolah yg terpelihara		3 Sekolah	370,362,500			3 Sekolah	444,435,000
1 01 01 16 ##	Pembangunan RKB (DAK)	Jumlah Ruang Sekolah yang di Bangun		1 Ruang	2,222,000,000			1 Ruang	2,666,400,000
1 01 01 16 ##	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	Jumlah Peserta Olimpiade Olahraga Nasional		1 Keg	138,170,000			1 Keg	165,804,000
1 01 01 16	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK)	Jumlah Sarana Toilet (Jamban) Beserta Sanitary yang Terbangun		22 Sekolah	2,518,610,512			22 Sekolah	3,022,332,614
1 01 01 16	Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP	Jumlah Peserta Olimpiade Siswa Nasional		1 Keg	85,897,500			1 Keg	103,077,000
1 01 01 16	Liga Sepak Bola (GALA) SMP	Tersedianya Wakil Daerah Untuk Gala SMP Tingkat SMP		1 Keg	127,695,000			1 Keg	153,234,000
1 01 01 16	Penyelenggaraan Try Out dan Remedial Teaching			1 Keg	279,425,000			1 Keg	335,310,000
1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga pendidik				888,220,000				1,065,864,000
1 01 01 20 04	Pembinaan Kelompok Karya Guru (KKG)	Jumlah peserta Pembinaan Kelompok Karya Guru		1 Keg	100,000,000			1 Keg	120,000,000
1 01 01 20 14	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah Musyawarah Guru Mapel		1 Keg	100,000,000			1 Keg	120,000,000
1 01 01 20 19	Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah	Jumlah Pelatihan Guru dan Kepsek		1 Keg	110,000,000			1 Keg	132,000,000
1 01 01 20	Pelatihan Guru Seni Tari Tingkat SD dan SMP	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Seni Tari		1 Keg	144,600,000			1 Keg	173,520,000
1 01 01 20	Pelatihan Guru Mendongeng Tingkat Tk dan PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan Guru Mendongeng		1 Keg	149,945,000			1 Keg	179,934,000
1 01 01 20	Pelatihan Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran di Kelas	Jumlah Peserta Pelatihan Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran di Kelas		1 Keg	152,445,000			1 Keg	182,934,000
1 01 01 20	Traning Of Trainer (TOT) Penulisan Karya Ilmiah Untuk Guru Tingkat SD dan SMP	Jumlah Peserta Traning Of Trainer (TOT) Penulisan Karya Ilmiah Untuk Guru Tingkat SD dan SMP		1 Keg	131,230,000			1 Keg	157,476,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				85,000,000				102,000,000
1 01 01 22 32	Tim Pengelola Bos Kota Lhokseumawe (Dikdas)	Jumlah Tim Pengelola Bos Kota Lhokseumawe		1 Keg	45,000,000			1 Keg	54,000,000
1 01 01 22 33	Tim Manajemen Pengelola DAK Kota Lhokseumawe (Dikdas)	Jumlah Tim Pengelola DAK Kota Lhokseumawe		1 Keg	20,000,000			1 Keg	24,000,000
1 01 01 22 42	Operasional Tim Penyusun RKA (Program)	Jumlah Peserta Tim Penyusun RKA Dinas		1 Keg	20,000,000			1 Keg	24,000,000
2 16	Urusan Kebudayaan				77,263,200,000				92,715,840,000
2 16 01 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				393,200,000				471,840,000
2 16 01 16 05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Periode Pengembangan Pelestarian dan peninggalan Sejarah Purbakala		1 Keg	73,200,000			1 Keg	87,840,000
2 16 01 16 14	Festifal Seni dan Pagelaran Budaya	Terselenggaranya Peringatan Hari Kesenian Daerah		1 Paket	95,000,000			1 Paket	114,000,000
2 16 01 16 20	Registrasi dan Pendokumentasi Objek Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Jumlah Peserta Pendataan Objek Peninggalan Sejarah Purbakala		1 Paket	45,000,000			1 Paket	54,000,000
2 16 01 16 30	Festifal dan Lomba Karya Seni	Terselenggaranya Festival Seni Piala Bergilir Walikota Lhokseumawe Ke-3		1 Paket	180,000,000			1 Paket	216,000,000
2 16 01 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				75,160,000,000				90,192,000,000
2 16 01 17 13	Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	Jumlah Peserta Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara		1 Keg	75,160,000,000			1 Keg	90,192,000,000
2 17 01 18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				1,710,000,000				2,052,000,000
2 17 01 18 06	Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe	Periode Operasional Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe		1 Keg	650,000,000			1 Keg	780,000,000
2 17 01 18 07	Dewan Kesenian Aceh	Jumlah Panitia Kesenian Aceh		1 Keg	500,000,000			1 Keg	600,000,000
2 17 01 18 08	Sanggar Pocut Meurah Intan Kota Lhokseumawe	Periode Operasional Sanggar Pocut Meurah Intan Kota Lhokseumawe		1 Keg	150,000,000			1 Keg	180,000,000
2 17 01 18	Belanja Operasional Gua Jepang	Periode Operasional Pengelolaan Gua Jepang Kota Lhokseumawe		1 Keg	80,000,000			1 Keg	96,000,000
2 17 01 18	Belanja Operasional Gedung Museum Kota Lhokseumawe	Periode Operasional Gedung Museum Kota Lhokseumawe		1 Keg	80,000,000			1 Keg	96,000,000
2 17 01 18	Pendataan Pelaku Sejarah Kota Lhokseumawe	Terdatanya Pelaku Sejarah Kota Lhokseumawe			75,000,000				90,000,000
2 17 01 18	Seminar/Pendataan Sejarah Seni Rapai Uroeh	Terdatanya Sejarah Seni Rapai Uroeh			100,000,000				120,000,000
2 17 01 18	Pelatihan Pelaku Tradisi Budaya Aceh	Terlatihnya Pelaku Tradisi Budaya Aceh			75,000,000				90,000,000
1 02 01	Dinas Kesehatan								
	BELANJA				186,515,507,853				217,083,855,859
	Belanja Tidak Langsung				67,347,535,649				74,082,289,214
	BELANJA LANGSUNG				119,167,972,204				143,001,566,645
1 02	Kesehatan				119,167,972,204				143,001,566,645
1. 02 01. 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		14 Kegiatan	6,519,581,227			14 Kegiatan	7,823,497,472
1. 02. 01. 01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,650,000			12 Bulan	1,980,000
1. 02. 01. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	489,170,000			12 Bulan	587,004,000
1. 02. 01. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		636 OB	319,200,000			636 OB	383,040,000
1. 02. 01. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya laundry untuk puskesmas rawat inap		12 Bulan	12,000,000			12 Bulan	14,400,000
1. 02. 01. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	27,500,000			12 Bulan	33,000,000
1. 02. 01. 01. 11	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen dan arsip		12 Bulan	22,000,000			12 Bulan	26,400,000
1. 02. 01. 01. 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	200,388,000			12 Bulan	240,465,600
1. 02. 01. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan	surat kabar untuk harian		365 Eks	10,032,000			365 Eks	12,038,400
1. 02. 01. 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah Makanan dan minum keperluan kantor		12 Bulan	27,500,000			12 Bulan	33,000,000
1. 02. 01. 01. 18	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	Periode Tersedianya Biaya perjalanan dinas dalam dan keluar daerah		12 Bulan	66,000,000			12 Bulan	79,200,000
1. 02. 01. 01. 19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Jasa tenaga kerja tidak tetap		8808 Orang	4,226,779,682			8808 Orang	5,072,135,618
1. 02. 01. 01. 36	Penyediaan jasa pengelola manajemen (DAK NON FISIK)	Terdeteksi Cakupan Kegiatan DAK NON FISIK		12 Bulan	325,690,000			12 Bulan	390,828,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 01. 38	Penyediaan jasa pengelola manajemen Kegiatan Non APBK	Terlaksananya kegiatan Non APBK		12 Bulan	280,000,000			12 Bulan	336,000,000
1. 02. 01. 01.	Kegiatan Penyediaan jasa pengelola manajemen (DAK Non Fisik)	Tersedianya Jasa Pengelola Manajemen dan Operasional Untuk Kegiatan DAK NON Fisik		12 Bulan	511,671,545			12 Bulan	614,005,854
1. 02 01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasaran yang baik		5 Kegiatan	868,921,900			5 Kegiatan	1,042,706,280
1. 02. 01. 02. 06	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (mobiler, komputer dll)	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	77,000,000			12 Bulan	92,400,000
1. 02. 01. 02. 14	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Gedung kantor		12 Bulan	257,871,900			12 Bulan	309,446,280
1. 02. 01. 02. 15	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan		12 Bulan	41,470,000			12 Bulan	49,764,000
1. 02. 01. 02. 16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	487,080,000			12 Bulan	584,496,000
1. 02. 01. 02. 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor(Mobiler,Komputer dll)	Periode Pemeliharaan Peralatan Kantor		12 Bulan	5,500,000			12 Bulan	6,600,000
1. 02 01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningktnya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		1 Kegiatan	7,145,000			1 Kegiatan	8,574,000
1. 02. 01. 06. 11	Penyusunan standar pelayanan minimum (SPM)	Jumlah Buku SPM		15 Buku	7,145,000			15 Buku	8,574,000
1. 02 01. 10	Program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja	Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe		2 Kegiatan	19,579,000			2 Kegiatan	23,494,800
1. 02. 01. 10 02	Penyusunan Rencana kerja (Renja)Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renjakerja SKPD		15 Buku	7,579,000			15 Buku	9,094,800
1. 02. 01. 10 07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan		10 Buku	12,000,000			10 Buku	14,400,000
1. 02 01. 11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan		1 Kegiatan	25,000,000			1 Kegiatan	30,000,000
1. 02. 01. 11. 01	Kegiatan pameran pembangunan kota lhokseumawe	Periode pameran pembangunan kota Lhokseumawe		6 Hari	25,000,000			6 Hari	30,000,000
1. 02 01. 15	Program obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan kesehatan obat masyarakat		13 Kegiatan	4,181,361,875			13 Kegiatan	5,017,634,250
1. 02. 01. 15 07	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Periode Tersedianya Obat-obatan dan pembekalan kesehatan		1 Kali	3,023,250,000			1 Kali	3,627,900,000
1. 02. 01. 15 09	Fasilitas Tim Terpadu Perencanaan Obat dan perbekalan kefarmasian (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		30 Orang	7,500,000			30 Orang	9,000,000
1. 02. 01. 15 10	Penyusunan kebutuhan bahan kimia (DBH-PR)	Jumlah Laporan Kebutuhan Bahan Kimia		30 Buku	3,350,000			30 Buku	4,020,000
1. 02. 01. 15 11	Pengadaan Alat Pengolah Data Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK)	Tersedianya Sarana Farmasi yang memadai		30 Buku	80,561,875			30 Buku	96,674,250
1. 02. 01. 15 13	Pelatihan Petugas Pengelola Obat Puskesmas dan Jaringan nya (DBH-PR)	Terlatihnya pengelola obat di Puskesmas dan Jaringan nya		55 Orang	50,000,000			55 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 15 14	Penanggulangan Obat Rusak dan Expired Date (DBH-PR)	Terlaksana nya proses pemusnahan obat rusak dan expired date		1 Paket	120,000,000			1 Paket	144,000,000
1. 02. 01. 15 17	Pemeliharaan, Kalibrasi dan Uji Fungsi Kelayakan Operasional Alkes (DBH-PR)	Tersedianya alkes yang layak dan akurat		1 Paket	105,000,000			1 Paket	126,000,000
1. 02. 01. 15	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pendistribusian dan e Logistik Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke Puskesmas Tepat Waktu		1 Paket	210,000,000			1 Paket	252,000,000
1. 02. 01. 15	Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kesehatan		1 Paket	334,700,000			1 Paket	401,640,000
1. 02. 01. 15	Pemeliharaan Sarana Instalasi Farmasi (DBH-PR)	Tercapainya Pengolahan Data Yang Baik		1 Paket	10,000,000			1 Paket	12,000,000
1. 02. 01. 15	Investarisasi Alkes di Semua Unit Pelayanan	Terinventaris Data Alkes Yang Ada di Unit Pelayanan		1 Paket	17,000,000			1 Paket	20,400,000
1. 02. 01. 15	Pengadaan Alkes Sesuai Kebutuhan di Semua Unit Pelayanan (DBH-PR)	Tersedianya Alkes yang Sesuai Kebutuhan di Unit Pelayanan		1 Paket	150,000,000			1 Paket	180,000,000
1. 02. 01. 15	Penyuluhan Penggunaan Alkes Sesuai SOP (Standar Operating Prosedure) (DBH-PR)	Tersedianya SOP Untuk Penggunaan Alkes		1 Paket	70,000,000			1 Paket	84,000,000
1. 02 01. 16	Program upaya kesehatan masyarakat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat		26 Kegiatan	27,738,169,790			26 Kegiatan	33,285,803,748
1. 02. 01. 16. 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama		1 Paket	14,015,941,412			1 Paket	16,819,129,694
1. 02. 01. 16. 02	Pemulihan dan Pemeliharaan Kesehatan (Jampersal) (DAK Non Fisik)	Upaya peningkatan kesehatan Masyarakat		1 Kali	1,573,361,540			1 Kali	1,888,033,848

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 16. 11	Peningkatan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan pengamanan dan pelangulangan rencana masalah kesehatan		4 Posko	148,380,000			4 Posko	178,056,000
1. 02. 01. 16. 20	Pelayanan kesehatan remaja usia reproduktif, lansia dan kesling (DAK NON FISIK)	Terdeteksi Kesehatan Remaja dan Usia Reproduksi, Lansia dan Kesling		1 Paket	248,060,000			1 Paket	297,672,000
1. 02. 01. 16. 29	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana		2 Paket	2,255,875,000			2 Paket	2,707,050,000
1. 02. 01. 16. 33	Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	Meningkatnya Standar Puskesmas		2 PKM	529,485,000			2 PKM	635,382,000
1. 02. 01. 16. 34	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang penyakit tidak Menular kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat		100 Orang	305,200,000			100 Orang	366,240,000
1. 02. 01. 16. 35	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK Non Fisik)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada masyarakat		12 Bulan	533,880,050			12 Bulan	640,656,060
1. 02. 01. 16. 36	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Remaja) (OTSUS)	Jumlah Peserta Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Remaja)		200 Orang	721,350,000			200 Orang	865,620,000
1. 02. 01. 16. 37	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (DAK Non Fisik)	Memperkuat Pelaksanaan Promotif dan Preventif Secara Efisien Dengan Memaksimalkan Sumber Pembiayaan Puskesmas			4,351,544,488			0	5,221,853,386
1. 02. 01. 16. 39	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Remaja, Usia Produktif, Lansia dan Kesling (DAK Non Fisik)	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Usia Produktif, Lansia dan Kesling		1 Paket	503,874,800			1 Paket	604,649,760
1. 02. 01. 16. 40	Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Terakreditasinya Puskesmas di Kota Lhokseumawe		1 Paket	529,485,000			1 Paket	635,382,000
1. 02. 01. 16. 41	Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DBH-PR)	Penanggulangan Krisis Kesehatan		200 Orang	160,980,000			200 Orang	193,176,000
1. 02. 01. 16. 42	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional (DBH-PR)	Peningkatan Kesehatan Tradisional & TOGA		40 Orang	30,000,000			40 Orang	36,000,000
1. 02. 01. 16. 43	Perlombaan Tenaga Kesehatan Teladan (DBH-PR)	Terlaksananya Perlombaan Tenaga Kesehatan Teladan		50 Orang	67,087,500			50 Orang	80,505,000
1. 02. 01. 16. 44	Pelatihan Jabatan Fungsional (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional		300 Orang	612,085,000			300 Orang	734,502,000
1. 02. 01. 16. 45	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS) (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)		200 Orang	340,000,000			200 Orang	408,000,000
1. 02. 01. 16. 46	Pelatihan Manajemen Puskesmas (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas		150 Orang	168,000,000			150 Orang	201,600,000
1. 02. 01. 16. 47	Pembinaan Motivasi dan Mental SDM (DBH-PR)	Pembinaan Motivasi dan Mental SDM		68 Orang	70,000,000			68 Orang	84,000,000
1. 02. 01. 16. 48	Pelatihan Teknis Penyuluhan dan Pendampingan Kesehatan Masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Penyuluhan dan Pendampingan Kesehatan Masyarakat		30 Orang	40,000,000			30 Orang	48,000,000
1. 02. 01. 16. 49	Pelatihan Elektrokardiogram (EKG) Tenaga Medis (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan Elektrokardiogram (EKG) Tenaga Medis		30 Orang	50,000,000			30 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 16. 50	Terlaksananya Manajemen Pelayanan Medik di Puskesmas (DBH-PR)	Terlaksananya Manajemen Pelayanan Medik di Puskesmas		31 Orang	45,000,000			31 Orang	54,000,000
1. 02. 01. 16. 51	Pelatihan dan Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) dan Rasio Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Terlaksananya Pelatihan dan Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) dan Rasio Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes		45 Orang	48,580,000			45 Orang	58,296,000
1. 02. 01. 16. 52	Kerjasama Dengan Organisasi Profesi Kesehatan Dalam Upaya Sinergisitas Peningkatan Kapasitas SDM di Wilayah Kota Lhokseumawe(SBH-PR)	Terjalinnnya Kerjasama Dengan Organisasi Profesi Kesehatan Dalam Upaya Sinergisitas Peningkatan Kapasitas SDM di Wilayah Kota Lhokseumawe		30 Orang	20,000,000			30 Orang	24,000,000
1. 02. 01. 16. ##	Pertemuan Lintas Program Pengembangan Kota Sehat (DBH-PR)	Terjalinnnya Penguatan Program Kota Sehat		80 Orang	250,000,000			80 Orang	300,000,000
1. 02. 01. 16.	Pemantauan dan Pengawasan Rumah Sakit Kota Lhokseumawe(DBH-PR)	Terlaksananya Pengawasan Rumah Sakit		8 Rumah Sakit	120,000,000			8 Rumah Sakit	144,000,000
1. 02 01. 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terpenuhinya pengawasan pada produk makanan		10 Kegiatan	496,246,000			10 Kegiatan	595,495,200
1. 02. 01. 17. 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.		5 Laporan	2,150,000			5 Laporan	2,580,000
1. 02. 01. 17. 06	Pengawasan Makanan minuman Kadarluarsa	Jumlah Pengawasan Makanan Minuman Expire		6 Kali	5,198,000			6 Kali	6,237,600
1. 02. 01. 17. 07	Pengawasan P-IRT dan depot air minum	Frekuensi Terlaksananya Pengawasan P-IRT dan Depot Air Minum		10 Kali	2,098,000			10 Kali	2,517,600
1. 02. 01. 17. 10	Pengambilan sampel dan pemeriksaan makanan dan minuman	Jumlah Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan Makanan Minuman		1 Kali	22,000,000			1 Kali	26,400,000
1. 02. 01. 17. 14	Pelatihan Peningkatan Mutu Pangan Untuk Industri rumah Tangga	Jumlah Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan		30 Orang	28,100,000			30 Orang	33,720,000
1. 02. 01. 17. 15	Pengawasan Makanan dan Minuman Rusak dan Kadaluarsa (DBH-PR)	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Makanan dan Minuman Kadaluarsa		6 Kali	5,700,000			6 Kali	6,840,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 17. 16	Pengawasan Kosmetik (DBH-PR)	Terlaksananya Pengawasan Kosmetik		6 Kali	4,000,000			6 Kali	4,800,000
1. 02. 01. 17. 17	Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian (DBH-PR)	Terlaksananya Pengawasan PBF, Apotek, Toko Obat, Produk Obat Tradisional		1 Paket	12,000,000			1 Paket	14,400,000
1. 02. 01. 17. 18	Pelatihan SIPNAP Untuk Apoteker Penanggung Jawab Sarana Distribusi Kefarmasian (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan SIPNAP Untuk Apoteker Penanggung Jawab Apotek, Klinik, PBF dan Rumah Sakit		1 Kali	40,000,000			1 Kali	48,000,000
1. 02. 01. 17. 19	Gerakan Masyarakat Sadar Obat (DBH-PR)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat		40 Desa	375,000,000			40 Desa	450,000,000
1. 02 01. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya promosi kesehatan dan pember dayaan masyarakat		53 Kegiatan	5,530,413,600			53 Kegiatan	6,636,496,320
1. 02. 01. 19. 13	Pembinaan Kader Desa Siaga	Meningkatnya Pengetahuan Kader tentang Kesehatan		68 Kader	73,000,000			68 Kader	87,600,000
1. 02. 01. 19. 20	Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah Peserta Hari Kesehatan Nasional (HKN)		210 Orang	38,825,000			210 Orang	46,590,000
1. 02. 01. 19. 39	Sosialisasi PHBS rumah tangga pada kader kesehatan (DBH-PR)	Jumlah Kader Kesehatan yang Mengikuti Sosialisasi PHBS RT		60 Orang	17,870,600			60 Orang	21,444,720
1. 02. 01. 19. 44	Pelatihan konselor sebaya dalam peningkatan kesehatan reproduksi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Pelatihan Konselor Sebaya 3 Angkatan Selama 3 Hari		90 Orang	65,020,000			90 Orang	78,024,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Pengetahuan Tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di institusi pendidikan tingkat Sekolah Dasar	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		100 Orang	152,810,000			100 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 19. ?	Peningkatan Pengetahuan Tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di institusi pendidikan tingkat Menengah Pertama	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		100 Orang	152,810,000			100 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 19. ?	Peningkatan Pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di institusi pendidikan tingkat menengah atas (DBH-PR)	Jumlah Pelajar SMA yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		100 Orang	152,810,000			100 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 19. 49	Pengadaan Media Promosi Kesehatan (DBH-PR)	Meningkatnya Penyebaran Informasi Tentang kesehatan		117 Lbr	31,750,000			117 Lbr	38,100,000
1. 02. 01. 19.	Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pekerja	Tersedianya Pos Usaha Kesehatan Pekerja Informal		3 Pos UKK	103,278,000			3 Pos UKK	123,933,600
1. 02. 01. 19.	Pendataan PHBS Rumah Tangga	Tersedianya data PHBS Rumah tangga		10 Desa	68,030,000			10 Desa	81,636,000
1. 02. 01. 19.	Penyebar luasan Informasi Kesehatan keliling rutin Dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan		4 Kecamatan	20,050,000			4 Kecamatan	24,060,000
1. 02. 01. 19. 50	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat menuju Desa Sehat (OTSUS)	Jumlah Peserta Penyuluhan Kesehatan Masyarakat menuju Desa Sehat		2720 Orang	692,760,000			2720 Orang	831,312,000
1. 02. 01. 19. 51	Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Instusi Pendidikan Tingkat Gampong di Kecamatan Banda Sakti (DBH-PR)	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		600 Orang	190,000,000			600 Orang	228,000,000
1. 02. 01. 19. 52	Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Instusi Pendidikan Tingkat Gampong di Kecamatan Muara Dua (DBH-PR)	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		4 Kali	190,000,000			4 Kali	228,000,000
1. 02. 01. 19. 53	Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Instusi Pendidikan Tingkat Gampong di Kecamatan Muara Satu (DBH-PR)	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		4 Kali	190,000,000			4 Kali	228,000,000
1. 02. 01. 19. 54	Peningkatan Pengetahuan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Instusi Pendidikan Tingkat Gampong di Kecamatan Blang Mangat (DBH-PR)	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba		4 Kali	190,000,000			4 Kali	228,000,000
1. 02. 01. 19. 55	Pengadaan dan Pemasangan Vidiotron Promosi Kesehatan Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Vidiotron Promosi Kesehatan Kota Lhokseumawe		1 Paket	501,400,000			1 Paket	601,680,000
1. 02. 01. 19.	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisa, Serta Penyajian Data Keluarga Sehat (DBH-PR)	Diketahuinya Data Keluarga Sehat		200 Org/ 4 Angkatan	100,000,000			200 Org/ 4 Angkatan	120,000,000
1. 02. 01. 19.	Pemetaan dan Rekapitulasi Data Potensi Sumber Daya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dalam Pengembangan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (DBH-PR)	Diketahuinya Data Potensial Sumber Daya Masyarakat		60%	60,000,000			60%	72,000,000
1. 02. 01. 19.	Analisis Dan Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (DBH-PR)	Terencananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		60%	40,000,000			60%	48,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 19.	Seminar Kajian Analisa Situasi Data Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Keluarga Sehat (DBH-PR)	Diketahui Permasalahan Kesehatan		2 Kali Keg	80,000,000			2 Kali Keg	96,000,000
1. 02. 01. 19.	Advokasi Lintas Sektor Untuk Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germes) (DBH-PR)	Terlaksananya Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germes)		2 Kali Keg	80,000,000			2 Kali Keg	96,000,000
1. 02. 01. 19.	Kampanye Kesehatan Masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya Kampanye Kesehatan Masyarakat		2 Kali Keg	87,000,000			2 Kali Keg	104,400,000
1. 02. 01. 19.	Pengembangan dan Pengadaan Material Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya Pengadaan Material KIE		70%	500,000,000			70%	600,000,000
1. 02. 01. 19.	Diseminasi di Tingkat Kecamatan Tentang Berbagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kepada Stakeholder Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa (DBH-PR)	Terlaksananya Diseminasi di Tingkat Kecamatan		1 Kali Keg	35,000,000			1 Kali Keg	42,000,000
1. 02. 01. 19.	Pertemuan/Forum Berkala Dalam Peningkatan Koordinasi Dalam Pembinaan Berbagai Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)(DBH-PR)	Terlaksananya Forum Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		1 Kali Keg	38,000,000			1 Kali Keg	45,600,000
1. 02. 01. 19.	Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Bidang Kesehatan (DBH-PR)	Terlaksananya SMD dan MMD		25 Desa	35,000,000			25 Desa	42,000,000
1. 02. 01. 19.	Pendampingan Keluarga Menuju Keluarga Sehat (KS) (DBH-PR)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Sehat		34 Desa	75,000,000			34 Desa	90,000,000
1. 02. 01. 19.	Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		1 Kali Keg	30,000,000			1 Kali Keg	36,000,000
1. 02. 01. 19.	Permainan Toga dan Toma (DBH-PR)	Terbinanya Toga dan Toma		25 Desa	60,000,000			25 Desa	72,000,000
1. 02. 01. 19.	Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas (DBH-PR)	Terselenggaranya Pelatihan Petugas Promkes Puskesmas		6 Puskesmas	55,000,000			6 Puskesmas	66,000,000
1. 02. 01. 19.	Peringkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Melalui Pelatihan Teknis Pengembangan Media Promosi Kesehatan (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Teknis Pengembangan Media Tenaga Promkes		1 Kali Keg	55,000,000			1 Kali Keg	66,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Melalui Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Promkes		1 Kali Keg	55,000,000			1 Kali Keg	66,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Melalui Pelatihan Kemitraan dan CSR (DBH-PR)	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Melalui Kemitraan		1 Kali Keg	55,000,000			1 Kali Keg	66,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Melalui Pelatihan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit(DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Promkes Rumah Sakit		1 Kali Keg	55,000,000			1 Kali Keg	66,000,000
1. 02. 01. 19.	Pelatihan/Orientasi Keluarga Sehat (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Keluarga Sehat		2 Kali Keg	115,000,000			2 Kali Keg	138,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		1 Kali Keg	40,000,000			1 Kali Keg	48,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Bagi Bidan/Perawat Poskesdes (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Bidan/Perawat		2 Kali Keg	80,000,000			2 Kali Keg	96,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat(DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Kader		2 Kali Keg	80,000,000			2 Kali Keg	96,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa		1 Kali Keg	45,000,000			1 Kali Keg	54,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kapasitas Toko Masyarakat (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Toko Masyarakat		1 Kali Keg	45,000,000			1 Kali Keg	54,000,000
1. 02. 01. 19.	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Petugas Promosi Kesehatan (DBH-PR)	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Promkes		100%	120,000,000			100%	144,000,000
1. 02. 01. 19.	Membentuk Forum Komunikasi Saka Bakti Husada (DBH-PR)	Terbentuknya Forum Saka Bakti Husada		1 Forum	45,000,000			1 Forum	54,000,000
1. 02. 01. 19.	Fasilitas Pengabdian Masyarakat Melalui Saka bakti Husada (DBH-PR)	Terselenggaranya Pengabdian Masyarakat		60%	30,000,000			60%	36,000,000
1. 02. 01. 19.	Peningkatan Kelembagaan Saka Bakti Husada (DBH-PR)	Meningkatnya Kelembagaan Saka Bakti Husada		60%	30,000,000			60%	36,000,000
1. 02. 01. 19.	Orentasi Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada (DBH-PR)	Terlaksananya Orientasi Pamong dan Instruktur		1 Kali Keg	20,000,000			1 Kali Keg	24,000,000
1. 02. 01. 19.	Pengembangan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Saka Bakti Husada (DBH-PR)	Perkembangnya Media KIE Saka Bakti Husada		60%	150,000,000			60%	180,000,000
1. 02. 01. 19.	Kelengkapan Sekretariat Saka Bakti Husada (DBH-PR)	Terbentuknya Sekretariat Saka Bakti Husada		60%	25,000,000			60%	30,000,000
1. 02. 01. 19.	Fasilitas Pengabdian Masyarakat Melalui Ormas dan Kelompok Potensial (DBH-PR)	Terwujudnya Pengabdian Masyarakat		60%	30,000,000			60%	36,000,000
1. 02. 01. 19.	Penguatan Forum Peran Serta Ormas dan Kelompok Potensial (DBH-PR)	Terselenggaranya Penguatan Forum Ormas dan Keluarga Potensial		1 Kali Keg	40,000,000			1 Kali Keg	48,000,000
1. 02. 01. 19.	Orentasi Tokoh Masyarakat dan Pemimpin Kelompok Potensial (DBH-PR)	Terlaksananya Orientasi Tama dan Keluarga Potensial		25 Desa	40,000,000			60%	48,000,000
1. 02. 01. 19.	Pengembangan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Organisasi Masyarakat (Ormas) (DBH-PR)	Pengembangan Media KIE		60%	150,000,000			60%	180,000,000
1. 02. 01. 19.	Pelatihan Kader Posyandu	Meningkatnya Pengetahuan Kader		75%	120,000,000			75%	144,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02 01. 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat		9 Kegiatan	4,016,091,750			9 Kegiatan	4,819,310,100
1. 02. 01. 20. 02	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin		100 Posyandu	1,570,861,750			100 Posyandu	1,885,034,100
1. 02. 01. 20. 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP);Anemia gizi besi; gangguan akibat kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Kasus Status Gizi Balita		20 Kasus	190,305,000			25 Kasus	228,366,000
1. 02. 01. 20. 08	Penagulangan Ibu hamil Kekurangan Energi (KEK) dan Anemia	Jumlah Tertanggulangi Kasus KEK dan Anemia		20 Kasus	28,455,000			20 Kasus	34,146,000
1. 02. 01. 20. 18	Pengadaan MP-ASI Anak Usia 6 s/d 24 Bulan dan PMT Ibu Menyusui Keluarga Miskin dalam wilayah Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Peserta Pengadaan MP-ASI Anak Usia 6 s/d 24 Bulan dan PMT Ibu Menyusui Keluarga Miskin dalam wilayah Kota Lhokseumawe		591 Orang	931,320,000			591 Orang	1,117,584,000
1. 02. 01. 20. 19	Pemberian Makanan Tambahan (BMT) Posyandu (DBH-PR)	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan		150 Orang	198,000,000			150 Orang	237,600,000
1. 02. 01. 20. 20	Pemberian Makanan Tambahan (BMT) Penderita TB (DBH-PR)	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan		130 Orang	199,000,000			130 Orang	238,800,000
1. 02. 01. 20. 21	Pemberian Makanan Tambahan (BMT) Penderita Gizi Buruk (DBH-PR)	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan		150 Orang	198,000,000			150 Orang	237,600,000
1. 02. 01. 20. 22	Pemberian Makanan Tambahan (BMT) Bumil (DBH-PR)	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan		160 Orang	198,000,000			160 Orang	237,600,000
1. 02. 01. 20. 23	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapai Keluarga Sadar Gizi (OTSUS)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapai Keluarga Sadar Gizi		568 Orang	502,150,000			568 Orang	602,580,000
1. 02 01. 21	Program pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya Pengembangan Lingkungan sehat		60 Kegiatan	5,335,131,491			60 Kegiatan	6,402,157,789
1. 02. 01. 21 01	Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat	Tertanganinya Limbah Medis		12 Bulan	24,000,000			12 Bulan	28,800,000
1. 02. 01. 21 11	Penataan sanitasi kesehatan lingkungan	Jumlah Petugas Penataan Sanitasi Kesehatan Lingkungan		10 Petugas	24,088,841			10 Petugas	28,906,609
1. 02. 01. 21 15	Pengawasan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Tenaga Pengawasan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4 Orang	10,862,650			4 Orang	13,035,180
1. 02. 01. 21	Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe		351 Orang	585,180,000			351 Orang	702,216,000
1. 02. 01. 21	Pemicuan STBM (DBH-PR)	Perubahan Prilaku Dalam Masalah Kesehatan		12 Orang	108,000,000			12 Orang	129,600,000
1. 02. 01. 21	Pemeriksaan Sarana Air Minum (DBH-PR)	Persentase Sarana Air Minum Yang memenuhi Syarat		1 Paket	20,000,000			1 Paket	24,000,000
1. 02. 01. 21	Pelatihan dan Bimtek SDM (DBH-PR)	Tersedia Tenaga Yang Terlatih		30 Orang	50,000,000			30 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 21	Pembinaan Institusi (DBH-PR)	Jumlah Institusi yang di Bina		7 Intansi	50,000,000			7 Intansi	60,000,000
1. 02. 01. 21	Sosialisasi Lintas Sektor (DBH-PR)	Jejaring Kemitraan		1 Kali	50,000,000			1 Kali	60,000,000
1. 02. 01. 21	Pembinaan Rumah Sehat (DBH-PR)	Cakupan Rumah Sehat		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000
1. 02. 01. 21	Peningkatan Kapasitas Tenaga (PNS dan Non PNS) (DBH-PR)	Meningkatnya Kapasitas Tenaga (Kesehatan dan Non Kesehatan)		40 Orang	50,000,000			40 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan Pelaporan Limbah Udara dan Radiasi (DBH-PR)	Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Pelaporan		4 Kali	30,000,000			4 Kali	36,000,000
1. 02. 01. 21	Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Sehat (DBH-PR)	Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor		2 Kali	50,000,000			2 Kali	60,000,000
1. 02. 01. 21	Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan KKS (DBH-PR)	Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor		2 Kali Keg	50,000,000			2 Kali Keg	60,000,000
1. 02. 01. 21	Konsultasi Teknis ke Pusat dan Provinsi (DBH-PR)	Tersedia Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif			20,000,000				24,000,000
1. 02. 01. 21	Bimtek di Daerah Binaan Penyelenggaraan Pasar Sehat dan KKS (DBH-PR)	Tersedia Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif		1 Kali	50,000,000			1 Kali	60,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan Pelaporan Penyehatan Air (DBH-PR)	Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Pelaporan		4 Kali	30,000,000			4 Kali	36,000,000
1. 02. 01. 21	Pengawasan TPM (DBH-PR)	Teratasinya TPM		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	24,000,000
1. 02. 01. 21	Pelatihan Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPBB-IRT) (DBH-PR)	Terlaksananya Pelatihan Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga		1 Kali	50,000,000			1 Kali	60,000,000
1. 02. 01. 21	Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas SDM (Kesehatan dan Non Kesehatan Tentang Keamanan Pangan) (DBH-PR)	Meningkatnya Pemahaman dan Kapasitas SDM (Kesehatan dan Non Kesehatan Tentang Keamanan Pangan)		40 Orang	50,000,000			40 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 21	Paket Media KIE (DBH-PR)	Tersedia Sarana dan Prasarana Promotif dan Preventif		1 Paket	50,000,000			1 Paket	60,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan Pelaporan Penyehatan Pangan (DBH-PR)	Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Pelaporan		4 Kali	30,000,000			4 Kali	36,000,000
1. 02. 01. 21	Pengadaan Reagensia dan Bahan Penunjang Sesuai Kebutuhan (DBH-PR)	Tersedianya Reagensia dan Bahan Penunjang Sesuai Kebutuhan		1 Paket	60,000,000			1 Paket	72,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 21	Revitalisasi dan Maintenance Sarana dan Alat Kalibrasi Alat Serta Sesuai Kebutuhan (DBH-PR)	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Serta Pengembangan Lab		1 Paket	20,000,000			1 Paket	24,000,000
1. 02. 01. 21	Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas (DBH-PR)	Meningkatnya Kapasitas Petugas		40 Orang	50,000,000			40 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 21	Pengambilan Sampel Untuk Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Sesuai Sarana dan Pengiriman Sampel KLB Serta Kasus Tertentu (DBH-PR)	Tersedianya dan Terperinkanya Sampel Untuk Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Sesuai Sarana dan Pengiriman Sampel KLB Serta Kasus Tertentu		30 Kali	48,000,000			30 Kali	57,600,000
1. 02. 01. 21	Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Sektor Informal (DBH-PR)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja		2 Pos UKK	300,000,000			2 Pos UKK	360,000,000
1. 02. 01. 21	Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Sektor Informal Nelayan (DBH-PR)	Terbentuknya Pos UKK Nelayan		1 Pos UKK	150,000,000			1 Pos UKK	180,000,000
1. 02. 01. 21	Surveilans Kesehatan Kerja Sektor Informal (DBH-PR)	Tersedianya Data kesehatan Kerja		4 Kali	5,000,000			4 Kali	6,000,000
1. 02. 01. 21	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (DBH-PR)	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Nelayan		80 Orang	90,000,000			80 Orang	108,000,000
1. 02. 01. 21	Paket Media KIE pekerja formal(DBH-PR)	Tersedia sarana dan prasarana promotif dan preventif		6 PKM	50,000,000			6 PKM	60,000,000
1. 02. 01. 21	Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (Gp2Sp) (DBH-PR)	% pelaksanaan GP2SP di instansi (RS, FKTP, Perkantoran)		6 PKM	150,000,000			6 PKM	180,000,000
1. 02. 01. 21	Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor pekerja perempuan (DBH-PR)	% pelaksanaan GP2SP di instansi (RS, FKTP, Perkantoran)		5 instansi	150,000,000			5 instansi	180,000,000
1. 02. 01. 21	Sosialisasi dan Pemberdayaan masyarakat pekerja kantor (DBH-PR)	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor		70 orang	75,000,000			70 orang	90,000,000
1. 02. 01. 21	Paket Media KIE pekerja perempuan (DBH-PR)	Tersedia sarana dan prasarana promotif dan preventif		1 paket	25,000,000			1 paket	30,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan pelaporan kesjaor (DBH-PR)	Terselenggaranya kegiatan Monev dan pelaporan		4 kali	50,000,000			4 kali	60,000,000
1. 02. 01. 21	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga (DBH-PR)	% anak sekolah dan calon jamaah haji yang diperiksa tingkat kebugarannya		10 Sekolah	360,000,000			10 Sekolah	432,000,000
1. 02. 01. 21	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada anak sekolah (DBH-PR)	% anak sekolah yang diukur tingkat kebugarannya		30 sekolah	300,000,000			30 sekolah	360,000,000
1. 02. 01. 21	Sosialisasi Kebugaran Jasmani Bagi Anak Sekolah (DBH-PR)	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor		30 sekolah	80,000,000			30 sekolah	96,000,000
1. 02. 01. 21	Pengukuran Kebugaran jasmani anak sekolah (DBH-PR)	Hasil pengukuran jasmani		31sekolah	80,000,000			31sekolah	96,000,000
1. 02. 01. 21	Paket Media KIE anak sekolah (DBH-PR)	Tersedia sarana dan prasarana promotif dan preventif		1 paket	20,000,000			1 paket	24,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan pelaporan kesjaor (DBH-PR)	Terselenggaranya kegiatan Monev dan pelaporan		4 kali	120,000,000			4 kali	144,000,000
1. 02. 01. 21	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada calon jamaah haji (DBH-PR)	% calon jamaah haji yang diukur tingkat kebugarannya		4 kecamatan	60,000,000			4 kecamatan	72,000,000
1. 02. 01. 21	Pengukuran Kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji (DBH-PR)	Hasil pengukuran kebugaran		1 kali	25,000,000			1 kali	30,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan pelaporan kesjaor (DBH-PR)	Terselenggaranya kegiatan Monev dan pelaporan		4 kali	35,000,000			4 kali	42,000,000
1. 02. 01. 21	Paket Media KIE pekerja formal(DBH-PR)	Tersedia sarana dan prasarana promotif dan preventif		6 PKM	50,000,000			6 PKM	60,000,000
1. 02. 01. 21	Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (Gp2Sp) (DBH-PR)	% pelaksanaan GP2SP di instansi (RS, FKTP, Perkantoran)		6 PKM	150,000,000			6 PKM	180,000,000
1. 02. 01. 21	Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor pekerja perempuan (DBH-PR)	% pelaksanaan GP2SP di instansi (RS, FKTP, Perkantoran)		5 instansi	150,000,000			5 instansi	180,000,000
1. 02. 01. 21	Sosialisasi dan Pemberdayaan masyarakat pekerja kantor (DBH-PR)	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor		70 orang	75,000,000			70 orang	90,000,000
1. 02. 01. 21	Paket Media KIE pekerja perempuan (DBH-PR)	Tersedia sarana dan prasarana promotif dan preventif		1 paket	25,000,000			1 paket	30,000,000
1. 02. 01. 21	Monev dan pelaporan kesjaor (DBH-PR)	Terselenggaranya kegiatan Monev dan pelaporan		4 kali	50,000,000			4 kali	60,000,000
	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga (DBH-PR)	% anak sekolah dan calon jamaah haji yang diperiksa tingkat kebugarannya		10 Sekolah	360,000,000			10 Sekolah	432,000,000
1. 02. 01. 22	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada anak sekolah (DBH-PR)	% anak sekolah yang diukur tingkat kebugarannya		30 sekolah	300,000,000			30 sekolah	360,000,000
1. 02. 01. 22. 01	Sosialisasi Kebugaran Jasmani Bagi Anak Sekolah (DBH-PR)	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor		30 sekolah	80,000,000			30 sekolah	96,000,000
1. 02. 01. 22. 18	Pengukuran Kebugaran jasmani anak sekolah (DBH-PR)	Hasil pengukuran jasmani		31sekolah	80,000,000			31sekolah	96,000,000
1. 02. 01. 22. 37	Paket Media KIE anak sekolah (DBH-PR)	Tersedia sarana dan prasarana promotif dan preventif		1 paket	20,000,000			1 paket	24,000,000
1. 02. 01. 22. 46	Monev dan pelaporan kesjaor (DBH-PR)	Terselenggaranya kegiatan Monev dan pelaporan		4 kali	120,000,000			4 kali	144,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 22.	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada calon jamaah haji (DBH-PR)	% calon jamaah haji yang diukur tingkat kebugarannya		4 kecamatan	60,000,000			4 kecamatan	72,000,000
1. 02. 01. 22. 59	Pengukuran Kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji (DBH-PR)	Hasil pengukuran kebugaran		1 kali	25,000,000			1 kali	30,000,000
1. 02. 01. 22. ?	Monev dan pelaporan kesjaor (DBH-PR)	Terselenggaranya kegiatan Monev dan pelaporan		4 kali	35,000,000			4 kali	42,000,000
1. 02 01. 22	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyakit menular		100 Kegiatan	6,371,819,400			100 Kegiatan	7,646,183,280
1. 02. 01. 22. 01	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (DBH-PR)	Jumlah Hari Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk		28 Desa	356,660,000			28 Desa	427,992,000
1. 02. 01. 22. 18	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi program imunisasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta MONEV		30 Orang	4,804,900			30 Orang	5,765,880
1. 02. 01. 22.	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Bagi petugas TB di Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Petugas TB dalam Pelayanan di Puskesmas		25 Orang	25,000,000			25 Orang	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Penguatan kapasitas bagi Kader dalam penemuan kasus TB di desa	Meningkatnya Pengetahuan Kader dalam Penemua Kasus		30 orang	40,000,000			30 orang	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi / Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat		Ls	45,000,000			Ls	54,000,000
1. 02. 01. 22.	Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Menular TB	Persentase Penemuan Kasus baru		68 Desa	30,000,000			68 Desa	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB untuk Penegakan Diagnosis TB	Meningkatnya pengetahuan tenaga Lab dalam penanganan Kasus		6 Puskesmas	18,000,000			6 Puskesmas	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Pembentukan Jejaring Kerja dan Kemitraan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor	Terbentuknya Jejaringan kerja dalam Lintas Program dan Sektor dalam penanganan kasus TB		Ls	25,000,000			Ls	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Pertemuan Rutin Pengelola TB Dinas Kesehatan dengan Petugas TB	Terlaksananya Sinkronisasi Pelaporan Petugas di Puskesmas dengan Pengelola Di Dinkes		4 kali	25,000,000			4 kali	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan TB di Puskesmas	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	20,000,000			4 kali	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) dalam pencegahan dan pengedaian TB	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit TB		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	PMT bagi pasien TB	Meningkatnya status Gizi bagi penderita TB		6 Bulan	200,000,000			6 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22.	Konsultasi program TB Ke luar daerah (Provinsi/pusat)	Meningkatnya Penguatan Kapasitas bagi Petugas dan Pengelola Program		Ls	80,000,000			Ls	96,000,000
1. 02. 01. 22.	Pelaksanaan Kolaborasi TB-HIV dan Validasi Data	Terlaksananya Penanganan kasus TB-HIV secara Bersama sesuai standart		22 Orang	30,000,000			22 Orang	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Kusta di Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Kusta dalam Pelayanan di Puskesmas		20 Orang	20,000,000			20 Orang	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Penguatan Kapasitas bagi Kader dalam Penemuan Kasus Kusta di Desa	Meningkatnya Pengetahuan Kader tentang penyakit Kusta		30 orang	40,000,000			30 orang	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi / Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Penjaringan, pemeriksaan dan pengobatan Kusta	Persentase dalam Penemuan Kasus Baru		68 Desa	18,000,000			68 Desa	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Petugas pada Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penanggulangan Kusta	Terbentuknya Jejaringan kerja dalam Lintas Program dan Sektor dalam penanganan kasus Kusta		20 Orang	25,000,000			20 Orang	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) daam Pencegahan dan Pengendalian penyakit kusta	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit Kusta		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemantauan pengobatan kasus	Terlaksananya Pengobatan Bagi Kasus Lama dan Kasus Baru		12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	18,000,000
1. 02. 01. 22.	pelaksanaan Rapid Village Survey (RVS)	Terdeteksi Dini Kasus Baru		68 Desa	98,270,000			68 Desa	117,924,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring Evaluasi program kusta	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	15,000,000			4 kali	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Penjaringan dan Pemeriksaan HIV dan IMS pada masyarakat Berisiko	Terdeteksi Dini Kasus Baru di Masyarakat Berisiko		68 Desa	60,000,000			68 Desa	72,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan SDM petugas HIV di Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Petugas HIV dalam Pelayanan di Puskesmas		25 Orang	25,000,000			25 Orang	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi dan Penyuluhan HIV	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Pertemuan Jejaring Kerja Kemitraan serta Peningkatan Kapasitas Penyakit HIV Lintas Program dan Lintas Sektor	Terlaksananya Pertemuan Jejaringan kerja dalam Lintas Program dan Sektor dalam penanggulangan Penyakit HIV		30 orang	40,000,000			30 orang	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring Evaluasi Pelaporan HIV di Puskesmas	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	20,000,000			4 kali	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Pembentukan Kader Peduli HIV	Terbentuknya Kader Peduli HIV		30 Desa	80,000,000			30 Desa	96,000,000
1. 02. 01. 22.	Peringatan Hari AIDS Sedunia	Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Sedunia		Ls	150,000,000			Ls	180,000,000
1. 02. 01. 22.	Konsultasi program HIV Ke luar daerah (Provinsi/pusat)	Terlaksananya Konsultasi ke Provinsi/Pusat		Ls	100,000,000			Ls	120,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) dalam pencegahan dan pengendalian HIV - AIDS	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit HIV		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Pengetahuan Tentang HIV-AIDS di institusi pendidikan tingkat Menengah Pertama (DBH-PR)	Jumlah Pelajar yang Mengikuti peningkatan pengetahuan tentang HIV-AIDS		350 Orang	152,810,000			350 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Pengetahuan tentang HIV-AIDS di institusi pendidikan tingkat menengah atas (DBH-PR)	Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti peningkatan pengetahuan tentang HIV-AIDS		350 Orang	152,810,000			350 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 22.	Kolaborasi TB / HIV	Terlaksananya Kolaborasi TB dan HIV		18 Orang	20,000,000			18 Orang	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Pelaksanaan Fogging Fokus / Fogging Massal	Jumlah Hari Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk		68 Desa	356,660,000			68 Desa	427,992,000
1. 02. 01. 22.	Pembentukan Kader Jumantik Masyarakat	Terbentuknya Kader Jumantik		68 Kader	35,000,000			68 Kader	42,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik	Meningkatnya Pengetahuan Jumantik di Masyarakat		600 Kepala Keluarga	40,000,000			600 Kepala Keluarga	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Jumantik Perkantoran	Meningkatnya Pengetahuan Jumantik di Perkantoran		25 Kantor	30,000,000			25 Kantor	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Jumantik Institusi Pendidikan	Meningkatnya Pengetahuan Jumantik di Institusi Pendidikan		30 Institusi Pendidikan	40,000,000			30 Institusi Pendidikan	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemeriksaan Jentik Berkala	Terlaksananya Pemeriksaan Jentik di Masyarakat		4 kali	30,000,000			4 kali	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan DBD di Puskesmas	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	15,000,000			4 kali	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Konsultasi Program DBD ke Provinsi	Terlaksananya Konsultasi ke Provinsi		Ls	20,000,000			Ls	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Konsultasi Program DBD ke Pusat	Terlaksananya Konsultasi ke Pusat		Ls	80,000,000			Ls	96,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi dan Penyuluhan DBD	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat		Ls	30,000,000			Ls	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Petugas pada Penyakit Hepatitis bagi Lintas Program dan Lintas Sektor	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Lintas Program dan Sektor dalam penanggulangan Penyakit Hepatitis		20 Orang	20,000,000			20 Orang	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan SDM petugas Hepatitis di Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Hepatitis dalam Pelayanan di Puskesmas		20 Orang	25,000,000			20 Orang	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Skrining Hepatitis Pada Masyarakat Berisiko	Terdeteksi Dini Kasus Baru di Masyarakat Berisiko		6 Puskesmas	20,000,000			6 Puskesmas	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi dan Penyuluhan Hepatitis pada Kelompok Berisiko	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat Berisiko		Ls	30,000,000			Ls	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Pengadaan Bahan dan Alat Penunjang Program Hepatitis	Tersedianya Alat dan Bahan Program Hepatitis		Ls	30,000,000			Ls	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) dalam pencegahan dan pengendalian Hepatitis	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit Hepatitis		25 Orang	35,000,000			25 Orang	42,000,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring dan Evaluasi Program Hepatitis	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	18,000,000			4 kali	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Konsultasi program Hepatitis Ke luar daerah (Provinsi)	Terlaksananya Konsultasi ke Provinsi		Ls	25,000,000			Ls	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Petugas Filariasis dan Kecacingan pada Lintas Program dan Lintas Sektor	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Lintas Program dan Sektor dalam penanggulangan Penyakit Filariasis dan Kecacingan		15 orang	18,000,000			15 orang	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Penguatan Kapasitas bagi Kader dalam penemuan kasus Filariasis dan Kecacingan	Meningkatnya Pengetahuan Kader dalam Penemua Kasus		35 orang	40,000,000			35 orang	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas SDM Petugas dalam penemuan dan Penanggulangan kasus Filariasis dan Kecacingan	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Filariasis dan Kecacingan dalam Pelayanan di Puskesmas		25 Orang	30,000,000			25 Orang	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) dalam pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Kecacingan	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit Filariasis dan Kecacingan		Ls	35,000,000			Ls	42,000,000
1. 02. 01. 22.	Penjaringan, Pemeriksaan dan Pengobatan Filariasis dan Kecacingan	Terdeteksinya Kasus Baru		68 Desa	30,000,000			68 Desa	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemantauan Pengobatan Kasus Filariasis	Terpantaunya Pengobatan Filariasis dan Kecacingan		12 Bulan	18,000,000			12 Bulan	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring Evaluasi Program Filariasis	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	18,000,000			4 kali	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Pelatihan Guru UKS dalam Pengendalian Kecacingan	Meningkatnya Pengetahuan Guru UKS dalam Program Filariasis dan Kecacingan		20 Sekolah	25,000,000			20 Sekolah	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Petugas Pneumonia Lintas Program dan Lintas Sektor	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Lintas Program dan Sektor dalam penanggulangan Penyakit Pneumonia		15 orang	17,000,000			15 orang	20,400,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 22.	Peningkatan SDM Petugas Pneumonia di Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Pneumonia dalam Pelayanan di Puskesmas		22 Orang	20,000,000			22 Orang	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi / Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Kader dalam Penemuan Kasus Pneumonia	Meningkatnya Pengetahuan Kader dalam Penemua Kasus		35 orang	40,000,000			35 orang	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) dalam pencegahan dan pengendalian Pneumonia	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit Pneumonia		Ls	35,000,000			Ls	42,000,000
1. 02. 01. 22.	Penjaringan, Pemeriksaan dan Pengobatan Pneumonia	Terdeteksi Dini Kasus Baru di Masyarakat		68 Desa	15,000,000			68 Desa	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemantauan Pengobatan Kasus Pneumonia	Terpantaunya Pengobatan Pneumonia		12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring Evaluasi Kasus Program Pneumonia	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 Kali	15,000,000			4 Kali	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Petugas Penyakit Rabies bagi Lintas Program dan Lintas Sektor	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Lintas Program dan Sektor dalam penanggulangan Penyakit Rabies		22 Orang	20,000,000			22 Orang	24,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan SDM Petugas Rabies di Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Pneumonia dalam Pelayanan di Puskesmas		20 Orang	18,000,000			20 Orang	21,600,000
1. 02. 01. 22.	Promosi / Penyuluhan dan Penyediaan Media KIE	Tersedianya Media KIE dan Informasi bagi Masyarakat		Ls	40,000,000			Ls	48,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Kader dalam Penemuan Kasus Rabies	Meningkatnya Pengetahuan Kader dalam Penemua Kasus		27 Orang	25,000,000			27 Orang	30,000,000
1. 02. 01. 22.	Pemberdayaan Masyarakat (Guru, TOGA, TOMA dll) dalam pencegahan dan pengendalian Rabies	Meningkatnya Pengetahuan Guru, TOGA, dan TOMA tentang Penyakit Pneumonia		Ls	35,000,000			Ls	42,000,000
1. 02. 01. 22.	Monitoring Evaluasi Kasus Program Rabies	Persentase Puskesmas dalam sistem pelaporan dan Penanganan Kasus sesuai dengan standart		4 kali	15,000,000			4 kali	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Penyakit Menular di Institusi Pendidikan	Meningkatnya Pengetahuan Institusi Pendidikan Tentang Penyakit Menular		30 Institusi Pendidikan	100,000,000			30 Institusi Pendidikan	120,000,000
1. 02. 01. 22.	Peringatan Hari - Hari Besar Penyakit Menular	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Penyakit Menular		Ls	120,000,000			Ls	144,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular		600 Orang	305,200,000			600 Orang	366,240,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan kapasitas petugas surveilans pkms dan rumah sakit (DBH-PR)	terlaksannaya survelen		50 Orang	25,000,000			50 Orang	30,000,000
1. 02. 01. 22.	pendampingan perjalanan calon jamaah haji ke embarkasih (DBH-PR)	terlaksasnya pendampingan jamaah haji		21 orang	20,000,000			21 orang	24,000,000
1. 02. 01. 22.	SPPD luar daerah utk program haji (DBH-PR)	terlaksanya perjalanan dinas		LS	30,000,000			LS	36,000,000
1. 02. 01. 22.	bimbingan kes dan deteksi dini peny tidak menular dan menular calon jamaah haji (DBH-PR)	terlaksananya bimbingan haji		120 orang	75,000,000			120 orang	90,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan kapasitas tenaga dokter dan petugas haji puskesmas (DBH-PR)	meningkatnya pengetahuan tenaga dokter haji		25 Orang	15,000,000			25 Orang	18,000,000
1. 02. 01. 22.	Investigasi Sueveilans dan Pemantauan Dini Kasus yang Berpotensi KLB	Presentasi Penemuan Kasus Dini KLB di Rumah Sakit dan Puskesmas		LS	35,000,000			LS	42,000,000
1. 02. 01. 22.	Penguatan Kapasitas Petugas Fasyankes	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Petugas Fasyankes		600 Orang	300,000,000			600 Orang	360,000,000
1. 02. 01. 22.	Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Bides Tentang Imunisasi		68 Orang	100,000,000			68 Orang	120,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Imunisasi dan berkomunikasi dengan Masyarakat	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Imunisasi dan berkomunikasi dengan Masyarakat		250 Orang	250,000,000			250 Orang	300,000,000
1. 02. 01. 22.	Pertemuan Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Imunisasi	Jumlah Peserta Pertemuan Advokasi Lintas Sektor untuk Mendukung Imunisasi		200 Orang	150,000,000			200 Orang	180,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imuisasi		500 Orang	300,000,000			500 Orang	360,000,000
1. 02. 01. 22.	Identifikasi KIPi (Kejadian Pasca Imunisasi) sesuai Standar	Presentasi Audit Kejadian KIPi		LS	4,000,000			LS	4,800,000
1. 02. 01. 22.	Supervisi dan Bimbingan rantai Vaksin dan imunisasi untuk jurim puskesmas dan Posyandu sesuai Standar	Presentasi Supervisi dan bimbingan Jurim dan Petugas Posyandu		LS	7,000,000			LS	8,400,000
1. 02. 01. 22.	pengambilan vaksin rutin dan vaksin Bias ke provinsi	persentase pengambilan vaksin		LS	15,000,000			LS	18,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 22.	Pembentukan forum peduli imunisasi Lintas Sektor LSM dan Masyarakat	Persentase jlh yang terbentuk		70 Orang	50,000,000			70 Orang	60,000,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Guru UKS dan Murid program BIAS	Persentase anak yg di imunisasi BIAS		2500 Orang	175,000,000			2500 Orang	210,000,000
1. 02. 01. 22.	Pertemuan Advokasi Lintas sektor (kepsek, guru, komite sekolah)	Persentase anak yg di imunisasi BIAS		170 Orang	125,000,000			170 Orang	150,000,000
1. 02. 01. 22.	Evaluasi Lintas program (kabid,kasei,pengelola program ,kapus)	persentase hasil yg di capai		70 Orang	10,000,000			70 Orang	12,000,000
1. 02. 01. 22.	Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan program imunisasi dengan narasumber provinsi	persentase yang di latih pengelola program imunisasi		50 Orang	175,000,000			50 Orang	210,000,000
1. 02. 01. 22.	SPPD luar daerah utk program Imunisasi	terlaksananya perjalanan dinas		LS	30,000,000			LS	36,000,000
1. 02. 01. 22.	Promosi dan penyuluhan Pengadaan media publikasi (KIE)	persentase pengadaan media		LS	45,000,000			LS	54,000,000
1. 02. 01. 22. 47	Kegiatan Pelayanan imunisasi dasar, PIN, Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit (DAK NON FISIK)	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar, pencegahan penyakit menular		450 orang	335,604,500			450 orang	402,725,400
1. 02 01.	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tidak menular	Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyakit Tidak menular		135 Kegiatan	19,318,345,916			135 Kegiatan	23,182,015,099
1 02. 01. 22. 65	Peningkatan kapasitas petugas surveilans pkms dan rumah sakit (DBH-PR)	terlaksannaya survelen pkms dan rumah sakit		20 orang	25,000,000			20 orang	30,000,000
1 02. 01. 22. 66	pendampingan perjalanan calon jamaah haji ke embarkasih (DBH-PR)	terlaksasanya pendampingan jamaah haji ke embarkasih		21 orang	20,000,000			21 orang	24,000,000
1 02. 01. 22. 67	SPPD luar daerah utk program haji (DBH-PR)	terlaksananya perjalanan dinas		ls	30,000,000			ls	36,000,000
1 02. 01. 22. 68	bimbingan kes dan deteksi dini peny tidak menular dan menular calon jamaah haji (DBH-PR)	terlaksananya bimbingan haji		120 orang	75,000,000			120 orang	90,000,000
1 02. 01. 22. 69	Peningkatan kapasitas tenaga dokter dan petugas haji puskesmas (DBH-PR)	meningkatnya pengetahuan tenaga dokter haji		20 orang	15,000,000			20 orang	18,000,000
1 02. 01. 22. 70	Pembentukan Posbindu PTM (DBH-PR)	terbentuknya posbindu		68 pos	300,000,000			68 pos	360,000,000
1 02. 01. 22. 71	Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM di masyarakat maupun FKTP (DBH-PR)	terlaksnanaya survelen PTM		8 kali	30,000,000			8 kali	36,000,000
1 02. 01. 22. 72	Penelitian terkait faktor risiko PTM (prevalensi faktor risiko maupun penyakit, validasi penatalaksanaan penyakit di FKTP) (DBH-PR)	terlaksananayam penelitian		3 kali	132,000,000			3 kali	158,400,000
1 02. 01. 22. 73	Pelaksanaan Posbindu PTM (DBH-PR)	terlaksnanaya posbindu		68 desa	68,000,000			68 desa	81,600,000
1 02. 01. 22. 74	Rekapitulasi data kesehatan PTM (DBH-PR)	terdatanya penyakit tidak menular		4 kali	12,000,000			4 kali	14,400,000
1 02. 01. 22. 75	Pendataan Penderita Hipertensi Menurut Wilayah Kerja Puskesmas (DBH-PR)	terdatanya penderita hipertensi		12 kali	38,000,000			12 kali	45,600,000
1 02. 01. 22. 76	Melakukan Skrining Faktor Risiko Hipertensi pada Masyarakat (DBH-PR)	skrining hifertensi		24 kali	330,000,000			24 kali	396,000,000
1 02. 01. 22. 77	Melakukan Pemantauan Pelayanan Kesehatan sesuai Standard di Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya pemantauan		4 kali	72,000,000			4 kali	86,400,000
1 02. 01. 22. 78	Pemantauan Pencegahan Komplikasi Pasien Hipertensi (DBH-PR)	terlaksananya pemantauan		4 kali	60,000,000			4 kali	72,000,000
1 02. 01. 22. 79	Pelatihan Tekhnis Pelayanan Kesehatan tentang Hipertensi bagi Tenaga Kesehatan dan petugas pelaksana (kader) posbindu PTM (DBH-PR)	terlaksananya pelatiahn petugas posbindu		72 orang	37,000,000			72 orang	44,400,000
1 02. 01. 22. 80	Penyediaan Peralatan Kesehatan DM (DBH-PR)	peralatan kesehatan DM		1 paket	150,000,000			1 paket	180,000,000
1 02. 01. 22. 81	Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak sekolah, dan lain-lain) mengenai pengetahuan PTM (DBH-PR)	terlaksananya pemberdayaan tentang PTM		600 orang	380,000,000			600 orang	456,000,000
1 02. 01. 22. 82	Pemberdayaan kelompok masyarakat (DBH-PR)	terlaksananya pemberdayaan masyarakat		350 orang	204,000,000			350 orang	244,800,000
1 02. 01. 22. 83	Optimalisasi kegiatan berbasis Posbindu (UKBM) dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan PPTM (DBH-PR)	terlaksananya optimaliasi		70 orang	68,000,000			70 orang	81,600,000
1 02. 01. 22. 84	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hipertensi di Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya monitoring		4 kali	6,000,000			4 kali	7,200,000
1 02. 01. 22. 85	Upaya monitoring dan deteksi dini Faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat (DBH-PR)	terlaksananya monitoring		4 kali	380,000,000			4 kali	456,000,000
	faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat								

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02. 01. 22. 86	Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pencegahan faktor risiko PTM dan Keswa (DBH-PR)	terlaksananya optimaliasi UKS		120 orang	198,000,000			120 orang	237,600,000
1 02. 01. 22. 87	Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda (DBH-PR)	terlaksananya optimaliasi kepemudaan dalam bidang kesehatan		100 orang	120,000,000			100 orang	144,000,000
1 02. 01. 22. 88	Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan (DBH-PR)	terlaksananya pendampingan		70 orang	81,600,000			70 orang	97,920,000
1 02. 01. 22. 89	Mengadakan sosialisasi/Lokakarya dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk PPTM (DBH-PR)	terlaksananya lokakarya		1 paket	37,000,000			1 paket	44,400,000
1 02. 01. 22. 90	Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian PTM (DBH-PR)	terlaksananya KIE PTM		1 paket	55,000,000			1 paket	66,000,000
1 02. 01. 22. 91	Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko dan pengendalian PTM (CERDIK, PANDU : pelayanan terpadu PTM, GERAKAN BERHENTI MEROKOK, PERMADI : PERIKSA MATA SENDIRI) (DBH-PR)	terlaksananya pelayanan terpadu PTM		1 paket	420,000,000			1 paket	504,000,000
1 02. 01. 22. 92	Capacity building pengendalian faktor risiko PTM (DBH-PR)	terlaksananya pengendalian faktor resiko PTM		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 93	Capacity building deteksi dini dan penemuan dini PTM (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini dan penemuan didni PTM		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 94	Capacity building tatalaksana dini PTM (DBH-PR)	terlaksananya tatalaksana dini PTM		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 95	Capacity building paliatif di komunitas (DBH-PR)	terlaksananya paliatif di komunitas		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 96	Capacity building surveilans faktor risiko PTM bagi kader, kelompok kerja, atau jejaring PTM (DBH-PR)	terlaksananya surveilans faktor risiko PTM bagi jejaring		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 97	Pelatihan penanggulangan gangguan fungsional bagi kader (DBH-PR)	terlaksananya penanggulangan gangguan fungsional bagi kader		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 98	Pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi kader (DBH-PR)	terlaksananya penanggulangan gangguan indera bagi kader		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1 02. 01. 22. 99	Operasional pengumpulan data dan pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM melalui Posbindu (DBH-PR)	terlaksananya pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM		12 Bulan	68,000,000			12 Bulan	81,600,000
1 02. 01. 22. ##	Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian PTM (DBH-PR)	terlaksananya KIE tentang pengendalian faktor risiko PTM		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
1 02. 01. 22. ##	Alat deteksi dini faktor risiko PJPD : Pemeriksaan tekanan darah, deteksi dini komplikasi tekanan darah tinggi, deteksi dini serangan stroke dan serangan jantung, kegawatdaruratan stroke dan serangan jantung (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini faktor risiko PJPD		12 Bulan	500,000,000			12 Bulan	600,000,000
1 02. 01. 22. ##	Pelatihan komunikasi bagi petugas penyuluh, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan mengenai faktor risiko dan PPTM (DBH-PR)	terlaksananya komunitas bagi petugas penyuluh tenaga kesehatan		12 Bulan	295,000,000			12 Bulan	354,000,000
1 02. 01. 22. ##	Pembentukan Jejaring Kerja dan Kemitraan (DBH-PR)	terlaksananya jejaring kerja dan kemitraan		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000
1 02. 01. 22. ##	Promosi / Penyuluhan Hipertensi (DBH-PR)	terlaksananya penyuluhan hipertensi		12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	90,000,000
1 02. 01. 22. ##	Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota (DBH-PR)	terlaksananya pemecahan masalah kesehatan		12 Bulan	38,000,000			12 Bulan	45,600,000
1 02. 01. 22. ##	Perjalanan Dinas Luar Daerah (DBH-PR)	terlaksananya perjalanan Dinas Luar daerah		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
1 02. 01. 22. ##	Peringatan hari besar Penyakit Tidak Menular (DBH-PR)	terlaksananya peringatan hari besar PTM		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	120,000,000
1 02. 01. 22. ##	Pelatihan Surveilans faktor risiko PTM (DBH-PR)	terlaksananya surveilans faktor risiko PTM		12 Bulan	95,000,000			12 Bulan	114,000,000
1 02. 01. 22. ##	Penyediaan sarana dan prasarana skrining (DBH-PR)	terlaksananya sarana dan prasarana skrining		12 Bulan	500,000,000			12 Bulan	600,000,000
1 02. 01. 22. ##	Pendataan Penderita DM Menurut Wilayah Kerja Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya pendataan penderita DM		12 Bulan	48,000,000			12 Bulan	57,600,000
1 02. 01. 22. ##	Melakukan Skrining Faktor Risiko DM pada Masyarakat (DBH-PR)	terlaksananya skrining faktor risiko DM		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1 02. 01. 22. ##	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan PTM (DBH-PR)	terlaksananya perencanaan kegiatan PTM		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
1 02. 01. 22. ##	Melakukan Pemantauan Pelayanan Kesehatan sesuai Standard di Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar		12 Bulan	72,000,000			12 Bulan	86,400,000
1 02. 01. 22. ##	Pemantauan Pencegahan Komplikasi Pasien DM (DBH-PR)	terlaksananya pencegahan komplikasi pasien DM		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	72,000,000
1 02. 01. 22. ##	Pelatihan Tekhnis Pelayanan Kesehatan tentang DM bagi Tenaga Kesehatan (DBH-PR)	terlaksananya tekhnis pelayanan kesehatan tentang DM		12 Bulan	37,000,000			12 Bulan	44,400,000
1 02. 01. 22. ##	Pelatihan Tekhnis Pelayanan Kesehatan tentang DM bagi petugas pelaksana (kader) posbindu Kesehatan (DBH-PR)	terlaksananya tekhnis pelayanan kesehatan tentang DM bagi kader		12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	144,000,000
1 02. 01. 22. ##	Penyusunan kebijakan faktor risiko PTM dan yang mendukung upaya PPTM di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Contoh : regulasi KTR dan regulasi gula, garam dan lemak (DBH-PR)	terlaksananya kebijakan faktor risiko PTM dan upaya PPTM		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02. 01. 22. ##	Penyediaan Peralatan Kesehatan DM (DBH-PR)	terlaksananya peralatan kesehatan kesehatan DM		12 Bulan	500,000,000			12 Bulan	600,000,000
1 02. 01. 22. ##	Pengetakan regulasi faktor risiko PTM (DBH-PR)	terlaksananya regulasi faktor risiko PTM		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Pertemuan Rutin Pengelola Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan dengan Petugas PTM Puskesmas	terlaksananya pertemuan rutin PTM dengan petugas		12 Bulan	12,000,000			12 Bulan	14,400,000
1 02. 01. 22. ##	Alat deteksi dini faktor risiko DM-PM : pemeriksaan gula darah, pemeriksaan obesitas (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini faktor risiko DM		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1 02. 01. 22. ##	Alat deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir, pemeriksaan Otoacoustic Emissins (OAEs) (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir		12 Bulan	128,000,000			12 Bulan	153,600,000
1 02. 01. 22. ##	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Diabetes melitusdi Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan DM		12 Bulan	6,000,000			12 Bulan	7,200,000
1 02. 01. 22. ##	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posbindu PTM (DBH-PR)	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan posbindu PTM		12 Bulan	12,000,000			12 Bulan	14,400,000
1 02. 01. 22. ##	Upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan penyakit tidak menular	terlaksananya advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan PTM		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	66,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Pembentukan Jejaring Kerja dan Kemitraan (DBH-PR)	terlaksananya pembentukan jejaring kerja dan kemitraan		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan Posbindu PTM (DBH-PR)	terlaksananya pelaksanaan posbindu		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	120,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Perjalanan Dinas Luar Daerah (DBH-PR)	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam taman kota, taman bermain anak, alun-alun (DBH-PR)	terlaksananya penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam taman kota		12 Bulan	500,000,000			12 Bulan	600,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan penyakit tidak menular (DBH-PR)	terlaksananya advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan PTM		12 Bulan	27,000,000			12 Bulan	32,400,000
1 02. 01. 22. ##	- Promosi (Pembuatan layanan iklan masyarakat PPTM) (DBH-PR)	terlaksananya promosi (pembuatan layanan iklan masyarakat PPTM)		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	72,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM (DBH-PR)	terlaksananya pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM		12 Bulan	6,000,000			12 Bulan	7,200,000
1 02. 01. 22. ##	- Pembukaan Klinik Rujukan Kanker (DBH-PR)	terlaksananya pembukaan klinik rujukan kanker		12 Bulan	145,000,000			12 Bulan	174,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan Pemeriksaan IVA centre (DBH-PR)	terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan IVA centre		12 Bulan	145,000,000			12 Bulan	174,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Pemenuhan obat-obatan esensial PTM (DBH-PR)	terlaksananya pemenuhan obat-obatan esensial PTM		12 Bulan	1,000,000,000			12 Bulan	1,200,000,000
1 02. 01. 22. ##	- Bantuan transportasi rujukan PTM bagi masyarakat tidak mampu (DBH-PR)	terlaksananya bantuan transportasi rujukan PTM bagi masyarakat tidak mampu		12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	144,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Deteksi dini kanker (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini kanker		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Alat deteksi dini faktor risiko PPKD (DBH-PR)	terlaksananya alat deteksi dini faktor risiko PPKD		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko merokok : skrining dan konseking upaya berhenti merokok anak sekolah dan kelompok khusus (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko merokok		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko penyakit paru obstruksi kronik (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko penyakit paru obstruksi kronik		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko asma (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko asma		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko SLE (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko SLE		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko Osteoporosis (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko osteoporosis		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	120,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko thalasemia (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko thalasemia		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sarana Prasarana Promotif Preventif Faktor risiko penyakit ginjal kronik (DBH-PR)	terlaksananya sarana prasarana promotif preventif faktor risiko penyakit ginjal kronik		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	240,000,000
1. 02. 01. 22. ##	Alat deteksi dini faktor risiko kanker : deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim untuk WUS usia 30-50 tahun, deteksi dini kanker anak, alat tindak lanjut dini kanker (krioterapi/alat tindak lanjut IVA) (DBH-PR)	terlaksananya alat deteksi dini faktor risiko kanker		12 Bulan	500,000,000			12 Bulan	600,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan pelayanan terpadu di Fasyankes Primer (DBH-PR)	terlaksananya pelayanan terpadu di fasyankes primer		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	60,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sosialisasi CERDIK pada Instansi Pemerintah dan Swasta, di Institusi Pendidikan, di Organisasi PKK, dan Darma Wanita Persatuan (DBH-PR)	terlaksananya sosialisasi cerdik pada instansi pemerintah dan swasta		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Konsultasi Program PTM dan Keswa ke Provinsi (DBH-PR)	terlaksananya konsultasi program PTM dan keswa ke provinsi		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	72,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 22. ##	- Rapat Triwulan Petugas PTM dan Keswa (DBH-PR)	terlaksananya rapat triwulan petugas PTM dan keswa		12 Bulan	4,000,000			12 Bulan	4,800,000
1. 02. 01. 22. ##	- Peningkatan kapasitas petugas kesehatan (DBH-PR)	terlaksananya peningkatan kapasitas petugas kesehatan		12 Bulan	98,000,000			12 Bulan	117,600,000
1. 02. 01. 22. ##	- <i>Capacity building</i> kader Posbindu PTM (DBH-PR)	terlaksananya <i>capacity building</i> kader posbindu PTM		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) keDinas Kesehatan dalam upaya peningkatan PPTM (DBH-PR)	terlaksananya pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan PPTM		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	24,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu di institusi pemerintah dan tatanan lain (sekolah, perkantoran, pabrik, tempat-tempat ibadah dan lain-lain) (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini di posbindu di institusi pemerintahan dan tatanan lain		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Penatalaksanaan deteksi dini PTM di FKTP dan FKTRL (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini PTM di FKTP dan FKTRL		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	192,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu PTM di masyarakat (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini di posbindu PTM di masyarakat		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	192,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Perjalanan Dinas Luar Daerah (DBH-PR)	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kanker di Puskesmas (Rp.DBH-PR)	terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan kanker di puskesmas		12 Bulan	12,000,000			12 Bulan	14,400,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pelatihan dan Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa (DBH-PR)	terlaksananya pelatihan dan pembentukan kader keswa		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	96,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu di institusi pemerintah dan tatanan lain (sekolah, perkantoran, pabrik, tempat-tempat ibadah dan lain-lain) (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini di posbindu		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Peringatan Hari Anti Narkoba Nasional (HANI) (DBH-PR)	terlaksananya peringatan hari anti narkoba nasional		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	120,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) (DBH-PR)	terlaksananya tim pelaksana keswa		12 Bulan	64,000,000			12 Bulan	76,800,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (Rp. 160.000.000,-)	terlaksananya pembentukan desa siaga sehat jiwa		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	192,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pemantauan Pasien ODGJ Berat (DBH-PR)	terlaksananya pemantauan pasien ODGJ berat		12 Bulan	68,000,000			12 Bulan	81,600,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pelepasan Pasien Pasung (DBH-PR)	terlaksananya pelepasan pasien pasung		12 Bulan	38,000,000			12 Bulan	45,600,000
1. 02. 01. 22. ##	- Penatalaksanaan deteksi dini gangguan jiwa di FKTP dan FKTRL (DBH-PR)	terlaksananya deteksi dini gangguan jiwa di FKTP dan FKTRL		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	192,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Sosialisasi Dampak Narkoba bagi Kesehatan di Masyarakat (DBH PR)	terlaksananya sosialisasi dampak narkoba		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Penyediaan Media KIE Keswa (DBH-PR)	terlaksananya penyediaan media KIE keswa		12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	8,400,000
1. 02. 01. 22. ##	- Penggandaan dan pendistribusian buku Kesehatan Lansia (DBB PR)	terlaksananya penggandaan dan pendistribusian buku kesehatan lansia		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Rapat Koordinasi (DBH-PR)	terlaksananya rapat koordinasi		12 Bulan	27,000,000			12 Bulan	32,400,000
1. 02. 01. 22. ##	- Peningkatan Pengetahuan SDM Jiwa (DBH-PR)	terlaksananya peningkatan pengetahuan SDM jiwa		12 Bulan	340,000,000			12 Bulan	408,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Perjalanan Dinas Luar Daerah (DBH PR)	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	36,000,000
02. 01. 22. ##	- Pelaksanaan Kunjungan Rumah (KIE Keswa dan dukungan Psikososial) (DBH-PR)	terlaksananya kunjungan rumah KIE keswa dan dukungan psikososial		12 Bulan	36,000,000			12 Bulan	43,200,000
02. 01. 22. ##	- Skrining Kesehatan Jiwa atau gangguan mental emotional dan perilaku di Masyarakat (DBH-PR)	terlaksananya skrining keswa		12 Bulan	380,000,000			12 Bulan	456,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pertemuan Rutin Pengelola Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan dengan Petugas Keswa Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya pertemuan rutin pengelola keswa		12 Bulan	6,000,000			12 Bulan	7,200,000
1. 02. 01. 22. ##	- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kesehatan Jiwa di Puskesmas (DBH-PR)	terlaksananya monitoring		2 kali	12,000,000			2 kali	14,400,000
1. 02. 01. 22. ##	- Pembentukan Jejaring Kerja dan Kemitraan (DBH-PR)	terbentuknya jaringan kerja		33 Orrang	50,000,000			33 Orrang	60,000,000
1. 02. 01. 22. ##	- Care Free Day (DBH-PR)	terlaksananya car free day		7 kali	120,000,000			7 kali	144,000,000
1. 02. 01. 22. 37	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imuisasi		440 Orang	23,804,958			440 Orang	28,565,950
1. 02. 01. 22. 46	Pelayanan Imunisasi dasar, PIN, Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit (DAK NON FISIK)	Terdeteksi Imunisasi Dasar,Pencegahan Penyakit Menular dan PTM		1 Paket	152,450,000			1 Paket	182,940,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Kader Jumentik dan Pemeriksaan Jentik dalam wilayah Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Kader Jumentik dan Pemeriksaan Jentik dalam wilayah Kota Lhokseumawe		408 Orang	603,803,000			408 Orang	724,563,600
1. 02. 01. 22. 55	pengambilan vaksin rutin dan vaksin Bias ke provinsi (DBH-PR)	Terpenuhinya Vaksin		8 kali	15,000,000			8 kali	18,000,000
1. 02. 01. 22. 56	Pembentukan forum peduli imunisasi (DBH-PR)	Terbentuknya forum peduli Imunisasi		75 orang	50,000,000			75 orang	60,000,000
1. 02. 01. 22. 57	peningkatan pengetahuan murid dan guru uks (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan murid dan guru uks		200 orang	175,000,000			200 orang	210,000,000
1. 02. 01. 22. 58	Pertemuan Advokasi lintas sektor program BIAS (DBH-PR)	Terlaksanannya Advokasi lintas sektor		90 orang	125,000,000			90 orang	150,000,000
1. 02. 01. 22. 59	pertemuan lintas program imuniasi(DBH-PR)	Terlaksanannya lintas Program		24 orang	10,000,000			24 orang	12,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 22. 60	peningkatan kapasitas pengelola program imunisasi ttg Rantai Vaksin dinkes dan puskesmas (DBH-PR)	Meningkatnya kapasitas pengelola program imunisasi		89orang	175,000,000			89orang	210,000,000
1. 02. 01. 22. 61	SPPD luar daerah utk imunisasi (DBH-PR)	terlaksannya perjalanan dinas		1s	30,000,000			1s	36,000,000
1. 02. 01. 22. 62	Promosi dan penyuluhan Pengadaan media publikasi (KIE) (DBH-PR)	Tersedianya media Publikasi		1 paket	45,000,000			1 paket	54,000,000
1. 02. 01. 22. 64	pertemuan lintas program Penyakit menular (DBH-PR)	terlaksannya pertemuan		1 kali	10,000,000			1 kali	12,000,000
02. 01. 22. 37	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi (DBH-PR)	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Imuisasi		440 Orang	23,804,958			440 Orang	28,565,950
02. 01. 22. 46	Pelayanan Imunisasi dasar, PIN, Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit (DAK NON FISIK)	Terdeteksi Imunisasi Dasar,Pencegahan Penyakit Menular dan PTM		1 Paket	152,450,000			1 Paket	182,940,000
1. 02. 01. 22.	Peningkatan Kapasitas Kader Jumantik dan Pemeriksaan Jentik dalam wilayah Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Kader Jumantik dan Pemeriksaan Jentik dalam wilayah Kota Lhokseumawe		408 Orang	603,803,000			408 Orang	724,563,600
1. 02. 01. 22. ?	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular		600 Orang	305,200,000			600 Orang	366,240,000
1. 02. 01. 22. ?	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (TB) (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Penyakit Tuberculosis (TB)		350 Orang	152,810,000			350 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 22. ?	Peningkatan Pengetahuan Tentang HIV-AIDS di institusi pendidikan tingkat Menengah Pertama (DBH-PR)	Jumlah Pelajar yang Mengikuti peningkatan pengetahuan tentang HIV-AIDS		350 Orang	152,810,000			350 Orang	183,372,000
1. 02. 01. 22. ?	Peningkatan Pengetahuan tentang HIV-AIDS di institusi pendidikan tingkat menengah atas (DBH-PR)	Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti peningkatan pengetahuan tentang HIV-AIDS		600 Orang	152,810,000			600 Orang	183,372,000
	Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi pasien Rujukan (DBH-PR)	Tersedianya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		1s	70,000,000			1s	84,000,000
02 01. 16	Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana puskesmas dan jaringannya		7 Kegiatan	11,770,000,000			7 Kegiatan	14,124,000,000
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Tersedianya gedung yang memadai		1 kegiatan	900,000,000			1 kegiatan	1,080,000,000
	Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang baik		2 kegiatan	2,700,000,000			2 kegiatan	3,240,000,000
	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya sarana kesehatan yang baik		3 kegiatan	1,800,000,000			3 kegiatan	2,160,000,000
	Pembangunan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang baik		4 kegiatan	4,000,000,000			4 kegiatan	4,800,000,000
	Pengadaan Sarana Prasarana Puskrsmas Pembantu	Pengadaan Sarana Prasarana Puskrsmas Pembantu		2 Kegiatan	1,500,000,000			2 Kegiatan	1,800,000,000
	Pengadaan Bahan Logistik Puskesmas	tersedianya logistik puskesmas		1 Kegiatan	400,000,000			1 Kegiatan	480,000,000
	Pengadaan Ambulance	tersedianya logistik puskesmas		1 Kegiatan	470,000,000			1 Kegiatan	564,000,000
1. 02 01. 17	Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit jaringannya		2 Kegiatan	4,800,000,000			2 Kegiatan	5,760,000,000
	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Tersedianya Gedung Farmasi yang baik		1 kegiatan	3,500,000,000			1 kegiatan	4,200,000,000
	Pembangunan Fasilitas Rumah Sakit	Tersedianya kelengkapan rumah sakit		1 kegiatan	1,300,000,000			1 kegiatan	1,560,000,000
1. 02 01. 18	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana puskesmas dan jaringannya		2 Kegiatan	1,700,000,000			2 Kegiatan	2,040,000,000
	Forum Peduli Anak Autis dan berkebutuhan khusus	terbentuknya forum anak autis		1 kegiatan	400,000,000			1 kegiatan	480,000,000
	Pengadaan sarana prasarana gedung unit donor darah (UDD)	Tesedianya sarana dan prasarana UDD		1 kegiatan	1,300,000,000			1 kegiatan	1,560,000,000
1. 02 01. 15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya data informasi pembangunan		2 Kegiatan	70,000,000			2 Kegiatan	84,000,000
	Penyusunan Tim Angka Kredit Tenaga Kesehatan	Priode Tim Penetapan Angka Kredit		1 kegiatan	38,000,000			1 kegiatan	45,600,000
	Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit tenaga Kesehatan	Meningkatnya pengetahuan timangka kredit		1 kegiatan	32,000,000			1 kegiatan	38,400,000
1. 02 01. 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tersedianya data informasi pembangunan		3 Kegiatan	1,477,750,255			3 Kegiatan	1,773,300,306
1. 02. 01. 29. 14	Pelayanan Kesehatan anak balita, prasekolah dan anak sekolah (DAK NON FISIK)	Terdeteksi Kesehatan Anak Balita, Prasekolah dan Anak Sekolah		1 Paket	305,050,000			1 kegiatan	366,060,000
1. 02. 01. 29.	Kegiatan Pelayanan kesehatan anak Blaita, prasekolah dan anak sekolah (DAK NON FISIK)	Meningkatnya cakupan kesehatan anak balita, pra sekolah dan anak sekolah		1 paket	585,432,200			1 kegiatan	702,518,640

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 29.	Kegiatan Penyedia Bantuan Operasional kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK NON FISIK)	Tersediannya Operasional Kesehatan (BOK) UKM		1 paket	587,268,055			1 kegitan	704,721,666
1. 02 01. 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Peduli Lansia		2 Kegiatan	540,380,000			2 Kegiatan	648,456,000
1. 02. 01. 30. 12	Pelatihan kader usia lanjut desa (DBH-PR)	Jumlah Kader Pada Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Lansia di Desa		30 Orang	35,700,000			30 Orang	42,840,000
1. 02. 01. 30.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat(Usia Lanjut) (OTSUS)	Jumlah Peserta Peningkatan Kesehatan Masyarakat(Usia Lanjut)		1700 Orang	504,680,000			1700 Orang	605,616,000
1. 02 01. 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terlaksananya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak kearah yang lebih baik		99 Kegiatan	17,556,220,000			99 Kegiatan	21,067,464,000
1. 02. 01. 32. 17	Pemeriksaan Kehamilan (DAK NON FISIK)	Terdeteksi Resiko Ibu Hamil		1 Paket	195,950,000			1 Paket	235,140,000
1. 02. 01. 32. 34	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pemeliharaan Kesehatan Ibuhamil,ibu bersalin,dan ibu nifas (DBH-PR)	Meningkatnya derajat kesehatan ibu		1.600 Orang	24,570,000			1.600 Orang	29,484,000
1. 02. 01. 32. ?	Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) Revisi (MDGs 4 dan 5) (DBH-PR)	Tersusunnya rekam jejak kematian Ibu dan Bayi		80 Orang	34,000,000			80 Orang	40,800,000
1. 02. 01. 32.	Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan keluarga tidak mampu (POS-RESTI BBLR) (DBH-PR)	Jumlah Peserta Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dan keluarga tidak mampu (POS-RESTI BBLR)		1700 Orang	505,800,000			1700 Orang	606,960,000
1. 02. 01. 32.	Kegiatan Pemeriksaan Kehamilan (DAK NON FISIK)	Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan		ls	477,900,000			ls	573,480,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu (DBH-PR)	jumlah peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu		250 petugas	Rp 45,000,000			250 petugas	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Pembinaan Petugas Pelayanan kesehatan ibu hamil terintegrasi berkualitas terfokus 10 T (DBH-PR)	Terbinanya ketrampilan Petugas Pelayanan kesehatan ibu hamil terintegrasi berkualitas terfokus 10 T		250 petugas	Rp 40,000,000			250 petugas	48,000,000
1. 02. 01. 32.	Skrening ibu hamil resiko tinggi (DBH-PR)	Terlaksananya Skrening pada ibu hamil resiko tinggi		900 kasus	Rp 35,000,000			900 kasus	42,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan dan pembinaan kelas ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (DBH-PR)	terselenggaranya dan terbinanya kelas ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas didesa wilayah Kota Lhokseumawe		68 kelas	Rp 15,000,000			68 kelas	18,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan pelayanan Kunjungan rumah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terfokus dan berkualitas (DBH-PR)	Meningkatnya pelayanan Kunjungan rumah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terfokus dan berkualitas		72 sarkes (PKM, Pustu, poskesdes)	Rp 55,000,000			72 sarkes (PKM, Pustu, poskesdes)	66,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan informasi buku KIA dan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) (DBH-PR)	Tersebar luasnya informasi buku KIA dan Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)		68 desa	Rp 45,000,000			68 desa	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan informasi program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (DBH-PR)	Tersebarluasnya informasi program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas		68 desa	Rp 60,000,000			68 desa	72,000,000
1. 02. 01. 32.	Kampanye kesehatan ibu masa reproduksi dan prahamil (DBH-PR)	Terselenggaranya Kampanye kesehatan ibu masa reproduksi dan prahamil		68 desa	Rp 25,000,000			68 desa	30,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam upaya kesehatan ibu (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam upaya kesehatan ibu		250 petugas	Rp 45,000,000			250 petugas	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya kesehatan ibu (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya kesehatan ibu		500 kader kesehatan	Rp 45,000,000			500 kader keseh	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan supervisi fasilitatif program KIA (DBH-PR)	Terlaksananya supervisi fasilitatif program KIA di Puskesmas		72 sarana kesehatan	Rp 38,000,000			72 sarana keseh	45,600,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan penggunaan kohort ibu, bayi dan balita (DBH-PR)	Terpantaunya penggunaan dan pemanfaatan kohort ibu, bayi dan balita		68 desa	Rp 45,000,000			68 desa	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan pos pelayanan berkualitas terfokus pada ibu hamil resiko tinggi (DBH-PR)	Terselenggaranya pos pelayanan berkualitas terfokus pada ibu hamil resiko tinggi		68 desa	Rp 45,000,000			68 desa	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan rumah tunggu kehamilan, persalinan, nifas dan bayi resiko tinggi komplikasi (DBH-PR)	Terselenggara operasional rumah tunggu kehamilan, persalinan, nifas dan bayi resiko tinggi komplikasi		1 rumah	Rp 85,000,000			1 rumah	102,000,000
1. 02. 01. 32.	Penelusuran Kematian ibu dan bayi baru lahir (Audit Maternal Perinatal) (DBH-PR)	Teramanajemen data penyebab Kematian ibu dan bayi baru lahir (Audit Maternal Perinatal)		72 sarkes (PKM, Pustu, poskesdes)	Rp 35,000,000			72 sarkes (PKM, Pustu, poskesdes)	42,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 32.	Konsultasi program Kesga dan Gizi di dalam daerah dan keluar daerah (DBH-PR)	Terselenggaranya Konsultasi program Kesga dan Gizi di dalam daerah dan keluar daerah untuk perbaikan program kesga dan gizi		4 kali/tahun	Rp 22,000,000			4 kali/tahun	26,400,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan (asuhan persalinan normal) (DBH-PR)	meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan (asuhan persalinan normal)		250 petugas	Rp 50,000,000			250 petugas	60,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan Jaminan persalinan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas terfokus tidak memiliki jaminan kesehatan (DBH-PR)	Terselenggaranya program Jaminan persalinan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas terfokus tidak memiliki jaminan kesehatan		150 kasus	Rp 700,000,000			150 kasus	840,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan KB paska salin (DBH-PR)	penyebarluasan informasi KB paska salin kepada masyarakat		68 desa	Rp 35,000,000			68 desa	42,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan kunjungan neonatus (KN) tersandar (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas petugas pelayanan kunjungan neonatus (KN) tersandar		5000 bayi baru lahir	Rp 35,000,000			5000 bayi baru	42,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas masyarakat pelayanan kesehatan bayi baru lahir dirumah (DBH-PR)	Meningkatnya kapasitas masyarakat pelayanan kesehatan bayi baru lahir dirumah		5000 masyarakat dan tokoh masyarakat	Rp 500,000,000			5000 masyarakat dan tokoh masyarakat	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kualitas kunjungan rumah bayi baru lahir resiko tinggi (DBH-PR)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada kunjungan rumah bayi baru lahir resiko tinggi		250 petugas	Rp 200,000,000			250 petugas	240,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan inisiasi menyusui dini bayi baru lahir (DBH-PR)	Peningkatan inisiasi menyusui dini bayi baru lahir		95 sarkes (RS, BPm, Poskesdes)	Rp 37,000,000			95 sarkes (RS, BPm, Poskesdes)	44,400,000
1. 02. 01. 32.	Skrening gangguan tumbuh kembang bayi baru lahir (DBH-PR)	TerSkreningnya gangguan tumbuh kembang bayi baru lahir		2500 bayi baru lahir	Rp 88,000,000			2500 bayi baru	105,600,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan POS Penanganan terpadu dan berkualitas terfokus bayi resiko tinggi dan bblr (DBH-PR)	Terlaksananya Penyelenggaraan POS Penanganan terpadu dan berkualitas terfokus bayi resiko tinggi dan bblr		6 Pos	Rp 500,000,000			6 Pos	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas dalam skrening bayi resiko tinggi dan hypotiroid kongenital (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas petugas dalam skrening bayi resiko tinggi dan hypotiroid kongenital		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Pembinaan penyelenggaraan kelas ibu bayi dan balita (DBH-PR)	Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan kelas ibu bayi dan balita		68 kelas	Rp 45,000,000			68 kelas	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas pemantau tumbuh kembang bayi dan anak balita (SDIDTK) (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas pemantau tumbuh kembang bayi dan anak balita (SDIDTK)		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita tersandar kohort (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita tersandar kohort		150 petugas	Rp 45,000,000			150 petugas	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kualitas pelayanan Kunjungan rumah bayi dan balita resiko tinggi (DBH-PR)	Meningkatnya kualitas pelayanan Kunjungan rumah bayi dan balita resiko tinggi		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan tumbuh kembang anak prasekolah (DBH-PR)	Terpantaunya tumbuh kembang dan terdeteksi gagguan tumuh kembang anak prasekolah		9800 bayi	Rp 42,000,000			9800 bayi	50,400,000
1. 02. 01. 32.	penyelenggaraan kelas ibu anak prasekolah (DBH-PR)	Terlaksananya penyelenggaraan kelas ibu anak prasekolah		68 kelas	Rp 45,000,000			68 kelas	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan parenting day anak berkebutuhan khusus (DBH-PR)	Terlaksananya Penyelenggaraan parenting day anak berkebutuhan khusus		150 kali	Rp 100,000,000			150 kali	120,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus (DBH-PR)	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus		1 klinik	Rp 140,000,000			1 klinik	168,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan pelayanan Kunjungan rumah anak berkebutuhan khusus (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan pelayanan Kunjungan rumah anak berkebutuhan khusus		100 anak	Rp 80,000,000			100 anak	96,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan pertemuan berkala forum peduli anak ABK (DBH-PR)	Terlaksananya Penyelenggaraan pertemuan berkala forum peduli anak ABK		5 tahun x 12 kl	Rp 35,000,000			5 tahun x 12	42,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan program pelayanan balita sakit (MTBS) (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan program pelayanan balita sakit (MTBS)		6 klinik mtbs	Rp 40,000,000			6 klinik mtb	48,000,000
1. 02. 01. 32.	Pertemuan evaluasi program kesehatan anak (DBH-PR)	Terlaksananya Pertemuan evaluasi program kesehatan anak		60 kali	Rp 48,000,000			60 kali	57,600,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (DBH-PR)	Terealisasinya kegiatan Peningkatan kapasitas petugas pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah		72 sekolah dasar sederajat	Rp 45,000,000			72 sekolah dasar s	54,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas pendidik dan peserta didik pelayanan UKS (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas pendidik dan peserta didik pelayanan UKS		150 pendidik	Rp 45,000,000			150 pendidik	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan koordinasi berkala Tim Pembina UKS Kota (DBH-PR)	Terbentuknya komunikasi koordinasi berkala Tim Pembina UKS Kota		60 kali	Rp 42,000,000			60 kali	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan pelayanan penjangkaran kesehatan anak sekolah SD dan sederajat (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan pelayanan penjangkaran kesehatan anak sekolah SD dan sederajat		72 sekolah dasar sederajat	Rp 55,000,000			72 sekolah dasar s	66,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan informasi hasil pelayanan penjangkaran kesehatan anak sekolah (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan informasi hasil pelayanan penjangkaran kesehatan anak sekolah		72 sekolah dasar sederajat	Rp 55,000,000			72 sekolah dasar sederajat	66,000,000
1. 02. 01. 32.	Supervisi kegiatan uks (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Supervisi kegiatan usaha kesehatan sekolah		72 sekolah dasar sederajat	Rp 42,000,000			72 sekolah dasar sederajat	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Pelatihan Usaha kesehatan Sekolah dan perilaku sehat anak usia sekolah (DBH-PR)	Terselenggaranya Pelatihan Usaha kesehatan Sekolah dan perilaku sehat anak usia sekolah		500 peserta didik	Rp 500,000,000			500 peserta di	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan dan pembinaan kelas kesehatan remaja (DBH-PR)	Terlaksananya Penyelenggaraan dan pembinaan kelas kesehatan remaja		68 desa	Rp 500,000,000			68 desa	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Penjangkaran kesehatan usia sekolah SMP /sederajat dan SMA /sederajat (DBH-PR)	Terlaksananya Penjangkaran kesehatan usia sekolah SMP /sederajat dan SMA /sederajat sesuai standar		44 SMP/SMA sederajat	Rp 40,000,000			44 SMP/SMA sed	48,000,000
1. 02. 01. 32.	Supervisi kegiatan pelayanan kesehatan remaja (DBH-PR)	Terlaksannya kegiatan Supervisi kegiatan pelayanan kesehatan remaja		44 SMP/SMA sederajat	Rp 55,000,000			44 SMP/SMA sed	66,000,000
1. 02. 01. 32.	Pendampingan konseling remaja resiko tinggi masalah kesehatan (DBH-PR)	Terlaksananya Pendampingan konseling remaja resiko tinggi masalah kesehatan		500 kasus	Rp 35,000,000			500 kasus	42,000,000
1. 02. 01. 32.	Skrening masalah kesehatan remaja (DBH-PR)	Terlaksananya Skrening masalah kesehatan pada remaja		6000 remaja	Rp 25,000,000			6000 remaja	30,000,000
1. 02. 01. 32.	Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat (UKS/UKGS) (DBH-PR)	Peningkatan kapasitas tim UKS dalam Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat (UKS/UKGS)		44 SMP/SMA sederajat	Rp 43,000,000			44 SMP/SMA sed	51,600,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas KB paska persalinan (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas petugas KB paska persalinan		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Supervisi Program KB (DBH-PR)	Terlaksananya Supervisi p-enyelenggaraan Program KB		68 desa	Rp 42,000,000			68 desa	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Penjangkaran peserta KB Baru (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Penjangkaran peserta KB Baru		68 desa	Rp 42,000,000			68 desa	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan Informasi KB dan kesehatan prahamil (DBH-PR)	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi KB dan kesehatan prahamil		68 desa	Rp 42,000,000			68 desa	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas calon pasangan usia subur persiapan kehamilan, persalinan selamat dan sehat (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas calon pasangan usia subur persiapan kehamilan, persalinan selamat dan sehat		1500 catin	Rp 500,000,000			1500 catin	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Kunjungan rumah calon PUS beresiko (DBH-PR)	Terlaksananya Kunjungan rumah pada calon PUS beresiko		1500 kasus	Rp 42,000,000			1500 kasus	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas pemeriksaan payudara dan kanker servik Usia reproduksi (DBH-PR)	Terselenggaranya Peningkatan kapasitas petugas pemeriksaan payudara dan kanker servik Usia reproduksi		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas Pemeriksaan kesehatan calon pasangan usia subur (PUS)/ pranikah (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas Pemeriksaan kesehatan calon pasangan usia subur (PUS)/ pranikah		250 petugas	Rp 42,000,000			250 petugas	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan penyelenggaraan pos pelayanan lansia integrasi (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan penyelenggaraan pos pelayanan lansia integrasi		68 Pos	Rp 500,000,000			68 Pos	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Pembinaan Pos Peningkatan latihan fisik lansia (DBH-PR)	Terselenggaranya Pembinaan Pos Peningkatan latihan fisik lansia		68 Pos	Rp 42,000,000			68 Pos	50,400,000
1. 02. 01. 32.	kunjungan rumah lansia sakit dan resiko tinggi (DBH-PR)	Terlaksananya kunjungan rumah lansia sakit dan resiko tinggi		500 kasus	Rp 42,000,000			500 kasus	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan kelas pemberdayaan dan belajar kesehatan lansia (DBH-PR)	Terealisasinya Penyelenggaraan kelas pemberdayaan dan belajar kesehatan lansia		68 kelas	Rp 42,000,000			68 kelas	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas pada skrening kesehatan lanjut usia (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas pada skrening kesehatan lanjut usia		250 petugas	Rp 150,000,000			250 petugas	180,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat Deteksi gangguan gizi prahamil pada remaja dan wanita usia subur (DBH-PR)	Terlaksananya upaya Peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat Deteksi gangguan gizi prahamil pada remaja dan wanita usia subur		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemberian PMT prahamil dan remaja KEK (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemberian PMT prahamil dan remaja KEK		250 kasus	Rp 300,000,000			250 kasus	360,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemberian PMT bumil kurang energi kronis (KEK) (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemberian PMT bumil kurang energi kronis (KEK)		200 kasus	Rp 200,000,000			200 kasus	240,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemberian PMT Gizi kurang (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemberian PMT Gizi kurang		350 kasus	Rp 300,000,000			350 kasus	360,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemberian PMT gizi buruk (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemberian PMT gizi buruk		50 kasus	Rp 80,000,000			50 kasus	96,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan Bumil KEK (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Bumil KEK		100 posyandu	Rp 200,000,000			100 posyand	240,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan Balita dibawah garis merah (BGM) (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Balita dibawah garis merah (BGM)		68 desa	Rp 200,000,000			68 desa	240,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan Balita Gizi Kurang (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Balita Gizi Kurang		68 desa	Rp 150,000,000			68 desa	180,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan Balita Gizi buruk (washting) (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Balita Gizi buruk (washting)		68 desa	Rp 150,000,000			68 desa	180,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan Balita gizi pendek (Stunting) (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan Balita gizi pendek (Stunting)		68 desa	Rp 100,000,000			68 desa	120,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan balita gizi lebih (obesitas) (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan balita gizi lebih (obesitas)		68 desa	Rp 46,000,000			68 desa	55,200,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan balita anemia (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan balita yang mengalami anemia		68 desa	Rp 42,000,000			68 desa	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan pemberian FE pada ibu hamil (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan pemberian FE pada ibu hamil		100 posyandu	Rp 42,000,000			100 posyand	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Pemantuan Bumil anemia (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantuan Bumil yang mengalami anemia		68 desa	Rp 43,000,000			68 desa	51,600,000
1. 02. 01. 32.	Pemantaun pemberian tablet fe remaja Putri (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantaun pemberian tablet fe remaja Putri		68 desa	Rp 43,000,000			68 desa	51,600,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan remaja putri anemia (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan remaja putri anemia		68 desa	Rp 43,000,000			68 desa	51,600,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan bayi berat lahir rendah (BBLR) (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan bayi berat lahir rendah (BBLR)		68 desa	Rp 43,000,000			68 desa	51,600,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan kader dan masyarakat dalam pemberian makanan bayi dan balita (PMBA) (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan kader dan masyarakat dalam pemberian makanan bayi dan balita (PMBA)		250 petugas	Rp 500,000,000			250 petugas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas kader dalam program upaya peningkatan gizi masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas kader dalam program upaya peningkatan gizi masyarakat		500 kader kesehatan	Rp 56,000,000			500 kader keseh	67,200,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kualitas penimbangan balita D/S (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas penimbangan balita D/S		21325 balita	Rp 42,000,000			21325 balita	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan informasi gizi masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan informasi gizi masyarakat		68 desa	Rp 500,000,000			68 desa	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Penyebarluasan informasi gizi pada penderita penyakit tidak menular dan penyakit menular (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan informasi gizi pada penderita penyakit tidak menular dan penyakit menular		68 desa	Rp 2,000,000,000			68 desa	2,400,000,000
1. 02. 01. 32.	Supervisi penyelenggaraan posyandu (DBH-PR)	Terlaksananya Supervisi penyelenggaraan posyandu		100 posyandu	Rp 42,000,000			100 posyand	50,400,000
1. 02. 01. 32.	Penyelenggaraan dan pembinaan klinik gizi (DBH-PR)	Terlaksananya klinik pelayanan gizi balita di Kota Lhokseumawe		2 Puskesmas	Rp 500,000,000			2 Puskesmas	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan upaya pemberian ASI eksklusif (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan upaya pemberian ASI eksklusif		100 petugas	Rp 53,000,000			100 petugas	63,600,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan upaya inisiasi menyusu dini (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan upaya inisiasi menyusu dini		250 bidan	Rp 45,000,000			250 bidan	54,000,000
1. 02. 01. 32.	Revitalisasi Posyandu menuju posyandu mandiri dan purnama (DBH-PR)	Terlaksananya Revitalisasi Posyandu menuju posyandu mandiri dan purnama		101 Posyandu	Rp 150,000,000			101 Posyand	180,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya keluarga sadar gizi (KADARZI) (DBH-PR)	Terlaksananya Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya keluarga sadar gizi (KADARZI)		800 keluarga	Rp 500,000,000			800 keluarga	600,000,000
1. 02. 01. 32.	Pemantauan status gizi balita (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Pemantauan status gizi balita		21325 balita	Rp 35,000,000			21325 balita	42,000,000
1. 02. 01. 32.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program upaya peningkatan gizi masyarakat (DBH-PR)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam program upaya peningkatan gizi masyarakat		300 kader kesehatan	Rp 500,000,000			300 kader keseh	600,000,000
1. 02. 01. 34	Program Evaluasi Pengendalian dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi pengendalian dan pelaporan		10 Kegiatan	825,815,000			10 Kegiatan	990,978,000
1. 02. 01. 34. 16	Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan (DBH PR)	Jumlah Peserta yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelayanan		76 Faskes	91,310,000			76 Faskes	109,572,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 02. 01. 34. 21	Peningkatan sistem informasi publik kesehatan terpadu terintegrasi Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	Tersedianya informasi kesehatan		2 Paket	280,000,000			2 Paket	336,000,000
1. 02. 01. 34. 38	Pengembangan sistem pengelolaan informasi pelayanan kesehatan di Puskesmas (DBH-PR)	Tersedianya data yang cepat, tepat, akurat dan konsisten		55 Peserta	57,450,000			55 Peserta	68,940,000
1. 02. 01. 34. 37	Peningkatan kapasitas Petugas tentang teknik komunikasi dan analisis data di Puskesmas (DBH-PR)	Meningkatnya kapasitas petugas kesehatan dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi kepada publik di Puskesmas		55 Peserta	63,400,000			55 Peserta	76,080,000
1. 02. 01. 34. 23	Pelatihan pelayanan profesional akuntabel santun transparansi dan empati (PASTE) di Puskesmas (DBH-PR)	Meningkatnya kapasitas petugas kesehatan dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi kepada publik di Puskesmas		55 Peserta	62,450,000			55 Peserta	74,940,000
1. 02. 01. 34. 04	Pertemuan Triwulan Analisa Pelaporan SP2TP dan SIMPUS Puskesmas dan monitoring (DBH-PR)	Jumlah pertemuan triwulan Analisa pelaporan SP2TP & SIMPUS Puskesmas		20 kali	52,855,000			20 kali	63,426,000
1. 02. 01. 34. 34	Peningkatan kapasitas administrasi KTU pada Dinkes, PKM dan Pustu (DBH-PR)	meningkatnya pengetahuan petugas pengelola administrasi		100%	58,000,000			100%	69,600,000
1. 02. 01. 34. 35	Pelatihan Sikda Ginerik dan informasi data kesehatan (DBH-PR)	meningkatnya pengetahuan petugas pelaporan		100%	53,000,000			100%	63,600,000
1. 02. 01. 34. 17	Penilaian mandiri kualitas Data Rutin (PMKDR) Kota Lhokseumawe (DBH-PR)	meningkatnya pengetahuan petugas penyusunan data rutin puskesmas		100%	61,000,000			100%	73,200,000
1. 02. 01. 34. 31	Pelatihan pemanfaatan teknologi sosial media bagi petugas kesehatan pada Puskesmas (DBH-PR)	Meningkatnya Pengetahuan Petugas dalam pemanfaatan teknologi sosial media untuk penyebaran informasi kesehatan pada Puskesmas di Kota Lhokseumawe		2 Kali	46,350,000			2 Kali	55,620,000
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
	BELANJA				143,811,092,467				170,332,474,405
	Belanja Tidak Langsung				5,500,365,558				6,050,402,114
	Belanja Langsung				138,310,726,909				164,282,072,291
1 03 01	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				138,310,726,909				164,282,072,291
1 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		10 Kegiatan	1,367,107,200			10 Kegiatan	1,640,528,640
1 03 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,160,000			12 Bulan	2,592,000
1 03 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	320,774,400			12 Bulan	384,929,280
1 03 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		372 OB	297,907,200			372 OB	357,488,640
1 03 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	36,000,000			12 Bulan	43,200,000
1 03 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	28,800,000			12 Bulan	34,560,000
1 03 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	14,400,000			12 Bulan	17,280,000
1 03 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Persediaan Surat kabar dan Referensi Pendukung Perencanaan		12 Bulan	1,641,600			12 Bulan	1,969,920
1 03 01 01 17	Penyediaan Makan dan minum	Periode penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	5,760,000			12 Bulan	6,912,000
1 03 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah	Periode rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	86,400,000			12 Bulan	103,680,000
1 03 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		570 OB	573,264,000			570 OB	687,916,800
1 03 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		5 Kegiatan	501,582,277			5 Kegiatan	601,898,732
1 03 01 02 11	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60 Unit	28,800,000			60 Unit	34,560,000
1 03 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Periode pemeliharaan rutin Gedung Kantor		12 Bulan	279,534,277			12 Bulan	335,441,132
1 03 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan (1 unit x 12 Bln)		12 UB	38,361,600			12 UB	46,033,920
1 03 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional (8 unit x 12 Bln)		96 UB	147,686,400			96 UB	177,223,680
1 03 01 02 28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin Peralatan dan Perlengkapan kantor		4 Jenis	7,200,000			4 Jenis	8,640,000
								0	
1 03 01 05	Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Terelaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	120,000,000
1 03 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Diikuti		5 Kegiatan	100,000,000			5 Kegiatan	120,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 01 07	program penyusunan perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja			2 Kegiatan	14,400,000			2	17,280,000
1 03 01 07 01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra		5 Buku	7,200,000			Kegiatan 5 Buku	8,640,000
2 03 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPK		5 Buku	7,200,000			5 Buku	8,640,000
1 03 01 10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			1 Kegiatan	6,300,000			1	7,560,000
1 03 01 10 11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum		5 Buku	6,300,000			Kegiatan 5 Buku	7,560,000
1 03 01 11	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pembangunan			1 Kegiatan	15,000,000			1	18,000,000
1 03 01 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		15 Hari	15,000,000			Kegiatan 15 Hari	18,000,000
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			7 Kegiatan	93,155,544,312			7	111,786,653,174
1 03 01 15 02	Survei kantor jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kantorjalan dan Jembatan		1 Dokumen	200,000,000			Kegiatan 1 Dokumen	240,000,000
1 03 01 15 03	Pembangunan Jalan (DAK)	Jumlah pembangunan jalan		80 Paket	28,327,041,818			80 Paket	33,992,450,182
1 03 01 15 05	Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan		2 Jembatan	600,000,000			2 Jembatan	720,000,000
1 03 01 15 06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelapor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelapor Pembangunan Jalan dan Jembatan		1 Dokumen	75,000,000			1 Dokumen	90,000,000
1 03 01 15 07	Pembangunan Jalan (DAK)	Jumlah Pembangunan Jalan melalui DAK		1 Paket	44,561,331,238			1 Paket	53,473,597,486
1 03 01 15 08	Pembangunan Jalan (OTSUS)	Jumlah Pembangunan Jalan melalui Otsus		8 Paket	13,032,171,256			8 Paket	15,638,605,507
1 03 01 15 09	Pembangunan Jembatan (OTSUS)	Jumlah Pembangunan Jalan melalui Otsus		4 Paket	6,360,000,000			4 Paket	7,632,000,000
1 03 01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			4 Kegiatan	4,875,000,000			4	5,850,000,000
1 03 01 16 02	Survei Kantor Saluran Drainase Gorong/gorong	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun		1 Dokumen	200,000,000			Kegiatan 1 Dokumen	240,000,000
2 03 01 16 03	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong			25 Unit	3,600,000,000			25 Unit	4,320,000,000
3 03 01 16 04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelapor			1 Dokumen	75,000,000			1 Dokumen	90,000,000
4 03 01 16 05	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong (Otsus)			1 Paket	1,000,000,000			1 Paket	1,200,000,000
1 03 01 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			3 Kegiatan	7,895,360,000			3	9,474,432,000
1 03 01 17 02	Survei kemiringan Lereng Turap/Talud/Bronjong	Jumlah panjang turap/talud/bronjong terbangun		1 Dokumen	200,000,000			Kegiatan 1 Dokumen	240,000,000
2 03 01 17 03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			20 Talud	1,215,360,000			20 Talud	1,458,432,000
3 03 01 17 06	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Otsus)			2 Talud	6,480,000,000			2 Talud	7,776,000,000
1 03 01 18	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan dan jembatan			2 Kegiatan	600,000,000			2	720,000,000
1 03 01 18 03	Rehabilitasi /Pemeliharaan JALAN	Terbayarnya Kewajiban		1 jalan	360,000,000			Kegiatan 1 jalan	432,000,000
1 03 01 18 06	Rehabilitasi /Pemeliharaan Saluran Air	Jumlah saluran air yang terpelihara		1 Saluran	240,000,000			1 Saluran	288,000,000
1 03 01 26	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber daya air lainnya			2 Kegiatan	1,500,000,000			2 Kegiatan	600,000,000
1 03 01 26 01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah sarana penampung air		1 Unit	1,000,000,000			1 Unit	1,200,000,000
2 03 01 26 02	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embun dan Bangunan air lainnya			1 Unit	500,000,000			1 Unit	600,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			5 Kegiatan	12,026,433,120			5	14,431,719,744
1 03 01 27 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah prasarana dan saluran air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersedia		30 Paket	1,317,600,000			5 Kegiatan 30 Paket	1,581,120,000
1 03 01 27 10	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)	Jumlah Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		1 Paket	4,616,640,000			1 Paket	5,539,968,000
1 03 01 27 11	Peningkatan Prasarana Sanitasi (DAK)	Jumlah Prasarana Sanitasi		1 Paket	3,692,193,120			1 Paket	4,430,631,744
1 03 01 27 15	Monitoring Air Limbah Komunal(Kegiatan Sanimas-IDB)	Jumlah Prasarana Air Limbah Komunal		1 Paket	900,000,000			1 Paket	1,080,000,000
2 03 01 27 16	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus)	Jumlah Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus)		1 Paket	1,500,000,000			1 Paket	1,800,000,000
1 03 01 28	Program Pengendalian Banjir			1 Kegiatan	10,000,000,000			1 Kegiatan	12,000,000,000
1 03 01 28 13	Pembangunan Prasarna Pengaman Pantai (SILPA OTSUS)	Jumlah Terbangunnya Prasarana Pengaman Pantai melalui Otsus		1 unit	10,000,000,000			1 unit	12,000,000,000
1 03 01 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			2 Kegiatan	3,000,000,000			2	3,600,000,000
1 03 01 29 01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah perencanaan		20 DED	1,200,000,000			20 DED	1,440,000,000
1 03 01 29 04	Revitalisasi Kawasan	Jumlah Gedung yang dibangun		1 Unit	1,800,000,000			1 Unit	2,160,000,000
1 03 01 30	Program Perencanaan Tata Ruan			3 Kegiatan	2,454,000,000			3	2,454,000,000
1 03 01 30 03	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tentang Rencana tata ruang	Jumla Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tentang Rencana tata ruang		1 Sosialisasi	200,000,000			1 Sosialisasi	240,000,000
2 03 01 30 11	Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Di Revisi		1 Dokumen	750,000,000			1 Dokumen	900,000,000
3 03 01 30 13	Survei dan Pemetaan	Jumlah Dokumen Survei dan Pemetaan		1 Dokumen	200,000,000			1 Dokumen	240,000,000
1 03 01 32	Pemanfaatan Ruang			1 Kegiatan	200,000,000			1	240,000,000
1 03 01 32 01	Sosialisasi Kebijakan,Norma,Standar,Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan,Norma,Standar,Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang		1 Sosialisasi	200,000,000			1 Sosialisasi	240,000,000
1 03 01 33	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			3 Kegiatan	600,000,000			3	720,000,000
1 03 01 33 01	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 Kebijakan	200,000,000			3 Kegiatan 1 Kebijakan	240,000,000
2 03 01 33 02	Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 Manual	200,000,000			1 Manual	240,000,000
3 03 01 33 07	Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 Sosialisasi	200,000,000			1 Sosialisasi	240,000,000
1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				57,653,529,152				69,184,234,982
1 04 01 15	Program Pengembangan Perumahan			1 Kegiatan	11,198,893,750				13,438,672,500
1 04 01 15 14	Pembangunan Rumah untuk masyarakat kurang mampu	Jumlah Pembangunan Rumah untk masyarakat miskin		130 Rumah	11,198,893,750			130 Rumah	13,438,672,500
1 04 01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			1 Kegiatan	1,476,000,000			1	1,771,200,000
1 04 01 16 07	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun		32 jalan	1,476,000,000			1 Kegiatan 32 jalan	1,771,200,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 01 21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum			3 Kegiatan	44,978,635,402			3 Kegiatan	53,974,362,482
1 04 01 21 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang terbangun		80 Unit	28,878,635,402			80 Unit	34,654,362,482
1 04 01 21 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS)	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang terbangun dengan dana OTSUS		2 Unit	6,600,000,000			2 Unit	7,920,000,000
1 04 01 21 03	Pengembangan rumah Sehat sederhana (OTSUS)	Jumlah rumah sehat sederhana yang terbangun dengan dana OTSUS		100 Unit	9,500,000,000			100 Unit	11,400,000,000
1 05 01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik								
	BELANJA				1,844,408,382				2,028,849,220
	Belanja Tidak Langsung				1,844,408,382				2,028,849,220
	Belanja Langsung				-				-
1 05	Kesbagpol				6,872,615,110				7,559,876,621
1 05 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			718,390,457				790,229,503
1 05 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,270,500			12 Bulan	1,397,550
1 05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	85,668,000			12 Bulan	94,234,800
1 05 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		120 OB	119,466,422			120 OB	131,413,064
1 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	30,250,000			12 Bulan	33,275,000
1 05 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	12,100,000			12 Bulan	13,310,000
1 05 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	6,050,000			12 Bulan	6,655,000
1 05 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	1,379,400			12 Bulan	1,517,340
1 05 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	25,300,000			12 Bulan	27,830,000
1 05 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	72,600,000			12 Bulan	79,860,000
1 05 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		600 OB	364,306,135			600 OB	400,736,749
2 17 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			283,287,620				311,616,382
1 05 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65 Unit	138,640,920			65 Unit	152,505,012
1 05 01 02 14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		12 Bulan	34548800			12 Bulan	38,003,680
1 05 01 02 15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Periode Mobil Jabatan Yang Terpelihara		12 Bulan	32,234,400			12 Bulan	35,457,840
1 05 01 02 16	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional	Periode Mobil Operasional Yang Terpelihara		12 Bulan	71,341,600			12 Bulan	78,475,760
1 05 01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara		15 Unit	6,521,900			15 Unit	7,174,090
1 05 01 04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			125,400,000				137,940,000
1 05 01 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		26 Orang	28,600,000			26 Orang	31,460,000
1 05 01 06	Penyediaan sewa Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor		2 Pintu Ruko	96,800,000			2 Pintu Ruko	106,480,000
1 05 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Penigkatan Kualitas SDM Aparatur			7,000,000				7,700,000
1 05 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		15 Buku	7,000,000			15 Buku	7,700,000
1 05 01 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Perencanaan Bagi SKPD di Kota Lhokseumawe			17,500,000				19,250,000
1 05 01 11 02	Kegitan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	17,500,000			6 Hari	19,250,000
1 05 01 15	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			30,000,000				33,000,000
1 05 01 115 11	Peringatan Hari Bela Negara	Jumlah Hari Ulang Tahun		1 Paket	30,000,000			1 Paket	33,000,000
1 05 01 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	TERPELIHARANYA KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			786,564,408				865,220,849
1 05 01 16 01	Penanganan Konflik Sosial Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah Periode Laporan		4 Laporan	166,359,408			4 Laporan	182,995,349

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 16 02	Pelatihan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		204 Laporan	147,000,000			204 Laporan	161,700,000
1 05 01 16 03	Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah Periode Laporan		4 Laporan	97,955,000			4 Laporan	107,750,500
1 05 01 16 04	Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Kota Lhokseumawe	Jumlah Periode Laporan		4 Laporan	101,750,000			4 Laporan	111,925,000
1 05 01 16 05	Bomtek Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Gangguan Konflik Bagi Paratur Gampong dan Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		680 Orang	273,500,000			680 Orang	300,850,000
1 05 01 17	PROGRAM PENINGKATAN SDM KEARSIPAN				700,600,000				770,660,000
1 05 01 17 01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		50 Orang	72,750,000			50 Orang	80,025,000
1 05 01 17 02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalngan Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		204 Orang	135,000,000			204 Orang	148,500,000
1 05 01 17 03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		68 Orang	79,000,000			68 Orang	86,900,000
1 05 01 17 04	Peningkatan Pemahaman Hak Azasi Manusia	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		204 Orang	127,500,000			204 Orang	140,250,000
1 05 01 17 05	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ormas, Orsps dan LSM di Kota Lhokseumawe	Jumlah Periode Laporan		4 Laporan	38,000,000			4 Laporan	41,800,000
1 05 01 17 10	Verifikasi ORMAS, ORSOS dan LSM	Jumlah Periode Laporan		4 Laporan	50,000,000			4 Laporan	55,000,000
1 05 01 17 15	Sosialisasi Ormas, ORSOS, LSM dan Lembaga	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		100 Ormas	78,350,000				86,185,000
1 05 01 17 16	Penguatan Kelembagaan ORMAS, ORSOS, dan LSM	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		200 Orang	120,000,000				132,000,000
1 05 01 18	KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	ADANYA KOORDINASI ANTAR LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN KESATUAN			463,422,825				509,765,108
1 05 01 18 07	Peningkatan Kapasitas KOMINDA Kota Lhokseumawe	Jumlah Anggota Kominda		4 Laporan	125,000,000			4 Laporan	137,500,000
1 05 01 18 08	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		50 Orang	71,027,700			50 Orang	78,130,470
1 05 01 18 09	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		40 Orang	55,967,000			40 Orang	61,563,700
1 05 01 18 10	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		272 Orang	101,628,700			272 Orang	111,791,570
1 05 01 18 12	Peningkatan Kapasitas Kebangsaan (FPK) Kota Lhokseumawe	Jumlah Anggota FPK		1 Tahun	52,274,100			1 Tahun	57,501,510
1 05 01 18 13	Peningkatan Kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Anggota FKUB		1 Tahun	57,525,325			1 Tahun	63,277,858
1 05 01 19	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	MENINGKATNYA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			603,925,150				664,317,665
1 05 01 19 05	Pelatihan Dasar Ilmu Intelijen dan Pendeteksi Dini Permasalahan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Yang Pelatihan		272 Orang	73,542,150			272 Orang	80,896,365
1 05 01 19 06	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Koordinasi		12 Bulan	136,754,300			12 Bulan	150,429,730
1 05 01 19 07	Sosialisasi Permendagri no. 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	Jumlah Peserta Yang Pelatihan		136 Orang	137,000,000			136 Orang	150,700,000
1 05 01 19 08	Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing	Jumlah Peserta Yang Pembekalan		100 Orang	101,628,700			100 Orang	111,791,570
1 05 01 19 09	Sosialisasi Permendagri No. 49 Tahun 20120 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing	Jumlah Peserta Yang Pelatihan		150 Orang	155,000,000			150 Orang	170,500,000
1 05 01 20	PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	TERLAKSANANYA PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN PENYAKIT (PEKAT) DI MASYARAKAT			505,000,000				555,500,000
1 05 01 20 01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras/Narkoba	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan		204 Orang	370,000,000				407,000,000
1 05 01 20 02	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan		136 Orang	135,000,000				148,500,000
1 05 01 21	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	ADANYA DATABASE PARTAI POLITIK, ORMAS, ORSOS DAN LSM YANG AKURAT			1,774,269,650				1,951,696,615

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 21 03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terlaksananya Forum Diskusi Politik		12 Bulan	125,000,000			12 Bulan	137,500,000
1 05 01 21 06	Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Aspirasi Melalui Partai Politik	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		136 Orang	138,270,000			136 Orang	152,097,000
1 05 01 21 07	Verifikasi Banruan PARPOL	Jumlah Bantuan Parpol		12 Bulan	45,000,000			12 Bulan	49,500,000
1 05 01 21 13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Parati Nasional dan Partai Lokal	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		27 Orang	31,472,150			27 Orang	34,619,365
1 05 01 21 14	Sosialisasi PERPU Tentang Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Bagi PARNAS dan Parlok	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		27 Orang	31,999,650			27 Orang	35,199,615
1 05 01 21 15	Rapat Koordinasi Dengan Partai Politik	Terlaksananya Rapat Koordinasi		12 Bulan	127,527,850			12 Bulan	140,280,635
1 05 01 21 16	Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Tahapan dan Tujuan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan		680 Orang	437,500,000			680 Orang	481,250,000
1 05 01 21 17	Sosialisasi Pemilihan Umum Bagi Pemilih Pemula	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		300 Orang	285,000,000			300 Orang	313,500,000
1 05 01 21 18	Penyuluhan Partisipasi Masyarakat Terhadap PILKADA	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan		136 Orang	175,000,000			136 Orang	192,500,000
1 05 01 21 19	Penyuluhan Perilaku Netralitas Dalam Pemilu Bagi Aparatur Pemerintah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan		150 Orang	97,500,000			150 Orang	107,250,000
1 05 01 21 20	Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Tahapan dan Tujuan PEMILU Tahun 2019	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan		120 Orang	150,000,000			120 Orang	165,000,000
1 05 01 21 21	Koordinasi Penegak Hukum PEMILU	Terlaksananya Koordinasi		12 Bulan	130,000,000			12 Bulan	143,000,000
1 05 01 23 06	DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU	LANCARNYA PENYELENGGARAAN PEMILU			857,255,000				942,980,500
1 05 01 23 06	Penyuluhan Partisipasi Masyarakat Terhadap PEMILU	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		204 Orang	153,000,000			204 Orang	168,300,000
1 05 01 23 09	Dukungan Terhadap Operasional KIP Kota Lhokseumawe	Tersedianya Operasional KIP Kota Lhokseumawe		12 Bulan	117,920,000			12 Bulan	129,712,000
1 05 01 23 22	Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi		500 Orang	375,850,000			500 Orang	413,435,000
1 05 01 23 23	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan PEMILU	Jumlah TIM Dalam Pelaksanaan PEMILU		50 Orang	210,485,000			50 Orang	231,533,500
1. 05 02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah								
1. 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)				18,895,399,274				22,674,479,129
	BELANJA				23,316,683,623				27,537,891,913
	Belanja Tidak Langsung				4,421,284,349				4,863,412,784
	Belanja Langsung				18,895,399,274				22,674,479,129
1 .05 .02 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terlaksannnya kegiatan administarsi perkantoran			7,601,331,840				9,121,598,208
1 .05 .02 01 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	4,560,000			12 Bulan	5,472,000
1 .05 .02 01 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	154,080,000			12 Bulan	184,896,000
1 .05 .02 01 .07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		192 OB	161,640,000			192 OB	193,968,000
1 .05 .02 01 .10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	72,000,000			12 Bulan	86,400,000
1 .05 .02 01 .11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	72,000,000
1 .05 .02 01 .13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	42,996,000			12 Bulan	51,595,200
1 .05 .02 01 .15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		365 Eks	13,440,000			365 Eks	16,128,000
1 .05 .02 01 .17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		11 Bulan	1,627,464,000			11 Bulan	1,952,956,800
1 .05 .02 01 .18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan		12 Bulan	240,000,000			12 Bulan	288,000,000
1 .05 .02 01 .20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		2940 OB	4,916,544,000			2940 OB	5,899,852,800
1 .05 .02 01 .21	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS terbayar		2940 OB	308,607,840			2940 OB	370,329,408
1 05 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur			5,651,165,890				6,781,399,068
1 .05 .02 02 .03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung dan pagar yang dibangun		1 Unit	11,000,000			1 Unit	13,200,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .05 .02 02	Lanjutan Pembangunan Mushalla dan Tempat Wuduk Satpol PP dan WH	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Mushalla dan Tempat Wuduk Satpol PP dan WH		1 Paket	75,000,000			1 Paket	90,000,000
1 .05 .02 02	Pemasangan Paving Blok di Belakang Kantor Satpol PP dan WH	Terpasangnya Paving Blok di Belakang Kantor Satpol PP dan WH		1 Paket	65,000,000			1 Paket	78,000,000
1 .05 .02 02	Pembuatan Saluran Air Dalam Lingkungan Satpol PP dan WH	Terlaksananya Pembuatan Saluran Air di Lingkungan Satpol PP dan WH		1Paket	40,000,000			1 Paket	48,000,000
1 .05 .02 02	Biaya Rehab Ruangan Kantor Satpol PP dan WH	Terlaksananya Biaya Rehab Ruangan Kantor Satpol PP dan WH		1Paket	80,000,000			1 Paket	96,000,000
1 .05 .02 02	Pengadaan Taman Pagar Kantor Satpol PP dan WH	Terwujudnya Taman Pagar Kantor Satpol PP dan WH		1Paket	20,000,000			1Paket	24,000,000
1 .05 .02 02 .11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan		15 UB	683,832,744			15 UB	820,599,293
1 .05 .02 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan WH	Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP dan WH yang Tersedia		558 UB	4,227,613,146			558 UB	5,073,135,775
1 .05 .02 02	Pembangunan Tempat Parkir Belakang Kantor Satpol PP dan WH	Jumlah tempat parkir yang dibangun		1 Unit	60,000,000			1 Unit	72,000,000
1 .05 .02 02	Pengadaan Pamphlet Larangan	Jumlah Pamphlet Larangan		30 Buah	30,000,000			30 Buah	36,000,000
1 .05 .02 02 .22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode pemeliharaan rutin gedung kantor		12 Bulan	10,000,000			12 Bulan	12,000,000
1 .05 .02 02 .23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil Jabatan		12 Bulan	39,960,000			12 UB	47,952,000
1 .05 .02 02 .24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		60 UB	184,200,000			60 UB	221,040,000
1 .05 .02 02	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 Unit	60,000,000			1 Unit	72,000,000
1 .05 .02 02	Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas		1 UB	18,000,000			1 UB	21,600,000
1 .05 .02 02	Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional		2 UB	30,000,000			2 UB	36,000,000
1 .05 .02 02 .30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor (Mobiler, komputer, dll)	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor		26 UB	16,560,000			26 UB	19,872,000
1 05 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparatur			440,594,724				528,713,669
1 .05 .02 03 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		297 OP	423,677,124			297 OP	508,412,549
1 .05 .02 03 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk PPNS		3 OP	16,917,600			3 OP	20,301,120
1 05 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			327,484,400				392,981,280
1 .05 .02 05 .01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		6 Org	145,200,000			6 Org	174,240,000
1 .05 .02 05 .02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi		80 Org	31,004,400			80 Org	37,205,280
1 .05 .02 05 .05	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kapasitas SDM aparatur		50 Org	101,280,000			50 Org	121,536,000
1 .05 .02 05	Biaya Seleksi Penerimaan Personil WH	Jumlah Personil WH yang di Seleksi		1 Ls	50,000,000			1 Ls	60,000,000
1 05 02 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Tersusunnya buku Renja			5,000,000				6,000,000
1 .05 .02 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kerja	Jumlah buku yang di cetak		10 Buku	5,000,000			10 Buku	6,000,000
1 05 02 10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Buku SPM			5,200,000				6,240,000
1 .05 .02 10 11	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah buku SPM		10 Buku	5,200,000			10 Buku	6,240,000
1 05 02 11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Ikut Mengsukkseskan Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan			16,764,000				20,116,800
1 .05 .02 11 .01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		7 Hari	16,764,000			7 Hari	20,116,800
1 05 02 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya sistem Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			3,209,602,420				3,851,522,904
1 .05 .02 15 .03	Pelatihan Pengendalian Kemanan dan Kenyaman Lingkungan	Terbayarnya kewajiban 2016		528 Org	750,062,420			528 Org	900,074,904
1 .05 .02 15 .07	Peningkatan Penertiban Syari'at Islam Kota Lhokseumawe	Jumlah Tenaga Penertiban Syari'at Islam Kota Lhokseumawe		50 Org	544,680,000			50 Org	653,616,000
1 .05 .02 15 .08	Pelaksanaan Hukuman Pelanggaran Syariat Islam	Jumlah pelaksanaan hukuman pelanggaran Syariat Islam		5 Kali	198,660,000			5 Kali	238,392,000
1 .05 .02 15 13	Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan WH	Jumlah aparatur yang ikut poengenaln kesamaptaan Satpol PP dan Wh		84 Org	100,000,000			84 Org	120,000,000
1 .05 .02 15	Peningkatan Kapasitas Personil WH	Jumlah Personil WH yang Ikut Pelatihan Dasar		20 Org	70,000,000			20 Org	84,000,000
1 .05 .02 15 16	Pembinaan dan penanganan Pelanggaran Qanun	Periode kegiatan pembinaan dan penanganan Qanun		12 Bulan	144,000,000			12 Bulan	172,800,000
1 .05 .02 15	Pelaksanaan Pengawasan Ibadah Sebelum Shalat Jumat	Periode Pengawasan Patroli Sebelum Shalat Jumat		12 Bulan	40,000,000			12 Bulan	48,000,000
1 .05 .02 15	Pengawasan / Pengendalian Isu-Isu di Lapangan	Terlaksananya Pengawasan / Pengendalian Isu-Isu di Lapangan		1 Ls	180,000,000			1 Ls	216,000,000
1 .05 .02 15 17	Pengawasan Syariat Islam Pos Pengamanan Objek Wisata Kota Lhokseumawe	Terwujud pengawasan syariat islam ditempat-tempat wisata		1 Ls	50,000,000			1 Ls	60,000,000
1 .05 .02 15 18	Pengamanan Pejabat/ Tamu-tamu Negara (VIP)	Periode Pengamanan terhadap Pejabat/Tamu Negara		1 Ls	158,400,000			1 Ls	190,080,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .05 .02 .15 19	Pengamanan Kantor Walikota/ Rumah Dinas/ Aset Daerah	Periode Pengamanan Kantor Walikota/ Rumah Dinas/ Aset Daerah		1 Ls	973,800,000			1 Ls	1,168,560,000
1 05 02 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terwujudnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			580,980,000				697,176,000
1 .05 .02 .16 6	Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Periode penertiban peraturan Daerah dan Kepala Daerah		50 Org	416,280,000			50 Org	499,536,000
1 .05 .02 .16 10	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramdhan dan Hari Besar Islam	Periode pengawasan dan pengendalian ketertiban		12 Bulan	111,450,000			12 Bulan	133,740,000
1 .05 .02 .16 11	Pengamanan Ketupan Rencong H-7 dan H4 dan Hari Natal dan Tahun Baru	Jumlah tenaga Satpol PP yang melakukan pengamanan		15 Bulan	32,500,000			15 Org	39,000,000
1 .05 .02 .16 12	Pengamanan Malam Takbiran Idul Fitri (Pawai) dan Shalat Idul Fitri serta Pengamanan Takbiran Idul Adha	Periode pengamanan malam takbiran dan shalat hari raya		4 Kali	5,850,000			4 Kali	7,020,000
1 .05 .02 .16 13	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	terlaksananya rangkaian kegiatan hari-hari besar		1 Bulan	14,900,000			1 Ls	17,880,000
1 05 02 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terwujudnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			777,276,000				932,731,200
1 .05 .02 16 6	Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Periode Penertiban Peraturan Daerah dan Kepala Daerah		50 Org	499,536,000			50 Org	599,443,200
1 .05 .02 16 10	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Hari Besar Islam	Periode Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban pada Bulan Ramadhan		12 Bulan	133,740,000			12 Bulan	160,488,000
1 .05 .02 16	Pengamanan Ketupan Rencong H-7 dan H+4	Jumlah Tenaga Satpol PP yang Melakukan Pengaman		15 Org	40,000,000			15 Org	48,000,000
1 .05 .02 16	Pengamanan Operasi Lilin Hari Natal dan Tahun Baru	Jumlah Tenaga Satpol PP yang Melakukan Pengaman		15 Org	40,000,000			15 Org	48,000,000
1 .05 .02 16	Pengamanan Malam Takbiran Idul Fitri (Pawai) dan Shalat Idul Fitri serta Pengamanan Takbiran Idul Adha	Periode Pengamanan Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya		4 Kali	40,000,000			4 Kali	48,000,000
	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Periode Pengamanan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam		3 Kali	24,000,000			3 Kali	28,800,000
1 05 02 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			40,000,000				48,000,000
1 .05 .02 12	Pendukung Kegiatan/Upacara HUT Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe	Jumlah kegiatan acara/upacara HUT satpol PP dan Wh		1 Hari	40,000,000			1 Hari	48,000,000
1 05 02	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat tentang ketertiban dan keamanan			150,000,000				180,000,000
1 .05 .02	Sosialisasi Peraturan Qanun	Jumlah peserta sosialisasi Qanun		50 Org	75,000,000			50 Org	90,000,000
1 .05 .02	Peningkatan Kerjasama Ulama/Tokoh Masyarakat/Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Ulama yang Mengikuti Pertemuan		50 Org	75,000,000			50 Org	90,000,000
1 05 02 23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			90,000,000				108,000,000
1 .05 .02 23 01	Penunjang Tenaga Satlinmas Untuk Pemilukada	Jumlah Tenaga Satlinmas Untuk Pemilukada							-
1 .05 .02 23 02	Penunjang Tenaga Satlinmas Untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres	Jumlah Tenaga Satlinmas Untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres		118 Org	90,000,000			0 Org	108,000,000
1 06 01	Dinas Sosial								
	BELANJA				15,175,094,009				16,830,869,789
	Belanja Tidak Langsung				2,411,021,926				2,652,124,119
	Belanja Langsung				12,764,072,083				14,178,745,670
1 06	Sosial				12,764,072,083				14,178,745,670
1 06 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		10 Kegiatan	527,955,625			10 Kegiatan	580,751,188
1 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,500,000				1,650,000
1 06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	94,200,000			12 Bulan	103,620,000
1 06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		1 Tahun	104,374,300			1 Tahun	114,811,730
1 06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	24,995,600			12 Bulan	27,495,160
1 06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	22,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	3,000,000			12 Bulan	3,300,000
1 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		365 Eks	1,140,000			1 Tahun	1,254,000
1 06 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makan & Minuman		1 Tahun	22,500,000			1 Tahun	24,750,000
1 06 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam Daerah	Periode Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah		1 Tahun	60,000,000			1 Tahun	66,000,000
1 06 01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		1 Tahun	196,245,725			1 Tahun	215,870,298
1 06 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5 Kegiatan		5 Kegiatan	146,120,000			5 Kegiatan	160,732,000
1 06 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	20,000,000			1 Tahun	22,000,000
1 06 01 02 14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Tahun	3,000,000			1 Tahun	3,300,000
1 06 01 02 15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan		1 Tahun	26,640,000			1 Tahun	29,304,000
1 06 01 02 16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas Operasional		1 Tahun	91,480,000			1 Tahun	100,628,000
1 06 01 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	5,000,000			1 Tahun	5,500,000
1 06 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1 Kegiatan		2 Kegiatan	128,750,000			2 Kegiatan	141,625,000
1 06 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			1 Tahun	8,750,000			1 Tahun	9,625,000
1 06 01 03 06	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Periode Penyewaan Gedung Kantor		1 Tahun	120,000,000			1 Tahun	132,000,000
1 06 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1 Kegiatan		1 Kegiatan	20,000,000			1 Kegiatan	22,000,000
1 06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12 Orang	20,000,000			12 Orang	22,000,000
1 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	5,270,850			1 Kegiatan	5,797,935
1 06 01 06 11	Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Dokumen SPM		15 Buku	5,270,850			15 Buku	5,797,935
1 06 01 10	Program Peyusunan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1 Kegiatan		2 Kegiatan	8,749,975			2 Kegiatan	9,624,973
1 06 01 10 02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja		15 Buku Renja	3,499,975			15 Buku Renja	3,849,973
1 06 01 10 06	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP		15 Buku SOP	5,250,000			15 Buku SOP	5,775,000
1 06 01 11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	15,000,000			1 Kegiatan	16,500,000
1 06 01 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Kegiatan Pameran Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	15,000,000			1 Kegiatan	16,500,000
1 06 01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	4 Kegiatan		12 Kegiatan	7,735,956,210			12 Kegiatan	8,230,856,210
1 06 01 15 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (KUBE/UEP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin		15 Unit	750,000,000			15 Unit	769,500,000
1 06 01 15 11	Sosialisasi program pemberdayaan Fakir miskin	Periode sosialisasi pemberdayaan fakir miskin		1 Keg	30,000,000			1 Keg	49,500,000
1 06 01 15 15	Rehabilitas Ringan, Sedang/Berat Rumah Kaum Dhuafa	Jumlah Unit Rumah Yang Di Rehab		1 Keg	4,935,000,000			1 Keg	4,954,500,000
1 06 01 15 16	Operasional Program Keluarga Harapan	Jumlah Dokumen Laporan Penerima PKH		1 Tahun	53,512,800			1 Tahun	73,012,800
1 06 01 15 22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Kurang Mampu		1 Tahun	100,000,000			1 Tahun	119,500,000
1 06 01 15 32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan Masyarakat Gampong	Terbayarnya Kewajiban 2016		1 Paket	1,594,455,310			1 Paket	1,613,955,310
1 06 01 15 34	Pelaksanaan pendukung Program keluarga harapan (PKH)	Jumlah pelaksanaan kegiatan		1 Kegiatan	53,512,800			1 Kegiatan	73,012,800
1 06 01 15 42	Respon Kasus (Tanggap Darurat Anak PMKS)			1 Keg	80,849,800			1 Keg	100,349,800
1 06 01 15	Sosialisasi bahaya narkoba berbasis masyarakat				49,675,500				69,175,500

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 15	Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat, korban bencana				88,950,000				108,450,000
1 06 01 15	Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Kesejahteraan (RASTRA)								154,900,000
1 06 01 15	Sosialisasi dan Publikasi RASRA/BPNT								145,000,000
1 06 01 16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7 Kegiatan		9 Kegiatan	501,150,450			9 Kegiatan	551,265,495
1.13.01.16.11	Monitoring Evaluasi dan Laporan	Periode pelaporan dan evaluasi		1 Kegiatan	39,300,000			1 Kegiatan	43,230,000
1.13.01.16.27	Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegritas)	Periode korban bencana sosial daerah konflik		1 Kegiatan	150,000,000			1 Kegiatan	165,000,000
1.13.01.16.30	Verifikasi Data Lansia	Periode verifikasi data lansia		1 Kegiatan	29,800,550			1 Kegiatan	32,780,605
1.13.01.16.34	Verifikasi Data Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Periode verifikasi data orang dengan		1 Kegiatan	68,773,700			1 Kegiatan	75,651,070
1.13.01.16.35	Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan untuk ODKB	Periode petunjuk teknis pemberian bantuan untuk ODKB		1 Kegiatan	14,420,500			1 Kegiatan	15,862,550
1.13.01.16.36	Observasi Bantuan Pembangunan/Rehab dan Bedah Rumah Dhuafa	Periode bantuan pembangunan / rehab dan bedah rumah dhuafa		1 Kegiatan	23,724,900			1 Kegiatan	26,097,390
1.13.01.16.37	Lauching Pemberian Bantuan Sosial	Periode lauching pemberian bantuan sosial		1 Kegiatan	44,281,000			1 Kegiatan	48,709,100
1.13.01.16.38	Respon Kasus (Tanggap Darurat Anak PMKS)	Periode respon kasus		1 Kegiatan	80,849,800			1 Kegiatan	88,934,780
1.13.01.16.39	Pendataan permasalahan Kesejahteraan Sosial PMKS	Periode pendataan permasalahan kesejahteraan sosial PMKS		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	55,000,000
1.13.01.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1 Kegiatan		1 Kegiatan	32,500,000			1 Kegiatan	35,750,000
1.13.01.18.04	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Penerima Alat Cacat		22 unit alat cacat	32,500,000			24 unit alat cacat	35,750,000
1.13.01.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1 Kegiatan		5 Kegiatan	2,941,120,000			5 Kegiatan	3,283,432,000
1.13.01.19.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Periode pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan		1 Keg	387,550,000			1 Keg	426,305,000
1.13.01.19.09	Pendidikan dan pelatihan bagi Remaja putus sekolah	Periode pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah		1 Keg	50,000,000			1 Keg	55,000,000
1.13.01.19.12	Operasional Panti Asuhan/ Panti Jompo	Jumlah Panti Asuhan Jompo Yang Mendapatkan Dana Bantuan		15 panti	2,453,570,000			15 panti	2,698,927,000
1.13.01.19.13	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Panti Asuhan/Jompo	Periode pendidikan dan pelatihan bagi pengurus panti asuhan		1 Keg	50,000,000			1 Keg	55,000,000
	TIM Monitoring dan Verifikasi Panti Asuhan/Panti Jompo								48,200,000
1.13.01.20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana; PSK; Narkoba dan Penyakit Sosial)	1 Kegiatan		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	55,000,000
1.13.01.20.10	Pendataan & Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Razia Gepeng)	Jumlah Gepeng Yang Di Bina/Di data		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	55,000,000
1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4 Kegiatan		7 Kegiatan	651,498,973			7 Kegiatan	1,044,270,870
1.13.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM Sosial Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan		68 orang	50,000,000			68 orang	55,000,000
1.13.01.21.05	Fasilitas kerjasama usaha antara Pemda dengan organisasi/lembaga sosial masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Usaha Antara Pemda dengan Lembaga Masyarakat		1 Tahun	150,000,000			68 orang	165,000,000
1.13.01.21.06	Penyediaan Fasilitas, Alat-alat Pendukung bagi Pemberdayaan Organisasi Lembaga Sosial Masyarakat	Tersalurnya fasilitas bagi masyarakat		1 Keg	401,498,973			1 Keg	441,648,870
1.13.01.21.10	Tim Terpadu Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Di Evakuasi		1 Tahun	50,000,000			1 Tahun	55,000,000
1.13.01.21.11	Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen LK3							41,140,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitas kerjasama usaha antara Pemda dengan organisasi/lembaga sosial masyarakat								149,028,000
	Operasional Fasilitas Kerjasama Usaha Antara Pemda Dengan Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat								137,454,000
2 01 01	DPMPTSP & NAKER								
	BELANJA				4,248,600,000				4,673,460,000
	Belanja Tidak Langsung				4,248,600,000				4,673,460,000
	Belanja Langsung				-				-
2 01	DPMPTSP & NAKER				6,410,759,974				7,051,835,971
2 1 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			837,986,464				921,785,110
2 1 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,950,000			12 Bulan	3,245,000
2 1 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	136,800,000			12 Bulan	150,480,000
2 1 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		180 OB	187,196,464			180 OB	205,916,110
2 1 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	40,500,000			12 Bulan	44,550,000
2 1 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	28,000,000			12 Bulan	30,800,000
2 1 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	9,800,000			12 Bulan	10,780,000
2 1 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	7,500,000			12 Bulan	8,250,000
2 1 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	30,240,000			12 Bulan	33,264,000
2 1 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
2 1 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		456 OB	245,000,000			456 OB	269,500,000
2 17 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			284,244,000				312,668,400
2 13 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	169,000,000			12 Bulan	185,900,000
2 13 01 02 14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		1 Paket	42,000,000			1 Paket	46,200,000
2 13 01 02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)		12 Bulan	31,968,000			12 Bulan	35,164,800
2 13 01 02 16	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional	Periode Mobil Operasional Yang Terpelihara		12 Bulan	31,776,000			12 Bulan	34,953,600
2 13 01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara		12 Bulan	9,500,000			20 Unit	10,450,000
2 1 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			60,000,000				66,000,000
2 1 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		12 Orang	60,000,000			1 Unit	66,000,000
2 1 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Penigkatan Kualitas SDM Aparatur			6,750,000				7,425,000
2 1 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		25 Buku	6,750,000			25 Buku	7,425,000
2 1 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			820,000,000				902,000,000
2 1 01 15 01	Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Database Tenaga Kerja		1 Kegiatan	110,000,000			1 Kegiatan	121,000,000
2 1 01 15 11	Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja		1 Kegiatan	120,000,000			1 Kegiatan	132,000,000
2 1 01 15 17	Pengembangan dan Pelatihan Wirausaha Baru	Terlaksananya Pelatihan Bagi Wirausaha Baru		1 Kegiatan	240,000,000			1 Kegiatan	264,000,000
2 1 01 15	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Angkatan Kerja		50 Orang	350,000,000			50 Orang	385,000,000
2 1 01 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA				287,970,000				316,767,000
2 1 01 16 01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersusunnya Informasi Tenaga Kerja		1 Kegiatan	47,970,000			1 Kegiatan	52,767,000
2 1 01 16 04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai		1 Kegiatan	240,000,000			1 Kegiatan	264,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 01									
2 1 01	PROGRAM PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA				190,000,000				209,000,000
2 1 01	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Terhadap Angkatan Kerja		50 Orang	50,000,000			50 Orang	55,000,000
2 1 01	Pembinaan Terhadap Para Pencari Kerja melalui Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja Baik Dari Pemerintah Maupun Dari Pihak Swasta		30 Orang	70,000,000			30 Orang	77,000,000
2 1 01	Melaksanakan Pembinaan dan Pengaturan Perluasan Lapangan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Mandiri di Pedesaan dan Perkotaan		25 Orang	70,000,000			25 Orang	77,000,000
2 1 01	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita Serta Penyandang Cacat dan Usia Lanjut	Terlaksananya Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita Serta Penyandang Cacat dan Usia Lanjut		40 Orang	40,000,000			40 Orang	44,000,000
2 1 01	Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja		50 Orang	485,700,383			50 Orang	534,270,421
2 1 01	Pengembangan Padat Karya Produktif	Terlaksananya Kegiatan Padat Karya Produktivitas Penanaman Kankung, Bayam, Cabe dan Lain-lain Sejenisnya dan Pemeliharaan Ikan, Kambing, Ayam, Sapi, Bebek dan Lain-lain		60 Orang	350,000,000			60 Orang	385,000,000
2 1 01	Memantau dan Mengevaluasi Terapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Produktif	Terlaksananya Pemantauan dan Pengevaluasian Terapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Produktif		50 Orang	65,000,000			50 Orang	71,500,000
2 1 01	Membina Pemandu Swadaya dan Desa Produktif	Terlaksananya Pembinaan Pemandu Swadaya dan Desa Produktif		30 Orang	150,000,000			30 Orang	165,000,000
2 1 01	Pembinaan Terhadap Pemandu Wirausaha dan Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pemandu Wirausaha dan Tenaga Kerja Mandiri		60 Orang	150,000,000			60 Orang	
2 1 01									
2 1 01	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	MENINGKATNYA PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI			47,500,000				52,250,000
2 1 01	Bimbingan dan Penyaluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	110,000,000
2 1 01	Forum / seminar / Presentasi dan Pameran di Dalam Negeri	Terlaksananya Seminar Investasi		2 Kali	200,000,000			2 Kali	220,000,000
2 1 01	Sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi KEK Kepada Masyarakat		1 Kegiatan	42,250,000			1 Kegiatan	46,475,000
2 1 01	Bussiness Forum Peluang Investasi KEK Kepada Pelaku Usaha di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Sosialisasi Bussiness Forum Peluang Investasi KEK Bagi Pelaku Usaha		1 Kegiatan	47,500,000			1 Kegiatan	52,250,000
2 1 01	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI				315,150,910				346,666,001
2 1 01	Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal (Brosur, Leaflet, Buku Petunjuk)	Jumlah Tersedianya Brosur dan Leaflet		2 Jenis	55,150,910			2 Jenis	60,666,001
2 1 01	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Tersedianya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalm Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif		1 Kegiatan	150,000,000			1 Kegiatan	165,000,000
2 1 01	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA	Tersusunnya Profil Investasi			55,000,000				60,500,000
2 1 01	Sosialisasi Produk Unggulan Daerah	Tersedianya Produk Lokal		1 Kegiatan	55,000,000			1 Kegiatan	60,500,000
2 1 01 17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN				582,040,000				640,244,000
2 1 01 17 02	Pelaksanaan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terselesainnya Perselisihan Hubungan Industrial		15 Kasus	119,640,000			15 Kasus	131,604,000
2 1 01 17 30	Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Peraturan dan Perjanjian Kerjasama	Tercapainnya Pemahaman Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		1 Kegiatan	180,000,000			1 Kegiatan	198,000,000
2 1 01 17 31	Verifikasi dan Pendataan Jaminan Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Verifikasi dan Pendataan Peserta Jamsostek		120 Perusahaan	36,000,000			120 Perusahaan	39,600,000
2 1 01 17 32	Tertib Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan	Tersedianya Perusahaan yang Memenuhi Tertib Administrasi Perusahaan		100 Perusahaan	246,400,000			100 Perusahaan	271,040,000
2 1 01	PROGRAM PERLINDUNGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PERLINDUNGAN KETANAGAKERJAAN			490,000,000				539,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 01	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Adnya Pemahaman Yang Baik Dari Angkatan Kerja, Pekerja / Nuruh dan Pengusaha Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		75 Orang	180,000,000			75 Orang	198,000,000
2 1 01	Pemeriksaan administrasi Ketenagakerjaan ke Perusahaan	Terlaksananya Tertib Administrasi Ketenagakerjaan di Perusahaan		200 Orang	220,000,000			200 Orang	242,000,000
2 1 01	Pembinaan Terhadap Pekerja dan Purna Kerja Serta Sosialisasi Ketetapan Upah Minimum	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pekerja dan Purna Kerja Serta Sosialisasi Ketetapan Upah Minimum		100 Orang	90,000,000			100 Orang	99,000,000
2 1 01	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN PENCEGAHAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI TEMPAT KERJA			805,880,000				886,468,000
2 1 01	Pengujian Peralatan Kerja ke Perusahaan	Terlaksananya Pemeriksaan / Pengujian Terhadap Perusahaan dan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan		60	75,000,000			60	82,500,000
2 1 01	Sertifikasi Penggunaan dan Peralatan Kerja	Tersertifikasinya Peralatan Kerja		60	75,000,000			60	82,500,000
2 1 01	Pembinaan Norma Kerja Terhadap Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pembinaan Norma Kerja Terhadap Perempuan dan Anak Kepada Pengusaha / Pengurus Perusahaan Tenaga Kerja, Anggota Asosiasi dan Orang Tua Pekerja Atau Anak		90	225,000,000			90	247,500,000
2 1 01	Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Terhadap Norma Kerja Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Terhadap Norma Kerja Perempuan dan Anak		60	70,000,000			60	77,000,000
2 1 01	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terselesaikannya PPHI / Kasus Dengan Perjanjian Bersama (PB/PHI) Tercatat		30 Kasus	128,700,000			30 Kasus	141,570,000
2 1 01	Verifikasi dan Pendataan Peserta Jamsostek	Tercapainya Pekerja / buruh Menjadi Peserta Program BPJS		100 Orang	85,180,000			100 Orang	93,698,000
2 1 01	Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tersedianya PP, PK, PKB, pada Perusahaan Pemberi Pekerja		100	97,000,000			100	106,700,000
2 1 01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pekerja	Terbentuknya Organisasi Serikat Pekerja Pada Masing-Masing Perusahaan dan Adanya Wadah Bipartit di Tempat Kerja		12	25,000,000			12	27,500,000
2 1 01	Pendataan dan Investasi Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha LKS Bipartit dan LKS Tripartit	Tersedianya PP, PK, PKB pada perusahaan Pemberi Kerja		30	25,000,000			30	27,500,000
2 1 01 18	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				668,738,600				735,612,460
2 1 01 18 05	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah Baliho / Spanduk / Banner / Brosur Sosialisasi Tentang Perizinan		3 Jenis	42,504,000			3 Jenis	46,754,400
2 1 01 18 01	Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan	Periode Pengawasan dan Penyelidikan Perizinan		96 OK	125,400,000			96 OK	137,940,000
2 1 01 18 04	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Data IKM		150 Quetioner	34,854,600			150 Quetioner	38,340,060
2 1 01 18 06	Peninjauan Lapangan Tempat Izin	Jumlah Peninjauan Pada Objek Izin Yang Diproses		96 OK	92,400,000			96 OK	101,640,000
2 1 01 18 09	Pengelolaan Media Pendaftaran Perizinan Online	Jumlah Permohonan Pendaftaran Perizinan Yang Menggunakan Media Pendaftaran Perizinan Online		24 Permohonan Izin	42,240,000			24 Permohonan Izin	46,464,000
2 1 01 18 12	Penyusunan Database Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan Dalam Perizinan		10 Izin	57,090,000			10 Izin	62,799,000
2 1 01 18 15	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tim Informasi dan Pengaduan	Jumlah Tim Informasi dan Pengaduan		12 Orang	14,400,000			12 Orang	15,840,000
2 1 01 18	Pendataan Objek Perizinan	Jumlah Buku Data Perizinan		30 Izin	40,700,000			30 Izin	44,770,000
2 1 01 18	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Peningkatan Nilai Perizinan Untuk Mendekati Harga Pasar		2300 Izin	87,950,000			2300 Izin	96,745,000
2 1 01 18	Penelitian & Verifikasi Perizinan	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah		2,300	56,200,000			2,300	61,820,000
2 1 01 18	Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Monev dan Laporan Perkembangan TJSLP		20 Perusahaan	75,000,000			20 Perusahaan	82,500,000
2 1 01	PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN	TERLAKSANANYA PENGAWASAN BERKALA PELAYANAN PERIZINAN			272,000,000				299,200,000
2 1 01	Identifikasi Izin Usaha	Periode Proses Izin Usaha		1 Jenis	42,000,000			1 Jenis	46,200,000
2 1 01	Pemutakhiran Data Bangunan	Jumlah Data Bangunan Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	150,000,000			1 Kegiatan	165,000,000
2 1 01	Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Perizinan	Jumlah Laporan Monev Perizinan		1 Buku	42,000,000			1 Buku	46,200,000
2 1 01	Pemetaan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Peta Lokasi Perizinan		1 Jenis	38,000,000			1 Jenis	41,800,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 1 01	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI LAYANAN PERIZINAN	TERCAPAINNYA PENINGKATAN AKSES INFORMASI LAYANAN PERIZINAN			687,500,000				756,250,000
2 1 01	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Simper / website	Tersedianya Sistem Informasi Perizinan		1 Jenis	215,500,000			1 Jenis	237,050,000
2 1 01	Pengembangan Sistem Aplikasi Software Pelayanan Perizinan E-Permite	Tersedianya Tim Operasional Informasi Layanan Perizinan Yang Terintegrasi		1 Jenis	250,000,000			1 Jenis	275,000,000
2 1 01	E-Arsip Layanan Perizinan	Tersedianya Sistem Informasi Arsip Layanan Perizinan		1 Jenis	35,000,000			1 Jenis	38,500,000
2 1 01	Operasional SIMPER Layanan Perizinan	Periode Operasional SIMPER Layanan Perizinan		120 OB	45,000,000			120 OB	49,500,000
2 1 01	Pelayanan Perizinan Mobile dengan Mobil Pelayanan (Moyan)	Jumlah Layanan Pelayanan Perizinan Mobile		120 OB	100,000,000			120 OB	110,000,000
2 1 01	Verifikasi Layanan Izin Media Sistem Informasi Perizinan Online (SipO)	Jumlah Layanan Pelayanan SilPO		1 Kegiatan	42,000,000			1 Kegiatan	46,200,000
2 02 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	BELANJA DAERAH				12,065,589,025				13,750,150,824
	Belanja Tidak Langsung				2,505,531,087				2,756,084,196
	BELANJA LANGSUNG				9,560,057,938				10,994,066,629
2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5,559,354,938				6,393,258,179
2. 02 01. 01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,047,143,438				1,204,214,954
2. 02 1. 01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	3,024,000			12 Bulan	3,477,600
2. 02 1. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	160,224,307			12 Bulan	184,257,953
2. 02 1. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		264 OB	197,766,504			264 OB	227,431,480
2. 02 1. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	75,900,000			12 Bulan	87,285,000
2. 02 1. 01. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	42,000,000			12 Bulan	48,300,000
2. 02 1. 01. 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	11,400,000			12 Bulan	13,110,000
2. 02 1. 01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	1,584,000			12 Bulan	1,821,600
2. 02 1. 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya Konsumsi Pendukung Untuk Kelancaran Kegiatan		11 Bulan	6,804,000			11 Bulan	7,824,600
2. 02 1. 01. 18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	257,400,000			12 Bulan	296,010,000
2. 02 1. 01. 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		372 OB	291,040,627			372 OB	334,696,721
2. 02 1. 02.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Tingkat Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			334,607,100				384,798,165
2. 02 1. 02. 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer Dll)	Periode Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	174,000,000			12 Bulan	200,100,000
2. 02 1. 02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara		1 Gedung	5,953,500			1 Gedung	6,846,525
2. 02 1. 02. 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara		1 Unit	42,780,000			1 Unit	49,197,000
2. 02 1. 02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Terpelihara		5 Unit	90,000,000			5 Unit	103,500,000
2. 02 1. 02. 30	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor (Mobiler, Komputer Dll)	Periode Perelatan dan Perlengkapan Kantor Yang terpelihara		12 Bulan	21,873,600			12 Bulan	25,154,640
2. 02 1. 03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				101,494,000				116,718,100
2. 02 1. 03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Aparatur		51 Org	46,494,000			51 Org	53,468,100
2. 02 1. 03. 06	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa		1 Gedung	55,000,000			1 Gedung	63,250,000
2. 02 1. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60,400,000				69,460,000
2. 02 1. 05. 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan		10 Orang	60,400,000			10 Orang	69,460,000
2. 02 1. 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan kerja Perangkat Kerja				23,120,000				26,588,000
2. 02 1. 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		15 Buku	14,000,000			15 Buku	16,100,000
2. 02 1. 07 04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Buku Standar Operasional Prosedur (SOP)		20 Buku	9,120,000			20 Buku	10,488,000
2. 02 1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			8,800,000				10,120,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02 1.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum	Jumlah Buku SPM		10 Buku	8,800,000			10 Buku	10,120,000
2. 02 1. 11.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan				21,600,000				24,840,000
2. 02 1. 11. 01	Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	21,600,000			6 Hari	24,840,000
2. 02 1. 15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				417,788,000				480,456,200
2. 02 1. 15.	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi KKG		100 Org	30,500,000			100 Org	35,075,000
2. 02 1. 15. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan untuk Kegiatan Monitoring		4 Laporan	30,500,000			4 Laporan	35,075,000
2. 02 1. 15. 05	Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi		100 Org	26,988,000			100 Org	31,036,200
2. 02 1. 15. 09	Hari Anak Nasional	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Hari Anak		100 Org	70,000,000			100 Org	80,500,000
2. 02 1. 15.	Pelatihan Keterampilan bagi Ibu Dalam Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		100 Org	75,000,000			100 Org	86,250,000
2. 02 1. 15. 12	Pelatihan Tumbuh Kembang Anak Bagi Pasangan Muda/Pengantin Baru	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		250 Org	184,800,000			250 Org	212,520,000
2. 02 1. 16.	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Cakupan Program Pengarusutamaan Gender Dan Anak			1,762,802,400				2,027,222,760
2. 02 1. 16. 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak		12 Bulan	48,000,000			12 Bulan	55,200,000
2. 02 1. 16. 14	Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah	Jumlah Anak yang Bergabung Dalam Forum Anak		160 Org	120,000,000			160 Org	138,000,000
2. 02 1. 16. 25	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah		36 Dokumen	250,000,000			36 Dokumen	287,500,000
2. 02 1. 16. 26	TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta TOT SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban		80 Org	163,202,400			80 Org	187,682,760
2. 02 1. 16. 24	Advokasi dan Fasilitasi PUG	Jumlah Aparatur Gampong yang menerapkan PUG		150 Org	180,000,000			150 Org	207,000,000
2. 08 1. 16. 28	Penguatan Kapasitas Lembaga layanan P2TP2A	Jumlah Pengurus dan Pendamping yang mengikuti pelatihan		85 Org	240,000,000			85 Org	276,000,000
2. 08 1. 16. 29	Advokasi alur Pendampingan pelaporan Korban KDRT	jumlah peserta yang Mengikuti advokasi alur pendampingan		65 Org	84,000,000			65 Org	96,600,000
2. 08 1. 16. 30	Pelayanan Korban Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kasus yang ditangani		40 Kasus	80,000,000			40 Kasus	92,000,000
2. 08 1. 16. 33	Sosialisasi PPRG bagi SKPD dan Aparatur Gampong	jumlah perencana program SKPD dan Aparatur Gampong yang mengikuti pelatihan		105 Org	150,000,000			105 Org	172,500,000
2. 08 1. 16. 34	TOT PPRG bagi SKPD dan Aparatur Gampong	jumlah perencana program SKPD dan Aparatur Gampong yang mengikuti TOT		105 Org	150,000,000			105 Org	172,500,000
2. 08 1. 16. 35	Roadshow PPRG bagi SKPD dan Aparatur Gampong	Jumlah perencana program SKPD dan Aparatur gampong yang menjalankan PPRG		32 SKPD dan 68 Gampong	144,000,000			32 SKPD dan 68 Gampong	165,600,000
2. 08 1. 16. 36	Pendataan terkait gender, perempuan, anak dan permasalahannya	tersedianya data gender		Perempuan, Anak dan permasalahannya	153,600,000			Perempuan, Anak dan permasalahannya	176,640,000
2. 02 1. 17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terfasilitasinya Kegiatan Yang Mengarah Pada Peningkatan Kualitas Hidup dan Penyelesaian Pengaduan Dari Tindak Kekerasan			867,600,000				997,740,000
2. 02 1. 17.	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah PUSPAGA		1 Keg	120,000,000			1 Keg	138,000,000
2. 02 1. 17. 15	Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu	Jumlah Kegiatan		1 Keg	180,000,000			1 Keg	207,000,000
2. 02 1. 17.	Seminar Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu	Jumlah Kegiatan		1 Keg	90,000,000			1 Keg	103,500,000
2. 02 1. 17. 17	Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun DWP	Jumlah Kegiatan		1 Keg	24,000,000			1 Keg	27,600,000
2. 02 1. 17.	Pembinaan Kelompok Usaha Perempuan Peningkatan Ekonomi Keluarga Dengan Bantuan Alat-alat	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan Yang Menerima Bantuan Alat-alat		12 Klip	120,000,000			12 Klip	138,000,000
2. 02 1. 17.	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Melalui Industri Rumahan	Perempuan yang Memiliki Usaha		80 Org	150,000,000			80 Org	172,500,000
2. 02 1. 17.	Pelatihan Mengasuh Dan Merawat Perempuan Lansia	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Mengasuh Dan Merawat Perempuan Lansia		50 Org	60,000,000			50 Org	69,000,000
2. 02 1. 17.	Pelatihan Ketrampilan Bagi Perempuan Lansia	Jumlah Perempuan Lansia Yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan		55 Org	54,000,000			55 Org	62,100,000
2. 02 1. 17.	Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Penyandang Disabilitas	Jumlah Perempuan Penyandang Disabilitas Yang diberdayakan		70 Org	69,600,000			70 Org	80,040,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 02 1. 18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan Kegiatan Yang Mengarah Pada Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			914,000,000				1,051,100,000
2. 02 1. 18. 02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan		100 Org	84,000,000			100 Org	96,600,000
2. 02 1. 18. 07	Peningkatan Keterampilan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Perempuan		50 Org	60,000,000			50 Org	69,000,000
2. 02 1. 18.	Pelatihan Membuat Aneka Kerajinan Tangan (DWP)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan		60 Org	42,000,000			60 Org	48,300,000
2. 02 1. 18. 17	Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Dharma Wanita		12 Bulan	144,000,000			12 Bulan	165,600,000
2. 02 1. 18. 19	Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)	Periode Persatuan Wanita Republik Indonseia		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	34,500,000
2. 02 1. 18.	Pelatihan Ketrampilan Perempuan (DWP)	Jumlah Peserta Ketrampilan Perempuan		35 Org	38,500,000			35 Org	44,275,000
2. 02 1. 18. 36	Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP Kota Lhokseumawe (DWP Kota Lhokseumawe)	Jumlah Kegiatan		1 Keg	24,000,000			1 Keg	27,600,000
2. 02 1. 18. 38	Bhakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Kota Lhokseumawe (DWP)	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	60,000,000			1 Kegiatan	69,000,000
2. 02 1. 18. 39	Seminar Pendidikan Bagi Masyarakat (DWP Kota Lhokseumawe)	Jumlah Peserta Seminar Pendidikan		50 Org	48,000,000			50 Org	55,200,000
2. 02 1. 18.	Seleksi Anak Daerah	Jumlah Anak yang Mengikuti Seleksi		40 Org	60,000,000			40 Org	69,000,000
2. 02 1. 18.	Perlombaan Dalam Rangka HUT Kota Lhokseumawe	Cakupan Partisipasi Aparatur Dalam Rangka HUT Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	37,500,000			1 Kegiatan	43,125,000
2. 02 1. 18.	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kader Ormas dan Parpol	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan		50 Org	55,000,000			50 Org	63,250,000
2. 02 1. 18.	Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Cakupan Pelaksanaan KIE Tentang KKG		12 Bln	75,000,000			12 Bln	86,250,000
2. 02 1. 18.	Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Yang Mandiri		65 Org	84,000,000			65 Org	96,600,000
2. 02 1. 18.	Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Kader Partai Politik Perempuan		30 Org	72,000,000			30 Org	82,800,000
2. 08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4,000,703,000				4,600,808,450
2. 08. 1. 15.	Program keluarga Berencana				2,563,363,000				2,947,867,450
2. 08. 1. 15. 09	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kota Lhokseumawe	Jumlah Gampong Yang Mengikuti Hari Keluarga Nasional		68 Gampong	100,000,000			68 Gampong	115,000,000
2. 08. 1. 15. 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)	Periode Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)		12 Bulan	1,135,000,000			12 Bulan	1,305,250,000
2. 08. 1. 15. 17	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Perentase Tingkat Pelayanan Balai Penyuluh KB		12 Bulan	1,146,563,000			12 Bulan	1,318,547,450
2. 08. 1. 15. 18	pendistribusian alat dan Obat kontrasepsi (DAK NON FISIK)	Jumlah Faskes yang disalurkan Alat dan Obat Kontrasepsi		28 Faskes	41,800,000			28 Faskes	48,070,000
2. 08. 1. 15.	Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Bagi Guru SLTP dan SLTA	Jumlah Guru SLTP dan SLTA		80 Org	90,000,000			80 Org	103,500,000
2. 08. 1. 15.	Sosialisasi Pojok Kependudukan	Jumlah Kegiatan		1 Keg	50,000,000			1 Keg	57,500,000
2. 08. 1. 16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja /Mahasiswa			568,000,000				653,200,000
2. 08. 1. 16. 03	Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Anak Sunat Rasul Keluarga Pra Sejahtera		200 Org	156,000,000			200 Org	179,400,000
2. 08. 1. 16. 11	Pelatihan Pembekalan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta Pelatihan		120 Org	216,000,000			120 Org	248,400,000
2. 08. 1. 16. 12	Pelatihan Tenaga Konselor PIK Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Tenaga Konselor PIK Kespro yang Terlatih		48 Org	96,000,000			48 Org	110,400,000
2. 08. 1. 16.	Pelatihan KIE Kespro Bagi PPKBD	Jumlah PPKBD yang Terlatih		68 Org	100,000,000			68 Org	115,000,000
2. 08. 1. 17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Yang Terlayani			70,000,000				80,500,000
2. 08. 1. 17. 06	Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes)	Jumlah Kecamatan		4 Kec	70,000,000			4 Kec	80,500,000
2. 08. 1. 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga				799,340,000				919,241,000
2. 08. 1. 23. 04	Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terbaik Bina keluarga Balita (BKB)	Jumlah gampong Yang dibina dan dinilai sebagai Gampong BKB Terbaik		68 Gampong	163,140,000			68 Gampong	187,611,000
2. 08. 1. 23. 05	Penilaian dan Pembinaan KB Lestari	Jumlah Pasangan KB Lestari Yang Terpilih		4 Kec	57,600,000			4 Kec	66,240,000
2. 08. 1. 23. 06	Penilaian dan Pembinaan Keluarga Harmonis	Jumlah Keluarga Harmonis Yang Terpilih		4 Kec	57,600,000			4 Kec	66,240,000
2. 08. 1. 23. 09	Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif (BKB HI)	Jumlah Kader BKB HI		84 Org	54,000,000			84 Org	62,100,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatorif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatorif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 08. 1. 23. 10	Penilaian dan Pembinaan Desa Binaan Terbaik Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Jumlah Kelompok BKB HI		4 Kelompok BKB HI	144,000,000			4 Kelompok BKB HI	165,600,000
2. 08. 1. 23.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah Kelompok BKR		12 Bulan	65,000,000			12 Bulan	74,750,000
2. 08. 1. 23.	Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	Periode Terlaksananya Pelatihan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	69,000,000
2. 08. 1. 23.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS		12 Bulan	70,000,000			12 Bulan	80,500,000
2. 08. 1. 23.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	Jumlah Kelompok BKL		12 Bulan	68,000,000			12 Bulan	78,200,000
2. 08. 1. 23.	Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	Periode Terlaksananya Pelatihan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	69,000,000
2 03	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan								
	Belanja								
	Belanja Tidak Langsung								
	Belanja Langsung				41,745,336,171				42,793,240,170
2 03	Pangan				39,880,539,571				40,836,372,410
2 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,368,241,495				1,505,065,645
2 03 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,500,000			12 Bulan	1,650,000
2 03 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	259,476,000			12 Bulan	285,423,600
2 03 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		228 OB	21,200,000			228 OB	23,320,000
2 03 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	81,088,375			12 Bulan	89,197,213
2 03 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Periode penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	21,600,000			12 Bulan	23,760,000
2 03 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	6,575,520			12 Bulan	7,233,072
2 03 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	1,140,000			12 Bulan	1,254,000
2 03 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	periode penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	12,300,000			12 Bulan	13,530,000
2 03 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	350,000,000			12 Bulan	385,000,000
2 03 01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		1140 OB	613,361,600			1140 OB	674,697,760
2 03 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan Sarana Perkantoran Kantor			2,063,333,000				2,269,666,300
2 03 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		30 Unit	603,410,000			30 Unit	663,751,000
2 03 01 02 03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan gedung kantor		3 Paket	1,018,955,000			3 paket	1,120,850,500
2 03 01 02 10	Pengadaan Mobiler	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Unit	31,968,000			1 Unit	35,164,800
2 03 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor		30 Unit	150,000,000			30 Bulan	165,000,000
2 03 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor	Periode Gedung Kantor yang terpelihara		12 Bulan	128,000,000			12 Bulan	140,800,000
2 03 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Mobil Jabatan	Jumlah Dinas yang Terpelihara		1 Unit	31,700,000			1 Unit	34,870,000
2 03 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		3 Unit	72,000,000			3 Unit	79,200,000
2 03 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Peralatan Kantor DKPP		12 Unit	27,300,000			12 Unit	30,030,000
2 03 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			40,000,000				44,000,000
2 03 01 05 24	Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis		2 Orang	40,000,000			2 Orang	44,000,000
2 03 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah			9,360,000				9,843,000
2 03 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian		10 Buku	4,830,000			10 Buku	5,313,000
2 03 01 07 03	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian		10 Buku	4,530,000			10 Buku	4,530,000
2 03 01 20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				339,741,500				341,090,000
2 03 01 20 10	Bimbingan Teknis Pendataan Kartu akses pangan rumah tangga (KAP-RT)	Periode Pemantauan Dana Analisis Pangan			13,485,000				14,833,500
2 03 01 20 18	Pengembangan Lumbung Pangan desa	Jumlah Pengembangan Lumbung Pangan desa			216,285,000				216,285,000
2 03 01 20 36	Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan	Periode Pelaksanaan Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan			51,910,000				51,910,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 03 01 20 40	Lomba Cipta Menu Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi Sumber daya lokal	Periode Lomba Cipta Menu Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi Sumber daya lokal			58,061,500				58,061,500
3 03 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan			751,014,894				826,116,383
3 03 01 15 08	Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi			645,964,894				710,561,383
3 03 01 15 14	Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)	Jumlah Balai Pertanian yang Terbangun			105,050,000				115,555,000
2 03 01 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				27,912,924,682				27,912,924,682
2 03 01 19 12	Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)	Jumlah Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan			3,388,694,682				3,388,694,682
2 03 01 19 03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan			974,000,000				974,000,000
2 03 01 19 07	Pembangunan Jalan Usaha tani (DAK)	Jumlah Usaha Tani Yang Terbangun		7	2,941,000,000				2,941,000,000
2 03 01 19 24	Pengembangan Sarana Dan Prasana Air (DAK)	Jumlah Irigasi Tanah Danggal		8 Unit	980,000,000			8 Unit	980,000,000
2 03 01 19 25	Penyediaan Sarana Dan Prasana Produksi Pertanian/Perkebuna (Otsus)	Jumlah Sarana Dan Prasana Produksi		5 Keg	19,500,000,000			5 Keg	19,500,000,000
2 03 01 19 27	Pengembangan Budidaya Cabe	Jumlah Pengembangan Cabe			67,385,000				67,385,000
2 03 01 19 28	Pengembangan Budidaya Tomat	Jumlah Pengembangan Tomat			61,845,000				61,845,000
2 03 01 20	Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan	1 jenis		1 Jenis	135,000,000				148,500,000
2 03 01 20 04	Peningkatan Sarana Dan Prasana Penyuluh (DAK Pertanian)	Jumlah Kendaraan Dinas		5 Unit	135,000,000			5 Unit	148,500,000
2 03 01 21	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Ternak		1 Jenis	648,600,000				648,600,000
2 03 01 21 02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			478,600,000				478,600,000
2 03 01 21 09	Pengadaan dan Perlengkapan kesehatan Hewan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Hewan			170,000,000				170,000,000
2 03 01 22	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Terlaksananya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			133,560,000				136,336,000
2 03 01 22 16	Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Pembibitan Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)			27,760,000			-	30,536,000
2 03 01 22 17	Expo/ Kontes Ternak	Jumlah Expo/ Kontes Ternak			105,800,000				105,800,000
2 03 01 19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Terlaksananya Optimasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			4,887,964,000				6,393,120,400
2 03 01 19 05	Lomba Masak Serba Ikan	Periode Lomba Masak Serba Ikan			51,564,000			-	56,720,400
2 03 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan			2,413,200,000				2,413,200,000
2 03 01 20 01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Meningkatnya Pendapatan dan kesejahteraan Petani			303,200,000				303,200,000
2 03 01 20 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah Pembangunan Jembatan Produksi Tambak			1,955,000,000				1,955,000,000
2 03 01 20 14	Pengukuran Kualitas Air Tambak	Tersedianya Kualitas Data Air Tambak			75,000,000				75,000,000
2 03 01 20 17	Penyusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Kegiatan Updating Data Pembudidayaan Ikan			80,000,000				80,000,000
2 03 01 25	Program Peningkatan sumber Daya Perikanan	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Perikanan			5,000,000				5,000,000
2 03 01 25 06	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya			5,000,000				5,000,000
2 03 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan			750,000,000				750,000,000
2 03 01 08 04	Penyusunan Detai Engineering Design (DED)PPI Ujong Blang	Jumlah Buku DED			200,000,000				200,000,000
	Penyusunan Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Blang	Periode Penyusunan Amdal PPI			550,000,000				550,000,000
2 03 01 26	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan				1,590,800,000			-	1,590,800,000
2 03 01 22 03	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Untuk Masyarakat Nelayan	Jumlah sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat Nelayan			1,590,800,000				1,590,800,000
2 05 01	Dinas Lingkungan Hidup								
	BELANJA				36,718,183,821				40,390,002,203
	Belanja Tidak Langsung				2,486,802,821				2,735,483,103
	Belanja Langsung				34,231,381,000				37,654,519,100
2 05	Lingkungan Hidup				34,231,381,000				37,654,519,100

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 05 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			23,244,430,000				25,568,873,000
2 05 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,640,000			12 Bulan	2,904,000
2 05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	11,000,000,000			12 Bulan	12,100,000,000
2 05 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		240 Orang Bulan	115,010,500			252 Orang Bulan	126,511,550
2 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	27,500,000			12 Bulan	30,250,000
2 05 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	19,800,000			12 Bulan	21,780,000
2 05 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	5,500,000			12 Bulan	6,050,000
2 05 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	1,254,000			12 Bulan	1,379,400
2 05 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	1,564,860,000			12 Bulan	1,721,346,000
2 05 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	165,000,000			12 Bulan	181,500,000
2 05 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		4572 Orang	10,331,865,500			4452 Orang	11,365,052,050
2 05 01 01 22	Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium	Jumlah Penyediaan Jasa Pengelolaan Laboratorium		48 Orang Bulan	11,000,000			48 Orang Bulan	12,100,000
2 05 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			3,289,000,000				3,617,900,000
2 05 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20 Unit	33,000,000			20 Unit	36,300,000
2 05 01 02 12	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Laboratorium	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium		2 Unit	60,500,000			2 Unit	66,550,000
2 05 01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2 Gedung	11,000,000			2 Gedung	12,100,000
2 05 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara		1 Unit	44,000,000			1 Mobil	48,400,000
2 05 01 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara		636 Mobil Bulan	2,860,000,000			636 Mobil Bulan	3,146,000,000
2 05 01 02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobile, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara		45 Unit	55,000,000			45 Unit	60,500,000
2 05 01 02 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik		1 Unit	5,500,000			1 Unit	6,050,000
2 05 01 02 32	Pemeliharaan Lampu Jalan	Periode Pemeliharaan Lampu Jalan		12 Bulan	220,000,000			12 Bulan	242,000,000
2 05 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terciptanya Kedisiplinan Pegawai			605,000,000				665,500,000
2 05 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		336 Pasang	605,000,000			308 Pasang	665,500,000
2 05 01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Dokumen SPM			3,300,000				3,630,000
2 05 01	Penyusunan Standart Minimum (SPM)	Jumlah Buku SPM		15 Buku	3,300,000			15 Buku	3,630,000
2 05 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja SKPD			3,300,000				3,630,000
2 05 01 07 2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD		25 Buku	3,300,000			25 Buku	3,630,000
2 05 01	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Tersedianya Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lsw		6 hari	16,500,000				18,150,000
2 05 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	16,500,000			6 Hari	18,150,000
2 05 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penghargaan dibidang Lingkungan			3,034,636,000				3,338,099,600
2 05 01 15 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	periode sarana dan prasarana tempat pembuangan Akhir sampah		6 unit	2,520,000,000			12 Bulan	2,772,000,000
2 05 01	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta Sosialisasi		100 Orang	64,636,000			40 Orang	71,099,600
2 05 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Prasarana Pemilahan Sampah		50 Unit	150,000,000			2000 Unit	165,000,000
2 05 01 15 15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Akhir Sampah	Periode Sarana dan Prasarana Tempat Pebuangan Akhir Sampah		5 Lokasi	300,000,000			12 Bulan	330,000,000
2 05 01 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL			204,515,000				224,966,500
2 05 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Jumlah Buku Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura		8 buku	14,465,000			8 buku	15,911,500

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 05 01 16 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan		3 lokasi	49,500,000			3 lokasi	54,450,000
2 05 01	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Buku Pengelolaan B3 dan limbah B3		8 buku	8,000,000			8 buku	8,800,000
2 05 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan pelaporan		5 Dokumen	9,515,000			5 laporan	10,466,500
2 05 01	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	Peringatan hari-hari lingkungan hidup		1 kali	99,000,000			1 tahun	108,900,000
2 05 01	Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Penanganan kasus Lingkungan Hidup		2 Kasus	11,000,000			1 tahun	12,100,000
2 05 01	Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup		1 kali	3,850,000			1 tahun	4,235,000
2 05 01	Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya penilaian sekolah adiwiyata		5 Laporan	9,185,000			40 Orang	10,103,500
2 05 01 18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam			110,000,000				121,000,000
2 05 01 18 03	Rehabilitasi Hutan dan lahan	Periode waktu Rehabilitasi Hutan dan Lahan		2 Paket	110,000,000			2 Paket	121,000,000
2 05 01 19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Informasi Sumber Daya Alam			55,500,000				61,050,000
2 05 01 19	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Peserta Peningkatan Edukasi dan Komunikasi		80 Orang	50,000,000			80 Orang	55,000,000
2 05 01 19 08	Penyusunan Status Lingkungan Hidup	Jumlah Buku SLHD		20 Buku	5,500,000			20 Buku	6,050,000
2 05 01 24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			805,200,000				885,720,000
2 05 01 24 06	Pemeliharaan RTH	Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH		3 lokasi	110,000,000			9 lokasi	121,000,000
2 05 01 24 11	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota	Jumlah Lokasi Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota		3 lokasi	145,200,000			3 lokasi	159,720,000
3 05 01	Pembangunan Taman Bermain dan penghijauan	Jumlah Pembangunan Taman Bermain dan Penghijauan yang terbangun		1 taman	550,000,000			1 taman	605,000,000
2 05 01	PROGRAM NORMALISASI JARINGAN AIR LIMBAH	Sarana dan Prasarana air limbah			330,000,000				363,000,000
2 05 01	Pengerukan/pembersihan jaringan air limbah/kotor	Jumlah Sarana dan Prasarana pengerukan air limbah/kotor		1 Lokasi	330,000,000			5 Lokasi	363,000,000
2 05 01 25	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM	Pemeliharaan Lampu Jalan			2,200,000,000				2,420,000,000
2 05 01 25 01	Peningkatan Penerangan Fasilitas Umum	Jumlah penerangan Fasilitas Umum		12 Bulan	220,000,000			12 Bulan	242,000,000
2 05 01 25 02	Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Periode Penerangan Jalan Umum		12 Bulan	1,980,000,000			12 Bulan	2,178,000,000
2 05 01 26	PROGRAM PENINGKATAN KEINDAHAN DAN KESERASIAN KOTA	Sarana dan Prasarana Keindahan dan Kebersihan Kota			330,000,000				363,000,000
2 05 01 26 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Keindahan Kota		3994 Unit	330,000,000			3994 Unit	363,000,000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Belanja Tidak Langsung				2,429,141,000				2,672,055,100
	BELANJA LANGSUNG			100%	53,483,544,440				58,831,898,884
	Dinas Capil								
2 06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				52,572,752,640				57,830,027,904
2 06 06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,004,340,000				1,104,774,000
2 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	5,000,000			12 Bulan	5,500,000
2 06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	162,920,000			12 Bulan	179,212,000
2 06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		264 OB	141,500,000			264 OB	155,650,000
2 06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	88,000,000
2 06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	66,000,000
2 06 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	40,000,000			12 Bulan	44,000,000
2 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Periode Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	2,280,000			12 Bulan	2,508,000
2 06 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	10,000,000			12 Bulan	11,000,000
2 06 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
2 06 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		816 OB	352,640,000			816 OB	387,904,000
									-

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 06 06 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor			1,941,095,000				2,135,204,500
2 06 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Unit	150,000,000			5 Unit	165,000,000
2 06 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang terpelihara		140 Unit	1,599,095,000			140 Unit	1,759,004,500
2 06 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Mobil Jabatan Kepala Dinas yang Terpelihara Selama 12 Bulan		1 Unit	50,000,000			1 Unit	55,000,000
2 06 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Terpelihara Selama 12 Bulan		1 Unit	30,000,000			1 Unit	33,000,000
2 06 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Dinas /Operasional	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara		3 Unit	50,000,000			3 Unit	55,000,000
2 06 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Selama 12 Bulan		45 Unit	40,000,000			45 Unit	44,000,000
2 06 01 02 44	(Mobile,komputer,dll)								
	Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Selama 12 Bulan		3 Unit	22,000,000			3 Unit	24,200,000
									-
2 06 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor			298,000,000				327,800,000
2 06 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS/Non PNS		98 set	98,000,000			98 set	107,800,000
2 06 01 03 06	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang disewa Untuk Arsip Kantor		1 Unit	50,000,000			1 Unit	55,000,000
2 06 01 03 09	Pengelola Jasa Data SIAK	Jumlah Jasa Pengelola Data SIAK		Triwulan	150,000,000			Triwulan	165,000,000
									-
2 06 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Periode Terlatihnya Aparatur			100,000,000				110,000,000
2 06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110,000,000
									-
2 06 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Terlaksananya Perencanaan Bagi SKPD Kota Lhokseumawe			8,000,000				8,800,000
2 06 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja Disdukcapi		10 Buku	8,000,000			10 Buku	8,800,000
									-
2 06 01 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KOTA	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kota			25,000,000				27,500,000
2 06 01 11 01	Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	25,000,000			6 Hari	27,500,000
									-
2 06 01 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan			26,882,236,520				29,570,460,172
2 06 01 15 01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Periode Pengoperasian SIAK Secara Terpadu		12 Bulan	45,000,000			12 Bulan	49,500,000
2 06 01 15 16	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan Orang Asing	Periode Pelayanan Pindah WNI dan Orang Asing		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
2 06 01 15 20	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	22,000,000
2 06 01 15 29	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta Sosialisasi Akta Kematian Kebutuhan Pencatatan Sipil		1 Kali	75,325,000			1 Kali	82,857,500
2 06 01 15 30	Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Akta- akta Pencatatan Sipil	Periode Tertatnya Arsip Pencatatan Sipil		IV Triwulan	58,855,000			IV Triwulan	64,740,500
2 06 01 15 32	Pemeliharaan Perangkat SIAK	Periode Pemeliharaan Perangkat SIAK		12 Bulan	77,000,000			12 Bulan	84,700,000
2 06 01 15 33	Pemanfaatan Data Kependudukan	Periode Pemanfaatan Data Kependudukan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	66,000,000
2 06 01 15 34	Pengelola Data Kependudukan	Periode Pengelola Data Kependudukan		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
2 06 01 15 35	Bimbingan Teknis PIAK	Periode Bimbingan Teknis PIAK		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	66,000,000
2 06 01 15 38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perangkat Lunak	tersedianya Werekhous Kependudukan dan Pecatatan Sipil Secara Terpadu		1 Paket	95,000,000			1 Paket	104,500,000
2 06 01 15 39	Penerbitan kartu Indentitas Anak (KIA)	Kartu Identitas Anak		4 Kali	50,000,000			4 Kali	55,000,000
2 06 01 15 41	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan WNA	Periode pelayanan pindah WNI dan WNA		12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	132,000,000
2 06 01 15 44	Monitor dan Evaluasi	cakupan perekaman KTP-E dan Akta pencatan Sipil			60,000,000				66,000,000
2 06 01 15 45	Sosialisasi Tentang Inovasi dan Pemanfaatan Data	Jumlah peserta Sosialisasi			60,000,000				66,000,000
2 06 01 15 46	Penyusunan dan Pengumpulan Data Kematian disetiap Desa dalam Wilayah Pemko Lhokseumawe	Periode penyusunan Data Kematian		IV Triwulan	67,700,000			IV Triwulan	74,470,000
2 06 01 15 47	Penyusunan Rencana Qanun Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Periode Penyusunan Rencana Qanun Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	55,000,000
2 06 01 16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN KEPENDUDUKAN	TERLAKSANANYA PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN KEPENDUDUKAN			22,314,081,120				24,545,489,232
2 06 01 16 01	Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Rentan Adminduk	Jumlah Data Penduduk Rentan dan Pelayanan Adminduk		12 Bulan	86,900,000			12 Bulan	95,590,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)				910,791,800				1,001,870,980
	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI MASYARAKAT				110,000,000				121,000,000
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Sosialisasi Kebijakan Kependudukan		12 Bulan	110,000,000			12 Bulan	121,000,000
	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN				448,591,800				493,450,980
	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil		60 Hari	61,438,000			60 Hari	67,581,800
	Pelayanan Keliling Kependudukan(DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Sekolah)		1 Keg	73,700,000			1 Keg	81,070,000
	Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Adminduk (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Jumlah Data Penduduk Rentan dan Pelayanan Adminduk		12 Bulan	86,900,000			12 Bulan	95,590,000
	Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan WNA	Periode Pelayanan Pindah WNI dan WNA		12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	132,000,000
	Pelayanan, Perekaman dan Penertiban KTP Elektronik (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Pelayanan, Perekaman dan Penertiban KTP Elektronik		4 Triwulan	106,553,800			4 Triwulan	117,209,180
	PENERTIBAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN				370,000,000				407,000,000
	Penertiban Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Penertiban Dokumen Kependudukan		12 Bulan	370,000,000			12 Bulan	407,000,000
	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)				202,200,000				222,420,000
	Penyusunan Profil Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Penyusunan Profil Kependudukan		12 Bulan	53,000,000			12 Bulan	58,300,000
	Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester		2 Kali	85,500,000			2 Kali	94,050,000
	Penyusunan Data Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik -Dana DAK)	Periode Penyusunan Akta Perkawinan dan Perceraian		IV TRIWULAN	63,700,000			IV TRIWULAN	70,070,000
	KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PEAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				150,000,000				165,000,000
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	Periode Pelayanan Pindah WNI dan WNA		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong								
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				2,628,805,720				2,891,686,292
	BELANJA LANGSUNG				7,409,500,000				8,150,450,000
2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				7,409,500,000				8,150,450,000
2 07 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			778,500,000				856,350,000
2 07 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,000,000			12 Bulan	2,200,000
2 07 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	220,000,000
2 07 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
2 07 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	33,000,000
2 07 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	17,000,000			12 Bulan	18,700,000
2 07 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	7,700,000
2 07 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	2,500,000			12 Bulan	2,750,000
2 07 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan		11 Bulan	20,000,000			11 Bulan	22,000,000
2 07 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110,000,000
2 07 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		12 Bulan	250,000,000			12 Bulan	275,000,000
2 07 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			257,000,000				282,700,000
2 07 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor(Mobiler,Komputer,dll)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Jenis	84,000,000			12 Jenis	92,400,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 01 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	33,000,000
2 07 01 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Periode Pemeliharaan dan Kendaraan Operasional		12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	27,500,000
2 07 01 02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Mobiler)	Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMG		12 Bulan	18,000,000			12 Bulan	19,800,000
2 07 01 02 42	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMG		1 Paket	100,000,000			1 Paket	110,000,000
1 22 02 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR			15,000,000				16,500,000
1 22 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PeriodeTerlatihnya aparatur perencana		12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	16,500,000
2 07 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				9,000,000				9,900,000
2 07 01 07 02	Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD		5 Buku	2,000,000			5 Buku	2,200,000
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah	Jumlah Buku SOP		5 Buku	7,000,000			5 Buku	7,700,000
2 07 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN				1,035,000,000				1,138,500,000
2 07 01 15 25	Pembinaan Dan Pengendalian APBG	Terarahnya pembangunan gampong		68 Gampong	200,000,000			68 Gampong	220,000,000
2 07 01 15 38	Pengendalian Profil Gampong	terselesainnya kegiatan pengendalian profil gampong		1 Kegiatan	45,000,000			1 Kegiatan	49,500,000
2 07 01 15 51	Penyusunan Peraturan Kota Lhokseumawe Tentang Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Gampong dan Besar Kota Lhokseumawe	Tersedianya peraturan wali kota dan keputusan tentang Pedoman ADG		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 53	Penyusunan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 57	Monitoring Kelengkapan Laporan Petanggungjawaban DD, ADG, dan BHPRD	Terlaksananya Pertanggung Jawaban LPJ,ADG,dan BHPRD		1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
2 07 01 15 58	Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Dana Desa Setiap Gampong	Terselesainya Kegiatan Tata cara pengalokasian dan besaran Dana Desa Setiap Kampong		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 59	Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong	Terselesainya Kegiatan Tata cara pengalokasian dan besaranBagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 60	Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Gampong	Tersedianya Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Gampong		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 61	Tata Cara Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran BUMG	Terselesainya kegiatan Tata cara Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembuburan BUMG		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 62	Penelitian dan Asistensi RKA-G dan DPA-G	Terselesainya Kegiatan Penelitian dan Asistensi RKA-G dan DPA-G		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 63	Monitoring Kelengkapan Dokumen Pencairan ADG, DD, BHPRD	Tertibnya Administrasi Pencairan DD,ADG, dan BHPRD		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 64	Penyusunan Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan APBG	terselesainya Kegiatan Penyusunan Penepatan Hasil Evaluasi Rancangan APBD		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	44,000,000
2 07 01 15 65	Satuan kerja keuangan gampong	Terarahnya pembangunan gampong		1 Kegiatan	350,000,000			1 Kegiatan	385,000,000
2 07 01 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA				495,000,000				544,500,000
2 07 01 17 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Gampong		-	-			-	-
2 07 01 17 06	Pembinaan Gampong dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Gampong		1 kegiatan	50,000,000			1 kegiatan	55,000,000
2 07 01 17 10	Koordinasi Kelompok Kerja Nasional(POKJANAL) Posyandu Plus	Terselesainya Koordinasi Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) Posyandu Plus		1 kegiatan	20,000,000			1 kegiatan	22,000,000
2 07 01 17 11	Pembinaan Pengembangan PKK	Priode Pembinaan Pengembangan PKK		1 kegiatan	300,000,000			1 kegiatan	330,000,000
	Pembinaan Mukim	Terbitnya Mukim Gampong		1 kegiatan	40,000,000			1 kegiatan	44,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendataan dan Evaluasi Aset Gampong	Terdatanya Aset Gampong		1 kegiatan	85,000,000			1 kegiatan	93,500,000
1 07 01 19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPERDESAAN				4,820,000,000				5,302,000,000
2 07 01 19 12	Rapat Koordinasi PKK	Tercapainya Hasil Rapat yang maksimal		1 kegiatan	30,000,000			1 kegiatan	33,000,000
2 07 01 19 14	Hari Kesatuan Gerak Pkk(PKK Kota Lhokseumawe)	Terselesainya Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK		1 kegiatan	40,000,000			1 kegiatan	44,000,000
	Penyuluhan PHBS RT			1 kegiatan	50,000,000			1 kegiatan	55,000,000
	Jambore Pkk (Pkk Kota Lhokseumawe)	Terlaksananya Jambore Pkk		1 kegiatan	200,000,000			1 kegiatan	220,000,000
	Diklat Peningkatan Mutu Produk Makanan/Kue (Pkk Kota Lhokseumawe)	Terlaksanya Pelatihan Mutu Produk/Kue		1 Kegiatan	60,000,000			1 Kegiatan	66,000,000
	Lomba Senam Lansia Bagi Kander Posyandu lansia	Terlaksananya Bagi Lansia		1 Kegiatan	60,000,000			1 Kegiatan	66,000,000
	Work Shop Parentin Advokasi			1 Kegiatan	60,000,000			1 Kegiatan	66,000,000
	Pelatihan Akhlaqul Kharimah PkkKota Lhokseumawe	Tercapainya Pembinaan Akhlaqul kharimah		1 Kegiatan	45,000,000			1 Kegiatan	49,500,000
	Pelatihan Aneka Kudapan dan Cemilan sehat Bagi Keluarga	Terlaksanya Pelatihan anekan kudapan		1 Kegiatan	45,000,000			1 Kegiatan	49,500,000
	Pelatihan Pembuatan Jelly ART	Terlaksanya Pelatihan jelly Atr		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	55,000,000
	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Terbinanya kelompok Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Pendapatan Masyarakat		1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
	Pembangunan Geuchik/Posyandu/Kantor Pkk/TPG/kantor Mukim Posyantek	Terlaksananya Pembangunan Kantor Pemerintah Desa		1 Kegiatan	1,000,000,000			1 Kegiatan	1,100,000,000
	Rehab Kantor Geuchik/Posyandu/Kantor Pkk/TPG/kantor Mukim/ Posyantek	Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor Desa		1 Kegiatan	900,000,000			1 Kegiatan	990,000,000
	Pembangunan Pagar Kantor Geuchik/Posyandu/Kantor Pkk/TPG/kantor Mukim/ Posyantek/ Serbaguna	Terlaksananya Pembangunan Kantor Pemerintah Desa		1 Kegiatan	800,000,000			1 Kegiatan	880,000,000
	Pemasangan Vaving Blok Kantor Geuchik/Posyandu/Kantor Pkk/TPG/kantor Mukim/ Posyantek	Priode Pembinaan Pengembangan PKK		1 Kegiatan	700,000,000			1 Kegiatan	770,000,000
	Pelatihan Kader Pkk Gampong	Terlaksananya Pelatihan Kader Pkk Gampong		1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	110,000,000
	Pelatihan Manajemen BUMG			1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
	Pelatihan Kader Posyandu Gampong	TerlaksananyaPelatihan Kader Posyandu Gampong		1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
	Pelatihan Manajemen Perintah Gampong	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Perintah Gampong		1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Gampong	Pelatihan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Gampong		1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
	Pelatihan Penyusunan Reusan Gampong	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Reusan Gampong		1 Kegiatan	80,000,000			1 Kegiatan	88,000,000
	Pelatihan Penyusunan Data Profil Gampong	terlaksananya Pelatihan Penyusunan Data Profil Gampong		1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	110,000,000
	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Tercapainya Pemberian Makanan Sehat Untuk Sekolah		1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	110,000,000
									-
2. 08.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4,000,703,000				4,600,808,450
2. 08. 1. 15.	Program keluarga Berencana				2,563,363,000				2,947,867,450

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 08. 1. 15. 09	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kota Lhokseumawe	Jumlah Gampong Yang Mengikuti Hari Keluarga Nasional		68 Gampong	100,000,000			68 Gampong	115,000,000
2. 08. 1. 15. 11	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)	Periode Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka meningkatkan Program Keluarga Berencana (DAK)		12 Bulan	1,135,000,000			12 Bulan	1,305,250,000
2. 08. 1. 15. 17	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Perentase Tingkat Pelayanan Balai Penyuluh KB		12 Bulan	1,146,563,000			12 Bulan	1,318,547,450
2. 08. 1. 15. 18	pendistribusian alat dan Obat kontrasepsi (DAK NON FISIK)	Jumlah Faskes yang disalurkan Alat dan Obat Kontrasepsi		28 Faskes	41,800,000			28 Faskes	48,070,000
2. 08. 1. 15.	Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Bagi Guru SLTP dan SLTA	Jumlah Guru SLTP dan SLTA		80 Org	90,000,000			80 Org	103,500,000
2. 08. 1. 15.	Sosialisasi Pojok Kependudukan	Jumlah Kegiatan		1 Keg	50,000,000			1 Keg	57,500,000
2. 08. 1. 16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja /Mahasiswa			568,000,000				653,200,000
2. 08. 1. 16. 03	Sunat Rasul Anak Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Anak Sunat Rasul Keluarga Pra Sejahtera		200 Org	156,000,000			200 Org	179,400,000
2. 08. 1. 16. 11	Pelatihan Pembekalan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta Pelatihan		120 Org	216,000,000			120 Org	248,400,000
2. 08. 1. 16. 12	Pelatihan Tenaga Konselor PIK Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Tenaga Konselor PIK Kespro yang Terlatih		48 Org	96,000,000			48 Org	110,400,000
2. 08. 1. 16.	Pelatihan KIE Kespro Bagi PPKBD	Jumlah PPKBD yang Terlatih		68 Org	100,000,000			68 Org	115,000,000
2. 08. 1. 17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Yang Terlayani			70,000,000				80,500,000
2. 08. 1. 17. 06	Bhakti Sosial KB-TNI (Manunggal KB-Kes)	Jumlah Kecamatan		4 Kec	70,000,000			4 Kec	80,500,000
2. 08. 1. 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga				799,340,000				919,241,000
2. 08. 1. 23. 04	Pembinaan dan Penilaian Desa Binaan Terbaik Bina keluarga Balita (BKB)	Jumlah gampong Yang dibina dan dinilai sebagai Gampong BKB Terbaik		68 Gampong	163,140,000			68 Gampong	187,611,000
2. 08. 1. 23. 05	Penilaian dan Pembinaan KB Lestari	Jumlah Pasangan KB Lestari Yang Terpilih		4 Kec	57,600,000			4 Kec	66,240,000
2. 08. 1. 23. 06	Penilaian dan Pembinaan Keluarga Harmonis	Jumlah Keluarga Harmonis Yang Terpilih		4 Kec	57,600,000			4 Kec	66,240,000
2. 08. 1. 23. 09	Pelatihan Kader BKB Holistik Integratif (BKB HI)	Jumlah Kader BKB HI		84 Org	54,000,000			84 Org	62,100,000
2. 08. 1. 23. 10	Penilaian dan Pembinaan Desa Binaan Terbaik Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Jumlah Kelompok BKB HI		4 Kelompok BKB HI	144,000,000			4 Kelompok BKB HI	165,600,000
2. 08. 1. 23.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah Kelompok BKR		12 Bulan	65,000,000			12 Bulan	74,750,000
2. 08. 1. 23.	Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	Periode Terlaksananya Pelatihan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	69,000,000
2. 08. 1. 23.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS		12 Bulan	70,000,000			12 Bulan	80,500,000
2. 08. 1. 23.	Penilaian dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia	Jumlah Kelompok BKL		12 Bulan	68,000,000			12 Bulan	78,200,000
2. 08. 1. 23.	Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	Periode Terlaksananya Pelatihan		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	69,000,000
2 09	BELANJA				13,423,791,100				21,686,042,400
2 09	Belanja Tidak Langsung				3,523,584,000				3,875,942,400
2 09	BELANJA LANGSUNG			100%	9,900,207,100				17,810,100,000
2 09	Perhubungan				9,900,207,100				17,810,100,000
2 09 06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan ADM Perkantoran			1,813,707,100				8,905,050,000
2 09 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	4,263,000			12 Bulan	4,689,300
2 09 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	262,860,000			12 Bulan	289,146,000
2 09 01 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan Kantor			4 UB	35,000,000				38,500,000
2 09 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		22 OB	125,800,000			22 OB	138,380,000
2 09 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	45,000,000			12 Bulan	49,500,000
2 09 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	49,250,500			12 Bulan	54,175,550
2 09 01 01 13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya Listrik dan Alat Kebersihan		12 Bulan	39,044,000			12 Bulan	42,948,400
2 09 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bacaan Media Cetak		12 Bulan	4,000,000			12 Bulan	4,400,000
2 09 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Aparatur		12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	7,700,000
2 09 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Adanya Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		128 OB	1,091,489,600			128 OB	1,200,638,560
2 09 06 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1,037,000,000				1,140,700,000
2 09 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Unit	500,000,000			1 Unit	550,000,000
2 09 01 02 06	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Ruang Kantor Yang Baru		13 Unit	75,000,000			13 Unit	82,500,000
2 09 01 02 14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya BBM Kendaraan Bermotor dan Perawatan Kendaraan Kepala Dinas		1 UB	20,000,000			1 UB	22,000,000
2 09 01 02 15	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Tersedianya BBM Kendaraan Bermotor dan Perawatan Kendaraan		1 Unit	33,000,000			1 Unit	36,300,000
2 09 01 02 16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Jasa Service		15 Bulan	394,000,000			15 Bulan	433,400,000
2 09 01 02 21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler)			22 Unit	15,000,000			22 Unit	16,500,000
2 09 01	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				45,000,000				49,500,000
2 09 01 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dan Atribut		80 Stel	45,000,000			80 Stel	49,500,000
2 09 01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				95,000,000				114,400,000
2 09 01 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM Perhubungan Yang Handal		4 Orang	45,000,000			4 Orang	49,500,000
2 09 01 43	Pelatihan dan Pembekalan Petugas Lapangan	Tersedianya Petugas Lapangan Yang Handal		50 Orang	50,000,000			50 Orang	55,000,000
2 09 01	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Terlaksananya Perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe			4,500,000				4,950,000
2 09 01 01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terciptanya RENJA SKPD		20 Buku	4,500,000			20 Buku	4,950,000
2 09 01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN				85,000,000				93,500,000
2 09 01 15 01	Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Terpeliharanya Fasilitas terminal		1 Dokumen	65,000,000			1 Dokumen	71,500,000
2 09 01 15 02	Penyusunan Kebijakan;norma;standart dan prosedur perhubungan	Tersedianya Tempat Pemberhentian Kendaraan		2 Dokumen	20,000,000			2 Dokumen	22,000,000
2 09 01 16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ				130,000,000				143,000,000
2 09 01 16 01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat-alat pengujian kendaraan bermotor		4 Unit	45,000,000			4 Unit	49,500,000
2 09 01 16 04	Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya bangunan terminal		1 Unit	20,000,000			1 Unit	22000000
2 09 01 16 05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Haltel, Traffic dan Rambu-Rambu LLAJ	Terpeliharanya bangunan fasilitas lalu lintas jalan		20 Unit	65,000,000			20 Unit	71,500,000
2 09 01 17	Program peningkatan pelayanan angkutan				333,000,000				366,300,000
2 09 01 17 01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Supir/Juru mudi Untuk Peningkatan	Terlaksananya penyuluhan supir angkutan		100 Orang	25,000,000			100 Orang	27,500,000
2 09 01 17 05	Pengendalian Disipin Pengeporasian Angkutan Umum dijalan Raya	terlaksananya pengawasan lalu lintas		75 Orang	195,000,000			75 Orang	214,500,000
2 09 01 17 09	Kegiatan Penciptaan Disiplin Dan Pemelihara Kebersihan Dilingkungan	terciptanya disiplin dan terpeliharanya kebersihan terminal		12 Bulan	38,000,000			12 Bulan	41,800,000
2 09 01 17 11	Pengumpulan Dan Analisis Data base Pelayanan Angkutan	terciptanya dokumen data base angkutan		3 Dokumen	30,000,000			3 Dokumen	33,000,000
2 09 01 17 15	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/juru mudi/awak Kendaraan	terpilihnnya juru mudi teladan		90 orang	45,000,000			90 orang	49,500,000
2 09 01 18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN				2,580,000,000				2,838,000,000
2 09 01 18 01	Pembangunan Edung (Fasilitas Terminal)	terpeliharanya fasilitas terminal		1 Unit	2,500,000,000			1 Unit	2,750,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 09 01 18 02	Pembangunan Halte Bus Taxi, Gedung Terminal	tersedianya tempat pemberhentian kendaraan		1 Unit	80,000,000			1 Unit	88000000
2 09 01 19	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN				3,287,000,000				3,615,700,000
2 09 01 19 01	Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas	adanya rambu lalu lintas dan prasarana lalu lintas		40 Unit	60,000,000			40 Unit	66,000,000
2 09 01 19 02	Pengadaan Marka Jalan	tersedianya marka jalan yang representatif		1 Kawasan	135,000,000			1 Kawasan	148,500,000
2 09 01 19 03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	tersedianya pagar pengaman jalan		1 Kawasan	50,000,000			1 Kawasan	55,000,000
2 09 01 19 05	Pengadaan Traffict Light	tersedianya APIL		1 Kawasan	525,000,000			1 Kawasan	577,500,000
2 09 01 19 06	Pengadaan Jembatan Penyebrangan	tersedianya sarana jembatan penyebrangan orang		2 Unit	1,200,000,000			2 Unit	1,320,000,000
2 09 01 19 11	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	adanya rambu-rambu dan prasarana lalu lintas		1 Kawasan	1,317,000,000			1 Kawasan	1,448,700,000
2 09 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSPORTASI				490,000,000				539,000,000
2 09 01 15 06	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Transportasi	tersedianya sarana transportasi		20 Unit	490,000,000			20 Unit	539,000,000
2 10 01	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian								
	BELANJA				5,352,583,932				5,887,842,325
	Belanja Tidak Langsung				1,779,311,382				1,957,242,520
	BELANJA LANGSUNG				3,573,272,550				3,930,599,805
2 10	Komunikasi dan Informatika				3,573,272,550				3,930,599,805
2 10 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			573,547,600				630,902,360
2 10 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	3,000,000			12 Bulan	3,300,000
2 10 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	96,316,000			12 Bulan	105,947,600
2 10 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		22 Org	105,124,800			22 Org	115,637,280
2 10 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	54,450,000			12 Bulan	59,895,000
2 10 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	25,410,000			12 Bulan	27,951,000
2 10 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	9,680,000			12 Bulan	10,648,000
2 10 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		365 Eks	2,758,800			365 Eks	3,034,680
2 10 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan		12 Bulan	19,360,000			12 Bulan	21,296,000
2 10 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
2 10 01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		12 Bulan	107,448,000			12 Bulan	118,192,800
2 10 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			451,116,800				496,228,480
2 10 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		52 Unit	165,000,000			52 Unit	181,500,000
2 10 01 02	Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)	Jumlah Pengadaan Roda 2		5 Unit	125,000,000				137,500,000
2 10 01 02 14	Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang Terpelihara		1 Gedung	84,700,000			1 Gedung	93,170,000
2 10 01 02 15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan		12 UB	32,234,400			12 UB	35,457,840
2 10 01 02 16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Periode Pemeliharaan dan Kendaraan Operasional		12 Bulan	32,324,400			12 Bulan	35,556,840
2 10 01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kominfo		9 Jenis	11,858,000			9 Jenis	13,043,800
2 10 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				100,000,000				110,000,000
2 10 01 03 06	Penyediaan Sewa Gedung / Gudang kantor	Jumlah Gudang Yang Disewa		1 Unit	100,000,000			1 Unit	110,000,000
2 10 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				44,000,000				48,400,000
2 10 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Gudang Yang Disewa		5 Orang	44,000,000			12 Bulan	48,400,000
2 10 01 10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				7,562,500				8,318,750

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 10 01 10 11	Penyusunan Standart Minimum (SPM)	Jumlah Buku SPM		15 Buku	7,562,500			15 Buku	8,318,750
2 10 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			24,075,000				26,482,500
2 10 01 07 02	Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD		10 Buku	15,000,000			10 Buku	16,500,000
2 10 01 07 03	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi	Jumlah Buku SOP SKPD		10 Buku	9,075,000			10 Buku	9,982,500
2 10 01 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	TERSEDIAANYA INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA LHOXSEUMAWE			16,500,000				18,150,000
2 10 01 11 01	Kegiatan pameran pembangunan dan pengembangan pembangunan	Periode Tersedianya data dan informasi lokasi pembangunan		6 Hari	16,500,000			6 Hari	18,150,000
2 10 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	TERSEDIAANYA DATA INFORMASI PEMBANGUNAN			569,270,650				626,197,715
2 10 01 15 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Periode Tersedianya Perangkat Komunikasi dan Informasi Kota Lhokseumawe		12 Bulan	88,000,000			12 Bulan	96,800,000
2 10 01 15 22	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi dan Informatika	Periode Tersedianya Perangkat Komunikasi dan Informasi Kota Lhokseumawe		12 Bulan	43,880,650			12 Bulan	48,268,715
2 10 01 15 23	Pengadaan Penunjang Media Center	Periode Tersedianya Penunjang Gedung Media Center		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
3 10 01 15 24	Pengadaan Cetak Buletin	Periode Tersedianya Buletin Kota Lhokseumawe		1 Unit	346,390,000			1 Unit	381,029,000
4 10 01 15 25	Pengadaan Spanduk Informasi	Periode Tersedianya Spanduk Komunikasi dan Informasi Kota Lhokseumawe		1 Unit	25,000,000			1 Unit	27,500,000
2 10 01 15 26	Pengadaan Blue Print TIK Kota Lhokseumawe	Periode Tersedianya Perangkat Komunikasi dan Informasi Kota Lhokseumawe		12 Bulan	99,000,000			12 Bulan	108,900,000
2 10 01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	PERIODE TERSEDIAANYA PERANGKAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA LHOXSEUMAWE			83,000,000				91,300,000
2 10 01 16 1	Pengadaan Manitenance Jaringan Kota Lhokseumawe	Tersedianya Maintenance Kota Lhokseumawe		1 Unit	33,000,000				36,300,000
2 10 01 16 2	Pengadaan Sarana Jaringan Telekomunikasi	Tersedianya Koneksi Internet		1 Ls	50,000,000				55,000,000
2 10 01 20	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	TERSEDIAANYA DATA/ INFORMASI PEMBANGUNAN			1,399,200,000				1,539,120,000
2 10 01 20 01	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Publik		12 Bulan	123,200,000			12 Bulan	135,520,000
2 10 01 20 02	Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe	Tersedianya Pengelolaan Email Pemerintah Kota Lhokseumawe		12 Bulan	121,000,000			12 Bulan	133,100,000
2 10 01 20 03	Pengelolaan Surat Elektronik	Tersedianya Pengelolaan Surat Elektronik		12 Bulan	45,000,000			12 Bulan	49,500,000
2 10 01 20 04	Pengadaan Mobil Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (OTSUS)	Tersedianya mobil layanan dan pengaduan masyarakat Kota Lhokseumawe		1 Unit	660,000,000			1 Unit	726,000,000
2 10 01 20 05	Pengadaan Aplikasi Percepatan Pembangunan	Tersedianya aplikasi		1 Unit	100,000,000			1 Unit	110,000,000
2 10 01 20 06	Pengadaan Aplikasi E-Kinerja	Tersedianya Aplikasi		1 Unit	110,000,000			1 Unit	121,000,000
2 10 01 20 07	Pengadaan Aplikasi Layanan Perizinan Terpadu	Tersedianya Aplikasi		1 Unit	140,000,000				154,000,000
2 10 01 20 08	Pengadaan Aplikasi Hel Desk dan Pengetahuan	Tersedianya Aplikasi		1 Unit	100,000,000			1 Unit	110,000,000
2 10 01 20 09	Pemeliharaan Aplikasi Pendukung E-Government			12 Bulan	67,000,000			12 Bulan	73,700,000
2 10 01 20 10	Pengadaan Jaringan dan Infrastruktur E-Government			12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	82,500,000
2 10 01 20 11	Sosialisasi Penyelenggaraan Program Kelompok Informasi Gampong			12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	82,500,000
2 10 01 20 12	Monitoring dan Evaluasi Program Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kota Lhokseumawe			12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	66,000,000
2 10 01 21	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI	TERSEDIAANYA TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI			110,000,000				121,000,000
2 10 01 21 01	Pengelolaan Keamanan Informasi dan Jaringan Internet Kota Lhokseumawe	Tersedianya Keamanan Informasi		12 Bulan	110,000,000			12 Bulan	121,000,000
2 10 01 21	PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MENINGKATNYA PENGETAHUAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			195,000,000				214,500,000
2 10 01 21	Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Pengelolaan Data Can Informasi Publik		12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	82,500,000
2 10 01 21	Sosialisasi Undang-Undang ITE	Tersedianya Pengelolaan Data Can Informasi Publik		12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	132,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
	BELANJA				32,831,207,924				28,919,357,431
	Belanja Tidak Langsung				3,241,352,855				3,241,352,855
	BELANJA LANGSUNG				29,589,855,069				25,678,004,576
2 11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				1,535,535,569				1,583,903,126
2 11 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			679,924,419				747,916,861
2 11 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,650,000			12 Bulan	1,815,000
2 11 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	218,943,569			12 Bulan	240,837,926
2 11 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		18 org	107,618,500			18 org	118,380,350
2 11 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	24,324,850			12 Bulan	26,757,335
2 11 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	9,900,000			12 Bulan	10,890,000
2 11 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	68,860,000			12 Bulan	75,746,000
2 11 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	1,254,000			12 Bulan	1,379,400
2 11 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan minuman		12 Bulan	6,380,000			12 Bulan	7,018,000
2 11 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	64,900,000			12 Bulan	71,390,000
2 11 01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap		6 Bulan	176,093,500			6 Bulan	193,702,850
2 11 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			112,241,250				106,279,375
2 11 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Mobiler, Komputer,dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Unit	5,500,000			1 Unit	6,050,000
2 11 01 02 14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/Pasar yang Terpelihara		1 Gedung	10,450,000			1 Gedung	11,495,000
2 11 01 02 08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Mobil Jabatan yang Terpelihara		1 Unit	29,260,000			1 Unit	15,000,000
2 11 01 02 08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang Terpelihara		3 Unit	61,641,250			3 Unit	67,805,375
2 11 01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler,dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara		14 Unit	5,390,000			14 Unit	5,929,000
2 11 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			44,000,000				48,400,000
2 11 01 03 06	Penyediaan Sewa Gedung /Gudang Kantor	Jumlah Gedung Yang Disewa		1 unit	44,000,000			1 unit	48,400,000
2 11 01 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMER DAYA APARATUR				8,800,000				9,680,000
2 11 01 3 6	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal		1 Kegiatan	8,800,000			1 Kegiatan	9,680,000
2 11 01 7	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA				1,474,000				1,621,400
2 11 01 7 1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA		10 Buku	1,474,000			10 Buku	1,621,400
	Penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah			10 Buku	-			10 Buku	
2 11 01 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Tersedianya informasi pembangunan Kota Lhokseumawe			383,095,900				421,405,490
2 11 01 11 02	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Industri dan Perdagangan	Jumlah Dokumen DED Industri dan Perdagangan		5 dokumen	383,095,900			5 dokumen	421,405,490
2 11 01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUUSAHAANDAN KEUNGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH				130,000,000				88,000,000
2 11 01 16 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewira Usahaan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	55000000
2 11 01 16 16	Penyelenggaraan pelatihan Akutansi	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1 Kegiatan	30,000,000			1 Kegiatan	33,000,000
2 11 1 16 16	Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Pembukaan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				80,000,000				88,000,000
2 11 01 17 19	Pendataan UMKM Kota Lhokseumawe	Jumlah UMKM di kota lhokseumawe		1 Hari	50,000,000			1 Hari	55,000,000
2 11 01 17 22	Pendataan Koperasi Tidak Aktif	Jumlah Hari Pelaksanaan		1 Hari	30,000,000			1 Hari	33000000
2 11 01 17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				96,000,000				72,600,000
2 11 01 17 17	Pelatihan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1 Kegiatan	66,000,000			1 Kegiatan	72,600,000
2 11 01 17 18	Bintek Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1 Kegiatan	30,000,000			1 Kegiatan	
3 06	Perdagangan				17,355,300,000				16,720,680,000
3 06 01 15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				3,091,500,000				1,016,500,000
3 06 01 15 05	Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi	Terlaksananya Pengawasan terhadap Tera Ulang UTTP metrologi		1 Kegiatan	30,000,000			1 Kegiatan	33,000,000
3 06 01 15 11	Pengawasan Pupuk Bersubsidi	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	35,000,000			1 Kegiatan	38,500,000
3 06 01 15 12	Pengawasan Bahan Berbahaya	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	40,000,000			1 Kegiatan	175,000,000
3 06 01 15 13	Pembangunan instalasi (Tangki Ukur Mobil) TUM	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	700,000,000			1 Kegiatan	770000000
3 06 01 15 14	Diklat Penera Ahli	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	10,000,000			1 Kegiatan	
3 06 01 15 15	Diklat Penyidik PPNS Metrologi	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	10,000,000			1 Kegiatan	
3 06 01 15 16	Kalibrasi Tera Tera Ulang Standart	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	700,000,000			1 Kegiatan	
3 06 01 15 17	Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK)	jumlah sarana dan peralatan Metrologi Legal yang tersedia		1 Kegiatan	1,456,000,000			1 Kegiatan	
3 06 01 15 18	Pembinaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	
3 06 01 15 19	Pengadaan Master Meter	jumlah lokasi pembinaan dan pengawsan peredaran barang dan jasa		1 Kegiatan	500,000			1 Kegiatan	
3 06 01 15 20	Pelatihan Bagi Reparatur Timbangan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		1 Kegiatan	60,000,000			1 Kegiatan	
3 06 01 18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI				14,263,800,000				15,704,180,000
3 06 01 18 03	Pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk	meningkatnya kawasan pasar yang tertera dengan baik		1 Kegiatan	6,000,000,000			1 Kegiatan	6,600,000,000
3 06 01 18 08	Pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk (DAK)	Jumlah Lokasi Pasar Yang direhab		2 Pasar	7,753,800,000			2 Pasar	8,529,180,000
3 06 01 18 09	Pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk (otsus)	Jumlah Lokasi Pasar Yang direhab		1 Kegiatan				1 Kegiatan	-
3 06 01 18 10	Pelaksanaan Pasar Murah dan Monitoring Harga Pasar	terlaksananya pasar murah dan monitoring harga pasar		1 Kegiatan	400,000,000			1 Kegiatan	400,000,000
3 06 01 18 11	Penertiban Pasar Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	jumlah lokasi yang ditertibkan		1 Kegiatan	60,000,000			1 Kegiatan	120,000,000
3 06 01 18 11	Studi Banding Ke Pasar Luar Daerah	jumlah Pasar yang dikunjungi		1 Kegiatan	50,000,000			1 Kegiatan	55,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 07	Perindustrian				10,699,019,500				7,373,421,450
3 06 01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAGANG DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH				170,742,000				127,316,200
3 06 01 20 01	Pameran Dagang, Pameran Industri dan pameran Dekranas Kota Lhokseumawe	Jumlah Keikutsetaan dalam Pameran Dagang, Pameran Industri,Dan Pameran Produk Industri Kecil UKM		4 jumlah keikutsertaan(berapa kali)	115,742,000			4 x Jumlah Keikutsertaan	127,316,200
3 06 01 20 01	Pendataan pedagang Besar, Menengah, Kecil dan mikro dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	jumlah pedagang yang terdata		1 Kegiatan	55,000,000			1 Kegiatan	
3 07 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKTIF				50,000,000				
3 07 01 15 01	Pembentukan Sentral Industri Kecil dan Menengah	tersedianya sentra produktif		Kegiatan	50,000,000				
3 07 01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				6,188,277,500				6,807,105,250
0 07 01 16 08	Pelatihan Teknis Produksi Ik Kerajinan Kayu	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	78,520,000			1	86372000
3 07 01 16 11	Pelatihan Peningkatan Mutu Ik Bordir	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	86,905,500			2	95,596,050
3 07 01 16 15	Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Lhokseumawe				50,000,000			2	55,000,000
3 07 01 16 17	Pelatihan Peningkatan industri Kecil Mutu Kue Kering	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	72,852,000				80,137,200
3 07 01 16 21	Pengadaan Mesin /Peralatan Produksi IKM	Jumlah mesin/peralatan produksi IKM		Paket	1,000,000,000			Peserta/IKM	1,100,000,000
3 07 01 16 24	Pengadaan Mesin /Peralatan Produksi IKM (DOKA)	Tersedianya mesin/peralatan untuk IKM		3 Kegiatan	2,500,000,000				2,750,000,000
3 07 01 16 28	Pembangunan Ladang Industri Garam Rayat percontohan	Tersedianya mesin/peralatan untuk IKM			250,000,000			Peserta/IKM	275,000,000
3 07 01 16 31	Pelatihan Pembekelan untuk Pemuda Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	50,000,000			1	55,000,000
3 07 01 16 32	Pelatihan Peningkatan Mutu IKM Kerupuk Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	100,000,000				110,000,000
3 07 01 16 30	Pengadaan Peralatan Industri Kecil Menengah (DAK)	Jumlah mesin/peralatan produksi IKM		Peserta/IKM	2,000,000,000				2,200,000,000
3 07 01 17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKHNOLOGI INDUSTRI				100,000,000				110,000,000
3 07 01 01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri				100,000,000				110,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI PONTESIAL				4,000,000,000				120,000,000
3 07 01 19 01	Pembinaan industri kecil dan Menengah (DAK)	Terselenggaranya pameran dagang		Paket	4,000,000,000			Paket	120,000,000
3 7 1 24	PROGRAM PENINGKATAN MUTU INDUSTRI				190,000,000				209,000,000
3 07 01 24 01	Peningkatan Desain Mutu bordir Pada Baju Jadi dan Linen Rumah Tangga	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	100,000,000			Peserta/IKM	110,000,000
3 07 01 24 02	Penilaian Desa kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe	Jumlah Desa yang Dinilai		Jumlah Desa	45,000,000			Jumlah Desa	49,500,000
3 07 01 24 04	Pembinaan Industri Kerajinan DEKRANASDA Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta/IKM yang mengikuti Pelatihan		Peserta/IKM	45,000,000			Peserta/IKM	49,500,000
2 13 01	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata								
	BELANJA				-				-
	Belanja Tidak Langsung								

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Langsung				-				-
2 13	DISPORAPA				24,626,369,400				27,089,006,340
2 13 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,026,760,000				1,129,436,000
2 13 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,000,000			12 Bulan	2,200,000
2 13 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	196,540,000			12 Bulan	216,194,000
2 13 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		140 OB	174,540,000			140 OB	191,994,000
2 13 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	58,800,000			12 Bulan	64,680,000
2 13 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	46,600,000			12 Bulan	51,260,000
2 13 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	21,600,000			12 Bulan	23,760,000
2 13 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	2,000,000			12 Bulan	2,200,000
2 13 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	7,200,000			12 Bulan	7,920,000
2 13 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	211,000,000			12 Bulan	232,100,000
2 13 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		216 OB	306,480,000			216 OB	337,128,000
2 17 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			420,408,400				462,449,240
2 13 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20 Unit	263,258,400			20 Unit	289,584,240
2 13 01 02 14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	22,000,000
2 13 01 02 16	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional	Periode Mobil Operasional Yang Terpelihara		12 Bulan	121,600,000			12 Bulan	133,760,000
2 13 01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara		20 Unit	15,550,000			20 Unit	17,105,000
1 05 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			80,000,000				88,000,000
1 05 01 06	Penyediaan sewa Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor		1 Unit	80,000,000			1 Unit	88,000,000
1 05 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Penigkatan Kualitas SDM Aparatur			3,000,000				3,300,000
1 05 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		6 Buku	3,000,000			6 Buku	3,300,000
1 05 01	PROGRAM PENINGKATAN SERTA KEPEMUDAAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			406,950,000				447,645,000
1 05 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Hari Pelaksanaan		4 Hari	135,500,000			6 Hari	149,050,000
1 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepimimpinan	Jumlah Angkatan		1 Angkatan	98,850,000				108,735,000
1 05 01	Training Of Trainer	Jumlah Hari Pelaksanaan dan Peserta		4 Hari	125,750,000				138,325,000
1 05 01	Seleksi Paskibrakat Tingkat Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta		60 Orang	46,850,000				51,535,000
1 05 01	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	TERLAKSANANYA PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA			99,250,000				109,175,000
1 05 01	Pelatihan Upaya Pencegahan	Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan		80 Orang	99,250,000			80 Orang	109,175,000
1 05 01	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	TERLAKSANANYA UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA			360,861,000				396,947,100
1 05 01	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan		140 Orang	96,500,000			4 Laporan	106,150,000
1 05 01	Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Peluang Usaha Kota Lhokseumawe	Jumlah Hari Pelaksanaan dan Jumlah Peserta		419 Orang	199,863,000			419 Orang	219,849,300
1 05 01	Pelatihan Ekonomi Kreatif/Pemadu Wisata/Pembuatan Souvenir Kota Lhokseumawe	Jumlah Hari Pelaksanaan dan Jumlah Peserta		2 Hari	64,498,000			2 Hari	70,947,800
1 05 01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA			226,150,000				248,765,000
1 05 01	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Ke Olahragaan	Jumlah Hari Pelatihan		4 Hari	226,150,000			4 Hari	248,765,000
1 05 01	KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	ADANYA KOORDINASI ANTAR LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN KESATUAN			2,990,000,000				3,289,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Uang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Insan Olahraga Yang Beprestasi		25 Orang	75,000,000			25 Orang	82,500,000
1 05 01	Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah Cabor Pembinaan		5 Cabor	750,000,000			5 Cabor	825,000,000
1 05 01	Pembinaan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar dan Daerah (POPDA) (OTSUS)	Jumlah Cabor		11 Cabor	1,000,000,000			11 Cabor	1,100,000,000
1 05 01	Pengadaan Peralatan Olahraga Unggulan	Jumlah Cabor		11 Cabor	785,000,000			11 Cabor	863,500,000
1 05 01	Gebyar Olahraga	Jumlah Cabor		11 Cabor	380,000,000			11 Cabor	418,000,000
1 05 01	Pengadaan Sarana dan Olahraga	Jumlah Sarana			130,790,000				143,869,000
1 05 01	Pengadaan Perlengkapan Volley	Jumlah Peralatan		34 Buah	23,290,000			34 Buah	25,619,000
1 05 01	Pengadaan Perlengkapan Bola Kaki	Jumlah Peralatan		1 Lapangan	31,900,000			1 Lapangan	35,090,000
1 05 01	Pengadaan Seragam Tim Bola Kaki	Jumlah Seragam			15,600,000				17,160,000
1 05 01	Pembangunan Lapangan Volley	Jumlah Lapangan		50 Buah	60,000,000			50 Buah	66,000,000
1 05 01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA			150,000,000				165,000,000
1 05 01	Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta		40 Orang	150,000,000			40 Orang	165,000,000
1 05 01	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			17,740,000,000				19,514,000,000
1 05 01	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	Jumlah Hari Pelaksanaan		1 Hari	140,000,000			1 Hari	154,000,000
1 05 01	Peningkatan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Yang Dikembangkan		1 Kawasan	5,500,000,000			1 Kawasan	6,050,000,000
1 05 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang dibangun		1 Sarana	12,100,000,000			1 Sarana	13,310,000,000
1 05 01	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN			992,200,000				1,091,420,000
1 05 01	Studi Banding Parawisata ke Destinasi Wisata Nasional	Jumlah Objek Wisata Yang Dikunjungi		1 Kawasan	605,000,000			1 Kawasan	665,500,000
1 05 01	Pengembangan dan Penguatan Informasi ke Database Kepariwisataan	Jumlah Website Yang Dikembangkan		1 Web	121,000,000			1 Web	133,100,000
1 05 01	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan	Jumlah Hari Monev		7 Hari	145,200,000			7 Hari	159,720,000
1 05 01	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Hari Pelaksanaan		3 Hari	121,000,000			3 Hari	133,100,000
2 17 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
	BELANJA				5,021,516,751				5,786,673,591
	Belanja Tidak Langsung				2,300,051,651				2,760,061,981
	Belanja Langsung				2,721,465,100				3,026,611,610
2 17	Perpustakaan				2,721,465,100				3,026,611,610
2 17 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			768,300,000				845,130,000
2 17 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	7,700,000
2 17 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	87,670,000			12 Bulan	96,437,000
2 17 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		120 OB	75,000,000			120 OB	82,500,000
2 17 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	55,000,000
2 17 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	3,630,000			12 Bulan	3,993,000
2 17 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	125,000,000			12 Bulan	137,500,000
2 17 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	16,500,000
2 17 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	27,500,000
2 17 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
2 17 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		528 OB	230,000,000			528 OB	253,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 17 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			372,315,100				409,546,610
2 17 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22 Unit	183,811,100			22 Unit	202,192,210
2 17 01 02 08	Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah Tempat Parkir Yang Dibangun		1 Unit	75,000,000			1 Unit	82,500,000
2 17 01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		1 Unit	25,000,000			1 Unit	27,500,000
2 17 01 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Periode Mobil Jabatan Yang Terpelihara		12 UB	29,304,000			12 UB	32,234,400
2 17 01 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional	Periode Mobil Operasional Yang Terpelihara		12 UB	29,600,000			12 UB	32,560,000
2 17 01 02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara		25 UB	29,600,000			25 UB	32,560,000
2 17 01 04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			30,000,000				33,000,000
2 17 01 04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		55 Unit	30,000,000			55 Unit	33,000,000
2 17 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Aparatur			82,500,000				90,750,000
2 17 01 02 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur		20 Orang	82,500,000			20 Orang	90,750,000
2 17 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Penigkatan Kualitas SDM Aparatur			7,150,000				7,865,000
2 17 01 02 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		25 Buku	7,150,000			25 Buku	7,865,000
2 17 01 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Perencanaan Bagi SKPD di Kota Lhokseumawe			16,500,000				18,150,000
2 17 01 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	16,500,000			6 Hari	18,150,000
2 17 01 18	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN				510,000,000				561,000,000
2 17 01 18 05	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Terwujudnya Database Informasi Kearsipan		1 Sistem	25,000,000			1 Sistem	27,500,000
2 17 01 18 06	Pengumpulan Data Arsip	Terkumpulnya Data Arsip Bernilai Guna		1 Keg	50,000,000			1 Keg	55,000,000
2 17 01 18 07	Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Terwujudnya Pedoman Tata Kearsipan		1 Draf Buku	300,000,000			1 Draf Buku	330,000,000
2 17 01 18 08	Pemeliharaan Jaringan Informasi Kearsipan	Terpeliharanya Jaringan Informasi Kearsipan		1 Paket	10,000,000			1 Paket	11,000,000
2 17 01 18 09	Penataan Dokumen Arsip Daerah	Tersedianya Data dan Arsip SKPD		7 SKPD	100,000,000			7 SKPD	110,000,000
2 17 01 18 10	Pembuatan Film Dokumentasi Arsip	Tersedianya Data dan Arsip SKP Dokumentasi Berbentuk Visual Audio		1 Video	25,000,000			1 Video	27,500,000
2 17 01 19	PROGRAM PENINGKATAN SDM KEARSIPAN				30,800,000				33,880,000
2 17 01 19 03	Bimbingan Teknis Tenaga Kearsipan	Jumlah Peserta SDM Kearsipan		90 Orang	30,800,000			90 Orang	33,880,000
2 17 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				903,900,000				1,027,290,000
2 17 01 15 02	Lomba Pustaka Tk. SMU Se-Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah Tk. SMU		100 Orang	37,950,000			100 Orang	41,745,000
2 17 01 15 03	Lomba Pustaka Tk. Gampong Se-Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Gampong		68 Orang	37,950,000			68 Orang	41,745,000
2 17 01 15	Lomba Bercerita Hikayat Daerah	Jumlah Peserta Lomba Bercerita Hikayat Daerah		90 OH	38,500,000			90 OH	42,350,000
2 17 01 15	Pengadaan Mobiler Perpustakaan Umum Kota Lhokseumawe (OTSUS)	Jumlah Mobiler Perpustakaan Kota Lhokseumawe		75 Unit	300,000,000			75 Unit	330,000,000
2 17 01 15	Pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Lhokseumawe	Periode Pelayanan Perpustakaan Keliling		132 OB	82,500,000			132 OB	90,750,000
2 17 01 15	Stock Opname dan Penyiangan (Wedding) Perpustakaan	Periode Terlaksananya Stock Opname dan Penyiangan		32 OTW	33,000,000			32 OTW	36,300,000
2 17 01 15	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Periode Pelaksanaan Perpustakaan Sabtu Minggu		324 OK	44,000,000			324 OK	48,400,000
2 17 02 15	Tersedianya Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Bacaan Perpustakaan		22	330,000,000			22	396,000,000
4 01 02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Belanja Tidak Langsung				488,073,323				536,880,655
4 01 03	Sekretariat Daerah								
	Belanja				104,452,415,528				114,841,865,081
	Belanja Tidak Langsung				17,571,758,100				19,328,933,910

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Langsung				86,880,657,428				95,512,931,171
4 01	Administrasi Pemerintahan (Setdako)				75,053,871,608				82,503,466,769
4 01 03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			9,769,620,000				10,746,582,000
4 01 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	33,000,000
4 01 03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	1,200,000,000			12 Bulan	1,320,000,000
4 01 03 01 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	176,000,000
4 01 03 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Periode penyediaan belanja jasa pemeliharaan kesehatan PNS		12 Bulan	-			12 Bulan	-
4 01 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		12 OB	280,000,000			12 OB	308,000,000
4 01 03 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	350,000,000			12 Bulan	385,000,000
4 01 03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	176,000,000
4 01 03 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	160,000,000			12 Bulan	176,000,000
4 01 03 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
4 01 03 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Periode penyediaan peralatan rumah tangga		12 Bulan	185,000,000			12 Bulan	203,500,000
4 01 03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	1,700,000,000			12 Bulan	1,870,000,000
4 01 03 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	3,000,000,000			12 Bulan	3,300,000,000
4 01 03 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		3504 OB	2,489,620,000			3504 OB	2,738,582,000
4 01 03 01 10	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Desa(PILKADES)	Terlaksananya Pemilihan Keuchik		12 Bulan	900,000,000			12 Bulan	990,000,000
4 01 03 01 3	Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Adeministarsi Antar Kecamatan dan Gampong	Kesediaan Data Tapal		12 Bulan	220,000,000			12 Bulan	242,000,000
4 01 03 01 30	Pemekaran Kecamatan dan Gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe	Menngkatnya Penataan Daerah Kecamatan dan Gampong		12 Bulan	169,994,000			12 Bulan	186,993,400
4 01 03 01 21	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan Gampong	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Gampong		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
4 01 03 01	Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Gampong	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Gampong		12 Bulan	520,905,000			12 Bulan	572,995,500
4 01 03 01 18	Pelayanan Asuransi Mukim	Meningkatkan Kesejahteraan		12 Bulan	27,500,000			12 Bulan	30,250,000
4 01 03 01 14	Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kemukiman dan Gampong	Ketersediaan Bantuan Operasional bagi Aparatur Gampong		12 Bulan	109,890,000			12 Bulan	120,879,000
4 01 03 01 16	Pendataan dan Penamaan Rupa Bumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe	Ketersediaan Data Rupa Bumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe		12 Bulan	137,500,000			12 Bulan	151,250,000
4 01 03 01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bagian Keistimewaan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Sektor Kab/Kota dan Provinsi		1 Ls	50,000,000			1 Ls	55,000,000
4 01 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		14 Keg	6,092,079,800				6,701,287,780
1 20 03 02	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		0 unit	-			0 unit	-
4 01 03 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli		7 unit	1,430,000,000			7 unit	1,573,000,000
4 01 03 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		9 jenis	2,642,079,800			9 jenis	2,906,287,780
4 01 03 02 14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	-			1 unit	-
4 01 03 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		216 UB	660,000,000			216 UB	726,000,000
4 01 03 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara		228 UB	350,000,000			228 UB	385,000,000
4 01 03 02 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Periode pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas		12 bulan	195,000,000			12 bulan	214,500,000
4 01 03 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		12 Bulan	280,000,000			12 Bulan	308,000,000
4 01 03 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor	Periode pemeliharaan pagar dan pembatas lingkungan kantor		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 02 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Periode pemeliharaan jaringan listrik		12 bulan	35,000,000			12 bulan	38,500,000
4 01 03 02 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Telepon	Periode pemeliharaan jaringan telepon		12 bulan	80,000,000			12 bulan	88,000,000
4 01 03 02	Pemeliharaan Lampu Jalan	Jumlah lampu jalan yang terpelihara		0 lokasi	-			0 lokasi	-
4 01 03 02 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan taman/tempat parkir/Halaman Kantor Kota Lhokseumawe		1 Unit	150,000,000			1 Unit	165,000,000
4 01 03 02 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	Periode pemeliharaan jaringan air minum		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	22,000,000
4 01 03 02 41	Pembangunan Fasilitas Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 unit	-			1 unit	-
4 01 03 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		12 Bulan	250,000,000			12 Bulan	275,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		2 Keg	622,000,000				684,200,000
4 01 03 03 6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas		1 Paket	300,000,000			1 Paket	330,000,000
4 01 03 03 07	Penyediaan Bantuan Perumahan Jabatan	Jumlah perumahan jabatan yang tersedia		3 unit	322,000,000			3 unit	354,200,000
1 20 03 03 08	Penyediaan Sewa Gudang	Jumlah gudang yang disewa		1 unit	-			1 unit	-
4 01 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur		4 Keg	490,160,000				539,176,000
4 01 03 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode pemberian kontribusi untuk pelatihan/bimtek		12 bulan	49,500,000			12 bulan	54,450,000
4 01 03 05 04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit layanan publik terbaik		65 orang	75,000,000			65 orang	82,500,000
4 01 03 05	Penyusunan Uraian Tugas dan Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko	Ketersediaan Buku Uraian Tugas dan Jabatan Pemko Lhokseumawe		50 Eks	65,000,000			50 Eks	71,500,000
4 01 03 05 32	penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Buku IKM Lhokseumawe		15 Eks	40,000,000			15 Eks	44,000,000
4 20 03 05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Ketersediaan Pedoman SOP		25 buku	25,000,000			25 buku	27,500,000
4 20 03 05 41	Sosialisasi UU Nomor 5 tentang ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		65 orang	-			65 orang	-
4 20 03 05 42	Pelatihan dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		67 orang	-			67 orang	-
4 20 03 05	Bimbingan Teknis PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		S	-			65 orang	-
4 20 03 05 45	Pembinaan dan pengembangan anggota KORPRI Kota Lhokseumawe	Jumlah atlit KORPRI Kota Lhokseumawe		20 orang	-			20 orang	-
4 20 03 05 46	Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) Pemko Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Jabatan Pemko Lhokseumawe		50 Eks	20,000,000			50 Eks	22,000,000
4 20 03 05 47	Pedoman Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan ASN Pemko Lhokseumawe		50 Buku	65,000,000			50 Buku	71,500,000
4 20 03 05	Penyusunan Peraturan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemko Lhokseumawe	Jumlah Buku Naskah Dinas		50 Buku	40,000,000			50 Buku	44,000,000
4 01 03 05 49	Seleksi MTQ Korpri Tingkat Kota Lhokseumawe	Jumlah peserta seleksi MTQ KORPRI tingkat Kota Lhokseumawe		100 orang	32,560,000			100 orang	35,816,000
4 01 03 05 50	Keikutsertaan Event BAPOR KORPRI	Jumlah peserta/pendamping event BAPOR KORPRI		20 orang	78,100,000			20 orang	85,910,000
4 01 03 05	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat	Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Bagian Kesra Setdako Lhokseumawe		1 Ls	85,000,000			1 Ls	93,500,000
4 01 03 05	Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Bidang Sosial dan Olahraga		1 Ls	200,000,000			1 Ls	220,000,000
4 01 03 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan		2 Keg	72,875,500				80,163,050
4 01 03 07 01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah buku RENJA		25 buku	3,960,000			25 buku	4,356,000
4 01 03 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Jumlah buku RENJA		25 buku	8,915,500			25 buku	9,807,050
4 01 03 07 05	Penyusunan RKT dan RKP dan Perjanjian Kerja Kinerja Tahun 2019	Jumlah buku RKT dan IKU Setdako, Perjanjian Kinerja Setdako, RKT dan IKU Pemko Lhokseumawe Tahun 2018		135 buku	60,000,000			135 buku	66,000,000
4 01 03 10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan		5 Keg	309,209,500				340,130,450
4 01 03 10 01	Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah buku LAKIP Pemko dan Setdako Lhokseumawe		75 eks	50,000,000			75 eks	55,000,000
4 01 03 10 02	Penyusunan dan pembahasan Laporan Keterangan Petanggungjawaban Pemerintah (LKPU)	Jumlah buku LKPU		38 Buku	85,189,500			38 Buku	93,708,450
4 01 03 10 03	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Jumlah buku LPPD dan IKK		20 buku	95,975,000			20 buku	105,572,500
4 01 03 10 04	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	Jumlah Buku EKPOD Kota Lhokseumawe		40 buku	78,045,000			40 buku	85,849,500
4 01 03 10 11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah buku Standar Pelayanan Minimum		4 Dokumen	35,000,000			4 Dokumen	38,500,000
4 01 03 10 12	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah SKPD yang ikut sosialisasi Standar Pelayanan Minimum		0 SKPD	-			0 SKPD	-
4 01 03 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kelancaran dalam pelayanan kedinasan KDH/WKDH		2 Keg	2,132,480,000				2,290,728,000
4 01 03 16 07	Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Periode Kunjungan kerja		12 bulan	150,000,000			12 bulan	165,000,000
4 01 03 16 08	Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Desa	Jumlah Rapat-rapat koordinasi Pimda/Muspida		0 kali	-			0 kali	-
4 01 03 16 09	Forum Komunikasi pimpinan daerah	Jumlah pelaksanaan Forkompinda		12 bulan	327,580,000			12 bulan	360,338,000
4 01 03 16 10	Peningkatan Pelayanan Kunjungan Tamu ke Kota Lhokseumawe	Periode Kunjungan Tamu ke Kota Lhokseumawe		12 bulan	380,000,000			12 bulan	418,000,000
4 01 03 16 11	Pertemuan Informal Unsur Muspida	Jumlah Pertemuan Unsur Muspida		1 kali	-			1 kali	-

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 16 12	Penyelenggaraan pendukung kegiatan pejabat daerah/Provinsi /Pusat, TNI/POLRI dan Instansi Vertikal lainnya	Periode pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi Pimda/Muspida		12 bulan	834,900,000			12 bulan	918,390,000
4 01 03 16	Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2019	Keikutsertaan APEKSI 2019		3 Kegiatan	330,000,000			3 Kegiatan	363,000,000
4 01 03 16 13	Koordinasi Pejabat Daerah/Provinsi/ Pusat, TNI/POLRI dan Instansi Vertikal Lainnya	Periode pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi Pimda/Muspida		12 bulan	60,000,000			12 bulan	66,000,000
4 01 03 16 14	Koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Desa	Periode penyelenggaraan koordinasi Pimpinan Daerah/Kecamatan dan Desa		12 bulan	50,000,000			12 bulan	55,000,000
4 01 03 17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi		3 Keg	577,509,540				635,260,494
4 01 03 17 04	Pelayanan LPSE	Periode pelayanan LPSE		12 bulan	229,309,540			12 bulan	252,240,494
4 01 03 17 05	Pelayanan LPSE SKPD	Periode pelayanan LPSE SKPD		12 bulan	54,700,000			12 bulan	60,170,000
4 01 03 17 06	Pelayanan Unit Layanan Pengaduan (ULP)	Periode pelayanan ULP		12 bulan	293,500,000			12 bulan	322,850,000
4 01 03 17 7	Workshop Pengadaan Barang/Jasa	Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan 3 Kegiatan dan 3 Tema		3 Kali	136,425,000			3 Kali	150,067,500
4 01 03 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa		3 Keg	7,920,000				7,920,000
4 01 03 25 07	Pembentukan dan Penguikuan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe	Periode publikasi penyelenggaraan Pemerintahan		12 bulan	7,920,000			12 bulan	8,712,000
4 01 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penataan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		19 Keg	2,860,800,000				3,146,880,000
4 01 03 26 02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Qanun yang disusun		14 Ran qanun	28,800,000			14 Ran qanun	31,680,000
4 01 03 26 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	periode legislasi Racangan peraturan perundang-undangan		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 26 04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang difasilitasi		1	24,000,000			5 kali	26,400,000
4 01 03 26 05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jenis Peraturan yang dipublikasi		5 jenis	189,600,000			5 jenis	208,560,000
4 01 03 26 06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru yang Lebih Tinggi	Jumlah konsep/naskah hasil kajian		20 Buah	584,040,000			20 Buah	642,444,000
4 01 03 26 07	Fasilitasi Pembentukan Kerjasama di Bidang Hukum	Periode penyediaan jasa advokasi		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 26 11	Bina Kadarkum	Jumlah peserta Bina Kadarkum		100 orang	-			100 orang	-
4 01 03 26 14	Pelaksanaan dan penerapan Analisis Beban Kerja	ketersediaan dokumen ABK Kota Lhokseumawe		60 buku	50,000,000			60 buku	55,000,000
4 01 03 26 15	Unifikasi & Kodefikasi Keputusan KDH, PERKADA dan Qanun Lainnya	Periode unifikasi dan kodefikasi Peraturan Kepala Daerah		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 26 18	Penataan administrasi persuratan	Jumlah buku yang dicetak		12 bulan	30,000,000			12 bulan	33,000,000
4 01 03 26 22	Peningkatan Kapasitas Staf Ahli	Jumlah Staf Ahli Walikota Lhokseumawe		3 orang	81,400,000			3 orang	89,540,000
4 01 03 26 20	Dukungan Dana untuk Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI Kota Lhokseumawe	Jumlah cabang olahraga yang dibina KORPRI Kota Lhokseumawe		0 cabang OR	-			0 cabang OR	-
4 01 03 26 23	RANHAM	Jumlah peserta RANHAM		0 orang	-			0 orang	-
4 01 03 26 24	Penyusunan dan evaluasi uraian tugas SKPD	jumlah skpd yang dievaluasi		70 Buku	150,000,000			31 SKPD	165,000,000
4 01 03 26 25	Penyusunan dan penyempurnaan Draf rancangan Qanun Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Rancangan Qanun yang disusun		20 Perda/Perkada	75,000,000			20 Perda/Perkada	82,500,000
4 01 03 26 26	Sosialisasi Unifikasi dan Kodefikasi keputusan Kepala Daerah,Peraturan Kepala dan Perda Lain	Jumlah peserta sosialisasi		0 orang	-			0 orang	-
4 01 03 26 27	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah peserta sosialisasi		65 orang	-			65 orang	-
4 01 03 26 29	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe	Jumlah peserta sosialisasi		65 orang	-			65 orang	-
4 01 03 26 30	Penanganan perkara litigasi dan Non litigasi Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah perkara yang ditangani		6 Orang	792,800,000			6 Orang	872,080,000
4 01 03 26 31	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Periode Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Dokumentasi Hukum		1Kali	33,600,000			1Kali	36,960,000
4 01 03 26	Bina Kadarkum	Masyarakat yang Sadar akan Pentingnya Norma dan Hukum		2 Kali	150,000,000			2 Kali	165,000,000
4 01 03 26	Sosialisasi HAM	Tercapainya Permohonan HAM		2 Kali	150,000,000			2 Kali	165,000,000
4 01 03 26	Legal Drafting	Terpahaminya Peraturan Perundang-undangan Penataan Perda dan Perwal		1 Kali	50,000,000			1 Kali	55,000,000
4 01 03 26	Sosialisasi Qanun	Tersosialisasinya Qanun Kota Lhokseumawe Kepada Masyarakat		4 Kali	200,000,000			4 Kali	220,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 26	Rapat dengan Pendapat Umum (RDPU) Qanun Kota Lhokseumawe	Lahirnya Produk Hukum yang berpihak kepada masyarakat		4 Kali	100,000,000			4 Kali	110,000,000
4 01 03 26 32	Sosialisasi ITE Dampak Teknologi Informasi Bagi Pelajar			12 bulan	21,560,000				23,716,000
4 01 03 26 34	Penyusunan dan Evaluasi Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Hasil Analisis Beban Kerja Kota Lhokseumawe		70 buku	150,000,000				165,000,000
4 01 03 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru		3 Keg	47,333,023,000				52,066,325,300
1 20 03 27 03	Percepatan Penyelesaian Tapal batas Wilayah Administrasi antar Daerah	Jumlah Tapal Batas Wilayah antar daerah		6 Bidang/per sil	39,915,100,000			6 Bidang/pe rsil	43,906,610,000
4 01 03 27 05	Pengadaaan/ Pembebasan Tanah	Jumlah tanah yang dibebaskan		6 Bidang/per sil	5,995,990,000			6 Bidang/pe rsil	6,595,589,000
4 01 03 27 10	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan langsung Kepala Desa (PILKADES)	Jumlah peserta pelatihan		68 orang	-			68 orang	-
4 01 03 27 15	Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2019	Keikutsertaan Apeksi 2019		3 Kegiatan	330,000,000			3 Kegiatan	363,000,000
4 01 03 27 15	Pemberdayaan Pemerintahan	Penyelenggaraan APEKSI dan AKKOPSI		1 kali	250,000,000			1 kali	275,000,000
4 01 03 27 16	Pendataan dan Penamaan Rupa Bumi Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe	Jumlah dokumen data rupabumi wilayah administrasi Kota Lhokseumawe		1 dokumen	-			1 dokumen	-
4 01 03 27 18	Pelayanan Kesehatan Mukim	Periode pelayanan kesehatan mukim		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 27 20	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan OTDA	Periode penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah		0 bulan	-			0 bulan	-
4 01 03 27 19	Penyelenggaraan HUT OTDA dan pendukung resepsi kenegaraan	Jumlah Kegiatan HUT OTDA		12 bulan	104,490,000			12 bulan	114,939,000
4 01 03 27 21	Penataan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Kemukiman dan Gampong	Jumlah Kecamatan, Pemukiman dan Gampong di wilayah Kota Lhokseumawe		12 Bulan	109,890,000			12 Bulan	120,879,000
4 01 03 27 22	Persiapan Pengadaan Tanah	Periode persiapan pengadaan tanah		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 27 24	Penyusunan Data Base Pertanahan	Jumlah Software Pertanahan		0 software	-			0 software	-
4 01 03 27 25	Penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar kecamatan dan gampong	Jumlah data base pertanahan		kasus	-			kasus	-
4 01 03 27 26	Rapat Koordinasi pimpinan tingkat kemukiman dan gampong	Jumlah pelaksanaan rapat		12 Bulan	66,000,000			12 Bulan	72,600,000
4 01 03 27 27	Penyelesaian konflik pertanahan dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah konflik yang dapat ditangani		7 kasus	46,500,000			7 kasus	51,150,000
4 01 03 27 28	Inventarisasi aset tanah negara dan bangunan Pemko Lhokseumawe	Jumlah dokumen tentang aset tanah Pemerintah Kota Lhokseumawe		dokumen	-			dokumen	-
4 01 03 27 29	Penyusunan rancangan peraturan dan perundang-undangan	Jumlah Rancangan Qanun yang disusun		Ran qanun	-			Ran qanun	-
4 01 03 27 30	Pemekaran kecamatan dan gampong Pemerintah Kota Lhokseumawe	Terbayarnya kewajiban 2016		1 paket	19,998,000			1 paket	21,997,800
4 01 03 27 35	Kelancaran Penyelenggaraan DESK Pilkada	Periode penyelenggaraan DESK PILKADA		12 Bulan	495,055,000			12 Bulan	544,560,500
4 01 03 27	Pelayanan Kesehatan Mukim	Periode pelayanan kesehatan mukim		12 Bulan	27,500,000			12 Bulan	30,250,000
4 01 03 27	Pemberian Remisi oleh Walikota Lhokseumawe Tahun 2018 pada Lembaga Masyarakat kelas II A Lhokseumawe	Terlaksananya Pemberian Remisi oleh Walikota Lhokseumawe Tahun 2018 pada Lembaga Masyarakat kelas II A Lhokseumawe		1 Kegiatan	363,000,000			1 Kegiatan	399,300,000
4 01 03 29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syari'at Islam)	Terwujudnya pelayanan kehidupan beragama		2 Keg	1,009,468,000				1,110,414,800
4 01 03 29 04	Peningkatan Kualitas Ibadah Masyarakat	Periode peningkatan kualitas ibadah masyarakat		11 bulan	1,009,468,000			11 bulan	1,110,414,800
4 1 03 29 08	Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan masyarakat desa bidang sosial budaya (Hari Besar)	Periode peningkatan kualitas ibadah masyarakat		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 30	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan		5 Keg	801,946,268				882,140,895
4 01 03 30 01	Penyusunan Laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik proyek	Jumlah laporan yang dihasilkan		4 dokumen	16,020,532			4 dokumen	17,622,585
4 01 03 30 02	Pelaksanaan penyaluran beras miskin	kelancaran penyaluran beras miskin ke desa		12 bulan	440638250			12 bulan	484,702,075
4 20 03 30 03	Penyusunan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBDK	Jumlah buku mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, pelaporan dan pembinaan kegiatan yang dibiayai dengan APBDK		100 buku	52,658,650			100 buku	57,924,515

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 20 03 30 04	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Periode pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		12 bulan	133,202,971			12 bulan	146,523,268
4 20 03 30 15	Pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	Periode Pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe		12 bulan	34,583,900			12 bulan	38,042,290
4 20 03 30	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Periode Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12 bulan	74,841,965			12 bulan	82,326,162
4 20 03 30 12	Verifikasi Modal usaha	Jumlah dokumen verifikasi		0 dokumen	-			0 dokumen	-
4 20 03 30 13	Perekonomian Masyarakat Pesisir Kota Lhokseumawe	Jumlah buku data masyarakat pesisir		0 buku	-			0 buku	-
4 20 03 30 14	Sosialisasi Raskin	Jumlah peserta Sosialisasi		72 orang	-			72 orang	-
4 20 03 30 17	Koordinasi urusan pemerintahan di bidang pembangunan	Jumlah laporan yang dihasilkan		4 laporan	50,000,000			4 laporan	55,000,000
4 01 03 31	Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra	Meningkatkan penerapan keistimewaan Aceh dan Kesra		3 Keg	150,000,000				165,000,000
4 20 03 31 06	Peningkatan sarana dan prasarana Mushalla Setdako Lhokseumawe	Periode operasioanal Mushalla Setdako		12 bulan	25,000,000			12 bulan	27,500,000
4 01 03 31 09	Operasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe	Periode operasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe		0 bulan	-			0 bulan	-
4 01 03 31 10	Pembinaan Marching Band Kota Lhokseumawe	Periode operasional Marching Band Kota Lhokseumawe		12 bulan	100,000,000			12 bulan	110,000,000
4 01 03 31 13	Operasional PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)	Periode operasional PKBI		0 bulan	-			0 bulan	-
4 01 03 31 14	Kegiatan Ceramah Rutin Jum'at	Jumlah pelaksanaan ceramah rutin Jumat		12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	27,500,000
4 01 03 31 15	Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah pelaksanaan kegiatan bantuan sosial		1 kali	-			1 kali	-
4 01 03 33	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana umum		2 Keg	61,040,000				67,144,000
4 20 03 33 03	Pendataan dan Peningkatan Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas penerangan		1 lokasi	-			1 lokasi	-
4 01 03 33 06	Pelestarian TMP Blang Panyang	Periode operasional TMP Blang Panyang		12 bulan	61,040,000			12 bulan	67,144,000
4 01 03 34	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar		5 Keg	2,763,740,000				3,040,114,000
1 20 03 34 01	Pendukung Kegiatan Acara/Upacara	Periode pendukung kegiatan upacara		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 34 02	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah peringatan Hari Besar Nasional		9 Kali	225,000,000			9 Kali	247,500,000
4 01 03 34 03	Pendukung Kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia		1 kali	-			1 kali	-
4 01 03 34 04	Pelaksanaan Rekrutmen Paskibra	Jumlah anggota Paskibra		35 orang	50,000,000			35 orang	55,000,000
4 01 03 34 05	Perlengkapan dan Pembinaan Paskibra	Jumlah anggota Paskibra		1 kali	508,570,000			1 kali	559,427,000
4 01 03 34 06	Peringatan HUT Perdamaian Aceh	Upacara peringatan Hari Perdamaian Aceh		1 kali	53,000,000			1 kali	58,300,000
4 01 03 34 07	Peringatan HUT KORPRI Kota Lhokseumawe	Upacara peringatan HUT KORPRI		1 kali	39,270,000			1 kali	43,197,000
4 01 03 34 09	Pelaksanaan Apel Gabungan Pemko Lhokseumawe	Apel Gabungan Pemko Lhokseumawe		1 tahun	42,000,000			1 tahun	46,200,000
4 01 03 34 08	Peninjauan Bantuan Ke Lapangan	Jumlah Peninjauan Bantuan ke Lapangan		0 kali	-			0 kali	-
4 01 03 34 10	Peningkatan pelayanan kunjungan tamu ke Kota Lhokseumawe	Periode kunjungan tamu ke Kota Lhokseumawe		12 bulan	380,000,000			12 bulan	418,000,000
4 01 03 34 12	Pelaksanaan peringatan Hari-Hari Besar	kegiatan pelaksanaan peringatan hari Kemerdekaan RI		1 kali	556,900,000			1 kali	612,590,000
4 01 03 34	Anjasana Ramadhan	Terlaksananya Anjasana Ramadhan Tahun 201 9 s/d 2020		1 kali	300,000,000			1 kali	330,000,000
4 01 03 34	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah Bag.Keist dan Kesra	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah Bag.Keist dan Kesra		11s	50,000,000			11s	55,000,000
4 01 03 34 13	Pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	Periode pelaksanaan Rangkaian Acara peringatan hari Kemerdekaan RI Tahun 2018 dan Terbayarnya Kewajiban Tahun 2016		1 Kegiatan	559,000,000			1 kali	614,900,000
1 20 03 38	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur			-				-
1 20 03 38 41	Seleksi MTQ Korpri Tingkat Kota Lhokseumawe	Jumlah peserta seleksi MTQ KORPRI tingkat Kota Lhokseumawe		100 orang	-			100 orang	-
1 20 03 38	Dukungan Dana MTQ KORPRI Ketingkat Provinsi	Jumlah peserta lolos seleksi MTQ KORPRI ke tingkat Propinsi		0 orang	-			0 orang	-
2 10	Komunikasi dan Informatika (Setdako)				11,826,785,820				13,009,464,402
2 10 03 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		6 Keg	2,300,000,000				2,530,000,000
2 10 03 15 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Periode pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi		12 bulan	200,000,000			12 bulan	220,000,000
2 10 03 15 03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Periode pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur		12 bulan	300,000,000			12 bulan	330,000,000
2 10 03 15 04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang dibeli		4 Jenis	350,000,000			4 Jenis	385,000,000
2 10 03 15 19	Pameran Pemko Lhokseumawe	Periode pameran pembangunan Kota Lhokseumawe		1 Kali	900,000,000			1 Kali	990,000,000
2 10 03 15 20	Pelaksanaan Kegiatan Protokol Pemko Lhokseumawe	Periode pelaksanaan kegiatan protokol		12 bulan	300,000,000			12 bulan	330,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 10 03 15 21	Pelaksanaan Peliputan untuk Publikasi dan Dokumentasi	Periode pelaksanaan peliputan		12 bulan	250,000,000			12 bulan	275,000,000
2 10 03 15 22	Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara	Jumlah pameran wisata dan budaya nusantara		0 kali	-			0 kali	-
4 01 03 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa		3 Keg	9,526,785,820				10,479,464,402
4 01 03 18 02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Periode publikasi penyelenggaraan Pemerintahan		12 bulan	9,500,000,020			12 bulan	10,450,000,022
4 01 03 18 08	Operasional Media Elektronik dan Media Cetak	Jumlah Pembekalan Pemula		3 jenis	-			3 jenis	-
4 01 03 18 08	Kerjasama informasi Media elektronik dan Media cetak/Organisasi Pers	Periode kerjasama yang dilakukan		12 bulan	-			12 bulan	-
4 01 03 18 09	Pelatihan jurnalistik televisi dan media cetak	Jumlah peserta pelatihan jurnalistik		3 jenis	26,785,800			3 jenis	29,464,380
4 01 04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat								
4 01	Administrasi Pemerintahan (Setwan)				*****				2,625,190,982,730
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				6,927,509,073				7,620,259,980
	Belanja Langsung				*****				2,625,190,982,730
4 01 04 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran			*****				2,607,516,681,053
4 01 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	3,960,000			12 Bulan	4,356,000
4 01 04 01 02	Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Penerangan dan alat Komunikasi		12 Bulan	481,800,000			12 Bulan	529,980,000
4 01 04 01 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	153,450,000			12 Bulan	168,795,000
4 01 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		12 Bulan	186,870,970			12 Bulan	205,558,067
4 01 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	113,267,578			12 Bulan	124,594,336
4 01 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	308,946,000			12 Bulan	339,840,600
4 01 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	129,211,500			12 Bulan	142,132,650
4 01 04 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Periode Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		12 Bulan	60,500,000			12 Bulan	66,550,000
4 01 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	168,234,000			12 Bulan	185,057,400
4 01 04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Makanan dan minuman		12 Bulan	1,641,970,000			12 Bulan	1,806,167,000
4 01 04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Periode rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah		12 Bulan	2,200,000,000			12 Bulan	2,420,000,000
4 01 04 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		1.884 OB	2,365,021,500,000			1.884 OB	2,601,523,650,000
4 01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terelenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			- 4,341,049,370			-	4,775,154,307
4 01 04 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional		1 Unit	610,293,750			1 Unit	671,323,125
4 01 04 02 06	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Mobiler, komputer dll)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		135 unit	1,357,215,625			135 unit	1,492,937,188
4 01 04 02 14	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		12 Bulan	895,496,250			12 Bulan	985,045,875
4 01 04 02 15	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan Mobil Jabatan yang terpelihara		4 Unit	77,000,000			4 Unit	84,700,000
4 01 04 02 16	Pemeliharaan Berkala Kendaraan Rutin/berkala Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara		14 Unit	799,480,000			14 Unit	879,428,000
4 01 04 02 21	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah kendaraan Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		141 Unit	207,460,000			141 Unit	228,206,000
4 01 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah Halaman dan Parkir yang terpelihara		1 UB	47,300,000			1 UB	52,030,000
4 01 04 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum	Jumlah pemeliharaan Jaringan Air yang terpelihara		1 Jaringan	22,000,000			1 Jaringan	24,200,000
4 01 04 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang terpelihara		1 Jaringan	27,500,000			1 Jaringan	30,250,000
4 01 04 02 32	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		1 UB	232,815,000			1 UB	256,096,500
4 01 04 02 38	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Telepon	Jumlah Jaringan Telepon yang terpelihara		1 Jaringan	33,000,000			1 Jaringan	36,300,000
4 01 04 02 45	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Terbayarnya Kewajiban 2016		1 Paket	31,488,745			1 Paket	34,637,620
4 01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur			- 453,265,861			-	315,313,747
4 01 04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan SETWAN		218 Pasang	286,648,861			218 Pasang	315,313,747

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 04 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas DPRK dan SETWAN		89 Pasang	166,617,000			89 Pasang	183,278,700
4 01 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	159,500,000			-	175,450,000
4 01 04 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		60 Orang	159,500,000			60 Orang	175,450,000
4 01 04 10	Program Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah		-	3,500,000			-	3,850,000
4 01 04 10 02	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Buku RENJA		10 Buku	3,500,000			10 Buku	3,850,000
4 01 04 11	Program Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah		-	41,965,000			-	46,161,500
4 01 04 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Adanya Partisipasi dalam Pameran Kota lhokseumawe		1 Kegiatan	41,965,000			1 Kegiatan	46,161,500
4 01 04 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		-	11,317,803,748			-	12,358,372,123
4 01 04 15 01	Pembahasan Rancangan Qanun Peraturan Daerah	Jumlah Qanun Inisiatif DPRK yang dibahas		12 Bulan	1,570,764,938			12 Bulan	1,727,841,432
4 01 04 15 03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan		350Rapat	3,078,834,000			350Rapat	3,386,717,400
4 01 04 15 05	Kegiatan Reses	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban		25 Laporan	1,320,412,500			25 Laporan	1,452,453,750
4 01 04 15 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRK yang Mengikuti diklat, legal drafting dll		25 Orang	2,552,000,000			25 Orang	2,807,200,000
4 01 04 15 09	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah Media Publikasi		2 Media	645,425,000			2 Media	709,967,500
4 01 04 15 10	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi DPRK Lhokseumawe	Jumlah Website DPRK Lhokseumawe		1 Web	102,816,725			1 Web	113,098,398
4 01 04 15 11	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi		6 OB	506,000,000			6 OB	556,600,000
4 01 04 15 12	Pergantian Antar Waktu Anggota (PAW) DPRK Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan PAW		3 Kegiatan	125,400,000			3 Kegiatan	137,940,000
4 01 04 15 13	Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Lhokseumawe	Jumlah Undangan Paripurna HUT Kota Lhokseumawe		1Kegiatan	40,810,000			1Kegiatan	44,891,000
4 01 04 15 14	Buletin Parlemenaria	Jumlah Buletin Parlemen		10 Edisi	391,897,195			10 Edisi	431,086,915
4 01 04 15 17	Rapat-Rapat Fraksi	Jumlah Laporan Rapat Fraksi		108 Laporan	29,710,890			108 Laporan	32,681,979
4 01 04 15 18	Pelantikan Anggota DPRK terpilih 2019 s/d 2024	Juml;ah Undangan Pelantikan Anggota DPRK		1 Kegiatan	310,125,000			1 Kegiatan	341,137,500
4 01 04 15 19	Pelantikan Pimpinan DPRK Lhokseumawe	Jumlah Undangan Pelantikan Anggota DPRK		1 Kegiatan	60,687,500			1 Kegiatan	66,756,250
4 01 04 15 20	Orientasi Anggota DPRK Lhokseumawe	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRK		2 Kegiatan	500,000,000			2 Kegiatan	550,000,000
4 01 04 15 24	Rapat Paripurna Istimewa DPRK	Periode Rapat Paripurna Istimewa DPRK		12 Bulan	82,920,000			12 Bulan	91,212,000
4 01 05	Kecamatan Banda Sakti								
4 01	Administrasi Pemerintahan (Kec.Banda Sakti)				1,003,910,500				1,104,301,550
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				2,472,546,087				2,719,800,696
	BELANJA LANGSUNG				1,003,910,500				1,104,301,550
4 01 05 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			552,414,000				607,655,400
4 01 05 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman		12 Bulan	4,000,000			12 Bulan	4,400,000
4 01 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Penerangan dan alat-alat komunikasi		12 Bulan	57,000,000			12 Bulan	62,700,000
4 01 05 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD		120 OB	56,200,000			120 OB	61,820,000
4 01 05 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	25,551,000			12 Bulan	28,106,100

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 05 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy		12 Bulan	11,460,000			12 Bulan	12,606,000
4 01 05 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	11,855,000			12 Bulan	13,040,500
4 01 05 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	2,400,000			12 Bulan	2,640,000
4 01 05 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	5,000,000			12 Bulan	5,500,000
4 01 05 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	70,000,000			12 Bulan	77,000,000
4 01 05 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap		636 OB	308,948,000			640 OB	339,842,800
4 4 01 05 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor			143,150,000				157,465,000
4 01 05 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		41 Unit	48,450,000			50 Unit	53,295,000
4 01 05 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara		1 Gedung	50,000,000			1 Gedung	55,000,000
4 01 05 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara		12 Bulan	34,700,000			12 Bulan	38,170,000
4 01 05 02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara		12 Bulan	10,000,000			12 Bulan	11,000,000
4 01 05 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Terlaksananya perencanaan bagi SKPD di Kota Lhokseumawe			7,150,000				7,865,000
4 01 05 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		10 Buku	7,150,000			10 Buku	7,865,000
4 01 05 09	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	Terbinanya aparatur pemerintahan desa/kelurahan/kecamatan			91,014,000				100,115,400
4 01 05 09 01	Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah Mukim/Desa/Kelurahan	Jumlah aparatur pemerintahan mukim		12 Bulan	91,014,000			12 Bulan	100,115,400
4 01 05 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pembangunan			19,000,000				20,900,000
4 01 05 11 01	Kegiatan pameran pembangunan Kota Lhokseumawe	Jumlah hari kegiatan pameran		6 Hari	19,000,000			6 Hari	20,900,000
4 01 05 28	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan masyarakat pemerintahan desa/kel			191,182,500				210,300,750
4 01 05 28 01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Agama, Sosial dan Budaya (MTQ, HUT RI, dll)	Jumlah hari pelaksanaan MTQ		6 Hari	114,502,500			6 Hari	125,952,750
4 01 05 28 03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Proposal		12 Bulan	16,000,000			12 Bulan	17,600,000
4 01 05 28 04	Peningkatan Pelatihan/Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Jumlah peserta yang terlatih		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	22,000,000
4 01 05 28 05	Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kel. (Gampong)	Periode kegiatan ketertiban dan ketentraman masyarakat		12 Bulan	12,480,000			12 Bulan	13,728,000
4 01 05 28 02	Kegiatan Saweu Gampong	Jumlah pertemuan silaturahmi		12 Bulan	28,200,000			12 Bulan	31,020,000
4 01 05	Kecamatan Blang Mangat								
4 01 07	Kecamatan Muara Satu								
4 01	Administrasi Pemerintahan (Kec. Muara Satu)				1,297,046,000				1,556,455,200
	Belanja Tidak Langsung				1,534,496,779				1,687,946,457
	BELANJA LANGSUNG				1,319,840,300				1,583,808,360
4 01 07 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			619,789,300				743,747,160
4 01 07 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan materai, fax & paket/pengiriman		12 Bulan	2,732,400			12 Bulan	3,278,880
4 01 07 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode tersedianya biaya telepon, Air dan Listrik		12 Bulan	120,624,000			12 Bulan	144,748,800
4 01 07 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan		144 Orang	63,667,404			144 Orang	76,400,885

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 07 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	24,245,496			12 Bulan	29,094,595
4 01 07 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Foto Copy		12 Bulan	16,900,000			12 Bulan	20,280,000
4 01 07 01 13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan peralatan elektronik dan bahan pembersih		12 Bulan	10,200,000			12 Bulan	12,240,000
4 01 07 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan surat kabar		12 Bulan	1,392,000			12 Bulan	1,670,400
4 01 07 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	10,200,000			12 Bulan	12,240,000
4 01 07 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	84,000,000			12 Bulan	100,800,000
4 01 07 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Tidak Tetap		660 Orang	285,828,000			660 Orang	342,993,600
4 01 07 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan Prasarana			232,422,000				278,906,400
4 01 07 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	51,600,000			12 Bulan	61,920,000
4 01 07 02 14	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang nyaman		12 Bulan	120,000,000			12 Bulan	144,000,000
4 01 07 02 15	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara		12 Bulan	35,640,000			12 Bulan	42,768,000
4 01 07 02 21	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor (mobiler,Komputer)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		660 Unit	15,342,000			660 Unit	18,410,400
4 01 07 02 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat Parkir & Halaman Kantor	Periode pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor		12 Bulan	9,660,000			12 Bulan	11,592,000
4 01 07 02 31	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yg di rehab		1 Unit	180,000			1 Unit	216,000
4 01 07 07	PEMBINAAN APARATUR & PEMERINTAHAN DESA/KEL./KECAMATAN	Meningkatnya disiplin aparatur			109,089,000			19%	130,906,800
4 01 07 07 01	Penyediaan Jasa aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintahan Mukim		8 Orang	109,089,000			8 Orang	130,906,800
4 01 07 10	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Adanya pedoman perencanaan kerja SKPD			5,400,000				6,480,000
4 01 07 10 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja		10 Buku	5,400,000				6,480,000
4 01 07 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya kegiatan Pameran			17,640,000				21,168,000
4 01 07 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode pameran pembangunan kota lhokseumawe		6 Hari	17,640,000				21,168,000
4 01 07 28	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN & PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN (KHUSUS KECAMATAN)	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel			335,500,000				402,600,000
4 01 07 28 01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan bidang Agama, sosial & budaya (MTQ,HUT RI,DLL)	Jumlah peserta MTQ		5 Hari	250,200,000			5 Hari	300,240,000
4 01 07 28 03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Pemuda dan Olahraga	Jumlah proposal		4 Buah	25,000,000			4 Buah	30,000,000
4 01 07 28 04	Peningkatan Pelatihan Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Jumlah peserta yang terlatih		39 Org	19,000,000			39 Org	22,800,000
4 01 07 28 05	Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kelurahan (Gampong)	Periode kegiatan ketertiban dan ketentrman masyarakat		12 Bulan	17,000,000			12 Bulan	20,400,000
4 01 07 28 02	Kegiatan Saweu Gampong	Jumlah pertemuan silaturahmi		12 Bulan	24,300,000			12 Bulan	29,160,000
4 01 08	Kecamatan Muara Dua								
4 01	Administrasi Pemerintahan (Kec. Muara Dua)				2,396,619,720				2,396,619,720
	BELANJA				4,220,032,021				4,642,035,223
	Belanja Tidak Langsung				1,891,442,301				2,080,586,531
	Belanja Langsung				2,328,589,720				2,561,448,692
4 1 08 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			586,219,950				644,841,945
4 1 08 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan materai, fax & paket/pengiriman		12 Bulan	3,300,000			12 Bulan	3,630,000
4 1 08 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode tersedianya biaya telepon, Air dan Listrik		12 Bulan	118,900,000			12 Bulan	130,790,000
4 1 08 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan		108 OB	71,098,800			108 OB	78,208,680
4 1 08 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	34,967,150			12 Bulan	38,463,865

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 1 08 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Foto copy		12 Bulan	17,220,000			12 Bulan	18,942,000
4 1 08 01 13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan peralatan elektronik dan bahan pembersih		12 Bulan	16,794,000			12 Bulan	18,473,400
4 1 08 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan surat kabar		12 Bulan	1,200,000			12 Bulan	1,320,000
4 1 08 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	16,160,000			12 Bulan	17,776,000
4 1 08 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	85,000,000			12 Bulan	93,500,000
4 1 08 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Tidak Tetap		156 OB	221,580,000			156 OB	243,738,000
4 1 08 02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan Prasarana			996,973,900				1,096,671,290
4 1 08 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional		3 Unit	51,000,000			3 Unit	56,100,000
4 1 08 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		15 Unit	288,128,400			15 Unit	316,941,240
4 1 08 02 14	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang nyaman		1 Unit	50,958,000			1 Unit	56,053,800
4 1 08 02 15	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara		1 Unit	39,700,000			1 Unit	43,670,000
4 1 08 02 21	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor (mobiler,Komputer)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	16,500,000
4 1 08 02 32	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatkannya Kualitas Sanitasi Gedung Kantor		1 Tahun	552,187,500			1 Tahun	607,406,250
4 1 08 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				82,650,000				90,915,000
4 1 08 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		1 Tahun	82,650,000			1 Tahun	90,915,000
4 1 08 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				5,100,000				5,610,000
4 1 08 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Rencana dan Indikator Program Kegiatan Tahunan		10 Buku	5,100,000			10 Buku	5,610,000
4 1 08 07	PEMBINAAN APARATUR & PEMERINTAHAN DESA/KEL./KECAMATAN	Meningkatnya disiplin aparatur			87,066,000				95,772,600
4 1 08 07 01	Penyediaan Jasa aparatur Pemerintahan Mukim/Desa/Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintahan Mukim		96 OB	87,066,000			96 OB	95,772,600
4 1 08 10	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Adanya pedoman perencanaan kerja SKPD			11,025,000				12,127,500
4 1 08 10 01	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Strategis Kerja Tahunan		10 Buku	5,675,000			25 Buku	6,242,500
4 1 08 10 02	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku renja		20 Buku	5,350,000			20 Buku	5,885,000
4 1 08 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya kegiatan Pameran			20,318,645				22,350,510
4 1 08 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode pameran pembangunan kota Lhokseumawe		6 Hari	20,318,645			6 Hari	22,350,510
4 1 08 28	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN & PEMBINAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN (KHUSUS KECAMATAN)	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kel			539,236,225				593,159,848
4 1 08 28 01	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan bidang Agama, sosial & budaya (MTQ,HUT RI,DLL)	Jumlah peserta MTQ		5 Hari	434,350,000			5 Hari	477,785,000
4 1 08 28 03	Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat Desa/Kelurahan Bidang Pemuda dan Olahraga	Jumlah proposal		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	33,000,000
4 1 08 28 04	Peningkatan Pelatihan Ketrampilan dan Pembinaan PKK Gampong	Jumlah peserta yang terlatih		12 Bulan	23,000,000			12 Bulan	25,300,000
4 1 08 28 05	Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Lingkungan Desa/Kelurahan (Gampong)	Periode kegiatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat		6 Kali	21,700,000			6 Kali	23,870,000
4 1 08 28 02	Kegiatan Saweu Gampong	Jumlah pertemuan silaturahmi		2 Mukim	30,186,225			12 Bulan	33,204,848
4 01 09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	BELANJA				-				-
	Belanja Tidak Langsung								
	Belanja Langsung				-				-

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01	BPBD				8,466,679,100				11,720,735,763
4 1 9 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			457,675,500				2,929,784,803
4 01 09 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,300,000			12 Bulan	2,530,000
4 01 09 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	186,365,000			12 Bulan	205,001,500
4 01 09 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		228 OB	124,653,500			228 OB	137,118,850
4 01 09 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	23,432,000			12 Bulan	25,775,200
4 01 09 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	12,000,000			12 Bulan	13,200,000
4 01 09 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	11,000,000			12 Bulan	12,100,000
4 01 09 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	1,425,000			12 Bulan	1,567,500
4 01 09 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	5,000,000			12 Bulan	5,500,000
4 01 09 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		4 Jenis	1,500,000			4 Jenis	1,650,000
4 01 09 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	90,000,000			12 Bulan	99,000,000
4 01 09 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		1309 OB	2,205,765,230			1309 OB	2,426,341,753
4 01 09	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			675,572,600				743,129,860
4 01 09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor		8 Jenis	62,432,500			8 Jenis	68,675,750
4 01 09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara		2 Gedung	15,000,000			2 Gedung	16,500,000
4 01 09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara		1 unit	38,650,000			1 unit	42,515,000
4 01 09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		11 unit	323,265,100			11 unit	355,591,610
4 01 09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		29 unit	46,725,000			29 unit	51,397,500
4 01 09	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah fasilitas gedung kantor yang di bangun		1 Paket	189,500,000			1 Paket	208,450,000
4 01 09	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			46,750,000				51,425,000
4 01 09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		36 Unit	46,750,000			55 Unit	51,425,000
4 01 09	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Aparatur			45,000,000				49,500,000
4 01 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur		25 Orang	45,000,000			25 Orang	49,500,000
4 01 09	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Penigkatan Kualitas SDM Aparatur			4,235,000				4,658,500
4 01 09 07	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja		10 Buku	4,235,000			10 Buku	4,658,500
4 01 09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Perencanaan Bagi SKPD di Kota Lhokseumawe			18,540,000				20,394,000
4 01 09	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	18,540,000			6 Hari	20,394,000
4 01 09	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM				7,132,366,000				7,826,649,600
4 01 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan laporan		12 Laporan	134,532,000			12 Laporan	147,985,200
4 01 09	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	Periode pengambilan dan pendistribusian barang dalam rangka penanggulangan bencana		12 Bulan	35,000,000			12 Bulan	38,500,000
4 01 09	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah paket/kawasan yang direhabilitasi dan direkonstruksi pascabencana		1 Paket	6,876,450,000			1 Paket	7,564,095,000
4 01 09	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah buku saku sosialisasi penanggulangan bencana		1000 buku	17,654,000			1000 buku	19,419,400
4 01 09	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Laporan tentang informasi potensi bencana alam		12 Laporan	16,500,000			12 Laporan	18,150,000
4 01 09	Penyuluhan/Pendidikan Teknik Evaluasi dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan teknik evaluasi dan penanggulangan bencana alam		20 orang	35,000,000			20 orang	38,500,000
4 01 09	Mitigasi Bencana	Periode Mitigasi Bencana		12 Bulan	17,230,000			12 Bulan	
4 01 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang dibangun							
4 01 09	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN				86,540,000				95,194,000
4 01 09	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah Alat Pemadam Kebakaran		3 Jenis	86,540,000			3 Jenis	95,194,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20	Inspektorat								
1 20 06	Pengawasan				15,429,394,368				18,511,073,242
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				5,500,000,000				6,050,000,000
	BELANJA LANGSUNG				15,429,394,368				18,511,073,242
1 20 06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,624,786,560				1,949,743,872
1 20 06 01 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	20,736,000			12 Bulan	24,883,200
1 20 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	182,649,600			12 Bulan	219,179,520
1 20 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		22 OB	212,198,400			22 OB	254,638,080
1 20 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	120,960,000			12 Bulan	145,152,000
1 20 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	63,590,400			12 Bulan	76,308,480
1 20 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	14,169,600			12 Bulan	17,003,520
1 20 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	9,780,480			12 Bulan	11,736,576
1 20 06 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan		12 Bulan	169,344,000			12 Bulan	203,212,800
1 20 06 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	362,880,000			12 Bulan	435,456,000
1 20 06 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tetap (Org x 12 Bln)		23 OB	468,478,080			23 OB	562,173,696
1 20 6 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			7,495,614,848				8,994,737,818
1 20 6 02 06	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60 Unit	732,265,920			60 Unit	878,719,104
1 20 6 02 15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		14 UB	61,805,376			14 UB	74,166,451
1 20 6 02 16	Pemeliharaan Rutin Berkala/ kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas		50 UB	170,669,376			50 UB	204,803,251
1 20 6 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, komputer dll)	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40 Unit	30,874,176			40 Unit	37,049,011
1 20 6 02 22	Pembangunan Kantor Inspektorat	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat		1 Gedung	6,500,000,000			1 Gedung	7,800,000,000
1 20 6 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				134,400,000				161,280,000
1 20 6 3 6	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang di Sewa		I Unit	134,400,000			I Unit	161,280,000
1 20 6 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				143,280,000				171,936,000
1 20 6 5 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya Skill/ Staf Inspektorat Melalui Diklat Substansi		10 Orang	120,960,000			10 Orang	145,152,000
1 20 6 5 25	Penetapan Angka Kredit	Jumlah PAK yang diterbitkan		70 Dukumen	22,320,000			70 Dukumen	26,784,000
1 20 6 10	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Laporan kinerja dan keuangan			11,880,000				14,256,000
1 20 6 10 2	Penyusunan Rencana (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja yang di Hasilkan		10 Buku	5,400,000			10 Buku	6,480,000
1 20 06 10 03	Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan		20 Buku	6,480,000			20 Buku	7,776,000
1 20 6 20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				5,090,680,000				6,104,616,000
1 20 6 20 01	Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala	Jumlah LHP yang di terbitkan		150 LHP	1,598,400,000			150 LHP	1,918,080,000
1 20 6 20 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Temuan yang Telah di Tindak Lanjuti		50 Laporan	360,000,000			50 Laporan	432,000,000
1 20 6 20 11	Pelaksanaan Tim Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TPGR)	Jumlah Sidang Majelis MPTGR		3 Kali	50,400,000			3 Kali	60,480,000
1 20 6 20 14	Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Draf Perkada dan Instruksi tentang SPIP yang dihasilkan		Level 3	29,606,400			Level 3	35,527,680
1 20 6 20 15	Rapat Kordinasi Pengawasan dengan Kepala SKPD	Jumlah Rapat Yang di Hasilkan		2 Kali	14,688,000			2 Kali	17,625,600
1 20 6 20 16	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Yang di Terbitkan		1 laporan	115,920,000			1 laporan	139,104,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 6 20 17	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK, Inspektorat Aceh, BPKP, Irjen dan Inspektorat	Jumlah Tindak Lanjut Yang di terbitkan		2 Laporan	431,049,600			2 Laporan	517,259,520
1 20 6 20 21	Penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara dan Daerah Temuan BPK-RI	Periode Pelaksanaan Penyelesaian Pemantauan Kerugian Negara		7 hari	166,536,000			7 hari	199,843,200
1 20 6 20 22	Pengawasan dan Pembantuan dan Alokasi Dana Desa	Terlaksananya Pengawasan Dana Desa		17 hari	216,000,000			17 hari	259,200,000
1 20 6 20 23	Reviu LAKIP Pemerintah Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Reviu LAKIP		1 Laporan	100,800,000			1 Laporan	120,960,000
1 20 6 20 24	Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Reviu RKA		33 OPD	216,000,000			33 OPD	259,200,000
1 20 6 20 26	Bimtek Pemetaan Manajemen Resiko SKPD	Terlaksananaya Pemetaan Resiko		1 Kegiatan	43,200,000			1 Kegiatan	51,840,000
1 20 6 20 27	Evaluasi Lakip SKPD Kota Lhokseumawe	Terlaksananya LAKIP SKPD Kota Lhokseumawe		33 OPD	24,480,000			33 OPD	29,376,000
1 20 6 20 28	Bimtek Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Melalui TPKD dan MPTGR	Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut TPKD dan MPTGR		1 Kegiatan	57,600,000			1 Kegiatan	69,120,000
1 20 6 20 29	Bimtek Pelaksanaan Pengelolaan Opname Kas Persediaan	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Opname KAS dan Persediaan		1 Kegiatan	57,600,000			1 Kegiatan	69,120,000
1 20 6 20 30	Bimtek Reviu RKA SKPD Dan PPKD	Terlaksananya Bimtek Reviu RKA SKPD dan PPKD		1 Kegiatan	72,000,000			1 Kegiatan	86,400,000
1 20 6 20 31	Reviu RKA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Reviu RKA SKPD dan PPKD		1 Kegiatan	158,400,000			1 Kegiatan	190,080,000
1 20 6 20 32	Reviu RKPD Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Reviu RKPD Kota Lhokseumawe.		1 Kegiatan	108,000,000			1 Kegiatan	129,600,000
1 20 6 20 33	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat		1 Kegiatan	144,000,000			1 Kegiatan	172,800,000
1 20 6 20 34	Bimtek Reviu Lakip	Terlaksananya Reviu LAKIP		1 Kegiatan	36,000,000			1 Kegiatan	43,200,000
1 20 6 20 35	Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Pelaporan Gratifikasi ASN Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	108,000,000			1 Kegiatan	129,600,000
1 20 6 20 36	Pelaksanaan Tim Sapu Bersih Pemerintah Kota Lhokseumawe	Terlaksananya Kegiatan Tim Sapu Bersih Pemerintah Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	936,000,000			1 Kegiatan	1,123,200,000
1 20 6 20 37	Verifikasi Laporan RAD PPK	Terlaksananya dokumen Laporan RAD PPK		1 Kegiatan	21,000,000			1 Kegiatan	21,000,000
1 20 6 20 37	Inventarisasi Hasil Pemeriksaan Menggunakan Aplikasi SIM, HP	Terlaksananya Inventarisasi Hasil Pemeriksaan Menggunakan Aplikasi SIM, HP		1 Kegiatan	25,000,000			1 Kegiatan	30,000,000
1 20 06 21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN				714,864,960				857,837,952
1 20 06 21 04	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Meningkatnya jumlah tenaga Pemeriksa dan Meingkatnya Kapabilitas Aparatur		1 Bulan	578,064,960			1 Bulan	693,677,952
1 20 06 21 06	Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe	Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe		Level 3	72,000,000			Level 3	86,400,000
1 20 06 21 07	Pelaksanaan Badan Kehormatan Kode Etik profesi Jabatan Fungsional Auditor	Terlaksananya disiplin kerja Auditor		1 Kegiatan	64,800,000			1 Kegiatan	77,760,000
1 20 06 22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN			100%	213,888,000				256,665,600
1 20 06 22 04	Penyusunan Pelaporan LP2P	Terinventaris Data Pegawai yang melakukan Pembayaran Pajak		4000 Orang	83,088,000			4000 Orang	99,705,600
1 20 06 22 06	Verifikasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Terinventaris Data Pegawai yang menyampaikan pelaporan LHKPN dan LHKASN		4000 Orang	100,800,000			4000 Orang	120,960,000
1 20 06 22 07	Penyusunan PKPT Berbasis Resiko	Terlaksananya Penyusunan PKPT Berbasis Resiko		1 Laporan	30,000,000			1 Laporan	36,000,000
4 03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				4,146,652,474				4,561,317,721
	BELANJA LANGSUNG				8,867,246,423				9,753,971,065

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03	Perencanaan				8,698,840,173				9,568,724,190
4 03 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,037,559,607				1,141,315,568
4 03 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	4,532,000			12 Bulan	4,985,200
4 03 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	328,922,000			12 Bulan	361,814,200
4 03 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		24 Org	131,373,695			24 Org	144,511,065
4 03 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	89,765,912			12 Bulan	98,742,503
4 03 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	36,740,000			12 Bulan	40,414,000
4 03 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	27,962,000			12 Bulan	30,758,200
4 03 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		1 Eks	1,254,000			1 Eks	1,379,400
4 03 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan		11 Bulan	44,110,000			11 Bulan	48,521,000
4 03 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	137,500,000			12 Bulan	151,250,000
4 03 01 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		30 Org	235,400,000			30 Org	258,940,000
4 03 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			1,152,099,014				1,267,308,915
4 03 01 02 06	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 Unit	369,847,764			8 Jenis	406,832,540
4 03 01 02 14	Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang Terpelihara		1 Gedung	160,462,500			1 Gedung	176,508,750
4 03 01 02 15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Periode Pemeliharaan Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)		12 UB	37,510,000			12 UB	41,261,000
4 03 01 02 16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Periode Pemeliharaan dan Kendaraan Operasional		12 UB	102,960,000			12 UB	113,256,000
4 03 01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda		9 Jenis	64,075,000			9 Jenis	70,482,500
4 03 01 02 32	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda		1 Jenis	330,000,000			1 Jenis	363,000,000
4 03 01 02	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang Terpelihara		1 Jenis	87,243,750			2 Jenis	95,968,125
4 03 01 03	PROGRAM DISIPLIN APARATUR	TERSEDIANYA ATRIBUT APARATUR			59,290,000				65,219,000
4 03 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		122 Stel	59,290,000			122 Stel	65,219,000
4 03 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR			55,000,000				60,500,000
4 03 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PeriodeTerlatihnya aparatur perencana		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
4 03 01 10	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			3,850,000				4,235,000
4 03 01 10 02	Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD		10 Buku	3,850,000			10 Buku	4,235,000
4 03 01 11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	TERSEDIANYA INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA LHOKESEUMAWE			16,500,000				18,150,000
4 03 01 11 01	Kegiatan pameran pembangunan dan pengembangan pembangunan	Periode Tersedianya data dan informasi lokasi pembangunan		6 Hari	16,500,000			6 Hari	18,150,000
4 03 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	TERSEDIANYA DATA INFORMASI PEMBANGUNAN			188,686,860				207,555,546
4 03 01 15 07	Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda	Periode Tersedianya Website Bappeda Kota Lhokseumawe		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	66,000,000
4 03 01 15 23	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Periode Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Berbasis		12 Bulan	60,000,000			12 Bulan	66,000,000
4 03 01 15 24	Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPRA (SISMONTEP)	Jumlah Laporan SISMONTEP		5 Laporan	68,686,860			5 Laporan	75,555,546
4 03 01 15	Survey Penggunaan Alat Komunikasi (Telepon,HP, Intenet, Surat Kabar/Majalah)	Periode Pelaksanaan Survey Penggunaan Alat Komunikasi (Telepon,HP, Intenet, Surat Kabar/Majalah)		12 Bulan	50,000,000			12 Bulan	55,000,000
4 03 01 16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	TERSEDIANYA DATA/ INFORMASI PEMBANGUNAN			287,794,375				316,573,813
4 03 01 16 13	Penyusunan Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	162,037,425			1 Dokumen	178,241,168
4 03 01 16 15	Survey Potensi Kesesuaian Lahan bagi Pengembangan Pertanian	Jumlah Buku		10 Buku	125,756,950			10 Buku	138,332,645

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03 01 19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR	TERLAKSANANYA PROGRAM SANITASI KOTA LHOKEUMAWE			1,255,000,000				1,380,500,000
4 03 01 19 17	Monitoring air limbah komunal (Kegiatan Sanimas-IDB)	Jumlah IPAL Komunal yang Terbangun		20 Titik	425,000,000			20 Titik	467,500,000
4 03 01 19 18	Optimalisasi Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Jumlah Kapasitas IPLT yang Terbangun		8 Titik	150,000,000			8 Titik	165,000,000
4 03 01 19 19	Penyusunan Rencana Pembangunan Penyehatan Lingkungan Environmental Health Rish Assesm (EHRA)	Dokumen Inventarisasi Pembangunan Penyehatan Lingkungan		5 Dokumen	135,000,000			5 Dokumen	148,500,000
4 03 01 19 20	Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Terhadap Program Nasional	Periode Pelaksanaan SANIMAS dan KOTAKU		12 Bulan	450,000,000			12 Bulan	495,000,000
4 03 01 19	Monitoring Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)	Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT)		10 Laporan	95,000,000			10 Laporan	104,500,000
4 03 01 20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			80,500,000				88,550,000
4 03 01 20 15	Peningkatan Kompetensi Peneliti	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Peneliti		20 Orang	80,500,000			20 Orang	88,550,000
4 03 01 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TERARAHNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,718,991,948				1,890,891,143
4 03 01 21 14	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA		100 Buku	70,100,910			100 Buku	77,111,001
4 03 01 21 15	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS		110 Buku	118,303,955			110 Buku	130,134,351
4 03 01 21 18	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Periode Pelaksanaan Musrenbang dan Konsultasi Publik		4 Hari	237,622,523			4 Hari	261,384,775
4 03 01 21 19	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan Nota Kesepakatan KUA Perubahan		95 Buku	70,100,910			95 Buku	77,111,001
4 03 01 21 21	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan		105 Buku	126,356,230			105 Buku	138,991,853
4 03 01 21 31	Penyusunan Monitoring, Pelaksana Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan		35 Buku	116,349,035			35 Buku	127,983,939
4 03 01 21 34	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Buku RKPD		50 Buku	77,921,965			50 Buku	85,714,162
4 03 01 21 44	Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh	Periode Monitoring		12 Bulan	81,012,000			12 Bulan	89,113,200
4 03 01 21 45	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi Kota Lhokseumawe	Jumlah Laporan Monitoring		15 Laporan	41,774,220			15 Laporan	45,951,642
4 03 01 21 46	Identifikasi Fungsionalisasi Sarana dan Prasarana Pembangunan	Jumlah Dokumen		10 Dokumen	66,432,000			10 Dokumen	73,075,200
4 03 01 21 49	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	Jumlah Buku RKPD Perubahan Kota Lhokseumawe		35 Buku	68,429,460			35 Buku	75,272,406
4 03 01 21 59	Penyusunan Evaluasi RKPD	Jumlah Buku Evaluasi RKPD Kota Lhokseumawe		40 Buku	93,654,000			4 Triwulan	103,019,400
4 03 01 21 65	Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)	Periode Terlaksananya Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh		4 Triwulan	62,797,440			2 Dokumen	69,077,184
4 03 01 21 66	Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK	Periode Terlaksananya Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK		4 Triwulan	106,274,300			4 Triwulan	116,901,730
4 03 01 21 67	Sosialisasi dan Penguatan Peran Pelaku Pemerintah Daerah Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Periode Pelaksanaan Sosialisasi		5 Kali	74,516,000			5 Kali	81,967,600
4 03 01 21 71	Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe	Jumlah Buku Renja		35 Buku	52,791,200			35 Buku	58,070,320
4 03 01 21 72	Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe	Jumlah Buku Perubahan Renja		35 Buku	52,791,200			35 Buku	58,070,320
4 03 01 21 76	Penyusunan Evaluasi RKPD Lhokseumawe	Jumlah Buku Evaluasi RKPD		4 Buku	93,654,000			4 Buku	103,019,400
4 03 01 21 77	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Buku RPIJM Kota Lhokseumawe		80 Buku	25,020,000			80 Buku	27,522,000
4 03 01 21 78	Penyusunan Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Kajian Belanja Publik Kota Lhokseumawe		20 Buku	30,000,000			20 Buku	33,000,000
4 03 01 21	Penyusunan Dokumen RPI2JM	Jumlah Laporan		1 Laporan	53,090,600			1 Laporan	58,399,660
4 03 01 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	MENINGKATNYA PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI			1,368,000,000				1,504,800,000
4 03 01 22 21	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe		35 Buku	110,000,000			35 Buku	121,000,000
4 03 01 22 20	Kajian Sektor Perekonomian di Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku		20 Buku	78,000,000			20 Buku	85,800,000
4 03 01 22 21	Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	110,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03 01 22	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya Evaluasi, Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)		1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	110,000,000
4 03 01 22	Sinkronisasi Uapaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Laporan Uapaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen	38,500,000
4 03 01 22	Tinjauan Perekonomian Kota Lhokseumawe	Dokumen Publikasi Tinjauan Perekonomian Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen	38,500,000
4 03 01 22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Corporatif Sosial Responsibility (CSR)	Dokumen Profil Calon Penerima Dana CSR		1 Dokumen	60,000,000			1 Dokumen	66,000,000
4 03 01 22	Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja		1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	110,000,000
4 03 01 22	Penyusunan Master Plan Penanaman Modal	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi		1 Dokumen	200,000,000			1 Dokumen	220,000,000
4 03 01 22	Fasilitas dan Kerjasama Bidang Investasi	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	55,000,000
4 03 01 22	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Buku Indikator Ekonomi Daerah		1 Dokumen	150,000,000			1 Dokumen	165,000,000
4 03 01 22	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersusunnya Bahan Masukan Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen	38,500,000
4 03 01 22	Pengembangan Ekinomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokal	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokal		1 Dokumen	45,000,000			1 Dokumen	49,500,000
4 03 01 22	Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pariwisata		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	22,000,000
4 03 01 22	Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1 Dokumen	200,000,000			1 Dokumen	220,000,000
4 03 01 22	Prospek Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Juml;ah Buku Prospek Pengembangan Ekonomi Masyarakat		10 Buku	50,000,000			10 Buku	55,000,000
4 03 01 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	TERLAKSANANYA PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA			655,981,000				721,579,100
4 03 01 23 14	Pengkajian Kebijakan Pendidikan	Jumlah Buku Pengkajian Kebijakan Pendidikan		20 Buku	35,981,000			20 Buku	39,579,100
4 03 01 23 21	Evaluasi Rencana Induk Pndidikan Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Induk Pendidikan Kota Lhokseumawe		20 Buku	115,000,000			20 Buku	126,500,000
4 03 01 23 24	Penilaian Adopsi Usulan Musrenbang Kota Lhokseumawe dan Reses DPRK Lingkup Bidang Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM dalam RKPd	Jumlah Buku		20 Buku	130,000,000			20 Buku	143,000,000
4 03 01 23 26	Analisis Kesesuaian Program Kegiatan yang di rencanakan terhadap Program/Kegiatan yang di Anggarkan Lingkup Bidang Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM	Jumlah Buku		20 Buku	110,000,000			20 Buku	121,000,000
4 03 01 23 27	Analisis Kesesuaian Perioritas Pembangunan RKPd dengan Perioritas Pembangunan RPJMD lingkup Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM	Jumlah Buku		20 Buku	120,000,000			20 Buku	132,000,000
4 03 01 23	Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan	Jumlah Buku		20 Buku	145,000,000			20 Buku	159,500,000
4 03 01 24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			138,908,301				152,799,131
4 03 01 24	Penyusunan dan Pengelolaan Database Perumahan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	54,912,001			1 Dokumen	60,403,201
4 03 01 24	Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2P-BK)	Jumlah Laporan		1 Laporan	83,996,300			1 Laporan	92,395,930
4 03 01 25	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA	MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			54,912,001				60,403,201
4 03 01 25 06	Monitoring Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Periode Monitoring		12 Bulan	54,912,001			12 Bulan	60,403,201
4 03 01 26	PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	TERLAKSANANYA KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN			278,910,000				306,801,000
4 03 01 26 03	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian		25 Buku	115,830,000			25 Buku	127,413,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03 01 26 08	Monitoring Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Jumlah Laporan Koordinasi Dana TP dan UB		10 Laporan	74,085,000			10 Laporan	81,493,500
4 03 01 26 09	Pengendalian Tata Ruang Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Pengendalian Tata Ruang		12 Bulan	88,995,000			12 Bulan	97,894,500
4 03 01 28	PROGRAM KHUSUS	TERLAKSANANYA PROGRAM KHUSUS PERENCANAAN			625,767,067				688,343,774
4 03 01 28 10	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi		1 Dokumen	43,881,610			1 Dokumen	48,269,771
4 03 01 28 14	Survey Potensi Kesesuaian Lahan Bagi Pengembangan Pertanian	Jumlah Dokumen		10 Buku	55,165,937			10 Buku	60,682,531
4 03 01 28 16	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen		15 Buku	34,948,320			15 Buku	38,443,152
4 03 01 28	Kegiatan Ketersediaan Energi Listrik di Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen		20 Buku	60,000,000			20 Buku	66,000,000
4 03 01 28	Kajian Pemanfaatan Tinja	Jumlah Dokumen		20 Buku	60,000,000			20 Buku	66,000,000
4 03 01 28	Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual	Jumlah Dokumen		20 Buku	60,000,000			20 Buku	66,000,000
4 03 01 28	Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen		20 Buku	31,771,200			20 Buku	34,948,320
4 03 01 28	Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya	Jumlah Laporan		1 Laporan	45,000,000			1 Laporan	49,500,000
4 03 01 28	Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	110,000,000			1 Dokumen	121,000,000
4 03 01 28	Analisis Nilai Tukar Petani dan Nelayan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	125,000,000			1 Dokumen	137,500,000
2 14	Statistik				168,406,250				185,246,875
2 14 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	TERSEDINYA DATA/ INFORMASI / STATISTIK DAERAH			168,406,250				185,246,875
2 14 01 15 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah buku PDRB		50 Buku	55,500,000			50 Buku	61,050,000
2 14 01 15 05	Penyusunan buku IPM	Jumlah Buku Indek Pembangunan Manusia		50 Buku	57,406,250			50 Buku	63,146,875
2 14 01 15 06	Penyusunan Buku Lhokseumawe Dalam Angka	Jumlah Buku Lhokseumawe Dalam Angka		80 Buku	55,500,000			80 Buku	61,050,000
4 04 01	Badan Pengelola Keuangan Daerah								
	Belanja Tidak Langsung				16,183,322,252				17,801,654,477
	BELANJA LANGSUNG				23,819,329,093				26,201,262,002
									-
4 04	Keuangan				23,819,329,093				26,201,262,002
4 04 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			2,608,598,193				2,869,458,012
4 04 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	10,340,000			12 Bulan	11,374,000
4 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	511,940,000			12 Bulan	563,134,000
4 04 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		12 Bulan	336,930,000			12 Bulan	370,623,000
4 04 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	132,000,000			12 Bulan	145,200,000
4 04 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	37,950,000			12 Bulan	41,745,000
4 04 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	14,312,925			12 Bulan	15,744,218
4 04 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		2 Jenis	2,200,000			2 Jenis	2,420,000
4 04 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan		11 Bulan	77,000,000			11 Bulan	84,700,000
4 04 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	400,000,000			12 Bulan	440,000,000
4 04 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (150 Org x 12 Bln)		1.800 OB	1,085,925,268			1.800 OB	1,194,517,795
4 04 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			9,778,800,000				10,756,680,000
4 04 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2 dan 4)		23 Unit	7,425,000,000			35 Unit	8,167,500,000
4 04 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	275,000,000			1 Paket	302,500,000
4 04 01 02 22	Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12 Bulan	850,000,000			12 Bulan	935,000,000
4 04 01 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (7 Unit x 12 Bln)		84 UB	159,500,000			84 UB	175,450,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 01 02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara		12 Bulan	60,500,000			12 Bulan	66,550,000
4 04 01 02 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah Taman Yang Terpelihara		12 Bulan	8,800,000			12 Bulan	9,680,000
4 04 01 02 47	Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah	Periode Pengadaan Kompensasi Gedung Kantor dan Tanah		30%	1,000,000,000			30%	1,100,000,000
4 04 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				180,000,000				198,000,000
4 04 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		180 Pasang	90,000,000			180 Pasang	99,000,000
4 04 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas		180 Pasang	90,000,000			180 Pasang	99,000,000
4 04 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			40,000,000				44,000,000
4 04 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		12 Bulan	40,000,000			12 Bulan	44,000,000
4 04 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				63,700,000				70,070,000
4 04 01 06 05	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Sementara dan Penerimaan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Berkala		12 Bulan	63,700,000			12 Bulan	70,070,000
4 04 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			94,351,600				103,786,760
4 04 01 07 02	Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja SKPD		7 Buku	4,351,600			7 Buku	4,786,760
4 04 01 07 03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Buku (LKIP) SKPD		7 Buku	15,000,000			7 Buku	16,500,000
4 04 01 07 04	Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Tertibnya SOP Administrasi Perkantoran		1 Dok	75,000,000			1 Dok	82,500,000
4 04 01 08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN				20,500,000				22,550,000
4 04 01 08 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		1 Kali	20,500,000			7 Buku	22,550,000
4 04 01 15	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN DAERAH	MENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN DAERAH			392,500,000				431,750,000
4 04 01 15 02	Pengelolaan Penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	Melakukan Pengelolaan pangajian setiap bulan sesuai jenis belanja, pengiputan data pegawai, penatausahaan dan pelaporan		12 Dok	82,500,000			12 Dok	90,750,000
4 04 01 15 14	Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggung Jawaban Belanja	Periode Verifikasi Penataan Pengelolaan Kas dan Pertanggung Jawaban Belanja		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	220,000,000
4 04 01 15 15	Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe	Periode Penelitian Dokumen Belanja Pemko Lhokseumawe		12 Bulan	44,000,000			12 Bulan	48,400,000
4 04 01 15 16	Penataan fungsi pengelolaan kas	periode Penataan Fungsi Pengelolaan kas		12 Bulan	66,000,000			12 Bulan	72,600,000
4 04 01 16	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN DAERAH			1,193,298,000				1,312,627,800
4 04 01 16 06	Penagihan rutin tunggakan pajak daerah dan distribusi daerah	Periode penagihan rutin tunggakan pajak		4 Triwulan	418,000,000			4 Triwulan	459,800,000
4 04 01 16 20	Pendataan wajib pajak PBB	Periode wajib pajak PBB		4 Triwulan	7,920,000			4 Triwulan	8,712,000
4 04 01 16 29	Sosialisasi dan Informasi Retribusi	Periode Sosialisasi dan Informasi Retribusi		1 Kali	79,200,000			1 Kali	87,120,000
4 04 01 16 38	Verifikasi dan penetapan SPPT PBB	Tersedianya Informasi penetapan PBB dalam bentuk format PBB		1 Tahun	8,250,000			1 Tahun	9,075,000
4 04 01 16 45	Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	Periode pendataan wajib pajak PBB		4 Triwulan	99,000,000			4 Triwulan	108,900,000
4 04 01 16 46	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Periode Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		12 Bulan	47,628,000			12 Bulan	52,390,800
4 04 01 16 47	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB		12 Bulan	107,000,000			12 Bulan	117,700,000
4 04 01 16 48	Pekan Pembayaran Pajak Daerah	Periode Pekan Pembayaran Pajak Daerah		12 Bulan	108,250,000			12 Bulan	119,075,000
4 04 01 16 49	Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Periode Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah		12 Bulan	143,050,000			12 Bulan	157,355,000
4 04 01 16 50	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110,000,000
4 04 01 16 51	Penertiban Pajak Daerah	Periode Penertiban Pajak Daerah		12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	82,500,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 01 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5,035,485,060				5,539,033,566
4 04 01 17 01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersedianya Buku ASB		50 Dok	41,030,000			50 Dok	45,133,000
4 04 01 17 02	Penyusunan Standar satuan Harga (SSH)	Jumlah Buku Standar satuan harga (SSH)		100 Buah SSH	60,000,000			100 Buah SSH	66,000,000
4 04 01 17 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah		1 Jenis Buku	41,400,000			1 Jenis Buku	45,540,000
4 04 01 17 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rancana dan Qanun APBK		3 Dok	572,804,460			3 Dok	630,084,906
4 04 01 17 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD		3 Dok	271,320,000			3 Dok	298,452,000
4 04 01 17 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBK	Tersedianya Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK		3 Dok	578,544,000			3 Dok	636,398,400
4 04 01 17 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBK dan DPPA SKPD	Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBK		3 Dok	187,680,000			3 Dok	206,448,000
4 04 01 17 21	Penyusunan buku pedoman penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah buku pedoman penyusunan RKA dan DPA SKPD		1 Dok	53,306,000			1 Dok	58,636,600
4 04 01 17 22	Pembinaan Pergeseran/Anggaran	Periode Pembinaan Pergeseran/Anggaran		1Dok	71,583,600			1 Dok	78,741,960
4 04 01 17 23	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-POKOK Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Rancangan Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah		2 Dok	102,000,000			2 Dok	112,200,000
4 04 01 17 26	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Laporan dana Transfer, Buku Register dan SPJ		30 Dok	187,000,000			30 Dok	205,700,000
4 04 01 17 27	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe		12 Bulan	146,100,000			12 Bulan	160,710,000
4 04 01 17 28	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi SIMDA		12 Bulan	220,000,000			12 Bulan	242,000,000
4 04 01 17 29	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Terlatihnya SDM SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan		66 Org	64,075,000			66 Org	70,482,500
4 04 01 17 30	Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBK	Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBK		12 Bulan	264,918,000			12 Bulan	291,409,800
4 04 01 17 33	Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe	Periode Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD Kota Lhokseumawe		35 SKPD	128,112,000			35 SKPD	140,923,200
4 04 01 17 34	Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe	Periode Penelitian dan Verifikasi DPPA SKPD Kota Lhokseumawe		35 SKPD	128,112,000			35 SKPD	140,923,200
4 04 01 17 35	Penyusunan Buku Rekening Anggaran Pemko Lhokseumawe	Tersediany Buku Rekening Anggaran Pemko Lhokseumawe		1 Dok	47,500,000			1 Dok	52,250,000
4 04 01 17 36	Penyusunan sistem dan prosedur(SISDUR Pengelolaan keuangan daerah)	Jumlah sisdur Pengelolaan keuangan daerah		1 Dokumen	102,000,000			1 Dokumen	112,200,000
4 04 01 17 37	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Proses Penganggaran Daerah	Terlatihnya SDM Dalam Proses Penganggaran di Daerah		20%	75,000,000			20%	82,500,000
4 04 01 17 38	Pendataan, Pendataran dan Penetapan WP/WR	Jumlah Data WP/WR		12 Bulan	648,000,000			12 Bulan	712,800,000
4 04 01 17 39	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Jumlah Penyampaian Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB dengan Benar		35 SKPD	180,000,000			35 SKPD	198,000,000
4 04 01 17 40	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Periode distribusi Ketetapan Pajak Daerah		12 Bulan	600,000,000			12 Bulan	660,000,000
4 04 01 17 41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Akuntansi	Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidang Akuntansi		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	88,000,000
4 04 01 17 42	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBK	Periode Penyusunan Pedoman Penyusunan APBK		1 Dok	40,000,000			1 Dok	44,000,000
4 04 01 17 43	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK	Periode Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBK		35 SKPD	50,000,000			35 SKPD	55,000,000
4 04 01 17 44	Pendataan dan Pengawasan Inventarisasi Barang BPKD Kota Lhokseumawe	Tertata dan Tertibnya Barang BPKD Kota Lhokseumawe		12 Bulan	15,000,000			12 Bulan	16,500,000
4 04 01 17 45	Verifikasi Dana BOS	Tertata dan Tertibnya Pengguna Dana BOS		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	88,000,000
4 04 01 18	PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	TERLAKSANANYA PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH			174,000,000				191,400,000
4 04 01 18 02	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Periode Laporan Realisasi Anggaran		12 Bulan	90,000,000			12 Bulan	99,000,000
4 04 01 18 05	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Periode Laporan Keuangan SKPD		12 Bulan	84,000,000			12 Bulan	92,400,000
4 04 01 19	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	TERLAKSANANYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH			3,404,716,240				3,745,187,864
4 04 01 19 04	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventaris Aset Daerah		12 Bulan	36,000,000			12 Bulan	39,600,000
4 04 01 19 08	Inventaris dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventaris dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah		12 Bulan	48,000,000			12 Bulan	52,800,000
4 04 01 19 09	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD		20 Dok	33,000,000			20 Dok	36,300,000
4 04 01 19 11	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak		12 Bulan	720,000,000			12 Bulan	792,000,000
4 04 01 19 12	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Terselenggaranya Penghapusan Aset Daerah		12 Bulan	42,000,000			12 Bulan	46,200,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 01 19 26	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Laporan Milik Daerah		12 Bulan	49,128,240			12 Bulan	54,041,064
4 04 01 19 28	Rekonsiliasi Aset Lancar Daerah dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Laporan Aset Lancar		12 Bulan	81,444,000			12 Bulan	89,588,400
4 04 01 19 30	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Aplikasi Persediaan Berjalan dengan Lancar		12 Bulan	204,000,000			12 Bulan	224,400,000
4 04 01 19 31	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Aplikasi SIMDA BMD Berjalan lancar		12 Bulan	216,000,000			12 Bulan	237,600,000
4 04 01 19 33	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD		12 Bulan	45,144,000			12 Bulan	49,658,400
4 04 01 19 34	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110,000,000
4 04 01 19 35	Perancangan Peraturan Walikota Barang Milik Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Barang Milik Daerah		1 Jenis	80,000,000			1 Jenis	88,000,000
4 04 01 19 36	Patok/Batas Aset Daerah	Adanya Batas Daerah Desa		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110,000,000
4 04 01 19 37	Data Teknis Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Tersedianya Data Teknis Bangunan Gedung		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	220,000,000
4 04 01 19 38	Manajemen Sistem Informasi Pemetaan Aset Daerah	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Aset		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
4 04 01 19 39	Perancangan Peraturan Walikota Sarana dan Prasarana	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Sarana dan Prasarana		1 Jenis	80,000,000			1 Jenis	88,000,000
4 04 01 19 40	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah		50 Buah	70,000,000			50 Buah	77,000,000
4 04 01 19 41	Sensus Barang Milik Daerah	Periode Sensus Barang Milik Daerah		12 Bulan	250,000,000			12 Bulan	275,000,000
4 04 01 19 42	Apresial/Penilaian Kembali Barang Milik Daerah	Tersedianya Data Nilai Barang Milik Daerah		12 Bulan	700,000,000			12 Bulan	770,000,000
4 04 01 19 43	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Bimtek) di Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidang Pengelolaan Aset		12 Bulan	70,000,000			12 Bulan	77,000,000
4 04 01 19 44	Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe	Tertibnya Administrasi Pelaporan Aset Daerah		12 Bulan	80,000,000			12 Bulan	88,000,000
4 01 20 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA			200,000,000				220,000,000
4 04 01 20 08	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Tersedianya Jaringan SIMDA		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	220,000,000
4 01 20 21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				633,380,000				696,718,000
4 04 01 21 01	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Tertibnya Pengelolaan dan Pengadministrasian Benda Berharga		12 Bulan	85,000,000			12 Bulan	93,500,000
4 04 01 21 02	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Penyampaian SSPD BPHTB dengan Benar		12 Bulan	107,000,000			12 Bulan	117,700,000
4 04 01 21 03	Penertiban dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terdistribusinya Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak		12 Bulan	227,680,000			12 Bulan	250,448,000
4 04 01 21 04	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek dan Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan	Akuratnya Penetapan PBB		12 Bulan	63,700,000			12 Bulan	70,070,000
4 04 01 21 05	Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Tersedianya Fasilitas Pelaporan Pajak Online		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
4 05 01 01	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				6,435,044,859				6,756,797,102
	Belanja Tidak Langsung				4,957,828,985				5,453,611,884
	BELANJA LANGSUNG			100%	6,435,044,859				6,756,797,102
4 05 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				996,058,586				1,045,861,515
4 05 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2,472,500			12 Bulan	2,596,125
4 05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	170,660,000			12 Bulan	179,193,000
4 05 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Org x 12 Bln)		216 OB	149,743,455			216 OB	157,230,628
4 05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	63,191,753			12 Bulan	66,351,341
4 05 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	21,942,000			12 Bulan	23,039,100
4 05 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	15,492,628			12 Bulan	16,267,259
4 05 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 EB	4,255,000			12 EB	4,467,750
4 05 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makan dan minuman		12 Bulan	11,471,250			12 Bulan	12,044,813
4 05 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	345,000,000			12 Bulan	362,250,000
4 05 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		420 OB	211,830,000			420 OB	222,421,500
4 05 01 02	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				1,545,870,398				1,623,163,918
4 05 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 Unit	1,000,000,000			1 Unit	1,050,000,000
4 05 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, dll)	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor		48 Unit	352,570,398			48 Unit	370,198,918

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 05 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Unit	50,000,000			1 Unit	52,500,000
4 05 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mushalla Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala Mushalla kantor		1 Unit	15,000,000			1 Unit	15,750,000
4 05 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		12 UB	33,300,000			12 UB	34,965,000
4 05 01 02 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		12 UB	22,500,000			12 UB	23,625,000
4 05 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer,dll)	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		55 Unit	57,500,000			55 Unit	60,375,000
4 05 01 02 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman kantor		1 Paket	15,000,000			1 Paket	15,750,000
4 05 01 03	Peningkatan Disiplin Aparatur				64,285,000				67,499,250
4 05 01 03 03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan Non PNS		130 Stell	64,285,000			130 Stell	67,499,250
4 05 01 05	Penigkatan Kapasitas SDM Aparatur				162,000,000				170,100,000
4 05 01 05 05	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		5 Orang	50,000,000			5 Orang	52,500,000
4 05 01 05 06	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Management Of Traineing (MOT)	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Management Of Training		1 Orang	2,000,000			1 Orang	2,100,000
4 05 01 05 07	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Training Officer Course (TOC)	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Training Officer Course		1 Orang	20,000,000			1 Orang	21,000,000
4 05 01 05 08	Pengiriman Peserta Diklat Fungsional - Kepegawaian (Widyaiswara/Ouditor/Asesor/Analisis)	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional		10 Orang	90,000,000			10 Orang	94,500,000
4 05 01 07	Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja				5,531,500				5,808,075
4 05 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah buku Renja SKPD yang tercetak		10 Buku	5,531,500			10 Buku	5,808,075
4 05 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2,588,507,900				2,717,933,295
4 05 01 15 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta diklat prajabatan		51 Orang	200,000,000			51 Orang	210,000,000
4 05 01 15 02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta diklat struktural kepemimpinan Tk. IV		30 Orang	1,295,299,800			30 Orang	1,360,064,790
4 05 01 15 03	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional		2 Peserta	30,000,000			2 Peserta	31,500,000
4 05 01 15 07	Penataan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Jumlah dokumen peremajaan data PNS		25 Buku	51,913,500			25 Buku	54,509,175
4 05 01 15 10	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat		120 Orang	30,000,000			120 Orang	31,500,000
4 05 01 15 13	Penyusunan Perencanaa Kebutuhan Pegawai ASN dengan Sistem e-Formasi	Tersusunnya peta kebutuhan pegawai ASN yang akurat dan sistematis		1 Kali	58,000,000			1 Kali	60,900,000
4 05 01 15 15	Evaluasi dan Verifikasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Selesai Pendidikan	Jumlah evaluasi dan verifikasi peserta tugas belajar, Izin belajar dan surat keterangan selesai pendidikan		1 Kali	18,901,000			1 Kali	19,846,050
4 05 01 15 15	Sosialisai Diklat Kepemimpinan Dengan Pola Baru	Jumlah peserta sosialisai diklat kepemimpinan dengan pola baru		90 Orang	66,894,800			90 Orang	70,239,540
4 05 01 15 18	Analisi Kebutuhan Diklat (AKD)	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat		5 Paket	42,499,000			5 Paket	44,623,950
4 05 01 15 20	Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLAT PIM Tk.II DAN Tk.III)	Jumlah peserta pengiriman pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLAT PIM)		14 Orang	478,999,800			14 Orang	502,949,790
4 05 01 15 22	Penyusunan Manajemen Kinerja ASN dengan Sistem e-Perfomance	Jumlah PNS yang melaksanakan e-kinerja		4358 Orang	274,000,000			4358 Orang	287,700,000
4 05 01 15 23	Pengelolaan Peremajaan Data Sistem e-Lapkin	Jumlah Data Penilaian SKP ASN yang dilaporkan dalam sistem e- Lapkin		4358 Orang	42,000,000			4358 Orang	44,100,000
4 05 01 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1,072,791,475				1,126,431,049
4 05 01 16 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan karier PNS		8 Kali	78,534,750			8 Kali	82,461,488
4 05 01 16 04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah dokumen kenaikan pangkat otomatir PNS		Periode April & Oktober	75,829,625			Periode April & Oktober	79,621,106
4 05 01 16 24	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah aparatur penerima satya lencana karya satya		150 Orang	187,000,000			150 Orang	196,350,000
4 05 01 16 25	Pelaksanaan Sidang Penetapan Hukum Disiplin ASN	Jumlah Sidang Penetapan Hukum Disiplin ASN		4 Kali	25,500,000			4 Kali	26,775,000
4 05 01 16 25	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan sumpah PNS di Pemko Lhokseumawe		200 PNS	19,500,000			200 PNS	20,475,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 05 01 16 27	Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Masa Purna Bakti	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS masa purna bakti		1 Kali	38,242,700			1 Kali	40,154,835
4 05 01 16 43	Evaluasi dan Verifikasi Tenaga Bakti Daerah	Jumlah evaluasi dan verifikasi tenaga bakti		1 Kali	21,000,000			1 Kali	22,050,000
4 05 01 16 49	Seleksi Penerimaan ASN di Lingkungan Pemko Lhokseumawe	Periode seleksi penerimaan ASN di lingkungan pemko Lhokseumawe		1 Kali	104,000,000			1 Kali	109,200,000
4 05 01 17 51	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		1 Kali	444,338,000			1 Kali	466,554,900
4 05 01 16 52	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemko Lhokseumawe	Jumlah Aparatur Pemko Lhokseumawe yang wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (HKPN)		350 Wajib Lapor	78,846,400			350 Wajib Lapor	82,788,720
4 06 01	Dinas Syariat Islam								
	BELANJA				3,355,050,000				4,026,060,000
	Belanja Tidak Langsung				3,355,050,000				4,026,060,000
	Belanja Langsung				-				-
4 06	Urusan Keistimewaan dan Kekhususan (Dinas Syariat Islam)				32,023,797,796				35,698,677,576
4 06 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			587,084,545				645,793,000
4 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,750,000			12 Bulan	1,925,000
4 06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	70,000,000			12 Bulan	77,000,000
4 06 01 01 07	Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan SKPD (18 orang x 12 Bulan)		18 Orang	126,000,000			18 Orang	138,600,000
4 06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	21,830,545			12 Bulan	24,013,600
4 06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	24,000,000			12 Bulan	26,400,000
4 06 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	3,250,000			12 Bulan	3,575,000
4 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		24 eks	1,254,000			24 eks	1,379,400
4 06 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	18,000,000			12 Bulan	19,800,000
4 06 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	220,000,000
4 06 01 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (152 Org x 12 Bln)		1.824 Orang	121,000,000			12 Bulan	133,100,000
4 06 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			179,140,000				197,054,000
4 06 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer, Laptop dan Printer)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15 Unit	85,500,000			15 Unit	94,050,000
4 06 01 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor		12 Bulan	6,500,000			12 Bulan	7,150,000
4 06 01 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara (1 Unit x 12 Bulan)		12 UB	28,640,000			2 Unit	31,504,000
4 06 01 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Operasional yang terpelihara (1 Unit x 12 Bulan)		12 UB	20,000,000			2 Unit	22,000,000
4 06 01 02 30	Pemeliharaan berkala Peralatan dan Perlengkapan Kanto (Mobiler, Komputer, Laptop dan Printer)	Periode Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor		21 Unit	20,000,000			12 Bulan	22,000,000
4 06 01 02 42	Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Ruang Yang Direhab		12 Bulan	18,500,000			12 Bulan	20,350,000
4 06 01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur			191,250,000				210,375,000
4 06 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Serta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		100 Stel	41,250,000			100 Stel	45,375,000
4 06 01 03 06	Penyediaan sewa gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Disewakan		2 Gedung	150,000,000			2 Gedung	165,000,000
4 06 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur			65,000,000				71,500,000
4 06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan		8 Orang	40,000,000			8 Orang	44,000,000
4 06 01 05 21	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan		12 Bulan	25,000,000			12 Bulan	27,500,000
4 06 01 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA DAERAH	Terarahnya Perencanaan Dinas			10,000,000				11,000,000
4 06 01 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja		6 Buku	10,000,000			6 Buku	11,000,000
4 06 01 08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan			20,000,000				22,000,000
4 06 01 08 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	20,000,000			6 Hari	22,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 06 01 06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Penyediaan sumber hukum Syariat dan Penegakannya			197,000,000				678,700,000
4 06 01 25 01	Fasilitas Pembentukan Kerja Sama di bidang hukum	Tersedianya perlengkapan kebutuhan penegakan hukum		12 Bulan	264,000,000			12 Bulan	290,400,000
4 06 01 15 05	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyusunan kebijakan Pemko Lhokseumawe		12 Bulan	156,000,000			12 Bulan	171,600,000
4 06 01 25 07	Publikasi Perundang-undangan	Tersebarannya Penyebaran Informasi tentang hukum jinayat bagi masyarakat		12 Bulan	127,000,000			12 Bulan	139,700,000
4 06 01 25 28	Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Terlaksananya Penyampaian amanat Qanun/perwal bagi lembaga pendidikan		12 Bulan	70,000,000			12 Bulan	77,000,000
4 06 01 15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA (KHUSUS SYARIAT ISLAM)	Terlaksananya Pelayanan Kehidupan Beragama			14,143,218,451				15,557,540,296
4 06 01 15 01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama (Musrembang Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu		15 Unit	2,500,000,000			15 Unit	2,750,000,000
	Pembangunan Pagar Untuk Dayah Balai Pengajian. Mushalla, Meunasah dan Mesjid Dusun Beuringin Gp. Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat	Pembangunan Pagar		155/m	232,500,000			155/m	255,750,000
	Pemasangan Kaca Mushalla, Meunasah dan Mesjid Dsn B Gp. Ujong Pacu Kec. Muara Satu	Pemasangan Kaca		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Gp. Ujong Blang Kec. Banda Sakti	Pengadaan Baju Seragam		70 Pasang	42,000,000			70 Pasang	46,200,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti	Pengadaan Baju Seragam		100 Pasang	60,000,000			100 Pasang	66,000,000
	Pengadaan Ac 2 Pk untuk Meunasah Uteunkot Gp. Mns Uteunkot Cunda Kec. Muara Dua	Pengadaan AC 2 Pk		9 Unit	81,900,000			9 Unit	90,090,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Blang Punteut Kec. Blang Mangat	Pengadaan Baju Seragam		50 Pasang	30,000,000			50 Pasang	33,000,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Gp. Keude Punteut Kec. Blang Mangat	Pengadaan Baju Seragam		58 Pasang	34,800,000			58 Pasang	38,280,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Gp. Mane Kareung Kec. Blang Mangat	Pengadaan Baju Seragam		78 Pasang	46,800,000			78 Pasang	51,480,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Gp. Mesjid Punteut Kec. Blang Mangat	Pengadaan Baju Seragam		83 Pasang	49,800,000			83 Pasang	54,780,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Gp. Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu	Pengadaan Baju Seragam		117 Pasang	70,200,000			117 Pasang	77,220,000
	Pengadaan Baju Seragam untuk Majelis Taklim dan Group Zikir. Gp. Blang Weu Panjoe Kec. Blang Mangat	Pengadaan Baju Seragam		80 Pasang	48,000,000			80 Pasang	52,800,000
4 06 01 15 09	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Mesjid (OTSUS)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Yang Mendapat Bantuan		4 Unit	2,640,040,386			4 Unit	2,904,044,425
4 06 01 15 10	Pemberian Jasa Keagamaan	Terbayarnya Honor Jasa Keagamaan		12 Bulan	1,941,729,130			12 Bulan	2,135,902,043
4 06 01 15 11	Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid	Jumlah Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama		7 Unit	1,850,750,000			7 Unit	2,035,825,000
	Pembuatan Kubah Besar Untuk Mesjid Jl. Elak Dbn Chik Mahmud Gp. Alue Awe Kec. Muara Dua	Pembuatan Kubah Besar		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pengadaan Sound System Mesjid Nurul Yaqin Gp. Ujong Blang Kec. Banda Sakti	Jumlah Pengadaan Sound System		1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
	Pembuatan Kubah Kecil Untuk Mesjid Dusun setia Mushalla Darul Muttaalimin, Gp. Batuphat Barat Kec. Muara Satu	Pembuatan Kubah		1 Paket	100,000,000			1 Paket	110,000,000
	Pembuatan Kubah Besar Mesjid Meuraya Kec. Blang Mangat	Pembuatan Kubah		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pengadaan Mimbar Untuk Mesjid Al-Abbrar, Gp. Asan Kareng Kec. Blang Mangat	Pengadaan Mimbar		1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
	Pengadaan Mimbar Untuk Mesjid Istiqamah, Gp. Cot Mane Asan Kareng Kec. Blang Mangat	Pengadaan Mimbar		2 Paket	50,000,000			2 Paket	55,000,000
	Pengadaan AC 2 PK Untuk Mesjid Ubudiyah Punteut, Gp. Keude Punteut Kec. Blang Mangat	Jumlah Pengadaan AC 2 PK		12 Unit	109,000,000			12 Unit	119,900,000
	Pembangunan Kubah Untuk Mesjid Baitul Khairat Gp. Ulee Jalan Banda Sakti	Pembangunan Kubah		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bantuan Pagar Untuk Mesjid Babul Jannah Gp. Alue Lim Kec. Blang Mangat	Pembangunan Pagar		210 Meter	337,274,000			210 Meter	371,001,400
	Pembangunan Kubah Mesjid Syuhada Gp. Jawa Kec. Banda Sakti	Pembangunan Kubah		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pembangunan Kubah GRC Mesjid Darul Atiq, Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat	Pembangunan Kubah		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pembangunan Kubah Mesjid Raudhatul Jannah Gp. Blang Poroh Kec. Muara Dua	Pembangunan Kubah		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pemasangan Plat Lantai Kubah dan Kubah Induk	Pemasangan Plat Lantai Kibah		1 Paket	250,000,000			1 Paket	275,000,000
4 06 01 15 13	Pelaksanaan Rangkaian Ibadah Haji dan Umrah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Manasik dan Berangkat Haji		270 Calon Jamaah Haji	468,424,935			270 Calon Jamaah Haji	515,267,429
4 06 01 15	Pemberangkatan Umrah Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian Yang Berprestasi	Jumlah Pimpinan Dayah dan Balai Pengajian		50 Orang	1,550,000,000			50 Orang	1,705,000,000
4 06 01 15	Operasional Mesjid Kecamatan	Tersedianya Dana Untuk Operasional Mesjid		4 Unit Mesjid Kec	150,000,000			4 Unit Mesjid Kec	165,000,000
4 06 01 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DAN PERAN ULAMA	MENINGKATNYA PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DAN PERAN ULAMA			4,847,786,550				5,332,565,205
4 06 01 16 03	Pengembangan Syiar Islam Dalam Masyarakat	Jumlah dan Qari'ah yang Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi		56 Orang	2,575,000,000			56 Orang	2,832,500,000
4 06 01 16 04	Peningkatan Penertiban Syari'at Islam	Terlaksananya Penertiban Bagi Pelanggar Syari'at Islam			450,000,000				495,000,000
4 06 01 16 05	Memperingati Hari-Hari Besar Agama Islam	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Islam		9 Hari	425,840,650			9 Hari	468,424,715
4 06 01 16 08	Pembina Qari-Qariah Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Anggaran Untuk Pembinaan Qari-Qariah		12 Bulan	85,000,000			12 Bulan	93,500,000
4 06 01 16 09	Pembinaan Hafidz-Hafidzah Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Anggaran Untuk Pembinaan Hafidz-Hafidzah		12 Bulan	150,000,000			12 Bulan	165,000,000
4 06 01 16 10	Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim	Periode Pembinaan Kegiatan BKMT		12 Bulan	418,911,900			12 Bulan	460,803,090
4 06 01 16 11	Pelatihan Tajhiz Mayat se Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan		68 Orang	125,000,000			68 Orang	137,500,000
4 06 01 16 12	Pembinaan Tilawatil Qur'an	Periode Terbinanya Tilawatil Qur'an		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	220,000,000
4 06 01 16 13	Lomba Da'I se Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Lomba Da'i		100 Orang	105,000,000			100 Orang	115,500,000
4 06 01 16 15	Penyelesaian Itsbat Nikah Korban Konflik dan Keluarga Miskin	Terlaksananya Prosesi administrasi Pasangan Yang Sudah Menikah		4 Kec	163,034,000			4 Kec	179,337,400
4 06 01 16	Pelatihan Manajemen Mesjid	Jumlah Peserta Pelatihan		100 Orang	150,000,000			100 Orang	165,000,000
4 06 01 21	PROGRAM PENDIDIKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH	MENINGKATNYA PROGRAM PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH			9,968,318,250				10,965,150,075
4 06 01 21 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah		60 Unit	5,000,000,000			60 Unit	5,500,000,000
	Pembangunan Ruang Belajar Untuk Dayah Gp. Mns Blang Kec. Muara Dua	Jumlah Ruang Belajar Yang Dibangun		3 Paket	600,000,000			3 Paket	660,000,000
	Pembangunan Ruang Belajar Untuk Dayah Nurul Yaqin Dusun Tg. Muhammad Idrus Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat	Jumlah Ruang Belajar Yang Dibangun		1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
	Pembangunan Pagar Untuk Dayah , Balai Pengajian, Mushalla, Meunasah dan Mesjid. Gampong Cot Trieng, Gp. Kec. Muara Satu	Terbangunnya Pagar		200 Permeter	300,000,000			200 Permeter	330,000,000
	Pengadaan Laptop Untuk Dayah Ujong Blang Kec. Banda Sakti	Jumlah Pengadaan Laptop		1 Unit	14,381,250			1 Unit	15,819,375
	Rehab Ringan Balai Pengajian Baitul Jannah, Gp. Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti	Rehab Sarana Balai Pengajian		1 Paket	100,000,000			1 Paket	110,000,000
	Pembangunan Sumur Bor Untuk Dayah Raudhatul Jannah Gp. Ulee Blang Mane, Kec. Blang Mangat	Terbangunnya Sumur Bor		1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
	Pembangunan Sumur Bor Gp. Mesjid Punteut Kec. Blang Mangat	Terbangunnya Sumur Bor		1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
	Pembangunan Sumur Bor Gp. Mesjid Meuraya Kec. Blang Mangat	Terbangunnya Sumur Bor		1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
	Pengadaan Tanah Timbun Yayasan Darul Yakin. Gp. Ulee Jalan Kec. Banda Sakti	Pengadaan Tanah timbun		4000 Perkubik	200,000,000			4000 Perkubik	220,000,000
	Pengadaan Kain Sarung Untuk Balai Pengajian Nurul Hidayah. Jl Buloh Belakang SMA 6, Gp. Baloy Kec. Blang Mangat	Tersalurnya Kain Sarung Untuk Balai Pengajian		148 Perlembar	14,800,000			148 Perlembar	16,280,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Pembangunan Mushalla Dayah Sirajul Muna. Gp. Blang Crum Kec. Muara Dua	Pembangunan Mushalla			200,000,000				220,000,000
4 06 01 21	Pembentukan Badan Usaha/Ekonomi Produktif di Dayah	Terlaksananya Pembentukan Usaha/Ekonomi Produktif di Dayah		4 Kec	2,500,000,000			4 Kec	2,750,000,000
4 06 01 21	Pelatihan Manajemen Dayah	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dayah		110 Orang	74,137,000			110 Orang	81,550,700
4 06 01 21	Pelatihan Kurikulum Bagi Pimpinan dan Guru Dayah	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum Bagi Pimpinan dan Guru Dayah		84 Orang	115,000,000			84 Orang	126,500,000
4 06 01 21	Seminar Nasional Tentang Ekonomi Syari'ah (OTSUS)	Terlaksananya Seminar		100 Orang	500,000,000			100 Orang	550,000,000
4 06 01 31	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA ULAMA DAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA	MENINGKATNYA PROGRAM SUMBER DAYA ULAMA DAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA			1,215,000,000				1,347,000,000
4 06 01 31 06	Pelatihan Dewan Hakim MTQ Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta Pelatihan Dewan Hakim MTQ		20 Orang	150,000,000			20 Orang	165,000,000
4 06 01 31 08	Perlombaan Baca Kitab Kuning Untuk Santri	Terlaksananya Perlombaan Kitab Kuning		55 Santri	150,000,000			55 Santri	165,000,000
4 06 01 31 09	Pengadaan Buku Agama, Kitab dan Al-Qur'an (OTSUS)	Jumlah Buku Agama Yang Diberikan Kepada Masyarakat			125,000,000				137,500,000
4 06 01 31 10	Pengadaan Buku Agama, Kitab dan Al-Qur'an (APBK)	Jumlah Buku Agama Yang Diberikan Kepada Masyarakat		1 Paket	135,000,000			1 Paket	148,500,000
4 06 01 31 18	Sosialisasi Pendidikan Anak Menurut Pandangan Islam	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan		68 Group	150,000,000			68 Group	165,000,000
4 06 01 31	Lomba Dalil Khairat Tingkat Kota Lhokseumawe	Jumlah Grup Dalail Khairat		68 Group	400,000,000			68 Group	440,000,000
4 06 01 31	Pemberdayaan Badan Kemakmuran Mesjid	Jumlah Mesjid Yang Mendapat Operasional		4 Kec	105,000,000			4 Kec	126,000,000
4 06 01 32	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	MENINGKATNYA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA			600,000,000				660,000,000
4 06 01 32 02	Pendataan Dayah dan Balai Pengajian Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah Dayah dan Balai Pengajian yang didata		686 Bp 56 Dayah	100,000,000			686 Bp 56 Dayah	110,000,000
4 06 01 32 06	Pendataan Mesjid dan Meunasah Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Jumlah Mesjid dan Meunasah Pengajian yang didata		50 Mesjid dan 68 Mesjid	100,000,000			50 Mesjid dan 68 Mesjid	110,000,000
4 06 01 32 07	Penyusunan Data Base Mesjid dan Meunasah	Jumlah Mesjid dan Meunasah Yang Terdata		49 Mesjid dan 69 Meunasah	150,000,000			49 Mesjid dan 69 Meunasah	165,000,000
4 06 01 32 08	Penyusunan Data Base Dayah dan Balai Pengajian se Kota Lhokseumawe	Jumlah Balai Pengajian dan Dayah		614 Bp dan 48 Dayah	250,000,000			614 Bp dan 48 Dayah	275,000,000
4 06 02	Sekretariat MPU								
04 06	Keistimewaan dan Kekhususan (MPU)				1,609,632,800				1,702,509,150
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				1,109,646,328				1,220,610,961
	BELANJA LANGSUNG				2,342,084,568				2,810,501,482
4 06 02 01	PROGRAM PELAYANAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1,680,652,743				2,016,783,292
4 06 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman		12 Bulan	1,050,000			12 Bulan	1,260,000
04 06 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Penerangan dan alat-alat komunikasi		12 Bulan	13,200,000			12 Bulan	15,840,000
04 06 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD		132 OB	68,208,600			132 OB	81,850,320
4 06 02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Benda Pos dan Paket Pengiriman		12 Bulan	25,206,100			12 Bulan	30,247,320
04 06 02 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy		12 Bulan	27,210,000			12 Bulan	32,652,000
4 06 02 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	10,205,250			12 Bulan	12,246,300
04 06 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	2,280,000			12 Bulan	2,736,000
04 06 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	21,600,000			12 Bulan	25,920,000
04 06 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	120,000,000
04 06 02 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap		144 OB	74,469,625			144 OB	89,363,550
04 06 02 01 23	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah pimpinan dan anggota MPU & DKU		408 OB	1,337,223,168			408 OB	1,604,667,802

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 06 02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				205,406,800				246,488,160
04 06 02 02 11	Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		12 Unit	116,606,800			12 Unit	139,928,160
04 06 02 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara		12 UB	19,700,000			12 UB	23,640,000
04 06 02 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		36 UB	58,500,000			36 UB	70,200,000
04 06 02 02 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		38 Unit	10,600,000			25 Unit	12,720,000
04 06 02 07	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				95,500,000				114,600,000
04 06 02 07 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		67 Pasang	95,500,000			67 Pasang	114,600,000
04 06 02 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA				25,000,000				30,000,000
04 06 02 07 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		4 Orang	25,000,000			5 Orang	30,000,000
04 06 02 07	PROGRAM PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA				9,300,000				11,160,000
04 06 02 07 01	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) satuan kerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENJA		10 Buku	4,800,000			10 Buku	5,760,000
04 06 02 07 02	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen SOP		10 Buku	4,500,000			10 Buku	5,400,000
04 06 02 07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN				15,000,650				18,000,780
04 06 02 07 01	Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe		6 Hari	15,000,650			6 Hari	18,000,780
04 06 02 31	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama				96,865,850				116,239,020
04 06 02 31 05	Pendidikan dan Pelatihan bagi para ulama	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan		70 Orang	48,939,475			30 Orang	58,727,370
04 06 02 31 11	Sosialisasi Fatwa, Bahasul Masail dan Tausiah MPU Kota Lhokseumawe	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Masaih dan Tausiah MPU		102 OH	47,926,375			102 OH	57,511,650
04 06 02 32	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA				48,028,350				57,634,020
04 06 02 32 05	Monitoring Terhadap Hasil Rekomendasi MPU Kota Lhokseumawe	Periode Pengawasan terhadap Tausiah dan Hasil Rekomendasi MPU Kota Lhokseumawe		5 OK	32,469,950			5 OK	38,963,940
04 06 02 32 07	Investigasi dan Verifikasi Keberadaan Aliran Sesat	Periode Identifikasi dan Verifikasi Aliran Sesat Keberadaan Aliran Sesat		1 OK	15,558,400			1 OK	18,670,080
04 06 02 46	PROGRAM PEMBINA, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS ULAMA				166,330,175				199,596,210
04 06 02 46 02	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Ulama (Simposium Hukum Islam)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Simposium Hukum Islam		100 OH	26,550,175			100 OH	31,860,210
04 06 02 46 03	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan (Buletin MPU)	Jumlah Buletin MPU		52.000 Eks	39,780,000			52.000 Eks	47,736,000
04 06 02 46 05	Musyawaharah Daerah (Musda) MPU	Periode Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Permusyawaratan Ulama		4 Hari	100,000,000			4 Hari	120,000,000
4 06 03	Sekretariat Baitul Mal								
4 06	Keistimewaan dan Kekhususan (Baitul Mal)				183,150,000				201,465,000
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				1,150,255,848				1,265,281,433
	BELANJA LANGSUNG				5,523,962,730				#REF!
4 06 03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			525,144,730				577,659,203
4 06 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Benda Pos dan Paket Pengiriman		12 Bulan	1,102,200			12 Bulan	1,212,420
4 06 03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penerangan dan alat-alat komunikasi		12 Bulan	17,160,000			12 Bulan	18,876,000
4 06 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD		158 Orang	63,382,000			158 Orang	69,720,200
4 06 03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	11,000,000			12 Bulan	12,100,000
4 06 03 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Bahan Cetak dan Fotocopy		12 Bulan	11,000,000			12 Bulan	12,100,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 06 03 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Alat Penerangan dan Alat Kantor		12 Bulan	2,198,460			12 Bulan	2,418,306
4 06 03 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode Surat Kabar dan Referensi Pendukung Perencanaan		12 Bulan	1,254,000			12 Bulan	1,379,400
4 06 03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Konsumsi Pendukung untuk Kelancaran Kegiatan		12 Bulan	8,250,000			12 Bulan	9,075,000
4 06 03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	32,993,070			12 Bulan	36,292,377
4 06 03 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap		312 OB	149,545,000			312 OB	164,499,500
4 06 03 01 23	Pelayanan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh		240 OB	227,260,000			240 OB	249,986,000
4 06 03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			136,796,000				150,475,600
4 06 03 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Sarana Perkantoran		21 Unit	66,000,000			21 Unit	72,600,000
4 06 03 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat		12 UB	26,136,000			12 UB	28,749,600
4 06 03 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Kegiatan Operasional		12 UB	41,360,000			12 UB	45,496,000
4 06 03 02 30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13 Unit	3,300,000			13 Unit	3,630,000
4 06 03 11	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN ADAT				20,044,200				22,048,620
4 06 03 01 04	Pelantikan Kepala & Wakil Kepala/Badan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Periode Pelantikan Kepala & Wakil Kepala/Badan Dewan Pengawasan Baitul Mal Kota Lhokseumawe		1 Kegiatan	20,044,200			1 Kegiatan	22,048,620
4 06 03 07	PENINGKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Terarahnya Perencanaan Dinas			3,740,000				4,114,000
4 06 03 07 02	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Periode Rencana Strategis SKPD		10 Buku	5,500,000			10 Buku	6,050,000
4 06 03 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Periode Rencana Kerja (RENJA) SKPD		10 Buku	3,740,000			10 Buku	4,114,000
4 06 03 47	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN BAITUL MAL			LSM	4,858,282,000				5,344,110,200
4 06 03 47 02	Kegiatan Pameran Pembangunan kota Lhokseumawe	Jumlah Bangunan Rumah Fakir dan Miskin (dana Zakat dan Infaq)		50 Unit	4,858,282,000			50 Unit	5,344,110,200
4 06 04	Sekretariat Majelis Adat Aceh								
4 06	Keistimewaan dan Kekhususan (MAA)				1,147,908,760				1,262,699,636
	BELANJA								
	Belanja Tidak Langsung				774,740,760				852,214,836
	BELANJA LANGSUNG				2,107,657,200				2,585,722,920
4 06 04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			599,232,200				659,155,420
4 06 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Benda Pos dan Paket Pengiriman		12 Bulan	2,000,000			12 Bulan	2,200,000
4 06 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	12,000,000			12 Bulan	13,200,000
4 06 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD		12 Orang	74,850,000			12 Orang	82,335,000
4 06 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor		12 Bulan	20,040,200			12 Bulan	22,044,220
4 06 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Foto copy		12 Bulan	8,711,000			12 Bulan	9,582,100
4 06 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	8,033,000			12 Bulan	8,836,300
4 06 04 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		15 Unit	3,500,000			15 Unit	3,850,000
4 06 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan (Eks x 12 Bln)		12 Bulan	2,280,000			12 Bulan	2,508,000
4 06 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	27,168,000			12 Bulan	29,884,800
4 06 04 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Periode Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	110,000,000
4 06 04 01 20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap (Org x 12 Bln)		168 Orang	76,345,000			168 Orang	83,979,500
4 06 04 01 23	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh		264 Orang	264,305,000			264 Orang	290,735,500
4 06 04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor			157,900,000				173,690,000
4 06 04 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20 Unit	50,000,000			20 Unit	55,000,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 06 04 02 X	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor		1 Unit	25,000,000			1 Unit	27,500,000
4 06 04 02 14	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor		1 Unit	10,000,000			1 Unit	11,000,000
4 06 04 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		1 Unit	30,000,000			1 Unit	33,000,000
4 06 04 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		1 Unit	33,300,000			1 Unit	36,630,000
4 06 04 02 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	9,600,000			12 Bulan	10,560,000
4 06 04 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur			38,000,000				41,800,000
4 06 04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Periode Pendidikan dan Pelatihan Formal		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	33,000,000
4 06 04 05 21	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pengajian Rutin SKPD		12 Bulan	8,000,000			12 Bulan	8,800,000
4 06 04 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur			132,500,000				145,750,000
4 06 04 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		25 Stel	35,000,000			25 Stel	38,500,000
4 06 04 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Adat beserta Accesoris		39 Stel	97,500,000			39 Stel	107,250,000
4 06 4 04 07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	Terarahnya Perencanaan Dinas			9,000,000				9,900,000
4 06 04 07 02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja Tahunan		5 Buku	4,500,000			5 Buku	4,950,000
4 06 04 07 03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)	Jumlah Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)		5 Buku	4,500,000			5 Buku	4,950,000
04 06 02 07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN				35,000,000				38,500,000
4 06 04 11 01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pameran Pembangunan Ekonomi		7 Hari	35,000,000			7 Hari	38,500,000
4 06 04 17	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN ADAT	Terciptanya Peusujuk Adat Tamu Daerah			120,000,000				132,000,000
4 06 04 17 01	Gampong Percontohan Peradilan Adat	Jumlah Gampong Percontohan Peradilan Adat		1 Gampong	35,000,000			1 Gampong	38,500,000
4 06 04 17 03	Pembinaan Gampong Percontohan Meuseulinya Adat	Jumlah Gampong Binaan		1 Gampong	60,000,000			1 Gampong	66,000,000
4 06 0'4 17 10	Lomba Dalel Khairat	Jumlah Peserta Dalel Khairat		40 Orang	25,000,000			40 Orang	27,500,000
4 06 04 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA				504,000,000				554,400,000
4 06 04 15 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Peusujuk Adat budaya Daerah		12 Bulan	55,000,000			12 Bulan	60,500,000
4 06 04 15 17	Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong	Jumlah Kasus Peradilan adat Gampong		68 Kasus	34,000,000			68 Kasus	37,400,000
4 06 04	Pelatihan Peradilan Adat Gampong	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat Gampong		50 Orang	35,000,000			50 Orang	38,500,000
4 06 04	Pendidikan Adat Istiadat Aceh untuk Guru-guru Sekolah	Jumlah Peserta Pendidikan Adat Istiadat Aceh untuk Guru-guru Sekolah		40 Orang	50,000,000			51 Orang	55,000,000
4 06 04 15 07	Penerbitan Majalah/Buku Tentang Adat	Jumlah Buku tentang Adat		100 Buku	45,000,000			100 Buku	49,500,000
4 06 04 15 21	Pelatihan Seumapa Untuk Generasi Muda	Jumlah Peserta		50 Orang	40,000,000				44,000,000
4 06 04	Pelatihan Dalael Khairat dan Meurukon	Jumlah Peserta		45 Orang	50,000,000			45 Orang	55,000,000
4 06 04 15 27	Pelestarian Adat Istiadat di Lini Mukim	Jumlah Pelestarian Adat Istiadat		9 Mukim	50,000,000			9 Mukim	55,000,000
4 06 04 15 01	Workshop Bersama Dengan Tokoh-tokoh Adat	Jumlah Worshop		20 Tokoh	35,000,000			20 tokoh	38,500,000
4 06 04 15 01	Upacara Prosesi Adat Perkawinan Aceh	Jumlah Peserta Prosesi Adat Perkawinan Aceh		40 Orang	65,000,000			40 Orang	71,500,000
4 06 04 15 23	Pilot Project Gampong Percontohan Adat			1 Gampong	45,000,000			1 Gpg	49,500,000
2 16 04 17	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Terciptanya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata			160,525,000				176,577,500
4 06 04 17 06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		2 Paket	60,525,000			2 Paket	66,577,500
4 06 04 17 11	Penyediaan Barang/Benda Koleksi Pusaka Adat	Jumlah Penyediaan Barang/Benda Koleksi Pusaka Adat		28 Unit	60,000,000			28 Unit	66,000,000
4 06 04 17 43	Penyusunan Deskripsi Barang Pusaka Adat dan Samudra Pasai	Adanya Deskripsi Barang Pusaka Adat dan Samudra Pasai		100 Buku	40,000,000			100 Buku	44,000,000
2 16 04 19	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAN	Terciptanya Peningkatan Pemahaman tentang Adat			75,000,000				349,800,000
2 16 04 19 01	Penyediaan alat-alat kesenian tradisional	Jumlah penyediaan alat kesenian tradisional		10 unit	75,000,000			10 unit	82,500,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 04 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terciptanya Peningkatan Pemahaman tentang Adat			121,500,000				133,650,000
2 16 04 17 08	Dialog/sosialisasi untuk generasi Muda dan Mahasiswa mengenai Adat Istiadat dan Hukum Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi untuk Generasi Muda		50 Orang	30,000,000			50 Orang	33,000,000
2 16 04 17 23	Sosialisasi tentang Peran Lembaga Adat Gampong Sebagai Pengendalian Sosialisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Peserta Sosialisasi Lembaga Adat Gampong		50 Orang	30,000,000			50 Orang	33,000,000
2 16 04 17 27	Pendidikan Adat bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe	Jumlah peserta Pendidikan Adat bagi Para Pelajar di Kota Lhokseumawe		100 Orang	61,500,000			100 Orang	67,650,000
4 06 04 20	PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA ADAT	Tersedianya lembaga adat			155,000,000				170,500,000
4 06 04 20 05	Upacara Adat Pengukuhan Lembaga Adat dan Resepsi Adat	Jumlah upacara adat pengukuhan Lembaga Adat		50 Orang	60,000,000			50 Orang	66,000,000
4 06 04 20 10	Penguatan Lembaga Peradilan Adat Gampong	Jumlah peserta Penguatan Lembaga Peradilan Adat Gampong		30 Orang	35,000,000			30 Orang	38,500,000
4 06 04 20 11	Penguatan Tim Konsultasi Hukum Adat	Adanya Tim Konsultasi Hukum Adat		20 Orang	30,000,000			20 Orang	33,000,000
4 06 04 20 15	Penguatan Forum Tuha Peut, Tuha Adat Perempuan	Adanya Forum Tuha Peut, Tuha Adat Perempuan		20 Orang	30,000,000			20 Orang	33,000,000
4 06 05	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah								
04 06	Keistimewaan dan Kekhususan (MPD)				1,912,598,799				2,068,405,679
	Belanja								
	Belanja Tidak Langsung				789,862,110				868,848,321
	Belanja Langsung				1,671,368,799				1,838,505,679
4 06 05 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			633,028,799				696,331,679
4 06 05 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	2,613,600			12 Bulan	2,874,960
04 06 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	7,260,000			12 Bulan	7,986,000
04 06 05 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		120	74,782,266			100 %	82,260,493
4 06 05 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	19,800,000			12 Bulan	21,780,000
04 06 05 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		12	10,890,000			100 %	11,979,000
4 06 05 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	10,890,000			12 Bulan	11,979,000
04 06 05 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12	2,640,000			100 %	2,904,000
04 06 05 01 17	Penyediaan Makan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makan dan Minuman		12	13,200,000			100 %	14,520,000
04 06 05 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		12	121,000,000			100 %	133,100,000
04 06 05 01 19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap		120	54,761,243			100 %	60,237,367
04 06 05 01 27	Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh	Persentase Penyediaan Jasa Lembaga Keistimewaan Aceh		216	315,191,690			100 %	346,710,859
04 06 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			210,990,000				232,089,000
04 06 05 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		3	72,000,000			100 %	79,200,000
04 06 05 02 06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)		3	45,000,000			100 %	49,500,000
04 06 05 02 15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		12	32,230,000			100 %	35,453,000
04 06 05 02 16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		24	51,260,000			100 %	56,386,000
04 06 05 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mobiler, Komputer dll)		30	10,500,000			100 %	11,550,000
04 06 05 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja			3,850,000				4,235,000
04 06 05 07 02	Penyusunan Renja	Jumlah Laporan Renja SKPD		10	3,850,000			10	4,235,000
04 06 05 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Perencanaan dan Pengawasan /Monitoring dan Evaluasi			209,000,000				229,900,000
04 06 05 21 06	Pengawasan dan Bimbingan Majelis Pendidikan Daerah kepada Komite Sekolah	Jumlah peserta BIMTEK		152	132,000,000				145,200,000
04 06 05 21 09	Supervisi Pengawas Satuan Pendidik	Teridentifikasinya Permasalahan- permasalahan Sistem Pelaksanaan PSB di Sekolah Tingkat Dasar s.d Menengah		5	44,000,000			3	48,400,000

Urusan/ SKPD/ Bid. Urusan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 06 05 21 10	Dialog Interaktif Masyarakat Tentang Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Public Hearing (Meudrah) Pendidikan		5	33,000,000			3	36,300,000
04 06 05 22	Program Perencanaan dan Pengawasan /Monitoring dan Evaluasi	Program Perencanaan dan Pengawasan /Monitoring dan Evaluasi			284,500,000				312,950,000
04 06 05 22 01	Penerbitan Buletin Edukasi	Jumlah eksampler buletin edukasi		4 Eks	99,000,000			4	108,900,000
04 06 05 22 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UN SLTA, SLTP	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian UN SLTA, SLTP		5 Laporan	27,500,000			5	30,250,000
04 06 05 22 03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Ujian Akhir Sekolah UAS SD	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Ujian Akhir Sekolah UAS SD		5 Laporan	11,000,000			5	12,100,000
04 06 05 22 04	Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	Jumlah laporan data anak tidak sekolah dan putus sekolah		5 Laporan	70,000,000			5	77,000,000
04 06 05 22 05	Pembinaan dan Pemantauan BOSDA	Jumlah Laporan Kepengawasan		5 Laporan	33,000,000			5	36,300,000
04 06 05 22 08	Konsultasi dan Mediasi Tenaga Kependidikan Dengan Pihak Terkait	Jumlah Laporan		5 Laporan	44,000,000			5	48,400,000
04 06 05 24	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah (MPD)	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah (MPD)			200,000,000				220,000,000
04 01 02 27 01	Diklat/ Studi Banding MPD terhadap daerah yang mendapat nilai pendidikan tertinggi nasional	Jumlah peserta diklat/studi banding		18 Orang	100,000,000			18 Orang	110,000,000
04 01 02 27 02	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Sekretariat MPD	Jumlah peserta pelatihan		23 Orang	50,000,000			23 Orang	55,000,000
04 01 02 27 03	Pelatihan Penyusunan Program bagi Pengurus dan Sekretariat MPD	Jumlah peserta pelatihan		23 Orang	50,000,000			23 Orang	55,000,000
04 06 05 24	Program Pendidikan Non Formal	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah (MPD)			130,000,000				143,000,000
04 01 02 27 01	Survey Kegiatan Remaja di Luar kegiatan Belajar di Sekolah	Jumlah kegiatan		1 keg	30,000,000			1 keg	33,000,000
04 01 02 27 02	Seminar Model Pendidikan Keluarga Menurut "Reusam Gampong"	Jumlah kegiatan		1 keg	55,000,000			1 keg	60,500,000
04 01 02 27 03	Menyusun Konsep Sinkronisasi Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (Sinergisitas elemen tripusat pendidikan)	Jumlah kegiatan		1 keg	45,000,000			1 keg	49,500,000

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indicator Sasaran daerah, Indikator Kinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Program yang tertuang pada tabel berikut :

TABEL 6.1

**INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2019**

Indikator	Target Capaian Kinerja Tahun 2019	SKPK Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)
Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum islami	85%	Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah
Jumlah Ijtihat, Ijma', qiyas dan fatwa yang diterapkan	77%	Majelis Pemusyawaratan Ulama
Jumlah Hafiz Alqur'an Orang		Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah
Indeks Melek Alqur'an	66%	Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah
Rasio aset dan transaksi keuangan syariah terhadap total transaksi keuangan	52%	Baitul Mal
Persentase Penurunan Pelanggran Syariat Islam	28%	Satpol PP dan WH
Persentase mesjid yang memenuhi standar	85%	Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah
Persentase masyarakat memahami budaya.	36%	Majelis Adat Aceh
Persentase pertumbuhan PDRB	5.95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Industri Rumah Tangga Perempuan	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	336	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja
Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB	0.445	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Persentase Koperasi dan UKM yang dibina	20%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Angka partisipasi Angkatan Kerja	5.45%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	1179	
Rasio penduduk yang bekerja	0.41	
Persentase ketersediaan pangan utama	533.19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
Nilai Tukar Petani (NTP)	92%	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	92%	
Rerata Nilai Ujian Nasional:		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
-Rerata Nilai Ujian Sekolah SD/MI	90	
-Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs	80	
Angka Partisipasi Kasar:		
- SD/MI	105.63	
- SMP/MTs	101	
- SMA/MA/SMK	97.4	
Angka partisipasi Murni:		
- SD/MI	99.4	
- SMP/MTs	83.9	
- SMA/MA/SMK	74.8	
Angka Harapan lama Sekolah	14.45	
IPM	77.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketersedian dayah		Dinas Syariat Islam & Pendidikan Dayah
Angka usia harapan hidup	73.83	Dinas Kesehatan

Pesrentase Balita gizi buruk	2%	
Jumlah PMKS yang dibina	80%	Dinas Sosial
Persentase program pembangunan yang responsif gender	3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Jumlah perempuan pekerja	0.56	
Rasio kepadatan penduduk	2.400	
Rasio KDRT	1300.000	
Cakupan pelayanan perpustakaan	100%	Dinas Perpustakaan dan Kersipan
Persentase ASN yang mengikuti diklat/pelatihan	2%	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM
Cakupan kegiatan masyarakat yang terfasilitasi	60%	Dinas Pemberdayaan masyarakat & Gampong
Persentase pelayanan kependudukan	92%	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase Pelayanan Administrasi Masyarakat	92%	Kecamatan
Cakupan pelayanan informasi masyarakat	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Rasio pelaksanaan kearsipan kantor	100%	Dinas Perpustakaan dan Kersipan
Cakupan pengawasan administrasi keuangan	100%	Inspektorat
Opini BPK	WDP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase hasil Kelitbangan yang di Implementasi	50%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya satu data pembangunan yang terintegrasi	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rumah layak huni	22.63	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Persentase pemukiman Layak huni		
Persentase infrastruktur gampong yang memadai		Dinas Pemberdayaan masyarakat & Gampong
Rasio ketersediaan fasilitas transportasi publik	20%	Dinas Perhubungan
Tingkat kesadaran berlalu lintas	25%	
Cakupan pelayanan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rasio kualitas pemukiman layak huni		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Persentase pengelolaan lingkungan	7428.00	Dinas Lingkungan Hidup
Rasio Penataan ruang sesuaai RTRW	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Indeks demokrasi	72%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase penurunan pelanggaran perda	82%	Satpol PP dan WH

Indikator Kinerja Utama
Kota Lhokseumawe 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	57
2	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	59
3	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah	Rp (milyar)	8.97
4	Pertumbuhan PDRB	Persen	6.80
5	Pengendalian Laju Inflasi	Persen	2.60
6	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	9.30
7	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	10.33
8	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Rp (Juta)	1.08
9	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20
10	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2323
11	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	18.56
12	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	336

13	Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3734
14	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	1.16
15	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	76.84
16	Rerata Nilai Ujian Nasional:		
	-Rerata Nilai Ujian Sekolah SD/MI	Nilai	90
	-Rerata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs	Nilai	80
17	Angka Partisipasi Kasar:		
	- SD/MI	Angka	105.63
	- SMP/MTs	Angka	101
18	Angka partisipasi Murni:		
	- SD/MI	Angka	99.4
	- SMP/MTs	Angka	83.9
19	Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15.40
20	Rasio Ketergantungan	Rasio(Per 10.000)	50.87
21	Jumlah Prestasi olahraga	Jumlah	30
22	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	16
23	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.28
24	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2
25	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA	Persen	70
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	6.62
27	Cakupan anak usia 0-11 bln mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	92.00
28	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	C
29	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	C
30	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi
31	Opini BPK	Opini	WTP
32	Keterbukaan Informasi Publik melalui Website	Ada/Tidak	Ada
33	Pencapaian target Nasional 100-0-100	Persen	4.13-16.8-75-7
34	Persentase Akses Jaringan Air Minum Layak/ Air Bersih	Persen	4.13
35	Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	16.8
36	Penanganan Sampah	Persen	75.7
37	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	8.45
38	Kategori Capaian kinerja Infrastruktur Publik	Absolut	Baik
39	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	66.6
40	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	43.7
41	Persentase sampah yang tertangani	Persen	78.72
42	Luasan RTH Publik 20%	Ha	30.7
43	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio(Per 10.000)	47.60
44	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	59
45	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	70

BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2019 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi pemerintah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBK. Adapun fungsi RKPK lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBK untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPK dan dokumen RKPK dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPK berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan. maka diperlukan instrument pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrument pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya dokumen RKPK ini maka diminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar : berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan RKPK Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya, menjadi acuan bagi SKPK Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan, kerangka

regulasi dan pelayanan umum dalam APBD Tahun 2019, mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan maka SKPK perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD.

Untuk keberhasilan pelaksanaan RKPK Tahun 2019 tidak terlepas dari kerja keras, semangat, Komitmen, Partisipasi, konsistensi dan disiplin sikap, tekad, semangat dan disiplin dari SKPK serta segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA